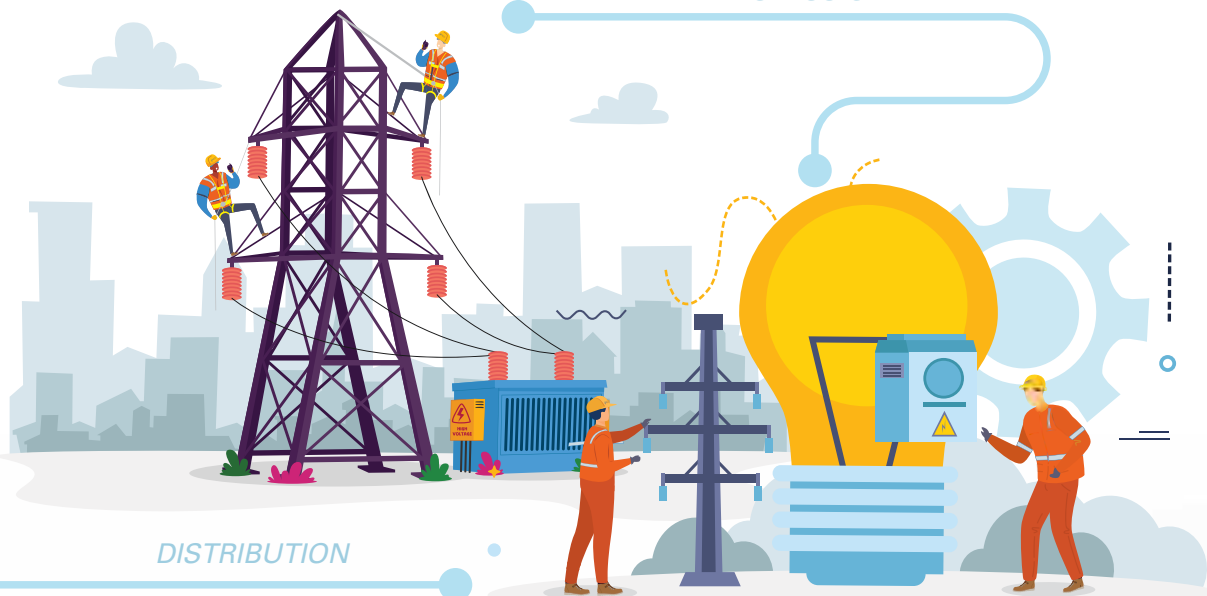


TRANSMISSION



DISTRIBUTION



COMMERCIAL

E-COMMERCE

Magnificent **Haleyora**

HALEYORA Luar Biasa

Kesinambungan Tema

Continuity of Themes

2019

Transformasi Power 2.0 dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0

Power 2.0 Transformation in Support Industrial Revolution Era 4.0



Tahun 2019 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan usaha PT Haleyora Power. Berbagai tantangan di masa transisi secara bertahap telah teratasi. Keunggulan operasi didukung oleh upaya efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki menghasilkan pertumbuhan pangsa pasar dan pencapaian performa keuangan yang melampaui ekspektasi. Setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari dinamika usaha yang memotivasi kami untuk lebih baik lagi dalam menjaga nilai-nilai integritas dan profesionalisme serta senantiasa beroperasi dengan praktik tata kelola korporasi terbaik. Dengan fundamental yang kuat, PT Haleyora Power siap mengembangkan peran dari *service provider* menjadi *asset operator* untuk meraih pertumbuhan di masa depan.

The year 2019 was a crucial milestone in PT Haleyora Power's business journey. Challenges in the transition period were gradually resolved. Operational excellence supported by efficiency and optimization of available resources resulted in market share growth and achievement of exceptional financial performance. Every challenge that we encounter is part of the business dynamics that motivates us to perform better in maintaining the values of integrity and professionalism and to continue operating with the best corporate governance practices. With strong fundamentals, PT Haleyora Power is ready to develop the role of a service provider to become an asset operator in order to achieve future growth.

2018

Transformasi Layanan Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

Services Transformasi Towards Sustainable Growth



Tahun 2018 merupakan momentum penting dalam perjalanan usaha PT Haleyora Power. Sepanjang tahun, Perusahaan bergerak cepat menyelesaikan berbagai proses transisi sebagai dampak dari regulasi penataan zonasi. Di saat yang sama, kami harus menyelaraskan proses bisnis dan menjaga kesinambungan pertumbuhan kinerja yang positif di dalam perubahan lingkungan yang penuh tantangan, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan. Keunggulan kompetitif di bidang layanan operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi didukung oleh digitalisasi data operasional dan *supporting* serta utilisasi sumber daya yang optimal telah menghasilkan kinerja keuangan yang melampaui ekspektasi. Dengan fundamental yang kuat, kami melangkah pasti untuk bertransformasi menjadi aset operator berstandar kelas dunia dan meraih pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

The year 2018 was a crucial period in the business journey of PT Haleyora Power. Throughout the year, the Company moved swiftly to complete various transition processes as a result of zoning regulation. At the same time, we must align business processes and maintain sustainable positive growth in a dynamic and challenging environment, while seizing growth opportunity. Competitive advantages in the sector of operations and maintenance services of transmission and distribution networks supported by digitalization of operational and supporting data and optimal utilization of resources have resulted in exceptional financial performance. With strong fundamentals, we are taking a bold step towards transforming into a world-class asset operator and achieving sustainable growth in the future.

2020

Ma9nificent Haleyora

Haleyora Luar Biasa



Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia dan pada tahun yang sama, PT Haleyora Power (HP) juga melakukan Transformasi HP yang merupakan penyalarsan dengan program Transformasi PLN sebagai perusahaan induk yang memiliki aspirasi *green, lean, innovative* dan *customer focused*.

Kedua hal tersebut juga menjadi tantangan bagi HP untuk melakukan transformasi yang luar biasa (*magnificent*) dan sekaligus sebagai menjadi peluang untuk berkembang menjadi lebih baik dengan mengedepankan *Customer Focus* dan *Innovative*. Sepanjang tahun 2020, HP telah berperan serta dalam pemasangan dan pemasaran Stroomnet (Iconnet) dan menandatangani MoU penyediaan Tenaga Kerja dengan perusahaan yang tergabung dalam PLN Grup. Serta melakukan penyempurnaan pada aplikasi ListriQu untuk membangun *customer experience* dan sekaligus menjadikan aplikasi ini sebagai solusi untuk layanan kelistrikan *end to end* bagi pelanggan. Pengembangan aplikasi ListriQu mampu meningkatkan pendapatan *beyond KWh* dan untuk mendukung Program SOLID (*Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increase Profit/Margin Contribution, dan Developing New Edge*).

Penyalarsan strategi dengan *holding* merupakan aspirasi jangka panjang bagi Perusahaan untuk mewujudkan visi menjadi *trend setter* dan pemimpin bagi perusahaan perusahaan yang bergerak pada operasi dan pemeliharaan dibidang transmisi dan distribusi di wilayah Indonesia maupun Asia Tenggara.

The COVID-19 pandemic that struck Indonesia in 2020 had a significant impact on the Indonesian people and economy, and the Company also completed the HP Transformation in 2020, which aligns with the PLN Transformation programme as a holding company with green, lean, innovative, and customer-centric aspirations. focused. These two factors also provide a challenge for HP in terms of executing an exceptional transformation (magnificent) while simultaneously providing a chance to improve development by emphasising Customer Focus and Innovation.

Throughout 2020, HP has been involved in the installation and marketing of Stroomnet (Iconnet) and has inked an agreement for the supply of manpower with PLN Group businesses. Additionally, we are improving the ListriQu application to enhance the user experience while also transforming it into a one-stop shop for end-to-end energy services for consumers. The creation of the ListriQu application enables revenue growth beyond KWh and contributes to the SOLID Program's objectives of ensuring business sustainability, optimising cost efficiency, leading industry capabilities, increasing profit/margin contribution, and developing new edge. Aligning strategy and holding is a long-term goal of the Company in order to achieve its ambition of being a trend setter and leader among businesses involved in transmission and distribution operations and maintenance in Indonesia and Southeast Asia.

Daftar Isi

Table of Content

- 2 **Kesinambungan Tema**
Continuity of Themes
- 4 **Daftar Isi**
Table of Content



9 01 PENDAHULUAN

INTRODUCTION

- 10 **Ikhtisar Keuangan**
Financial Highlights
- 13 **Ikhtisar Operasional**
Operational Highlights
- 15 **Ikhtisar Saham**
Share Highlights
- 15 **Ikhtisar Efek Lainnya**
Other Share Highlights
- 16 **Sertifikasi**
Certification
- 17 **Peristiwa Penting 2020**
Significant Events in 2020

27 02 LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT



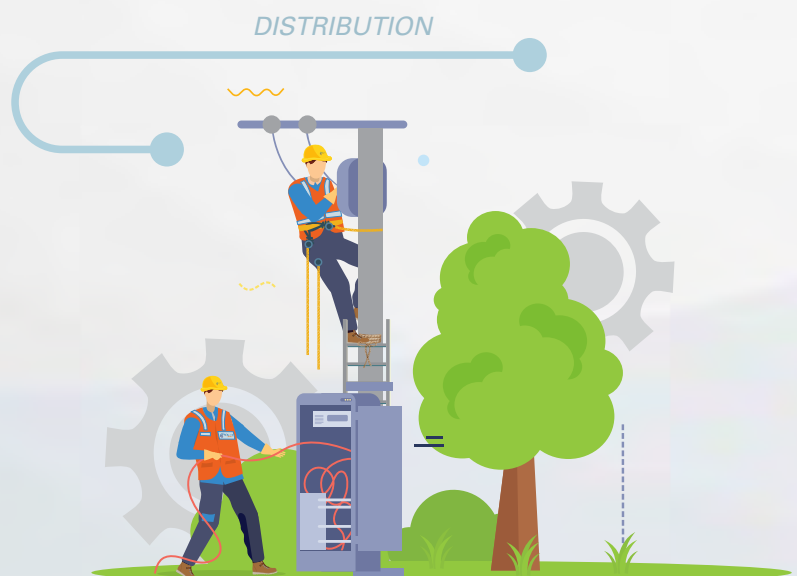
- 28 **Laporan Dewan Komisaris**
Report from the Board of Commissioner's
- 36 **Laporan Direksi**
Report from the Board of Directors

49 03 PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



- 50 **Identitas Perusahaan**
Company Identity
- 52 **Jejak Langkah**
Milestones
- 54 **Sejarah Singkat**
Company Brief
- 56 **Bidang Usaha**
Business Line
- 58 **Logo Perusahaan**
Company's Logo
- 59 **Moto Perusahaan**
Company Motto
- 59 **Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan**
Objective, Target, and Strategy of the Company
- 63 **Visi dan Misi Perusahaan**
The Company's Vision and Mission
- 64 **Budaya Perusahaan**
Corporate Culture
- 66 **Struktur Organisasi**
Organisational Structure
- 68 **Profil Dewan Komisaris**
Profile of the Board of Commissioners
- 72 **Profil Direksi**
Profile of the Board of Directors
- 78 **Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi**
Officers' Profile One Level Down from The Board of Directors
- 80 **Komite Audit**
Audit Committee



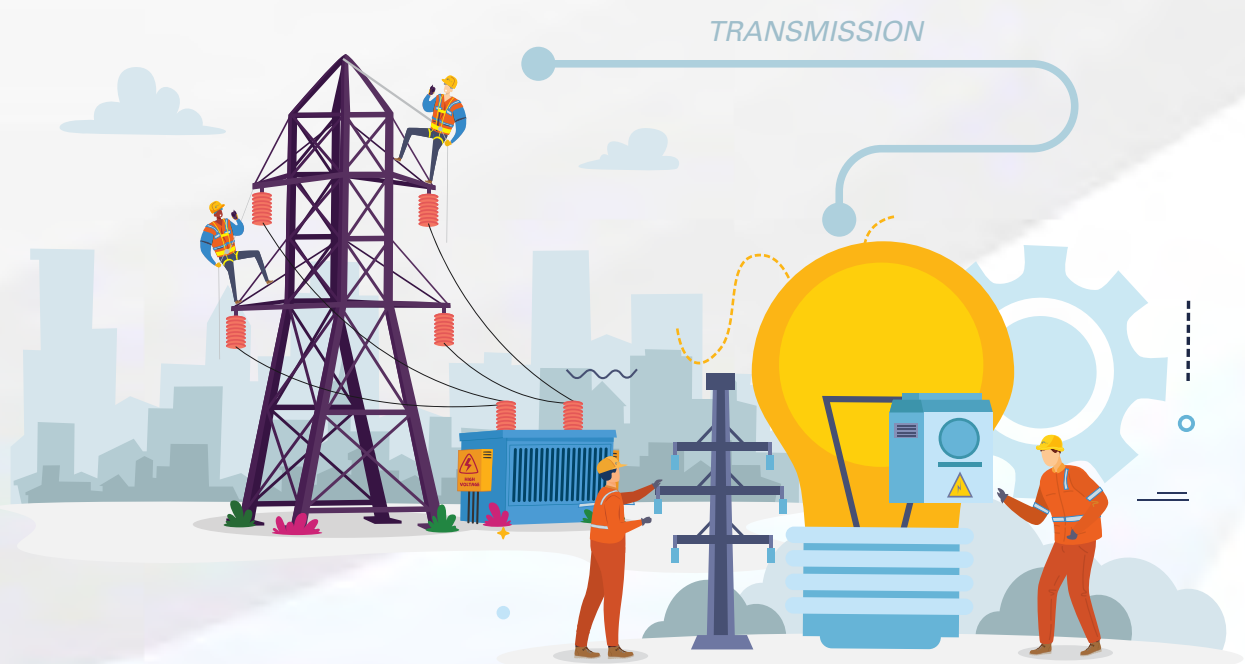
- 82 Komite GCG dan Manajemen Risiko
GCG and Risk Management Committee
- 83 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners
- 84 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholders' Structure and Composition
- 87 Kronologis Pencatatan Saham
Distribute Chronology of Listings
- 87 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing History
- 87 Struktur Grup Perusahaan
Structure of the Company Group
- 88 Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Subsidiaries and Affiliated Entities
- 89 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Perusahaan
The Company Supporting Institutions and Professions
- 90 Wilayah Operasi
Operational Map
- 92 Informasi Website Perusahaan
Information About the Business' Website
- 93 Program Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
Management Education and Training Program

97 04 ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



- 98 Tinjauan Industri
Industry Overview
- 102 Tinjauan Operasional
Operational Performance Highlights
- 110 Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing Aspects and Market Share
- 111 Kelangsungan usaha
Continuity of Business
- 113 Prospek Usaha
Prospective Business
- 115 Tinjauan Keuangan
Analysis of the Financial Situation



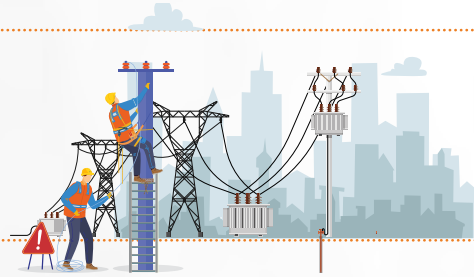
147 05 FUNGSI PENUNJANG BISNIS BUSINESS SUPPORT FUNCTIONS



148 Sumber Daya Manusia
Human Resources

165 Teknologi Informasi
Technology Information

173 06 TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE



174 Komitmen dan Kebijakan Perusahaan dalam
Menerapkan GCG
Commitments and Policies of the Company in
Applying

176 Struktur dan Mekanisme *Corporate Governance*
Corporate Government's Structure and Mechanism

179 Penilaian Penerapan GCG
Assessment of GCG Implementation

183 Peningkatan Kualitas GCG
Improvement in GCG Quality

183 *Roadmap* Pengembangan GCG
GCG Development Road

184 Informasi Pemegang Saham Utama dan
Pengendali
Primary Shareholders and Information Controlling

184 Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders' General Meeting

191 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

197 Komisaris Independen
Independent Commissioner

198 Direksi
Board of Directors

205 Independensi dan Transparansi Dewan
Komisaris dan Direksi
The Board of Commissioners' and Board of
Directors' Independence and
Transparency

209 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan
Direksi
Assessment of the Board of
Commissioners and the Board of
Directors' Performance

212 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris
dan Direksi
Board of Commissioners and Board of
Directors Remuneration Policy

213 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of
Directors Meetings

220 Komite Audit
Audit Committee

225 Komite GCG dan Manajemen Risiko
Committee on GCG and Risk Management

230 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Commissioners' Board

232 Corporate Secretary
Corporate Secretary

236 Satuan Pengawas Internal (Audit Internal)
Unit of Internal Supervision (Internal Audit)

240 Akuntan Publik
Public Accounts

241 Manajemen Risiko
Risk Management

254 Sistem Pengendalian Intern
Internal Control System

256 Permasalahan Hukum/Litigasi Perusahaan
dan Anak Perusahaan
Legal/Litigation Problems Concerning the
Company and Subsidiaries

256 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Business Data and Information

DISTRIBUTION



257 Kode Etik
Code of Conducts

261 Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
Policy on the Whistleblowing System

265 Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi
Policy on Anti-Corruption and Gratification

265 Transparansi Praktik *Bad Governance*
Transparency of Improper Government Practices

267 07 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



268 Komitmen dan Kebijakan
Commitments and Policies

275 Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia
Social Responsibility in Human Rights

278 Tanggung Jawab Sosial Bidang Perusahaan
Terkait Operasi yang Adil
Corporate Social Responsibility for Ethical Business Activities

280 Tanggung Jawab Sosial Bidang Pelestarian
Lingkungan Hidup
Social Responsibility in the Environmental Conservation Industry

281 Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan,
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Social Responsibility in Labor, Health, and Safety

292 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait
Tanggung Jawab Kepada Konsumen dan Mitra
Kerja
Social Responsibility of the Corporation in
Relation to Responsibility to Consumers and
Work Partners

295 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait
Pengembangan Sosial dan Kemasayarakatan
Corporate Social Responsibility for Social and
Community Development

309 08 LAPORAN KEUANGAN AUDIT

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

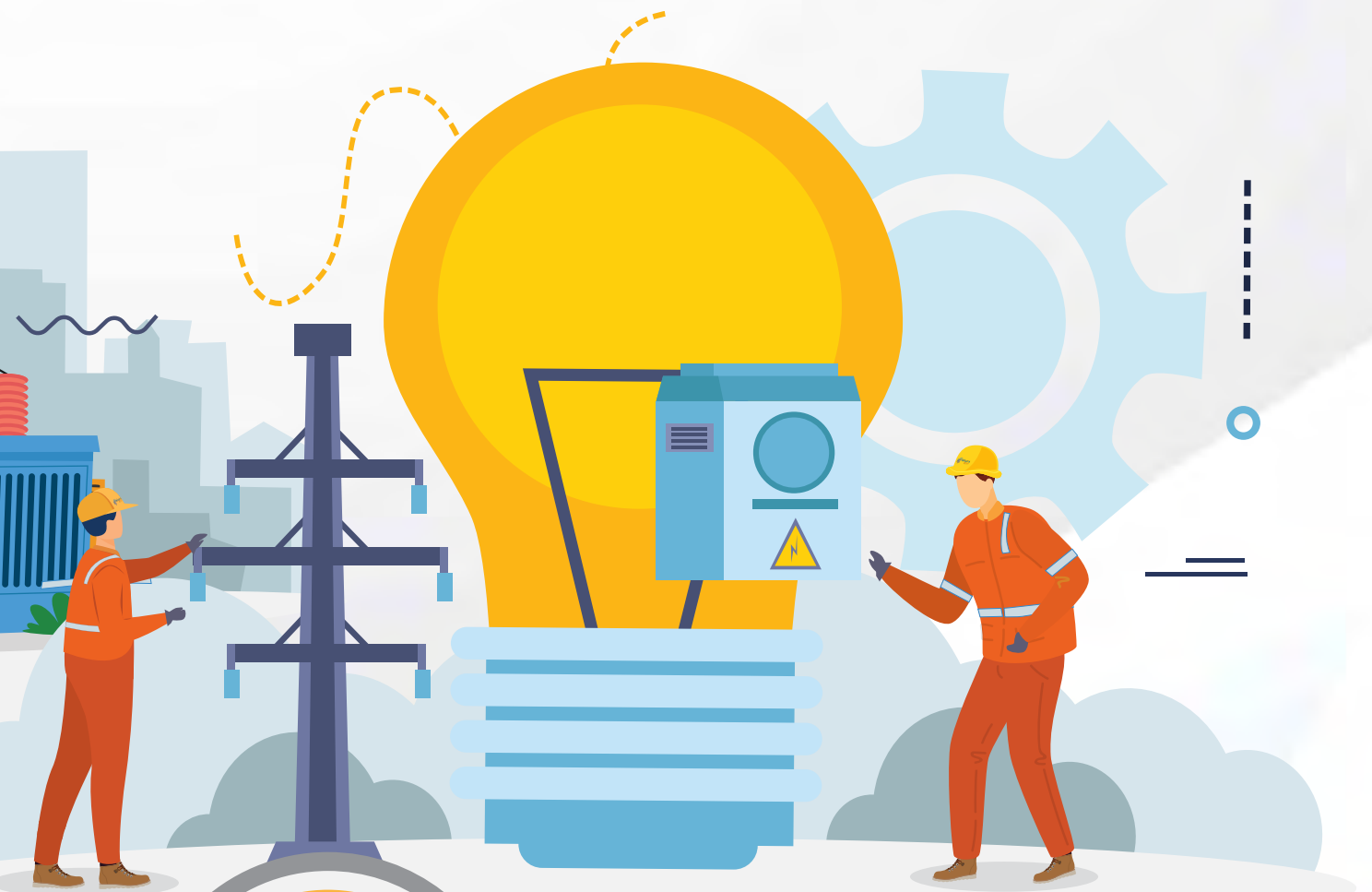


TRANSMISSION





Di tengah kondisi pandemi COVID-19 Haleyora Power mampu mencatat peningkatan pendapatan dan aset perusahaan
Despite the COVID-19 epidemic, Haleyora Power increased its income and assets



01

Pendahuluan
Introduction

Ikhtisar Keuangan

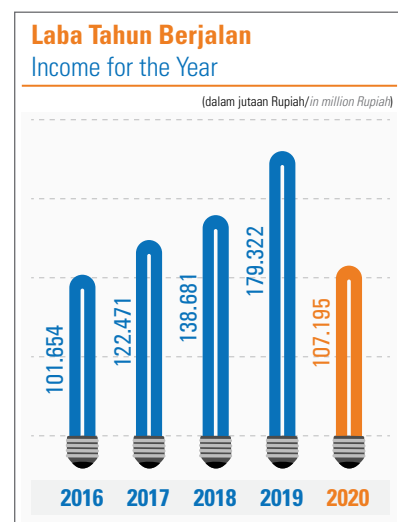
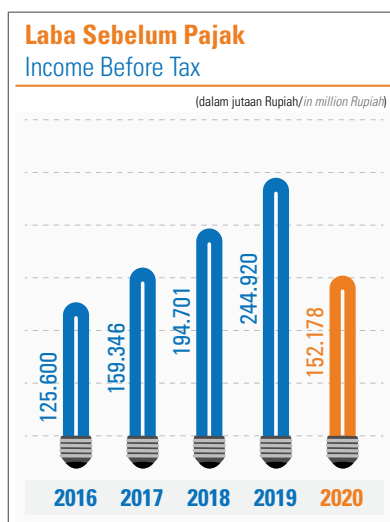
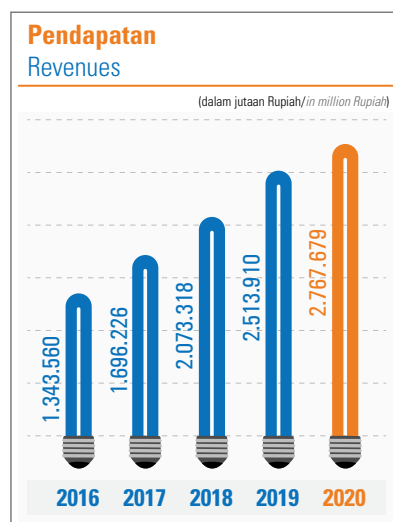
Financial Highlights

Labanya (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Description |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Pendapatan | 2.767.679 | 2.513.910 | 2.073.318 | 1.696.226 | 1.343.560 | Revenues |
| Beban Pokok Pendapatan | (2.558.205) | (2.225.980) | (1.821.999) | (1.487.314) | (1.171.780) | Cost of Revenues |
| Beban Usaha | (57.296) | (43.010) | (56.618) | (49.566) | (46.180) | Operating Expenses |
| Laba sebelum Pajak | 152.178 | 244.920 | 194.701 | 159.346 | 125.600 | Income before Tax |
| Beban Pajak | (44.983) | (65.598) | (56.020) | (36.875) | (23.946) | Tax Expense |
| Laba Tahun Berjalan | 107.195 | 179.322 | 138.681 | 122.471 | 101.654 | Income for the Year |
| Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: | | | | | | Profit for the Year Attributable to: |
| - Pemilik Entitas Induk | 104.939 | 177.350 | 135.254 | 117.145 | 93.683 | - Owners of the Parent |
| - Kepentingan Non-Pengendali | 2.256 | 1.972 | 3.427 | 5.326 | 7.971 | - Non-Controlling Interest |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada: | | | | | | Total Comprehensive Income for the Year Attributable to: |
| - Pemilik Entitas Induk | 125.438 | 171.273 | 129.827 | 126.183 | 152.186 | - Owners of the Parent |
| - Kepentingan Non-Pengendali | 2.256 | 1.972 | 3.427 | 5.326 | 7.971 | - Non-Controlling Interest |
| Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 127.694 | 173.245 | 133.254 | 131.509 | 160.157 | Total Comprehensive Income for the Year |



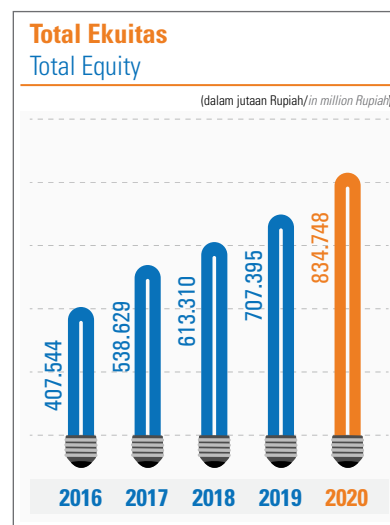
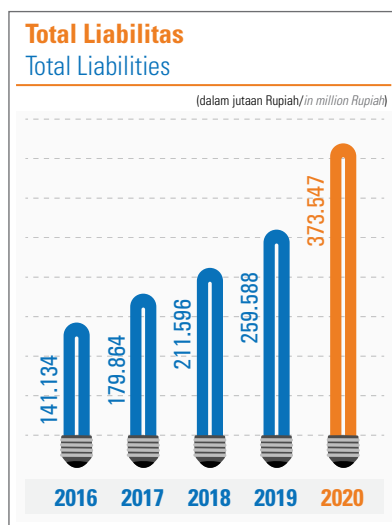
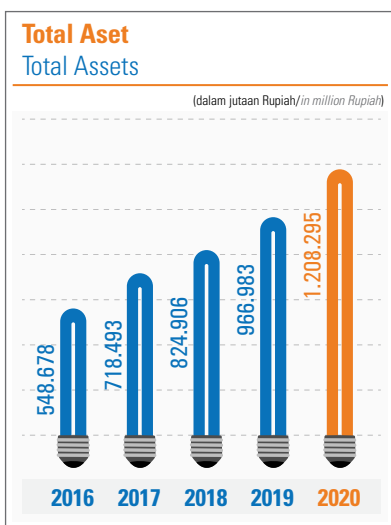


Posisi Keuangan

Financial Position

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Description |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| Aset Lancar | 865.803 | 831.622 | 715.865 | 637.767 | 484.557 | Current Assets |
| Aset Tidak Lancar | 342.492 | 135.361 | 109.041 | 80.726 | 64.121 | Non-Current Assets |
| Total Aset | 1.208.295 | 966.983 | 824.906 | 718.493 | 548.678 | Total Assets |
| Liabilitas Jangka Pendek | 205.244 | 97.663 | 93.214 | 89.129 | 62.655 | Current Liabilities |
| Liabilitas Jangka Panjang | 168.303 | 161.925 | 118.382 | 90.735 | 78.479 | Non-Current Liabilities |
| Total Liabilitas | 373.547 | 259.588 | 211.596 | 179.864 | 141.134 | Total Liabilities |
| Total Ekuitas | 834.748 | 707.395 | 613.310 | 538.629 | 407.544 | Total Equity |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 1.208.295 | 966.983 | 824.906 | 718.493 | 548.678 | Total Liabilities and Equity |
| Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama | 49.808 | 48.888 | 47.476 | 42.698 | 38.093 | Investment Associates and Joint Ventures |



Arus Kas

Cash Flow

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Description |
|------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|--|
| Arus kas dari aktivitas operasi | 274.750 | 24.399 | 162.156 | 42.445 | 79.974 | Cash Flow from Operating Activities |
| Arus kas dari aktivitas investasi | 17.897 | (23.185) | (26.788) | (1.598) | (9.299) | Cash Flow from Investment Activities |
| Arus kas dari aktivitas pendanaan | (52.608) | (79.160) | (58.576) | (212) | - | Cash Flow from Financing Activities |
| Kenaikan bersih kas dan setara kas | 240.039 | (77.947) | 76.795 | 40.635 | 70.675 | Net Increase in Cash and Cash Equivalents |
| Kas dan Setara Kas Awal tahun | 305.598 | 383.545 | 306.750 | 266.115 | 195.440 | Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year |
| Kas dan Setara Kas Akhir tahun | 545.637 | 305.598 | 383.545 | 306.750 | 266.115 | Cash and Cash Equivalents at End of Year |

Rasio Keuangan Utama

Main Financial Ratio

(dalam Persentase kecuali dinyatakan lain/in the Percentage unless otherwise stated)

| Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Description |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| Rasio Beban Pokok Pendapatan (%) | 89,6 | 88,55 | 87,88 | 87,68 | 87,21 | Cost of Revenues Ratio (%) |
| Rasio Operasi (%) | 94,8 | 90,26 | 90,61 | 90,61 | 87,68 | Operating Ratio (%) |
| Rasio Kas (Kali) | 3,06 | 3,13 | 4,11 | 3,44 | 4,25 | Cash Ratio (Times) |
| Rasio Lancar (Kali) | 5,36 | 8,23 | 7,68 | 7,16 | 7,73 | Current Ratio (Times) |
| Rasio Utang terhadap Aset (%) | 30,92 | 26,85 | 25,65 | 25,03 | 25,72 | Debt to Asset Ratio (%) |
| Rasio Utang terhadap Modal (%) | 44,75 | 36,70 | 34,50 | 33,39 | 34,63 | Debt to Equity Ratio (%) |
| Margin EBITDA (%) | 8,45 | 9,86 | 9,42 | 9,19 | 8,92 | EBITDA Margin (%) |
| Margin Operasi (%) | 5,15 | 9,74 | 9,36 | 9,41 | 9,61 | Operation Margin (%) |
| Margin Bersih (%) | 3,87 | 7,13 | 6,69 | 7,22 | 7,57 | Net Margin (%) |
| Tingkat Pengembalian Aset (%) | 9,61 | 18,54 | 16,81 | 17,05 | 18,53 | Return on Assets (%) |
| Tingkat Pengembalian Modal (%) | 13,91 | 22,74 | 24,94 | 22,74 | 24,94 | Return on Equity (%) |
| Umur Piutang (Hari) | 47 | 45 | 40 | 38 | 32 | Collection Period (Day) |



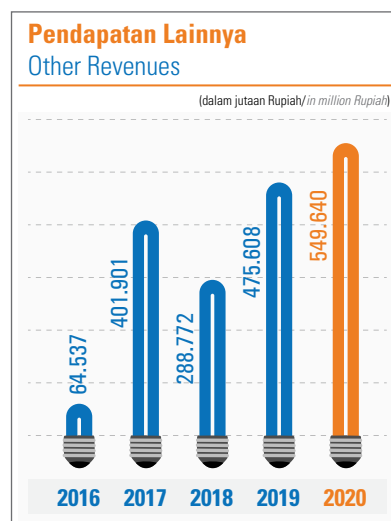
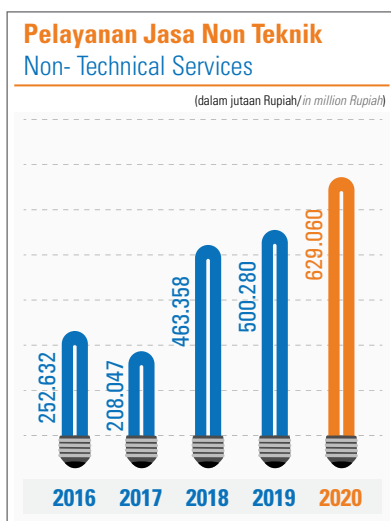
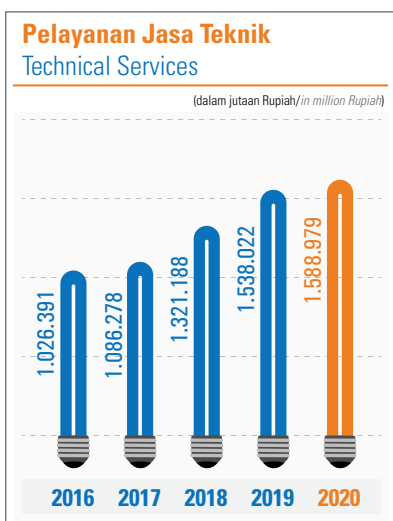


Ikhtisar Operasional

Operational Highlights

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Description |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Pendapatan Operasi dan Pemeliharaan | | | | | | Operation and Maintenance Revenue |
| Pelayanan Jasa Teknik | 1.588.979 | 1.538.022 | 1.321.188 | 1.086.278 | 1.026.391 | Technical Services |
| Pelayanan Jasa Non Teknik | 629.060 | 500.280 | 463.358 | 208.047 | 252.632 | Non- Technical Services |
| Pendapatan Lainnya | 549.640 | 475.608 | 288.772 | 401.901 | 64.537 | Other Revenues |
| Jumlah | 2.767.679 | 2.513.910 | 2.073.318 | 1.696.226 | 1.343.560 | Total |



Jumlah Pelanggan

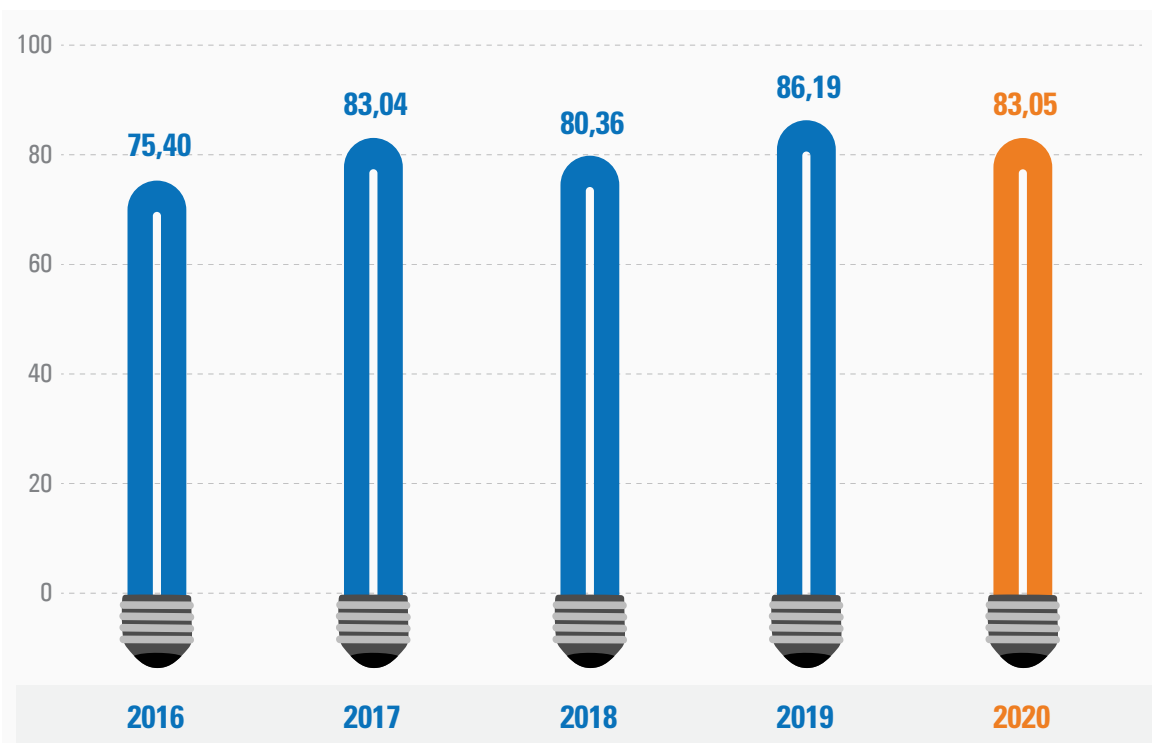
Total Customers

| Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Description |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| Bidang Distribusi | 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | Distribution |
| Bidang Transmisi | 6 | 5 | 2 | 1 | - | Transmission |
| Jumlah | 17 | 15 | 12 | 10 | 5 | Total |

Penilaian Penerapan GCG

Assessment on GCG Implementation

Skor Penetapan GCG 2016-2020
2016-2020 GCG Determination Score





Ikhtisar Saham

Share Highlights

Hingga akhir tahun 2020, HP tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

HP did not exchange shares until the end of 2020, thus there is no information on the number of outstanding shares, market capitalization, greatest and lowest share prices, and closing share prices, as well as the volume of shares traded.

Ikhtisar Efek Lainnya

Other Share Highlights

Hingga 31 Desember 2020, HP tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

HP did not issue bonds, sukuk, or convertible bonds as of December 31, 2020, and therefore there is no information on the quantity of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/yield rates, maturity dates, or rating of bonds/sukuk.



Sertifikasi Certification



Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Quality Management System Certificate



| | |
|--|---------------------|
| Bidang Sertifikasi <i>Certification Field</i> | : SNI ISO 9001:2015 |
| Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i> | : LMK certification |
| Tahun Perolehan <i>Earning Year</i> | : 2020 |
| Masa Berlaku Hingga <i>Validity Period</i> | : 2023 |





Peristiwa Penting 2020

Significant Events in 2020

Jakarta, 2020

Jakarta, 2020



DUKUNGAN HP TERHADAP TRANSFORMASI PLN

Support from HP for PLN Transformation

Sebagaimana diamanatkan oleh PT PLN (Persero) sebagai induk usahanya, terdapat 4 sasaran strategis transformasi yaitu *Green* (menjadikan PLN sebagai perusahaan yang menghadirkan energi ramah lingkungan); *Innovative* (mendorong pertumbuhan perusahaan melalui model dan layanan bisnis yang inovatif); *Customer Focused* (memuaskan pelanggan melalui kualitas dan layanan kelas dunia) dan *Lean* (sebagai penyedia listrik yang lincah, andal dan kompetitif bagi pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri). Dalam mendukung program Transformasi PLN-SOLID, HP bersinergi dengan anak perusahaan PLN lainnya yaitu ICON+ dan PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) menghadirkan Stroomnet yang merupakan layanan akses internet yang dapat diaktifasikan dengan program tambah daya. Stroomnet mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan internet rumah yang andal, terjangkau, dan *unlimited*.

Sinergi lain sebagai bentuk dukungan terhadap Transformasi PLN-Green, Perusahaan bersama induk usaha meluncurkan program penggunaan motor listrik. Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan membuat Indonesia lebih hijau. Selain itu juga sebagai upaya untuk menerapkan gaya hidup elektrik (*Elektrifying Lifestyle*) kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Secara bertahap pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah dilakukan agar masyarakat lebih bijaksana dalam pemanfaatan energi.

As mandated by its parent company, PT PLN (Persero), there are four strategic transformation objectives: Green (transforming PLN into an environmentally friendly energy provider); Innovative (encouraging company growth through innovative business models and services); Customer Focused (satisfying customers through world-class quality and service); and Lean (as an agile, reliable and competitive electricity provider for household, business and industrial customers). HP collaborates with other PLN companies, particularly ICON+ and PT National Electric Service Tarakan (PLN Tarakan), to deliver Stroomnet, an internet access service that may be enabled with the addition of a power programme. Stroomnet is able to answer the Indonesian people's need for economical, dependable, and unrestricted home internet.

Another synergy aimed at assisting the PLN – Green Transformation is that the Firm and its parent company started a campaign promoting the usage of electric motors. This initiative attempts to cut carbon emissions and make Indonesia more environmentally friendly. Additionally, it is an endeavour to adopt an electric lifestyle (Elektrifying Lifestyle) for the Indonesian people in compliance with Presidential Regulation No. 55 of 2019 on Accelerating the Battery-Based Electric Motor Vehicle Program for Road Transportation. Gradually, the Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) has been constructed to educate the community about energy conservation.

Jakarta, 10 Januari 2020
Jakarta, January 10, 2020



Pemeriksaan Instalasi dan Penggantian KWH Meter untuk Pelanggan Terdampak Banjir Se-Jabodetabek dengan jumlah 2020 pelanggan, yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) bekerjasama dengan Haleyora Power (ListriQu).

PT PLN (Persero), in partnership with Haleyora Power, conducted an inspection of the installation and replacement of KWH metres for flood-affected consumers in Jabodetabek, with a total of 2020 clients (ListriQu).

Pemeriksaan Instalasi dan Penggantian KWH Meter Pelanggan Terdampak Banjir Se-Jabodetabek
Conducted an inspection of the installation and replacement of KWH metres for flood-affected consumers in Jabodetabek

Jakarta, 10 Januari 2020
Jakarta, January 10, 2020



Manajemen PT Haleyora Power (HP) melakukan kunjungan kepada warga yang terkena musibah banjir di wilayah Bekasi, dan memberikan bantuan berupa makanan serta minuman.

The management of PT Haleyora Power (HP) visited residents in the Bekasi area who had been affected by flooding and provided help in the form of food and beverages.

Kunjungan kepada warga yang terkena musibah banjir di wilayah Bekasi
Visited residents in the Bekasi area who had been affected by flooding



Jakarta, 10 Januari 2020
Jakarta, January 10, 2020



Kunjungan kepada petugas teknik lapangan di Posko Pondok Gede (wilayah kerja HP Region 5 DKI dan Banten)

A visit to the Pondok Gede Command Post (HP Region 5 DKI and Banten)

Kunjungan kepada petugas teknik lapangan di Posko Pondok Gede (wilayah kerja HP Region 5 DKI dan Banten) dengan memberikan support sekaligus menyerahkan perahu karet untuk mempermudah tim siaga dalam membantu masyarakat sekitar.

A visit to the Pondok Gede Command Post (HP Region 5 DKI and Banten) to provide assistance and hand out rubber boats to make it simpler for the standby team to assist the local population.

Jakarta, 10 Januari 2020
Jakarta, January 10, 2020



Bantuan kepada tenaga kerja HP dan asrama penghafal Al-Quran

HP gave help to HP workers and the Koran memorised

Bersama dengan keluarga besar Lazis Haleyora Power memberikan bantuan kepada tenaga kerja HP dan asrama penghafal Al-Quran yang terkena dampak musibah banjir di wilayah sekitar Ciledug, Tangerang, Banten.

Together with Lazis Haleyora Power's extended family, HP gave help to HP workers and the Koran memorised dormitories damaged by the flood in the area near Ciledug, Tangerang, Banten.

Online seluruh region, 17 Agustus 2020
Online all regions, August 17, 2020



Launching Program SEMATA Zero Accident
Haleyora Power
SEMATA Zero Accident Haleyora Power
Program Launch

PT Haleyora Power selalu berkomitmen untuk terus mengedepankan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan meluncurkan *Quick Wins* untuk mencapai *Zero Accident*. Memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75, program bertajuk SEMATA (Semangat Selamat Menuju *Zero Accident*) hadir agar seluruh Insan Haleyora Power satu pandangan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek kesehatan dan keselamatan dalam bekerja.

Turut hadir dalam acara *launching* program, yakni Bapak Komang Parmita (EVP HSSE PT PLN), Bapak Agung Nugraha (GM UID JABAR PLN) jajaran Komisaris, Direksi, Manajemen, serta Manajemen Regional PT Haleyora Power, dan jajaran Direksi AP dan Afiliasi Haleyora Power. "Perlu kita pahami bersama bahwa sasaran dalam penerapan K3 bukan hanya tentang angka. Melainkan tentang jiwa yang tetap harus aman dalam bekerja, tentang keluarga pekerja yang tidak harus cemas menunggu di rumah, tentang instalasi ketenagalistrikan yang harus selalu aman dari kerusakan, serta pasokan listrik kepada para pelanggan yang harus tetap terjaga", ujar Bapak Sulityo Biantoro selaku Direktur Utama PT Haleyora Power.

SEMATA ! Semangat Selamat Zero Accident !

PT Haleyora Power has always prioritised Occupational Health and Safety by using Quick Wins to achieve Zero Accidents. Taking advantage of the energy surrounding the Republic of Indonesia's 75th Independence Day, the initiative named SEMATA (Semangat Selamat Towards Zero Accident) is here to ensure that all Haleyora Power personnel have a common perspective on the significance of health and safety at work.

Mr. Komang Parmita (EVP HSSE PT PLN), Mr. Agung Nugraha (GM UID JABAR PLN), and members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Management, and Regional Management of PT Haleyora Power, as well as the Board of Directors of AP and Haleyora Power Affiliates, were also present at the program's launch event. "We must all recognise that the objective of adopting OHS is not just numerical. However, about the soul that must remain safe at work, about working families who do not have to worry about waiting at home, about electricity installations that must remain damage-free at all times, as well as electricity supply to customers who must be maintained," As President Director of PT Haleyora Power, Mr. Difficulty Biantoro stated.

SEMATA ! Semangat Selamat Zero Accident !



Online seluruh region, 17 Agustus 2020
Online all regions, August 17, 2020



**Launching Program SEMATA Zero Accident
Haleyora Power**
*SEMATA Zero Accident Haleyora Power
Program Launch*

Memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75, HP menghadirkan program bertajuk SEMATA (Semangat Selamat Menuju *Zero Accident*) yang berisikan:

1. Passpor Kompetensi;
2. K3 Defender (inspeksi & penerapan *safety Integrity & Quality*);
3. *E-Learning*.

Agar seluruh Insan Haleyora Power lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek kesehatan dan keselamatan dalam bekerja.

Taking advantage of the momentum of the Republic of Indonesia's 75th Independence Day, HP presents SEMATA (Spirit of Congratulations to Zero Accident), which includes:

1. *Passport of Competence;*
2. *The K3 Defender (inspection & implementation of safety Integrity & Quality);*
3. *Electronic learning.*

Thus, all Haleyora Power People can become more aware of the importance of workplace health and safety.

Semarang, 18 Agustus 2020
Semarang, August 18, 2020



Haleyora Power Resmi Luncurkan *Command Center* dan Layanan *Borderless* Zona Semarang

*Haleyora Power Officially Launches *Command Center* and *Borderless* Service in Semarang Zone*

Haleyora Power kembali menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam hal ketenagalistrikan kepada pelanggan. Hal tersebut diwujudkan dengan peresmian *Command Center* di Semarang. Mengambil tema "*Launching Command Center* dan Layanan *Borderless* Zona Semarang" hasil sinergi dengan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta yang di selenggarakan di PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Semarang. Turut hadir dalam kesempatan ini, Direktur Keuangan & SDM PT Haleyora Power, Abdul Fatah Nasution, GM PLN UID JATENG & DIY, Feby Joko Priharto, Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko.

Haleyora Power has once again shown its dedication to provide consumers with the finest possible service in terms of energy. This was accomplished via the establishment of the Command Center in Semarang. Taking the subject "Launching Command Center and Semarang Zone Borderless Services," the event was conducted at PLN's Distribution Regulatory Implementation Unit (UP2D) Semarang as a result of a collaboration with PLN Central Java Distribution Main Unit & D.I. Yogyakarta. Additionally present were Abdul Fatah Nasution, Director of Finance and Human Resources of PT Haleyora Power, Feby Joko Priharto, Mayor of Semarang, Hendrar Prihadi, and Sujarwanto Dwiatmoko, Head of the Central Java Province ESDM Office.

Palembang, 18 Agustus 2020
Palembang, August 18, 2020



Launching ListriQu di Kota Palembang
ListriQu is being launched in Palembang City

Acara peresmian yang dilakukan secara daring bersinergi dengan PT PLN (Persero), dihadiri oleh GM Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB) PLN, Daryono, Manajer UP3 PLN, Nanang Prasetyo, jajaran Direksi, Manajemen, dan Manajemen Regional PT Haleyora Power. Tidak lupa acara peresmian tersebut dihadiri pula oleh rekan-rekan pers yang ada di Palembang (18/8).

The inauguration event, which was held online in collaboration with PT PLN (Persero), was attended by Daryono, General Manager of PLN's South Sumatra, Jambi, and Bengkulu (S2JB) Regional Main Unit, Nanang Prasetyo, and members of PT Haleyora Power's Board of Directors, Management, and Regional Management. Not to be forgotten, the inauguration event in Palembang (18/8) was also attended by press colleagues.

Online seluruh region, 4 September 2020
Online all regions, September 4, 2020



Hari Pelanggan Nasional Haleyora Power Tahun 2020
2020 is Haleyora Power's National Customer Day

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2020 dirayakan suka cita oleh insan Haleyora Power. Momentum tersebut di isi dengan berbagai macam kegiatan diantaranya temu pelanggan dengan mengunjungi kantor PLN yang berada di Wilayah kerja PT Haleyora Power (4/9). Tidak hanya itu, tim ListriQu turut ikut serta dalam semarak Hari Pelanggan Nasional dengan berkunjung ke rumah-rumah pelanggan.

Dengan adanya kegiatan yg dilaksanakan pada Hari Pelanggan Nasional 2020 ini, ada sebuah harapan dan semangat untuk meningkatkan mutu pelayanan menjadi yang terbaik serta hubungan dengan pelanggan pun terasa erat.

National Customer Day 2020 was joyfully observed by Haleyora Power employees. The momentum was maintained via a variety of activities, including client meetings at the PLN office in the PT Haleyora Power operating region (4/9). Additionally, the ListriQu crew observed National Customer Day by visiting customers' homes.

With the events planned for National Customer Day 2020, there is optimism and excitement for improving service quality to the point where it is the best and customer relationships seem personal.



Pekanbaru, 10 September 2020
Pekanbaru, September 10, 2020



Acara *video conference* *Launching* ListriQu di Pekanbaru, Riau yang bersinergi dengan PT PLN (Persero) di hadir oleh GM Unit Induk Wilayah Riau & Kepulauan Riau, Bapak Dispriansyah beserta manajemen, serta jajaran Direksi dan manajemen PT Haleyora Power (10/9).

Mr. Dispriansyah and his management attended the ListriQu Launching video conference in Pekanbaru, Riau in collaboration with PT PLN (Persero), as well as the Board of Directors and management of PT Haleyora Power (10/9).

Kini ListriQu telah hadir di kota Pekanbaru
ListriQu has now arrived at Pekanbaru

Jakarta, 19 Oktober 2020
Jakarta, October 19, 2020



Semangat PT Haleyora Power bertransformasi menuju perusahaan yang mampu menjadi pemimpin dibidang penyedia solusi dalam sistem ketenagalistrikan dengan pelayanan prima. Puncak Acara Hari Ulang Tahun PT Haleyora Power Ke-9 Kemeriahan acara puncak Hari Ulang Tahun PT Haleyora Power Ke-9 disambut antusias oleh insan Hoper (19/10).

Acara dihadiri oleh jajaran Direksi PT PLN (Persero), EVP, General Manajer baik dari Unit Distribusi, Transmisi, serta Wilayah PT PLN (Persero), Anak Perusahaan PLN Group, Anak Perusahaan serta Afiliasi PT Haleyora Power, dan tidak lupa insan Haleyora Power di masing-masing wilayah kerja.

Wujudkan harapan untuk menjadi perusahaan yang unggul dalam bidang penyedia solusi dan memberikan inovasi dalam pelayanan ketenagalistrikan bagi pelanggan.

Ma9nificent! 9 Tahun Haleyora Power
"Spirit of Transformation"

Ma9nificent! 9 Years of Haleyora Power
"Spirit of Transformation"

PT Haleyora Power's spirit is evolving into a business capable of becoming a market leader in the area of solution providers for the power system via superior service. The Peak of PT Haleyora Power's 9th Anniversary (19/10).

The ceremony was attended by the Board of Directors of PT PLN (Persero), the EVP, General Managers of PT PLN (Persero) Distribution's Transmission, and Regional Units, PLN Group Subsidiaries, PT Haleyora Power Subsidiaries, and Affiliates, as well as Haleyora Power employees in each work area.

Manifesting the dream of creating a business that excels at delivering solutions and innovating in the delivery of energy services to consumers.

Jakarta, 30 November 2020
Jakarta, Desember 30, 2020



HP berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 370001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).



HP has successfully obtained ISO 370001:2016 Certificate on Anti-Bribery Management System (SMAP).

Haleyora Power Memperoleh Sertifikat ISO 370001:2016 SMAP

Haleyora Power Gets Certificate ISO 370001:2016 SMAP

Seluruh region, 12 Desember 2020
Whole region, Desember 12, 2020



Sebagai tanggung jawab sosial PT Haleyora Power kepada masyarakat khususnya menyangkut disekitar wilayah kerja PT Haleyora Power di kantor pusat maupun seluruh *Region*, maka dari itu memberikan santunan berupa bantuan renovasi atau perlengkapan yang dibutuhkan oleh Rumah Ibadah agar dapat digunakan dengan masyarakat dengan lebih layak dan nyaman.

As part of PT Haleyora Power's social duty to the community, we will provide compensation in the form of remodelling help or equipment required by the House of Worship so that it may be utilised more effectively and comfortably by the community.

CSR Haleyora Power Peduli Rumah Ibadah Tahun 2020

Haleyora Power's CSR Commitment to Houses of Worship in 2020



Jakarta, 14 Desember 2020
Jakarta, December 14, 2020



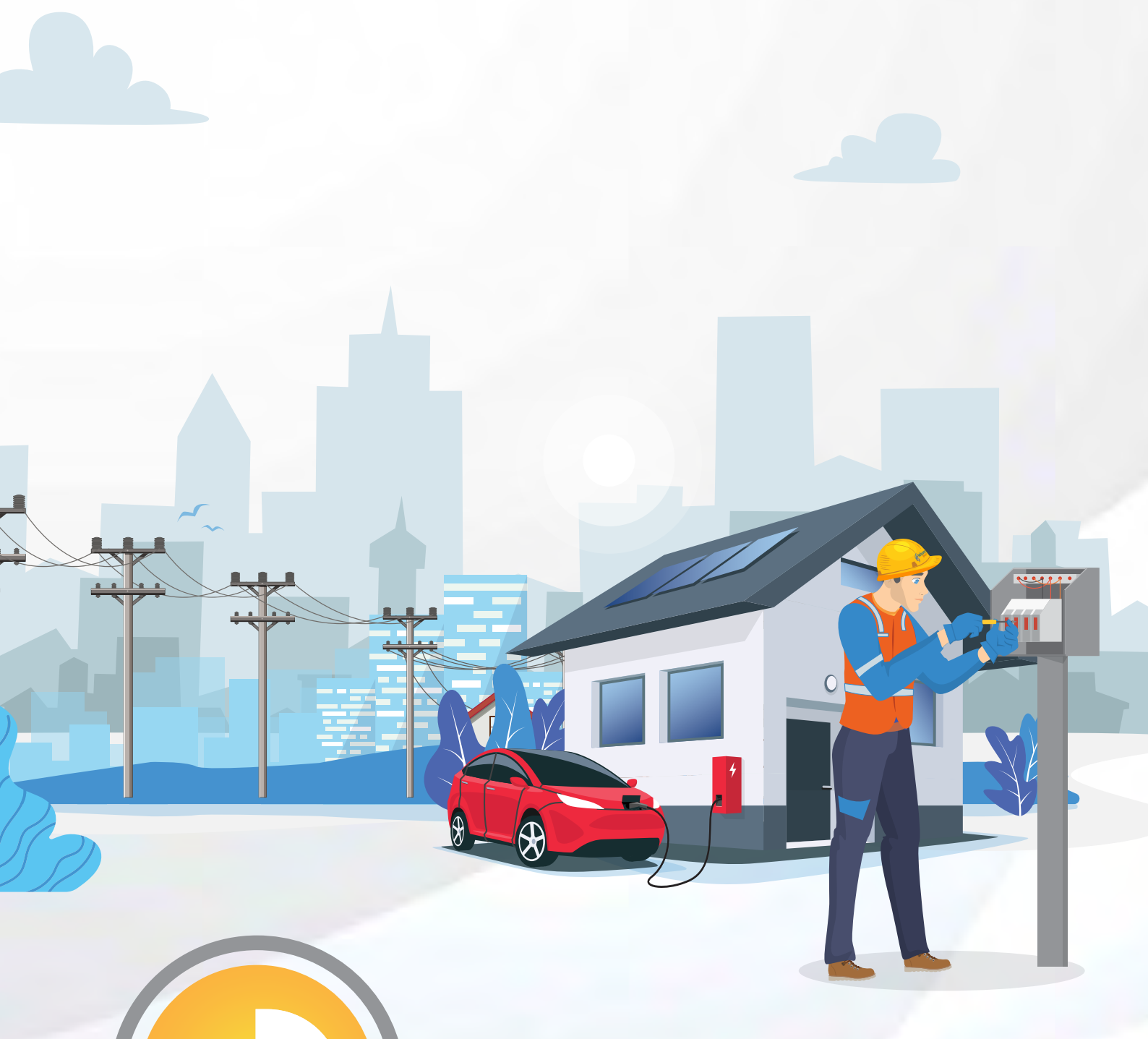
Serah terima jabatan Direktur Utama PT Haleyora Power Bapak Purnomo (baru) dengan Bapak Sulistyio Biantoro (lama) disaksikan oleh Komisaris Utama pada tanggal 14 Desember 2020 bertempat di kantor pusat PT Haleyora Power.

The President Commissioner observed the transfer of the post of President Director of PT Haleyora Power from Mr. Purnomo (new) to Mr. Sulistyio Biantoro (old) on December 14, 2020 at PT Haleyora Power's main office.

Sertijab Direktur Utama PT Haleyora Power
*Certificate of PT Haleyora Power's President
and Director*







Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioner's



“Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas upaya maksimal dalam mengelola Perusahaan di tengah tantangan dan usaha menjaga keberlangsungan Perusahaan. Direksi telah menjalankan seluruh tugas dan perannya dengan baik sehingga mampu mencatatkan peningkatan pendapatan usaha dan aset Perusahaan”.

“The Board of Commissioners commends the Board of Directors for their zealous management of the Company in the face of adversity and their efforts to ensure the Company's continuation. The Board of Directors has discharged all of its responsibilities and functions effectively, resulting in a rise in the Company's operational revenues and assets.”

Para Pemegang Saham yang terhormat,

Sebagaimana kita alami bersama pada tahun 2020 Indonesia menghadapi tantangan besar dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan WHO sebagai Pandemi Global yang dirasakan di seluruh belahan dunia. Namun kami ingin mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, ditengah kondisi ekonomi dan bisnis yang sangat menantang tersebut, PT Haleyora Power ("HP atau "Perusahaan") masih dapat membukukan kinerja yang baik dan dapat menjalankan amanat Pemegang Saham.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap operasional Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sebagai pertanggung jawaban Dewan Komisaris atas amanah yang diberikan oleh Pemegang Saham dan juga merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pandangan atas Kondisi Eksternal

Pandemi COVID-19 menyebabkan Pemerintah mengambil sejumlah langkah besar dengan melakukan pembatasan pergerakan skala besar bagi masyarakat dan memberlakukan kebijakan *Work from Home* (WFH) baik untuk sektor formal maupun non formal sebagai solusi untuk menghindari keramaian dan memutus mata rantai penyebaran virus.

Kendati demikian perekonomian Indonesia tetap mengalami kontraksi sebesar 2,07% atau jauh menurun dibandingkan kinerja ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 5,02%. Lemahnya konsumsi masyarakat akibat kebijakan pembatasan sosial menjadi penyebab utama terkontraksinya perekonomian. Permintaan minyak dan gas juga mengalami tren penurunan seiring berkurangnya aktivitas masyarakat dan kegiatan usaha. Konsumsi energi listrik pada sektor industri turut mengalami penurunan walaupun sektor rumah tangga mengalami peningkatan, dapat dikatakan bahwa kebijakan bekerja dan bersekolah dari rumah merupakan penyebabnya.

To my fellow shareholders,

As we will all discover in 2020, Indonesia is confronted with significant difficulties as a result of the COVID-19 epidemic, which has been classified by the WHO as a Global Pandemic affecting all regions of the globe. However, we would like to offer our thanks and gratitude to God Almighty, since by His grace, PT Haleyora Power ("HP or the "Company") was able to maintain a positive performance and fulfil its shareholder mandate despite these very difficult economic and commercial circumstances.

We present the key points of the report on the Board of Commissioners' implementation of supervisory duties on the Company's operations for the fiscal year ending December 31, 2020, as the Board of Commissioners' responsibility for the mandate given by the Shareholders and as a form of application of the principles of Good Corporate Governance. the superior one.

External Conditions: Opinions

The COVID-19 pandemic has prompted the government to take a number of significant measures, including limiting community mobility and imposing a Work from Home (WFH) policy for both the official and informal sectors, in order to avoid crowds and disrupt the virus's chain of transmission.

Nonetheless, the Indonesian economy continued to shrink by 2.07%, much less than the previous year's 5.02% contraction. The primary reason of economic contraction is weak public consumption as a result of social restriction measures. Demand for oil and gas also decreased as a result of decreased community and corporate activity. Electrical energy consumption in the industrial sector has also dropped, but consumption in the residential sector has risen. This may be attributed to the policy of working and studying from home.

Penilaian Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perusahaan

Dengan adanya pandemi COVID-19 sebagai tantangan utama tahun 2020, operasional Perusahaan secara umum mengalami gangguan baik dalam proses distribusi, transmisi hingga aktivitas operasional lainnya. Direksi telah mengambil sejumlah inisiatif strategis dengan menetapkan beberapa aturan terkait aturan kerja bagi karyawan di masa pandemi yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan sebagai aset utama Perusahaan.

Selaras dengan program Transformasi yang diluncurkan oleh PLN sebagai induk perusahaan, Direksi telah menjalankan beberapa strategi terkait antara lain melakukan penguatan pada bisnis inti dan melakukan pengembangan bisnis segmen *non captive*. Terobosan terbaik Perusahaan adalah dengan melakukan pengembangan aplikasi ListriQu baik dalam penambahan fitur maupun perluasan jaringan ke beberapa pulau, hal ini sangat sesuai dengan kondisi pada tahun 2020 dimana hampir seluruh kegiatan masyarakat dilakukan dari rumah.

Terkait kinerja keuangan, pendapatan dan aset Perusahaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 10,09% dan 24,96% dengan pencapaian terhadap RKAP sebesar 99,75% dan 106,41%. Oleh karena itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas upaya maksimal dalam mengelola perusahaan di tengah tantangan dan usaha menjaga keberlangsungan Perusahaan.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Perekonomian dan bisnis diprediksi akan tumbuh positif seiring harapan meredanya pandemi COVID-19 di tahun 2021. Direksi telah menyusun RJP 2020-2024 sebagaimana arahan Pemegang Saham dengan memperhatikan target-target pertumbuhan jangka panjang.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, arah pengembangan bisnis HP pada RJP 2020-2024 selaras dengan transformasi PLN dan target-target yang ditetapkan Direksi untuk memperluas pasar

Board of Directors Evaluation of Management Performance

With the COVID-19 pandemic as the primary threat in 2020, the Company's operations have been disrupted in general, including distribution, transmission, and other operational activities. The Board of Directors has taken a number of strategic measures, including adopting numerous work guidelines for workers during the epidemic, with the goal of safeguarding the Company's primary assets, health and safety.

In support of PLN's Transformation initiative, the Board of Directors has adopted various relevant initiatives, including improving the core business and growing the non-captive business sector. The Company's most significant achievement is the development of the ListriQu application, both in terms of new capabilities and network expansion to many islands; this is very much in accordance with the circumstances in 2020, when virtually all community activities will be conducted from home.

In terms of financial performance, the Company's revenue and assets grew by 10.09% and 24.96%, respectively, in 2020, while the RKAP was achieved at 99.75% and 106.41%, respectively. As a result, the Board of Commissioners commends the Board of Directors for their extraordinary efforts in managing the business in the face of adversity and their efforts to ensure the Company's survival.

The Board of Directors' Perspectives on Business Prospects

The economy and business are expected to expand favourably in the next years in anticipation of containing the COVID-19 pandemic in 2021. The Board of Directors developed the 2020-2024 RJP in accordance with Shareholder directives, taking long-term growth goals into consideration.

According to the Board of Commissioners, the direction of HP's business development in RJP 2020–2024 is consistent with PLN's transformation, and the Board of Directors' targets to expand the



di *captive* dan *non captive market* merupakan target yang realistis dan sangat mungkin untuk direalisasikan, sehingga memungkinkan Perusahaan tetap dapat bertahan dan tumbuh berkelanjutan.

Untuk itu, Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung dan siap memberikan *support* untuk tercapainya target-target tersebut dengan senantiasa mengingatkan Direksi untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap aspek pengembangan SDM dan Teknologi Informasi agar pelayanan terhadap pelanggan dapat lebih ditingkatkan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga menyarankan Direksi untuk mengoptimalkan sinergi dengan anak perusahaan maupun afiliasinya yang tergabung dalam manajemen portofolio PLN Grup, baik dalam pengembangan organisasi maupun pengembangan bisnis sebagai upaya untuk menciptakan *operation excellence* yang ditunjang dengan efisiensi yang baik di masa mendatang.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Kepada Direksi

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya dengan memastikan bahwa Perusahaan telah dikelola oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memperhatikan aspirasi dari Pemegang Saham.

Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan *review* terhadap setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya dengan berpegang pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Direksi atas persetujuan Pemegang Saham.

Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran dasar Perusahaan. Atas dasar hal tersebut, fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris diimplementasikan melalui komunikasi berkala, memberikan saran dan nasihat kepada Direksi,

captive and non-captive markets are realistic and very likely to be realised, enabling the Company to survive and grow sustainably.

As a result, the Board of Commissioners fully supports and is prepared to assist in the accomplishment of these goals by continuously reminding the Board of Directors to prioritise human resource development and information technology in order to continue improving customer service.

Additionally, the Board of Commissioners advises the Board of Directors to maximise synergies with subsidiaries and affiliates that are part of the PLN Group portfolio management, both organizationally and commercially, in an attempt to maintain operational excellence in the future.

Implementation of the Board of Directors' Supervisory Duties

Throughout 2020, the Board of Commissioners discharged its responsibilities by ensuring that the Company was managed by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations, corporate governance principles, and the objectives of Shareholders.

The Board of Commissioners oversees and evaluates the Board of Directors' strategic initiatives and determines their appropriateness in accordance with the Company's Budget Work Plan (RKAP), which was previously presented by the Board of Directors with Shareholder approval.

Advising the Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors are governed by relevant legislation and the Company's Articles of Association. On this basis, the Board of Commissioners' supervisory role is carried out via periodic communication, advice and counsel to the Board of Directors, including approval of issues within the

termasuk memberikan persetujuan atas hal-hal yang merupakan kewenangan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melangsungkan rapat gabungan bersama dengan Direksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan membahas laporan-laporan periodik Direksi; membahas kondisi dan prospek usaha Perusahaan; membahas kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat kepada Direksi sebagai arahan agar dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Direksi.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola

HP telah menerapkan prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada seluruh jenjang organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020 telah berjalan dengan baik di masa yang penuh dengan tantangan tersebut. Organ GCG; baik yang berada di bawah Dewan Komisaris maupun di bawah Direksi telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab dan telah menjalin kerjasama dengan baik.

Tahun 2020, Perusahaan telah melengkapi infrastruktur tata kelolanya dengan melakukan tinjauan ulang terhadap beberapa kebijakan yang telah ada dan mengeluarkan sejumlah keputusan maupun kebijakan Direksi untuk menunjang kegiatan operasional di Perusahaan.

Sebagaimana dilakukan oleh Perusahaan setiap tahunnya, penilaian sendiri atas penerapan GCG di tahun 2020 memperoleh skor 83,05 dengan predikat "Baik". Kriteria pengukuran yang digunakan sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.

Dewan Komisaris memandang bahwa Perusahaan perlu untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG salah satunya dengan menindaklanjuti rekomendasi *assessment* dari tahun sebelumnya.

Board of Commissioners' power in line with relevant rules. Throughout 2020, the Board of Commissioners met jointly with the Board of Directors 17 (seventeen) times to discuss the Board of Directors' periodic reports; to discuss the Company's operating conditions and business prospects; to discuss national policies affecting the Company's performance; and to provide feedback, notes, and advice to the Board of Directors as a direction.

Perspectives on the Governance Implementation Process

At all levels of the company, HP has adopted Good Corporate Governance concepts and practises based on the values of openness, accountability, responsibility, independence, and fairness. The Board of Commissioners believes that the implementation process that took place during 2020 went well in these trying circumstances. GCG organs, both those reporting to the Board of Commissioners and those reporting to the Board of Directors, have fulfilled their respective tasks, duties, and obligations and created a culture of collaboration.

By 2020, the Company will have completed its governance infrastructure by evaluating numerous current policies and releasing a number of Board of Directors decisions and policies to support the Company's operational operations.

As is customary, the Company's self-assessment of GCG implementation in 2020 received an overall score of 83.05 with the predicate "Good." The measuring criteria were developed in line with the Minister of BUMN's Regulation PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and the Secretary of the Ministry of BUMN's Decree SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012.

The Board of Commissioners believes that the Company must continue to enhance the quality of GCG implementation, including by following up on prior year's evaluation recommendations.



Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengelola Perusahaan didukung oleh Komite Audit dan Komite *Good Corporate Governance* & Manajemen Risiko (GCG & MR). Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas dukungan Komite dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020. Komite Audit dan Komite GCG & MR telah menunjukkan kinerja yang berkualitas dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Komite Audit telah memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan KPI yang telah ditetapkan, hasil evaluasi kinerja Komite Audit pada tahun 2020 mendapatkan skor maksimal dan Dewan Komisaris menilai hal tersebut sangat baik tercermin dari beberapa kriteria yang melebihi rencana seperti pelaksanaan rapat sebanyak 41 kali dan laporan realisasi kegiatan dan KPI Komite.

Komite *Good Corporate Governance* & Manajemen Risiko (GCG & MR) mendapatkan hasil evaluasi yang serupa dengan pencapaian skor yang maksimal dan dinilai oleh Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko di Perusahaan dan upaya peningkatan penerapan GCG. Selama tahun 2020, Komite *Good Corporate Governance* & Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat dengan Dewan Komisaris dan dengan Divisi terkait sebanyak 39 kali dan melakukan kunjungan kerja Komite sebanyak 2 kali.

Evaluation of the Performance of Committees Reporting to the Board of Commissioners

The Audit Committee and the Good Corporate Governance & Risk Management (GCG & MR) Committee assist the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities in monitoring and managing the Company. The Board of Commissioners appreciates the Committee's assistance in enhancing the efficiency with which the Board of Commissioners performs its responsibilities and functions during 2020. By adhering to sound competence and quality standards, the Audit Committee and the GCG & MR Committee have shown superior performance.

The Audit Committee oversaw the application of internal controls and aided the Board of Commissioners efficiently in monitoring the internal and external audit functions, corporate governance, and compliance with relevant laws and regulations.

According to the established KPIs, the Audit Committee's performance in 2020 received a maximum score, which the Board of Commissioners considered to be very well reflected in several criteria that exceeded expectations, such as holding 41 meetings and reporting on the accomplishment of activities and Committee KPIs.

The Good Corporate Governance & Risk Management (GCG & MR) Committee received similar evaluation results, earning a maximum score, and was deemed to have performed admirably by the Board of Commissioners, among other things, by making recommendations to the Board of Commissioners on risk management implementation in the Company and efforts to improve GCG implementation. The Committee on Good Corporate Governance and Risk Management met 39 times with the Board of Commissioners and relevant Divisions in 2020 and paid the Committee two working visits.

Pandangan atas Penerapan *Whistleblowing System* (WBS)

Perusahaan telah menyusun dan mengesahkan pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) pada 31 Agustus 2020 dalam Surat Edaran Direksi PT Haleyora Power Nomor: 0008.E/DIR-HP/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Audit Investigasi di Lingkungan PT Haleyora Power dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan WBS terkait mekanisme penyampaian pelaporan/pengaduan, penyelesaian dan evaluasi secara berkesinambungan dengan menunjuk Satuan Kerja Pengelola WBS dan Tim Audit Investigasi. Dewan Komisaris secara aktif terlibat dan mengawasi efektivitas pelaksanaan WBS di Perusahaan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2020, susunan dan komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan sebagaimana diputuskan dalam RUPS Sirkuler tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan dan memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et discharge*) kepada Sdr. Fahmi El Amruzi D sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Karyawan Aji sebagai Plt. Komisaris sekaligus mengangkat Sdr. Bima Putrajaya sebagai Komisaris Utama. Sehingga komposisi Dewan Komisaris pada akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bima Putrajaya : Komisaris Utama
Purnama T. Sianturi : Komisaris

Apresiasi

Dengan dilaluinya tahun 2020 yang penuh tantangan dan kerja keras, atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Direksi dan seluruh karyawan PT Haleyora Power atas loyalitas dan dedikasi yang optimal dan memberikan kinerja optimal.

Opinions on the Whistleblowing System's Implementation (WBS)

The Company has compiled and ratified guidelines for the implementation of the whistleblowing system on August 31, 2020 in the Circular Letter of the Directors of PT Haleyora Power Number: 0008.E/DIR-HP/2020 regarding the Whistleblowing System and Investigation Audits in PT Haleyora Power in order to improve the WBS's mechanism for submitting reports/complaints. The Board of Commissioners is actively engaged and monitors the Company's WBS implementation's success.

Changes in the Board of Commissioners' Composition

*The composition and composition of the Board of Commissioners were changed in 2020, as decided in Circular GMS on June 19, 2020, by dismissing and granting settlement and release (*acquit et discharge*) to Mr. Fahmi El Amruzi D as President Commissioner and Mr. Karyawan Aji as Acting Commissioner, while simultaneously appointing Mr. Bima Putrajaya as President Commissioner. As a result, the Board of Commissioners' composition at the end of 2020 will be as follows:*

*Bima Putrajaya : President Commissioner
Purnama T. Sianturi : Commissioner*

Appreciation

As 2020 has been a year of difficulties and hard work, the Board of Commissioners would like to convey our thanks and gratitude to the Board of Directors and all staff of PT Haleyora Power for their unwavering commitment and performance.



Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Additionally, the Board of Commissioners wishes to express its appreciation to shareholders and stakeholders for their confidence and support in enabling the Board of Commissioners to carry out their duties and obligations effectively.

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa memberikan nilai dan manfaat yang berkelanjutan kepada seluruh pelanggan dan masyarakat Indonesia.

The business is dedicated to delivering long-term value and advantages to all of its customers and the Indonesian people.

Jakarta, Juli 2021

Atas Nama Dewan Komisaris

On behalf of the Board of Commissioners

Bima Putrajaya
Komisaris Utama

President Commissioner

Laporan Direksi

Report from the Board of Directors



"2020 merupakan tahun yang sangat menantang dengan adanya Pandemi COVID-19, namun Perusahaan tetap berusaha maksimal memantapkan diri dalam industri kelistrikan nasional. Selain membukukan peningkatan pendapatan usaha dan aset, Perusahaan juga menambah pelanggan baru dan melakukan sinergi antar anak perusahaan".

"2020 will be a difficult year due to the COVID-19 Pandemic, but the Company is making every effort to gain a foothold in the national power sector. Along with increasing company revenue and assets, the Company adds new clients and synergizes operations across subsidiaries."

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Atas nama segenap Direksi dan jajaran manajemen PT Haleyora Power (HP), kami ucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Perusahaan telah berhasil melewati tahun 2020 dengan baik.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok kegiatan pengelolaan Perusahaan yang kami lakukan di tahun 2020, khususnya dalam upaya mewujudkan Visi Perusahaan yaitu "Global Electricity Network Service Solution (GENSS)".

Kondisi Perekonomian 2020

Dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menjadi isu global pada tahun 2020, perekonomian dunia dan Indonesia pada khususnya menghadapi tantangan yang sangat besar. Banyak negara mengambil kebijakan untuk *lockdown* yang menyebabkan roda perekonomian berjalan sangat lambat.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan dalam upaya menghadapi pandemi dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta himbauan agar masyarakat melakukan kegiatan bekerja dan belajar dari rumah (*work from home*) dan bahkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,07%, dan Bank Indonesia (BI) juga tercatat 5 (lima) kali menurunkan tingkat suku bunga BI 7 *days repo rate* yaitu dari 5,00% menjadi 3,75%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berdampak cukup besar dalam industri kelistrikan nasional. Konsumsi listrik di sektor industri dan bisnis yang merupakan pelanggan terbesar mengalami penurunan sebesar 0,8% menjadi 243,6 TWh dibandingkan tahun 2019, sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh 8,1% karena kebijakan bekerja dan sekolah dari rumah.

Respected Stockholders and Stakeholders, we express our thanks and gratitude to God Almighty on behalf of the whole Board of Directors and management of PT Haleyora Power (HP) for the company's successful completion of 2020.

Here we summarise the key aspects of the company's management actions in 2020, with a particular emphasis on achieving the company's vision, namely "Global Electricity Network Service Solution (GENSS)."

Economic Situation in 2020

With the COVID-19 pandemic expected to reach a global scale by 2020, the global economy and Indonesia, in particular, face huge hurdles. Numerous countries have lockdown policies, which cause the economy's wheels to spin very slowly.

*The Indonesian government has attempted a variety of measures to combat the epidemic, including imposing Large-Scale Social Restrictions (PSBB), encouraging individuals to work and study from home (*work from home*), and even issuing a Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on Financial Policy. The Stability of the State and Financial System in the Face of a Pandemic of Corona Virus Disease in 2019 (COVID-19) and/or Threats to the National Economy and/or Financial System Stability (Perppu 1/2020).*

According to data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) growth shrank by-2.07% in 2020, and Bank Indonesia (BI) also lowered its 7-day repo rate five (five) times, from 5.00% to 3.75%. Indonesia's economic slump has had a severe effect on the country's electricity business. Electricity consumption in the industrial and business sectors, which account for the majority of consumers, declined by 0.8% to 243.6 TWh in 2019, while household consumption increased by 8.1%, owing to the policy of working and studying from home.

Kebijakan dan Inisiatif Strategis Perusahaan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan, HP di tahun 2020 tetap fokus dalam menjalankan transformasi agar dapat menjalankan lini proses bisnis yang efektif dan efisien. Salah satu hal penting dalam transformasi tersebut adalah melaksanakan Transformasi PLN dalam upaya harmonisasi dan optimalisasi PLN Group dengan 4 (empat) aspirasi yang dimiliki yaitu *Green, Lean, Innovative* dan *Customer Focused*, melakukan pengembangan bisnis dan memperkuat bisnis inti Perusahaan.

Direksi sangat memperhatikan aspirasi Pemegang Saham dalam mengimplementasikan RKAP tahun 2020 dengan menindaklanjuti misi portofolio PLN Group yaitu SOLID (*Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industries Capabilities, Increasing Profit Contribution, Developing New Edge*) antara lain dengan adanya *pilot project* bersama PLN Pusat untuk *two layer* dan AMC; mendukung pengembangan *Autodispatch* dan sistem *ticketing*; *Zero growth recruitment* untuk pekerjaan Yantek dan Manbill untuk menyerap TK yang kontraknya berakhir di tahun 2020 sekaligus melakukan pembenahan dari sisi human capital serta Penambahan konten layanan ListriQu dan Perluasan Implementasi ListriQu di seluruh ibukota Provinsi di pulau Jawa dalam konteks *Beyond kWh*.

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di sepanjang tahun 2020, Perusahaan dapat membukukan pertumbuhan kinerja operasional dan kinerja keuangan yang baik. HP membukukan peningkatan pendapatan sebesar 10,09% dari Rp2.513,91 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2.767,68 miliar. Pelayanan Jasa Teknik memberikan kontributor terbesar yaitu 57,41% dari struktur pendapatan Perusahaan atau Rp1.588,98 miliar.

Total aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1.208,30 miliar mengalami peningkatan sebesar 24,96% atau Rp241,31 miliar dari tahun sebelumnya dengan pencapaian melampaui target sebesar 106,41%. Komposisi total aset di dominasi oleh aset lancar sebesar 71,65% atau Rp865,80 miliar selaras dengan meningkatnya Piutang Non Usaha dari Pihak Berelasi sebesar Rp5,17 miliar.

Strategic Policies and Initiatives of the Organization

To accomplish the company's vision and mission in 2020, HP will continue to focus on transformation in order to run effective and efficient line of business processes. One critical aspect of this change is implementing the PLN Transformation in order to align and optimise the PLN Group around four aspirations, namely Green, Lean, Innovative, and Customer-Focused, as well as to drive business development and reinforce the company's core business.

The Board of Directors is concerned about the aspirations of the Shareholders in implementing the 2020 RKAP by following up on the mission of the PLN Group portfolio, namely SOLID (Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industries Capabilities, Increasing Profit Contribution, Developing New Edge) among others by having a pilot project with Head of PLN to two layer and AMC: supports the development of Autodispatch and ticketing systems; Zero growth recruitment for Yantek and Manbill jobs to absorb TK whose contracts expire in 2020, makes improvements from the human capital side, as well as augments ListriQu service content and Expanding ListriQu implementation in all provincial capitals on the island of Java in the context of Beyond kWh.

Comparison of Achieved and Targeted Results

Despite many struggles during 2020, the company achieved positive growth in both operational and financial performance. HP increased sales by 10.09%, from Rp2,513.91 billion in 2019 to Rp2,767.68 billion in 2020. Technical Services contributed the most, accounting for 57.41% of the company's revenue structure, or Rp1,588.98 billion.

The total assets of the company were Rp1,208.30 billion, up 24.96% or Rp241.31 billion from the previous year, surpassing the goal of 106.41%. Total assets were dominated by current assets at 71.65% or Rp865.80 billion, in accordance with the Rp5.17 billion rise in Non-Trade Receivables from Related Parties.



Hingga 31 Desember 2020, kinerja operasional HP secara umum berhasil mencapai target yang ditetapkan pada RKAP. HP memiliki kontrak penugasan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) kontrak penugasan pengaman layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi dan Transmisi. Pertumbuhan pelanggan baru pada Distribusi sebesar 29 dari target 29 ULP yang ditetapkan, sehingga pencapaian realisasi atas target untuk indikator adalah 100% sedangkan pertumbuhan pelanggan baru pada Transmisi sebesar 14 dari target 11 ULTG yang ditetapkan, sehingga pencapaian realisasi atas target untuk indikator adalah 110%.

Secara gabungan, pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) pada periode Tahun 2020 sebesar 98,03%, mengalami kenaikan dari kondisi pencapaian SLA 2019 sebesar 97,78%. Pencapaian SLA tertinggi di Region Jawa Tengah dan DIY yaitu 99,99%.

Survei Kepuasan Pelanggan

Perusahaan telah melaksanakan survei terkait kepuasan dari pelanggan sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja dengan mutu layanan dan layanan secara umum, tingkat harga (*billing rate*), administrasi keuangan, ketepatan waktu layanan, dan penanganan keluhan yang diberikan oleh Perusahaan.

Pada tahun 2020, indeks kepuasan pelanggan ter-audit tercatat 71,54 dengan capaian 80,84% dari yang telah ditargetkan. Dimasa mendatang, sesuai dengan arahan Pemegang Saham, Perusahaan akan berfokus dalam mewujudkan *roadmap* layanan kelas dunia dengan menerapkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan bisnis proses secara modern untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan daya saing bisnis inti Jasa O&M transmisi dan distribusi ketenagalistrikan.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Sebagaimana kriteria yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan, skor pencapaian PT Haleyora Power pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 95,51 dan masuk pada kategori "AAA" atau kondisi "SEHAT". Pencapaian masing-masing indikator

As of December 31, 2020, HP's operational performance in general has met the RKAP objectives. HP currently holds 132 (one hundred thirty two) contracts for the provision of security services for Distribution and Transmission Operations and Maintenance. The growth of new subscribers in distribution was 29 out of the 29 ULP goal set, indicating a 100% accomplishment of the indicator's aim, while the growth of new subscribers in transmission was 14 out of the 11 ULTG target set, indicating a 110% achievement of the indicator's target.

The combined Service Level Agreement (SLA) compliance rate for the 2020 period was 98.03%, an improvement over the 97.78% compliance rate for the 2019 SLA. The greatest SLA accomplishment was 99.99% in the regions of Central Java and DIY.

A Survey of Customer Satisfaction

The Company has conducted surveys to determine customer satisfaction as a means of evaluating and improving service quality and performance in relation to the quality of services and services in general, the price level (billing rate), financial administration, responsiveness to customer service requests, and complaint handling provided by the Company.

In 2020, the audited customer satisfaction index was 71.54, exceeding the goal by 80.84%. In the future, the company will focus on delivering a world-class service roadmap by leveraging information technology to integrate modern business processes, thereby increasing customer satisfaction and competitiveness in the company's core business of O&M services, electricity transmission, and distribution.

The Company's Risk-Based Rating

According to the criteria specified in the Minister of SOEs' Decree No. KEP-100/MBU/2002 on the Assessment of the Company's Risk-Based Rating, PT Haleyora Power's accomplishment score in 2020 has risen to 95.51, placing it in the "AAA" category or "HEALTH" condition. The achievements of each indicator are (1)

yaitu (1)Kepuasan Pelanggan sebesar 9,70; (2) Efektifitas Produk dan Proses sebesar 53,96; (3) Fokus Tenaga Kerja sebesar 3,93; (4) Keuangan dan Pasar sebesar 26,76; (5) Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan sebesar 1,16.

Customer Satisfaction scored 9.70 points; (2) Product and Process Effectiveness scored 53.96 points; (3) Workforce Focus scored 3.93 points; (4) Finance and Markets scored 26.76 points; and (5) Leadership, Governance, and Social Responsibility scored 1.16 points for each of the indicators.

Prospek dan Rencana ke Depan

Pada tahun mendatang diperkirakan pandemi COVID-19 masih belum berakhir, namun Pemerintah telah melakukan berbagai upaya terkait Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Proses ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap upaya pemulihan perekonomian dan reformasi sosial sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi nasional.

Future Prospects and Objectives

Although it is anticipated that the COVID-19 pandemic will continue to spread in the next year, the government has undertaken many attempts to address both the COVID-19 pandemic and the national economic recovery (PC-PEN). This approach is intended to enhance public and investor confidence in efforts to rehabilitate the economy and implement social reforms, thus encouraging national economic growth.

Pertumbuhan ekonomi yang positif akan semakin menguatkan sektor ketenagalistrikan. Kebutuhan energi listrik akan meningkat selaras dengan penambahan jumlah penduduk dan Bergeraknya perekonomian. Pemerintah mencanangkan program Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional serta masih melanjutkan program 35.000MW dan tengah mendorong agar perusahaan swasta turut mendukung dalam pemenuhan energi listrik nasional.

Positive economic development will bolster the power industry even more. Electrical energy demand will rise in lockstep with population growth and economic growth. The government established the National Electricity Independence and Resilience initiative, is continuing the 35,000MW programme, and is urging private businesses to assist in achieving national electrical energy independence.

Perusahaan menangkap besarnya peluang usaha yang ada di tahun mendatang dengan penugasan dari perusahaan induk dan menargetkan pertumbuhan pangsa pasar sebesar 72,14% di tahun 2021 serta menargetkan pencapaian SLA sebesar 100% dengan tujuan dapat mengoptimalkan kualitas kinerja keuangan dan operasional HP.

The company capitalises on the significant business opportunities that exist in the coming year through assignments from the parent company and targets 72.14% market share growth in 2021, as well as 100% SLA compliance, with the goal of continuously improving the quality of HP's financial and operational performance.

Perusahaan berkomitmen melaksanakan penugasan PLN dengan sebaik-baiknya untuk memberikan kontribusi penting di dalam meningkatkan kualitas keandalan dan intensitas layanan kepada pelanggan PLN.

The business is dedicated to completing the PLN assignment as efficiently as possible in order to make a significant contribution to PLN customers' service quality, dependability, and intensity.

HP juga memiliki peran penting dalam program *breakthrough* PLN salah satunya adalah *beyond KWh*. Perusahaan telah menetapkan beberapa program kerja strategis terkait pengembangan bisnis melalui program *beyondkwh* dari *Non Captive* antara lain: (ListriQu, CBM, PVR, *Power Quality*). Salah satu rencana yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ListriQu yang bertujuan menjadi solusi bagi pelanggan dan membangun *customer experience*.

HP also plays a critical part in PLN's ground-breaking programmes, one of which goes beyond KWh. Through Non-Captive's beyond kwh initiative, the firm has developed numerous strategic work projects linked to business growth, including the following: (ListriQu, CBM, PVR, Power Quality). One of the goals is to create ListriQu, which will serve as a customer solution and will help improve customer experience. ListriQu is also being developed



ListriQu juga dikembangkan untuk pelanggan industri sehingga meningkatkan pendapatan *beyond kwh* dan membangun kolaborasi bisnis dengan PLN, anak perusahaan PLN dan mitra lainnya.

for industrial clients in order to diversify income streams beyond kwh and foster commercial relationships with PLN, its subsidiaries, and other partners.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perusahaan selalu berkomitmen dalam melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dalam jangka panjang dengan harapan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

Untuk memperoleh gambaran kondisi penerapan GCG, setiap tahun Perusahaan senantiasa melakukan penilaian/*assessment* terkait dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik dalam penerapan GCG, sehingga dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan penyempurnaan di tahun mendatang.

Pada tahun 2020, penerapan GCG PT Haleyora Power mendapatkan predikat "Baik" dengan perolehan skor 83,05. Kriteria pengukuran yang digunakan sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 juni 2012.

Corporate Governance in Practice

The firm has always been dedicated to adopting the principles of Good Corporate Governance (GCG) in order to enhance the company's long-term success and accountability, with the goal of enhancing company value via improved performance and a positive corporate image (good corporate image).

Each year, the company conducts an evaluation of the state of GCG implementation, based on relevant laws and best practices, in order to identify areas that need improvement in the following year.

In 2020, PT Haleyora Power's GCG implementation received an "Excellent" rating of 83.05. The measuring criteria were developed in line with the Minister of SOE's Regulation PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and the Secretary of the Ministry of SOE's Decree SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat Perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap semua pemangku kepentingannya. Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan operasi dan pemeliharaan (*Operation & Maintenance*) jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan sekaligus entitas dari PLN Grup, HP memiliki komitmen penuh untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan membina hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan baik internal dan eksternal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (4).

Corporate Social Responsibility

The pandemic of COVID-19 has no effect on the company's commitment to meeting its corporate social obligation to all of its stakeholders. As a company engaged in the operation and maintenance of electricity transmission and distribution networks (Operation & Maintenance) and as a member of the PLN Group, HP is fully committed to meeting its corporate social responsibility and fostering positive relationships with all stakeholders, both internal and external, as stated previously. governed by the Republic of Indonesia's Government Regulation No.47 of 2012 on the Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies and by the Republic of Indonesia's Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies, article 74 paragraph (4).

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk empati dan solidaritas kepada masyarakat dan lingkungan antara lain melakukan aksi solidaritas ketahanan pangan dampak COVID-19 atau penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat; pemberian santuan kepada anak yatim melalui yayasan atau panti yatim piatu di wilayah kerja PT Haleyora Power baik di kantor pusat maupun di regional; serta membantu dalam pembangunan sarana beribadah di akhir tahun 2020.

Throughout 2020, the Company has engaged in a variety of activities to demonstrate its empathy and solidarity with the community and the environment, including organising solidarity actions for food security in response to COVID-19 or distributing social assistance in the form of basic necessities to the community; making donations to orphans through foundations or orphanages located in the Company's work area; and providing donations to orphans through foundations or orphanages located in the Company's work area.

Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan komposisi keanggotaan Direksi sebagai berikut:

- Pada RUPS Sirkuler yang ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2020, telah diberhentikan secara hormat dengan ucapan terima kasih atas aspirasi dan dedikasi yang telah diberikan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada Sdr. Achmad Taufik Haji dan Sdr. Sutrisno Samad sekaligus mengangkat Sdr. Sulistyio Biantoro sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Sdr. Achmad Abdul Fatah sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan SDM.
- Pada RUPS Sirkuler yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2020, telah diberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada Sdr. Sulistyio Biantoro dan mengangkat Sdr. Purnomo sebagai Direktur Utama.

Changes in the composition of the Board of Directors

Throughout 2020, the company made the following changes to its Board of Directors composition:

- *In the Circular GMS signed on June 19, 2020, it was respectfully dismissed with gratitude for the aspirations and dedication demonstrated, as well as the granting of settlement and release (*acquit et decharge*) to Mr. Achmad Taufik Haji and Mr. Sutrisno Samad. At the same time, it appointed Mr. Sulistyio Biantoro as Acting President Director and Mr. Achmad Abdul Fatah as Acting*
- *In the Circular GMS dated December 10, 2020, it was politely dismissed with appreciation for his efforts and ideas, as well as giving Mr. Sulistyio Biantoro settlement and release (*acquit et decharge*), and appointing Mr. Purnomo as President Director.*

Sehingga pada 31 Desember 2020 posisi Direksi adalah sebagai berikut:

Purnomo : Direktur Utama
Abdul Fatah Nasution : Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Sinung Triwulandari : Direktur Operasi

As a result, as of December 31, 2020, the Board of Directors' seats are as follows:

*Purnomo : President Director
Abdul Fatah Nasution : Director of Finance and Human Resources
Sinung Triwulandari : Director of Operations*



Apresiasi

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Segegap Direksi memberikan apresiasi kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi tinggi, sehingga Perusahaan mampu melewati tantangan tersebut dengan capaian kinerja yang positif. Apresiasi juga kami berikan kepada Dewan Komisaris atas kerjasama, nasihat dan rekomendasi yang diberikan, sehingga Direksi mampu melakukan pengelolaan Perusahaan dengan baik. Sekaligus ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham dengan kepercayaan penuh yang telah diberikan hingga Perusahaan dapat terus melaju menghadapi berbagai tantangan dengan meraih peluang positif bagi pertumbuhan kinerja yang optimal.

Atas nama Perusahaan, Direksi juga memberikan apresiasi kepada seluruh konsumen dan mitra kerja atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dan kepercayaan yang telah diberikan pada Perusahaan. Kami senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Appreciation

2020 is a year fraught with difficulties. The whole Board of Directors expresses gratitude to all workers for their commitment to assisting the company in overcoming these obstacles via good performance accomplishments. Additionally, we express our gratitude to the Board of Commissioners for their cooperation, guidance, and suggestions that enabled the Board of Directors to run the company effectively. Moreover, we would like to express our gratitude to the shareholders for their unwavering confidence in the company, which enables it to continue overcoming different obstacles and grabbing good chances for optimum performance development.

The Board of Directors further expresses gratitude on behalf of the Company to all customers and business partners for the long-standing relationship and confidence placed in the Company. We are always striving to enhance the quality of collaboration to our mutual advantage.

Jakarta, Juli 2021

Atas Nama Direksi

In the capacity of a member of the Board of Directors

Purnomo
Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT HALEYORA POWER

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ABOUT THE RESPONSIBILITIES OF THE 2020 ANNUAL REPORT OF PT HALEYORA POWER

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Haleyora Power tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2020 annual report of PT Haleyora Power have been presented in their entirety and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of this Annual Report. This statement is duly made in all integrity.

Jakarta, Juli 2021
Dewan Komisaris
The Board of Commissioners



Bima Putrajaya
Komisaris Utama
President Commissioner



Purnama T. Sianturi
Komisaris
Commissioner



SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT HALEYORA POWER

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS ABOUT THE RESPONSIBILITIES OF THE 2020 ANNUAL REPORT OF PT HALEYORA POWER

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Haleyora Power tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2020 annual report of PT Haleyora Power have been presented in their entirety and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of this Annual Report. This statement is duly made in all integrity.

Jakarta, Juli 2021

Direktur

The Board of Directors

Purnomo

Direktur Utama
President Director

Abdul Fatah Nasution
Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR

Sinung Triwulandari
Direktur Operasi
Director of Operations



Bima Putrajaya
Komisaris Utama
President Commissioner

Purnama T. Sianturi
Komisaris
Commissioner



Abdul Fatah Nasution
Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR

Sinung Triwulandari
Direktur Operasi
Director of Operations

Purnomo
Direktur Utama
President Director



Perusahaan melakukan sinergi dengan anak perusahaan lain yang bergabung dalam PLN Grup

The business collaborates with other PLN Group companies



03

Profil Perusahaan
Company Profile

Identitas Perusahaan

Company Identity



Nama PT Haleyora Power

Name

Nama Panggilan HP

Nickname

Sektor Usaha Ketenagalistrikan

Business Sector Electricity

Bidang Usaha

Menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan yang meliputi:

1. Survei Teknis Perluasan Jaringan Distribusi, Pelayanan Pelanggan, Pembangunan dan *Updating* Data Jaringan Distribusi.
2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Transmisi dan Distribusi, yang mencakup:
 - a) Gardu Induk
 - b) Gardu Distribusi
 - c) Jaringan Tegangan Tinggi (JTT)
 - d) Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
 - e) Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
 - f) Sambungan Rumah (SR)
 - g) Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
 - h) Penyediaan Material Pemeliharaan

Business Line

Providing operation and maintenance services including:

1. *Technical survey of distribution networks expansion, customer service, construction and updating of distribution network data.*
2. *Operation and maintenance of transmission and distribution installations, including:*
 - a) *Substation*
 - b) *Distribution Substation*
 - c) *High-Voltage Network (JTT)*
 - d) *Medium-Voltage Network (JTM)*
 - e) *Low-Voltage Network (JTR)*
 - f) *Household Connection (SR)*
 - g) *Metering and Limiting Device (APP)*
 - h) *Maintenance Materials Provision*



Tanggal Pendirian 18 Oktober 2011

Date of Establishment October 18, 2011



Dasar Hukum Pendirian

- Akta Pendirian No.36, tanggal 18 Oktober 2011 Notaris Muhammad Hanafi, S.H.
- Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-51226.AH.01.01 tanggal 21 Oktober 2011.
- Akta No.104 tanggal 27 November 2017 Notaris Muhammad Hanafi, S.H.
- Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0196200 tanggal 30 November 2017.

Establishment Legal Basis

- *Deed of Establishment No.36, dated October 18, 2011 Notary Muhammad Hanafi, S.H.*
- *Approval No.AHU-51226.AH.01.01 issued October 21, 2011 from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*
- *Notary Muhammad Hanafi, S.H., Deed No.104 dated November 27, 2017.*
- *Approval No.AHU-AH.01.03-0196200 issued November 30, 2017 from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*



Kepemilikan

1. PT PLN (Persero) sebanyak 99.999 lembar saham atau sebanyak 99,99% saham, dan
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar saham atau sebesar 0,01%.

Ownership

1. PT PLN (Persero) with 99,999 shares or 99,99% shares, and
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan of PT PLN (Persero) with 1 shares or 0.01%

Modal Dasar

Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau 100.000 lembar saham

Authorized Capital

100 billion rupiahs (one hundred billion rupiahs) or 100,000 shares



Jumlah Pegawai

133 orang

Total Employees

133 people



Kantor Pusat

Kindo Square, Blok A15–A16

Head Office

Jalan Duren Tiga Raya No.101, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan

Tel. : (021) 7919 2517

Fax. : (021) 7919 2516



Email

kontak@haleyorapower.co.id



Situs Perusahaan

www.haleyorapower.co.id

Website



Facebook

PT Haleyora Power (fan page)



Instagram

@haleyorapower



Wilayah Operasi

Operational Area

- 7 Region
- 60 Area/APP/UPT

Jejak Langkah Milestones

Didirikan pada tanggal 18 Oktober 2011

- Penugasan bidang O&M Transmisi dan Distribusi berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) (Perdir) No.459.K/DIR/2012.
- Mendirikan perusahaan patungan PT EPI dengan PT Pelindo 2.

- Mengakuisisi PT MIU.
- Mengerjakan proyek di Salatiga (*Pilot Project 2 Layer*), SBU, Majalaya, Padang.
- Menerima Perdir No.734. DIR/2013 tentang Penugasan Layanan O&M Transmisi dan Distribusi.
- Perubahan nama dari MIU menjadi HPI.
- Mengerjakan proyek eksisting di Kalimantan, Jawa, Sumatra, dan Papua.

- Perjanjian kerja sama (PKS) antara PLN dan HP (037.P.J.040/DIR/2014).
- Implementasi Perdir 734. DIR/2013.
- Implementasi PKS di Jawa Timur dan DKI.
- Migrasi proyek ex HPI di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.
- Proyek di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten dimigrasi ke HPI.
- Menjalankan proyek eksisting (lelang/penunjukan).



On October 18, 2011, the company was founded.

- Assignment of O&M Transmission and Distribution based on PT PLN (Persero) (Perdir) Regulation No. 459.K/DIR/2012 of the Board of Directors of PT PLN (Persero) (Perdir).
- PT EPI and PT Pelindo 2 formed a joint venture business.

- PT MIU was acquired.
- Salatiga (Pilot Project 2 Layer), SBU, Majalaya, and Padang are all locations where we are currently working on a project.
- Receiving Perdir No.734. DIR/2013 relating to the Assignment of Transmission and Distribution O&M Services.
- MIU is renamed HPI.
- Currently assisting with ongoing projects in Kalimantan, Java, Sumatra, and Papua.

- PLN and HP have entered into a cooperation agreement (PKS) (037.P.J.040/DIR/2014).
- Implementation of the Board of Director's Regulation No.734. DIR/2013.
- East Java and DKI implementations of PKS.
- Ex-HPI project migration to PLN Distribution in West Java and Banten.
- HPI was used to transfer projects from PLN Distribution West Java and Banten to HPI.
- Implementing ongoing initiatives (auction/appointment).



- Perluasan di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI.
- Persiapan layanan *end-to-end*.
- Menjalankan proyek eksisting (lelang/penunjukan).
- Perluasan di Sulawesi dan Nusa Tenggara.

- Perluasan di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, dan Banten
- Proyek percontohan layanan *end-to-end* distribusi di Sidoarjo, Semarang, Sumatra.
- Sosialisasi layanan *end-to-end* di Jawa dan Sumatra.
- Menjalankan proyek eksisting (lelang/penunjukan).
- Perluasan di Ambon, Kalimantan, Sulawesi.
- Migrasi proyek ke penugasan HP dan PT PLN Tarakan.

Meluncurkan produk layanan digital ListriQu

- Penandatanganan Perjanjian Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT Cogindo DayaBersama
- *Launching* Program SEMATA Zero Accident Haleyora Power
- Peresmian *Command Center* dan Layanan *Borderless* Zona Semarang
- *Launching* ListriQu di Kota Palembang dan Pekanbaru

2015

2016-2018

2019

2020

- PLN Distribution Expansion in West Java and Banten, Central Java, East Java, and DKI.
- Configuration of an end-to-end service.
- Implementing ongoing initiatives (auction/appointment).
- Sulawesi and Nusa Tenggara expansion.

- Expansion of operations in Central Java, East Java, the DKI, and Banten
- In Sidoarjo, Semarang, Sumatra, a pilot project for end-to-end distribution services is underway.
- Dissemination of services from start to finish in Java and Sumatra.
- Implementing ongoing initiatives (auction/appointment).
- Expansion of operations in Ambon, Kalimantan, and Sulawesi.
- Migration of projects to HP and PT PLN Tarakan assignments.

Launched the digital service ListriQu

- A Memorandum of Understanding (MoU) was signed with PT Cogindo DayaBersama.
- SEMATA Zero Accident Haleyora Power Program Launch
- Inauguration of the Command Centre and Borderless Service in the Semarang Zone
- ListriQu launches in Palembang and Pekanbaru



Sejarah Singkat

Company Brief

PT Haleyora Power (selanjutnya disebut HP) berdiri pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan Akta Pendirian No.36, tanggal 18 Oktober 2011 Notaris Muhammad Hanafi, S.H. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai induk perusahaan mendirikan HP dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik PT Aneka Tambang (Antam) dengan membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik 260 MW (PLTU 3x30 MW dan PLTD 10x17 MW) untuk memasok listrik bagi kegiatan penambangan dan *smelter* PT Antam di Maluku Utara. Rencana tersebut tidak terealisasi sehingga PLN mengarahkan HP untuk mengelola bisnis penjualan tenaga listrik (ritel).

Pada tanggal 14 September 2012, Direksi PLN mengeluarkan keputusan No.459.K/DIR/2012 tentang Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi Ketenagalistrikan dan mulai menugaskan HP untuk melaksanakan layanan operasi dan pemeliharaan (*operation & maintenance/O&M*) transmisi dan distribusi tenaga listrik, bekerja sama dengan unit-unit PLN Wilayah. Pada tahun yang sama juga HP menjalin kerjasama dengan PT Pelindo II untuk mendirikan perusahaan patungan PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) yang bidang usahanya adalah menyalurkan dan menjual listrik kepada *tenant* di kawasan Pelindo II dengan skema penjualan listrik secara *bulk* dan tarif premium B2B (*business to business*). HP memegang 45% saham PT EPI.

Di tahun berikutnya HP mengakuisisi PT Mitra Insan Utama (MIU) untuk kemudian mengubah namanya menjadi PT Haleyora Powerindo (HPI) berdasarkan Akta Risalah Rapat No.17 tanggal 23 Januari 2013. HPI bergerak dalam bidang penyediaan tenaga kerja, meliputi layanan Teknik untuk operasi dan pemeliharaan pembangkit dan distribusi, layanan *non-teknik* (*buliding management, billing management, industrial cleaning, integrated document management system (IDMS), enterprise asset management (EAM)*).

Sepanjang tahun 2017, HP telah menyelesaikan pekerjaan jasa O&M yaitu 62 kontrak penugasan pengaman layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi yang terdapat pada 6 (enam) Distribusi dan 3 (tiga) Wilayah meliputi 38 (tiga puluh delapan) Area dan 4 (empat) Area Pengatur Distribusi. Pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi Perusahaan untuk mencapai kinerja yang semakin baik. Ditahun yang sama, HP mulai menata ulang rencana kerja dan anggaran serta rencana jangka panjang perusahaan secara menyeluruh dengan memperhatikan zonasi wilayah kerja yang

PT Haleyora Power (hence referred to as HP) was founded on October 18, 2011 with the Deed of Establishment No.36, dated October 18, 2011 Notary Muhammad Hanafi, S.H. As the holding company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) established HP with the goal of meeting the electricity needs of PT Aneka Tambang (Antam) by building and operating a 260 MW power plant (PLTU 3x30 MW and PLTD 10x17 MW) to supply electricity for PT Antam's mining and smelter activities in North Maluku. Because the proposal did not come to fruition, PLN delegated management of the energy sales business to HP (retail).

On September 14, 2012, the PLN Board of Directors issued Decree No.459.K/DIR/2012 concerning Securing Operation and Maintenance Services for Electricity Transmission and Distribution, and HP was assigned to perform operation and maintenance (O&M) services for electricity transmission and distribution in collaboration with regional PLN units. In the same year, HP partnered with PT Pelindo II to create PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI), a joint venture firm whose line of business is to distribute and sell energy to tenants in the Pelindo II region via a bulk electricity sales scheme and premium B2B services (business to business). PT EPI is 45% owned by HP.

Based on the Deed of Minutes of Meeting No.17 dated January 23, 2013, HP purchased PT Mitra Insan Utama (MIU) and changed its name to PT Haleyora Powerindo (HPI) the following year. HPI provides personnel, including engineering services for generator and distribution operation and maintenance, non-technical services (building management, billing administration), industrial cleaning, integrated document management system (IDMS), and enterprise asset management (EAM).

Throughout 2017, HP performed O&M service work, namely 62 contracts for Distribution Operations and Maintenance services in 6 (six) Distributions and 3 (three) Regions encompassing 38 (thirty-eight) Areas and 4 (four) Distribution Management Areas. This accomplishment serves as incentive for the company to improve its performance. In the same year, HP began to reorganise the work plan and budget, as well as the company's overall long-term plan, by taking into account the zoning of the work area as determined by PLN in the Board of Directors Regulation No.0030.P/



telah ditetapkan oleh PLN dalam Peraturan Direksi No.0030.P/DIR/2017 tentang Perubahan Peraturan Direksi No.734.K/DIR/2013 tentang Kebijakan Zonasi/Regionalisasi Wilayah Operasi PT Haleyora Power dan PLN Tarakan di mana HP ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja Sumatra, Jawa dan Bali, sedangkan PT PLN Tarakan mengelola wilayah kerja Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pada tahun 2018, Perusahaan fokus pada penguatan kompetensi inti, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas dan cakupan layanan operasi dengan mulai mengimplementasi "best practice O&M end-to-end process distribution" dan penyempurnaan proses bisnis, berpedoman pada standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Bentuk komitmen Perusahaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan adalah dengan meluncurkan aplikasi ListrikQu pada pertengahan tahun 2020. Fitur ListrikQu ada didalam aplikasi *New PLN Mobile* dan menjawab kebutuhan pelanggan yang ingin melakukan modifikasi atau perubahan instalasi listrik di rumah, gedung atau kantor. Mengusung *tagline Quick and Quality Solution*, ListrikQu menyediakan layanan instalasi listrik yang cepat dengan petugas yang memiliki sertifikasi kompetensi kelistrikan, kualitas material yang memenuhi standar SNI, harga yang transparan serta produk yang bergaransi.

Terobosan penting lain yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2020 adalah penandatanganan Perjanjian Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan PT Cogindo DayaBersama dalam hal kerjasama penyediaan jasa pendukung pemeliharaan dan pengoperasian dalam upaya pemenuhan tenaga kerja *project* yang akan merambah di kancah Internasional.

Pertumbuhan Perusahaan semakin pesat dengan bertambahnya wilayah operasional di akhir tahun 2020, yang terdiri dari 7 *region* dan 60 *area/APP/UPT* yang tersebar di Sumatra dan Jawa. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan akan semakin kuat dan berkomitmen untuk menjadi aset operator berstandar kelas dunia dan meraih pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

DIR/2017 concerning Amendment to the Board of Directors Regulation No.734.K/DIR/2013 concerning the Zoning Policy/Regionalisation of the Operational Areas of PT Haleyora Power and PLN Tarakan in which HP is appointed to manage the working areas of Sumatra, Java and Bali, while PT PLN Tarakan manages the working areas of Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua.

In 2018, the Company concentrated on enhancing core competencies, expanding human resources (HR), and increasing the quality and breadth of operational services by launching "best practise O&M end-to-end process distribution" and upgrading business processes driven by system standards. ISO 9001:2015 quality management system.

The ListrikQu application will be launched in mid-2020 as part of the Company's commitment to provide the finest service possible to consumers. The ListrikQu function, which is available in the New PLN Mobile application, caters to clients who wish to alter or replace the electrical systems in their homes, buildings, or workplaces. ListrikQu, with the slogan Quick and Quality Solution, offers quick electrical installation services with officers who have electrical competence certification, material quality that satisfies SNI requirements, fair pricing, and guaranteed goods.

Another significant milestone achieved by the Company in 2020 was the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with PT Cogindo DayaBersama regarding cooperation in providing maintenance and operation support services in an effort to fulfil project workforce that will penetrate the international arena.

With the addition of operating areas by the end of 2020, the Company's development will accelerate, with 7 regions and 60 areas/APP/UPT distributed throughout Sumatra and Java. In accordance with this, the Company will become stronger and more dedicated to being a world-class asset operator and attaining long-term development.

Bidang Usaha

Business Line

Bidang Usaha Sesuai dengan Anggaran Dasar Terakhir dan Dijalankan pada Tahun Buku

Business Sectors as Defined in the Most Recent Articles of Association and as Performed in the Fiscal Year

Maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pembangunan, dan jasa, yaitu terdiri dari:

According to Article 3 of the Articles of Association, the Company's goals and objectives are to do business in the areas of industry, commerce, development, and services, which include the following:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir Based on the Most Recent Articles of Association

1. Menjalankan usaha di bidang industri pembangkitan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran, serta usaha-usaha lain terkait ketenagalistrikan; industri mesin listrik dan perlengkapannya; fabrikasi peralatan listrik dan elektronik; daur ulang peralatan listrik dan elektronik; pembangkitan listrik tenaga batu bara, minyak bumi, gas, air, panas bumi dan *co-generation*; serta kegiatan usaha terkait.

Running a business in the power generation industry, which includes generating, selling, distributing, and other businesses related to electricity; industrial electrical machinery and equipment; electrical and electronic equipment fabrication; recycling of electrical and electronic equipment; coal, oil, gas, water, geothermal and co-generation power generation; and related business activities

2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor-impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik, meliputi perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal dan interinsular, baik atas tanggungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat; dan bertindak sebagai pemasok, leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan, atau peragenan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Conducting business in the trade sector, including import-export and trading of electrical and electronic equipment, as well as inter-island/regional as well as local and inter-island import and export trade, both for their own account and for the account of other people or legal entities on a commission or mandated basis; and acting as suppliers, suppliers, wholesalers, distributors, commissioners, representatives, or agents, both domestically and abroad.

3. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, yang meliputi pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik; serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Conducting business in the field of development, which includes installing, maintaining, and developing technology that supports the provision of electricity; and managing and utilising natural resources and other energy sources for the benefit of electricity, in accordance with applicable laws and regulations.

4. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; sertifikasi layak operasi sistem kelistrikan (gardu induk listrik, transmisi, dan distribusi); sertifikasi mutu peralatan kelistrikan hasil produk dalam negeri; sertifikasi sistem manajemen mutu; konsultasi bidang kelistrikan, antara lain meliputi perencanaan perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana; konsultasi bidang listrik elektronika, pengujian dan penerapan alat listrik, serta kegiatan usaha terkait lainnya.

Conducting business in the field of electrical power installation inspection and testing; certifying the proper operation of electrical systems (substations, transmission, and distribution); certifying the quality of electrical equipment manufactured by domestic manufacturers; certifying quality management systems; consulting in the field of electricity, including planning for housing, office buildings and facilities and infrastructure; consulting in the field of electrical electronics, testing and application of electrical equipment, as well as other related business activities.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat ini

Current Business Activities

Menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan yang meliputi:

Providing operation and maintenance services including:

1. Survei teknis perluasan jaringan distribusi, Pelayanan pelanggan, Pembangunan dan *updating* data jaringan distribusi.

1. *Technical survey of distribution network expansion, customer service, construction and updating of distribution network data.*



2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Transmisi dan Distribusi, yang mencakup:

- Gardu Induk
- Gardu Distribusi
- Jaringan Tegangan Tinggi (JTT)
- Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
- Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
- Sambungan Rumah (SR)
- Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
- Penyediaan Material Pemeliharaan

2. Operation and Maintenance of Transmission and Distribution Installation, including:

- Substation
- Distribution Substation
- High-Voltage Network (JTT)
- Medium-Voltage Network (JTM)
- Low-Voltage Network (JTR)
- Household Connection (SR)
- Metering and Limiting Device (APP)
- Maintenance Materials Provision

Produk dan Layanan yang Diberikan

Products and Services

HP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik dengan wilayah operasional Jawa dan Sumatra. Dalam menjalankan operasional tersebut HP menyusun *catalogue service* sebagai panduan kepada pelanggan sebagai berikut:

HP's primary business sector is as a service provider for energy transmission and distribution, having operations throughout Java and Sumatra. HP has developed the following service catalogue to assist customers in carrying out these operations:

| JENIS PRODUK/JASA TYPES OF PRODUCTS AND SERVICES | PROBIS PROBIS | SERVIS SERVICES |
|---|-----------------------------|--|
| DISTRIBUTION | OPERASI OPERATION | OPERATOR/COMMAND CENTRE YANDAL & PATROL CORRECTIVE ACTION |
| | PEMELIHARAAN MAINTENANCE | PRAKONDISI ROW HAR ROW HAR JTM, JTR & SR HAR JAR & GARDU HAR KUBIKEL HAR METER SOLUTION |
| NIAGA COMMERCE | MANAGEMENT BILLING | PDIL CATER |
| | REVENUE ASSURANCE | PENAGIHAN PDP & REKON ENERGI HAR GARDU HAR METER P2TL |
| TRANSMISI TRANSMISSION | OPHAR | OP SEL 20 KV HAR SEL 20 KV HAR INSTRUMEN |
| | OPHAR TT | OP SEL 150 KV GROUND PATROL TRANS HAR SEL 150 KV HAR INSTRUMENT HAR SWITCH YARD 150 KV |

Logo Perusahaan

Company's Logo



Makna Logo Logo Interpretation

- Filosofi dari logo PT Haleyora Power adalah sebuah bentuk yang sangat unik karena secara keseluruhan menggabungkan antara *logogram* dengan *logotype*-nya dalam satu komposisi logo yang sarat makna, mengambil ide dari putaran turbin yang merupakan *Power* dari *Energy Solution* milik PT Haleyora Power .
- Dimulai dari logogram, siratan berupa tiga garis yang digabungkan menjadikan sebuah Sinergi dalam pelayanan Energi listrik (*Electricity*) yang mengedepankan Kualitas, Kehandalan dan *Eco Friendly*. Siratan ini merupakan gabungan dua huruf kapital yaitu E dan S yang merupakan singkatan dari *Energy Solution* yang memang menjadi motto dari Haleyora Power juga berarti perputaran yang selalu bergerak dan terus bergerak secara Simultan menuju puncak kemajuan masa depan. Makna selanjutnya dari siratan E dan S ini adalah suatu keseimbangan dengan alam *Eco Friendly*, *Elegant* dan *Simple* tapi tetap *Safety*.
- *The logo philosophy of PT Haleyora Power is very unusual in that it blends the logogram and the logotype into a meaningful logo composition, using the concept of turbine rotation to represent the Power of Energy Solution held by PT Haleyora Power.*
- *Beginning with the logogram, the three lines are joined to form a synergy in the service of electrical energy (Electricity) that places a premium on Quality, Reliability, and Environmental Friendliness. This phrase is a mixture of two capital letters, E and S, which stand for Energy Solution, which is the slogan of Haleyora Power. It also refers to a cycle that is always moving and continues to advance Simultaneously toward the pinnacle of future development. The following interpretation of these E and S suggestions is a balancing of Eco-Friendly, Elegant, and Simple natures while maintaining Safety.*

Warna Korporat Corporate Colour

- Warna Biru melambangkan inovasi, teknologi, pertumbuhan, kesungguhan, kepercayaan, kearifan, luas dan harmonis dengan alam .
- Warna Jingga yang merupakan perpaduan harmonis antara merah dan kuning melambangkan keberanian, kekuatan, energi, kedinamisan, kehangatan, harapan dan optimisme.
- *The logo philosophy of PT Haleyora Power is very unusual in that it blends the logogram and the logotype into a meaningful logo composition, using the concept of turbine rotation to represent the Power of Energy Solution held by PT Haleyora Power.*
- *Orange, a harmonic combination of red and yellow, represents bravery, power, energy, vitality, warmth, hope, and optimism.*

Tipe Huruf Font Type

- Penggunaan tipografi sederhana yaitu type font Corbel selain mudah terbaca dan mudah diingat juga melambangkan kejujuran tanpa meninggalkan citra perusahaan yang kokoh. Bentuk tulisan huruf kecil italic melambangkan organisasi yang modern dan dinamis, maju, berfikiran terbuka, serta menjaga keseimbangan hamonisasi.
- *The choice of straightforward typography, namely the Corbel typeface, not only makes the text easy to read and recall, but also represents honesty without evoking a strong corporate image. The italic lowercase writing represents a progressive and dynamic company that is progressive, open-minded, and maintains a harmonious balance.*



Moto Perusahaan

Company Motto



Safety

Perusahaan memastikan tercapainya *Zero Accident* dalam seluruh lingkup pekerjaan.
: *The business is committed to achieving a zero-accident rate throughout its full area of operations.*



Integrity

Perusahaan memastikan integritas/kejujuran setiap Tenaga Kerja dan Organ Perusahaan melakukan kegiatan yang mengedepankan Integritas perilaku, Integritas penyampaian data dan proses bisnis yang senantiasa berdasarkan *Good Corporate Governance* (GCG).

The corporation guarantees the integrity/honesty of each employee and corporate organ in order to do business in a manner that prioritises behavioural integrity, data submission integrity, and business procedures that are always consistent with Good Corporate Governance (GCG).



Quality

Perusahaan memastikan pengelolaan *Project* berbasis kepada *Work Service Resource Management* dan menjamin tercapainya kualitas pekerjaan berdasarkan proses bisnis yang *excellence* berbasis Teknologi Informasi, sehingga perusahaan menjadi *Trend Setter* dan *Quality Setter*.

The firm guarantees that projects are managed using Work Service Resource Management and that high-quality work is produced using superior business processes supported by information technology, enabling the organization to become a Trend Setter and a Quality Setter.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan

Objective, Target, and Strategy of the Company

Tujuan Perusahaan

Objective Company

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah untuk berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pembangunan dan jasa.

The aim and objective of this Company, as stated in the Articles of Association, is to strive in the sectors of industry, commerce, development, and services.

Sasaran Perusahaan

Target of the Company

Sasaran yang ingin dicapai Perusahaan dalam rangka menuju Visi Perusahaan yang ditetapkan merupakan sasaran utama yang pencapaiannya dilakukan dengan tahapan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Adapun sasaran setiap tahun yang akan dicapai HP dijabarkan lebih lanjut dalam *Roadmap* Menuju Visi Perusahaan, sebagaimana uraian berikut:

The primary objective of the Corporate is to realize the Company Vision. This objective is accomplished via the phases of the long-term company strategy (RJPP) HP's yearly targets, as detailed in the Roadmap to the Corporate Vision, are as follows:

High Level Strategy Roadmap

High Level Strategy Roadmap

| Stabilization | | Excellent Performance | | Trend Setter |
|---|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. <i>Training Leaders Competencies</i> | 1. <i>Training Leaders Competencies</i> | 1. <i>Innovation</i> | 1. <i>Innovation</i> | 1. <i>Innovation</i> |
| 2. <i>End to end 50%</i> | 2. <i>End to end 50%</i> | 2. <i>End to end 100%</i> | 2. <i>Sertifikasi TK 100%</i> | 2. <i>Sertifikasi TK 100%</i> |
| 3. <i>Revenue Growth 15%</i> | 3. <i>Revenue Growth 20%</i> | 3. <i>Revenue Growth 15%</i> | 3. <i>Revenue Growth 15%</i> | 3. <i>Revenue Growth 15%</i> |
| 4. <i>GCG = 85</i> | 4. <i>GCG = 87</i> | 4. <i>GCG = 88</i> | 4. <i>GCG = 90</i> | 4. <i>GCG = 91</i> |
| 5. <i>OFI KPKU = SA 376</i> | 5. <i>KPKU = 425</i> | 5. <i>OFI KPKU = SA 476</i> | 5. <i>KPKU = 500</i> | 5. <i>OFI KPKU = SA 576</i> |
| 6. <i>HP Go Mobile 50%</i> | 6. <i>HP Go Mobile 50%</i> | 6. <i>HP Go Mobile 100%</i> | 6. <i>HP Go Mobile 100%</i> | 6. <i>HP Go Mobile 100%</i> |

| Perspektif BSC BSC Perspective | Pandangan Industri Industry Foresight | Gap AS IS Gap AS IS | Sasaran Strategis Strategic Target | Program Prioritas Priority Program | KPI KPI |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Pelanggan | <ul style="list-style-type: none"> Tuntutan pelanggan akan kecepatan dan kualitas layanan semakin tinggi Daya tawar pelanggan akan semakin tinggi seiring dengan UU perlindungan konsumen | CSI HP < CSI LEADING PRACTICE | <i>Customer Service Excellence</i> | <ul style="list-style-type: none"> Membangun standar perilaku layanan | CSI |
| Customers | <ul style="list-style-type: none"> <i>Customer expectations for service speed and quality are increasing.</i> <i>Customers' negotiating power will be enhanced in accordance with consumer protection legislation.</i> | CSI HP < CSI LEADING PRACTICE | <i>Customer Service Excellence</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Establishing norms for service behaviour</i> | CSI |
| Produk dan Layanan | <ul style="list-style-type: none"> Layanan O&M Ketenagalistrikan tumbuh seiring dengan 35.000 MW Tuntutan kualitas produk O&M Ketenagalistrikan berbasis K3 Terbukanya layanan jasa O&M Ketenagalistrikan | Bersifat Reaktif Kolektif | <i>Product Development</i> | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan produk baru dengan optimalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan | <i>End to End Services</i> |
| Products and Services | <ul style="list-style-type: none"> <i>Electricity O&M services expand in lockstep with the addition of 35,000 MW.</i> <i>Demand for electricity generated by operations and maintenance</i> <i>Product quality in O&M</i> <i>Electricity O&M services are now available.</i> | Collective Reactive | <i>Product Development</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>By maximising and exploiting information technology, new products may be developed.</i> <i>Development</i> | <i>End to End Services</i> |



| Perspektif BSC BSC Perspective | Pandangan Industri Industry Foresight | Gap AS IS Gap AS IS | Sasaran Strategis Strategic Target | Program Prioritas Priority Program | KPI KPI |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Proses Bisnis Internal | <ul style="list-style-type: none"> Tuntutan Layanan berbasis IT semakin meningkat Tuntutan standardisasi layanan berdasarkan | Bisnis seperti biasa <i>Business as Usual</i> | <i>Probis Excellent</i> | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan pada Standardisasi Bisnis Proses O&M Ketenagalistrikan Membangun layanan modern berbasis Menyusun perencanaan kerja berbasis | <i>HP Go Mobile</i> |
| <i>Internal Business Process</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Demands for IT-based services are increasing</i> <i>Demands of Zero Accident</i> <i>Demands of standardization services based of best practice</i> | | <i>Probis Excellent</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Strengthening the Standardization of Electricity O&M Process Business</i> <i>Build modern services based on</i> <i>Develop work-based planning</i> | <i>HP Go Mobile</i> |
| Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> Tuntutan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Tuntutan sikap dan perilaku layanan yang ekselen | Bersifat secara Personalia | HCM | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan pengembangan Organisasi melalui <i>alignment</i> dengan Organisasi Induk dan Anak Perusahaan Pengembangan <i>training</i> Pengembangan kompetensi pengelolaan SDM Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja | Sertifikasi HCR & OCR |
| <i>Human Resources</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Demands of Competence and Profesionalism Human Resources</i> <i>Demand for excellent service attitudes and behaviors</i> | <i>Personnel</i> | <i>HCM</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Reinforcement and development organization through alignment with Main Organization and Subsidiaries</i> <i>Development of Leadership training</i> <i>Development competence of management human resources</i> <i>Conducting labor training and certification</i> | <i>Certification HCR & OCR</i> |
| Keuangan dan Pasar | <ul style="list-style-type: none"> Pasar semakin terbuka dan persaingan industri O&M semakin ketat Tuntutan efisiensi dan peningkatan laba dari pasar non-captive | Fokus di Pasar Captive | Penetrasi Pasar | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan potensi Pengukuran Kinerja berbasis Implementasi EDP terkait pada perbaikan SCM | <i>End to End Service</i> |
| <i>Finance and Market</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Market is increasingly open and O&M industry competition is increasingly tigh</i> <i>Demands for efficiency and profit growth from non-captive market</i> | <i>Focus on Market Captive</i> | <i>Market</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Do the business intelligence potency non captive</i> <i>Leading industry based performance measurement</i> <i>Implementation EDP related to repair SCM</i> | <i>End to End Service</i> |

| Perspektif BSC BSC Perspective | Pandangan Industri Industry Foresight | Gap AS IS Gap AS IS | Sasaran Strategis Strategic Target | Program Prioritas Priority Program | KPI KPI |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|------------|
| Kepemimpinan | <ul style="list-style-type: none"> Tuntutan transparansi dan GCG dalam pengelolaan bisnis Diperlukan pemimpin masa depan yang kompeten, visioner, berintegritas dan menjadi panutan | Kepemimpinan belum tumbuh | <i>Visionary Integrity Leadership</i> | <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kepemimpinan di seluruh level Pelatihan Pembinaan | GCG KPKU |
| Leadership | <ul style="list-style-type: none"> <i>Transparency and GCG demands in business management</i> <i>Future leaders who are competent, visionary, integrity and be a role model</i> | <i>Grass Road leadership hasn't grow yet</i> | <i>Visionary Integrity Leadership</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Leadership coaching at all stages</i> <i>Teamwork coaching</i> <i>Mental Workforce coaching</i> | GCG KPKU |

Strategi Perusahaan

Strategy of the Company

Berdasarkan hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat* (SWOT) yang dituangkan dalam matriks *Threat, Opportunity, Weakness, Strength* (TOWS) maka HP menetapkan 6 (enam) Strategi Utama sesuai dengan RJP di atas yaitu:

- Performance Improvement*, dalam rangka menjawab tantangan yang terkait tuntutan profesionalisme dalam standar layanan dan penerapan MEA.
- Product Development and Diversification*, dalam rangka mengoptimalkan kekuatan internal untuk meraih peluang pasar *non captive*.
- Human Capital Management Excellent*, dalam rangka memenuhi HCR & OCR guna meningkatkan profesionalisme dan kepuasan tenaga kerja.
- Penetrasi Market Non Captive*, dalam rangka peningkatan laba Perusahaan.
- Business Process Excellent*, dalam rangka menyiapkan diri untuk menjadi *leader practice* di bidang O&M sistem ketenagalistrikan dan serta pengelolaan *management building* dan *back office*.
- Customer Service Excellent*, dalam rangka memenuhi tuntutan profesionalisme standar layanan dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Based on the analysis results of *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat* (SWOT) as stated in the matrix *Threat, Opportunity, Weakness, Strength* (TOWS) that HP stipulates 6 (six) Main Strategies in accordance with the RJP above, which are:

- Performance Improvement*, in answering the challenges related to the demands of professionalism in service standards and MEA application.
- Product Development and Diversification*, in optimizing the internal power to reach *non-captive market opportunities*.
- Human Capital Management Excellent*, in order to meet HCR & OCR in improving professionalism and job satisfaction.
- Non-Captive Market Penetration*, in order to increase profit of the Company.
- Business Process Excellent*, in order to prepare to be the *leader practice* in the sector of O&M in the electricity system and *management building and back office management*.
- Customer Service Excellent*, in order to meet the demands of professional service standards in encountering free market competition.



Visi dan Misi Perusahaan

The Company's Vision and Mission

Perusahaan senantiasa melakukan tinjauan dan pembaruan atas visi dan misi Perusahaan setiap tahun dan pada tahun 2020, manajemen masih menganggap bahwa visi dan misi Perusahaan masih sesuai dengan kondisi pasar.

Each year, the Company reviews and updates its vision and mission, and management believes that in 2020, the Company's vision and purpose remain consistent with market circumstances.

Visi Perusahaan

Company's Vision

Visi Haleyora Power adalah **"Global Electricity Network Service Solution (GENSS)."**

"Global Electricity Network Service Solution (GENSS)" is Haleyora Power's goal.

Global

Di antara perusahaan sejenis secara kapabilitas perusahaan mampu menjadi pemimpin di Indonesia dan Asia Tenggara.

Global

In terms of capacity, the business is capable of becoming a market leader in Indonesia and Southeast Asia.

Electricity Network Service Solution

Perusahaan mampu sebagai penyedia solusi dalam sistem ketenagalistrikan dan bidang lainnya, dalam hal ini perusahaan bergerak di bidang *Distribution, Transmission, sales and service* yang berperan sebagai *Managing Assets, Operating Assets dan Assets Services*.

Electricity Network Service Solution

The business is capable of acting as a solution provider in the electrical system and other areas; in this instance, the company is involved in distribution, transmission, sales, and service, as well as asset management, asset operation, and asset management services.

Misi Perusahaan

Company's Mission

Misi Haleyora Power adalah **"Lead in GENSS with CARE"**

Haleyora Power's goal is **"Lead in GENSS with CARE"**

Collaborating to realize SOLID

Perusahaan berkolaborasi dalam mewujudkan Misi Portofolio PLN Group yaitu SOLID (*Securing of Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increasing Profit Contribution, Developing New Edge*).

Collaborating to realize SOLID

Companies work together to accomplish the PLN Group Portfolio Mission, namely SOLID (Securing of Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increasing Profit Contribution, Developing New Edge).

Agile in obtaining new opportunities and challenges

Perusahaan dituntut untuk dapat bergerak lincah untuk mendapatkan peluang dan menghadapi tantangan yang ada baik di *captive market* maupun *non captive market*.

Agile in obtaining new opportunities and challenges

Businesses must be flexible in order to capitalise on possibilities and overcome obstacles in both captive and non-captive markets.

Responsive in providing the best service to customers

Perusahaan selalu responsif dalam memberikan pelayan yang terbaik kepada pelanggan dan menjadikan pelanggan sebagai orientasi utama.

Responsive in providing the best service to customers

The business is always responsive in terms of delivering the finest service possible and putting the client first.

Engage stakeholders to increase the value of the company

Perusahaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai-nilai yang ada pada Perusahaan.

Engage stakeholders to increase the value of the company

The Company engages all stakeholders in order to enhance the Company's values.

Budaya Perusahaan

Corporate Culture

Tata Nilai Perusahaan

Corporate Values

Tata Nilai Haleyora Power yaitu "Haleyora Power Terbaik" sebagai penunjang visi dan misi, dengan penjelasan sebagai berikut:

The values of Haleyora Power are "Best Haleyora Power" in order to fulfil the vision and purpose, as explained below:

AKHLAK

Pada tahun 2020, HP melakukan penyesuaian terhadap Budaya Perusahaan, sesuai arahan Kementerian BUMN, yang disampaikan melalui Surat Edaran KBUMN No.SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai- Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN menetapkan Core Value AKHLAK sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Core Values ini selanjutnya wajib menjadi core values seluruh BUMN, termasuk PLN sebagai Pemegang Saham utama PT Haleyora Power sehingga Haleyora mulai menerapkan budaya AKHLAK didalam setiap kegiatan Perusahaan.

In 2020, HP adjusted its Corporate Culture in response to the Ministry of SOEs' directive, which was communicated through KBUMN Circular No.SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 about the Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises. The Ministry of State-Owned Enterprises has designated AKHLAK's Core Values as the identity and glue for a work culture that promotes continual performance development. These Fundamental Values must then become the core values of all SOEs, including PLN as the majority stakeholder of PT Haleyora Power, in order for Haleyora to begin implementing the AKHLAK culture throughout all of the Company's activities.

AKHLAK merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif dengan penjelasan sebagai berikut:

AKHLAK is an acronym for Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative with the following explanation:



Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

1. Memenuhi janji dan komitmen;
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan;
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan;
2. Membantu orang lain belajar;
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. Suka menolong orang lain;
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara;
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
3. Bertindak proaktif.

Kolaboratif

Membangun kerjasama yang sinergis

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Amanah

Retaining the confidence accorded

1. *Keeping pledges and promises;*
2. *Accepting accountability for assigned duties, choices, and actions performed;*
3. *Adhering to moral and ethical values.*

Kompeten

Persevering in your education and development

1. *Increasing self-awareness of one's ability to overcome obstacles;*
2. *Assisting people in their education;*
3. *Completing assignments with the highest level of quality possible.*

Harmonis

Taking care of one another and appreciating one another's differences

1. *Showing respect for everyone regardless of their background;*
2. *Taking pleasure in assisting others;*
3. *Creating an enabling work environment.*

Loyal

Being dedicated to and emphasising the Nation's and Country's interests

1. *Protecting the reputations of co-workers, leaders, SOE, and the Country;*
2. *Willing to make sacrifices in order to accomplish a greater objective;*
3. *Submit to leadership as long as it does not violate the law or ethical standards.*

Adaptif

Continuing to be innovative and receptive to change

1. *Adapting quickly in order to improve;*
2. *Continuously improving to stay current with technical advancements;*
3. *Taking aggressive measures.*

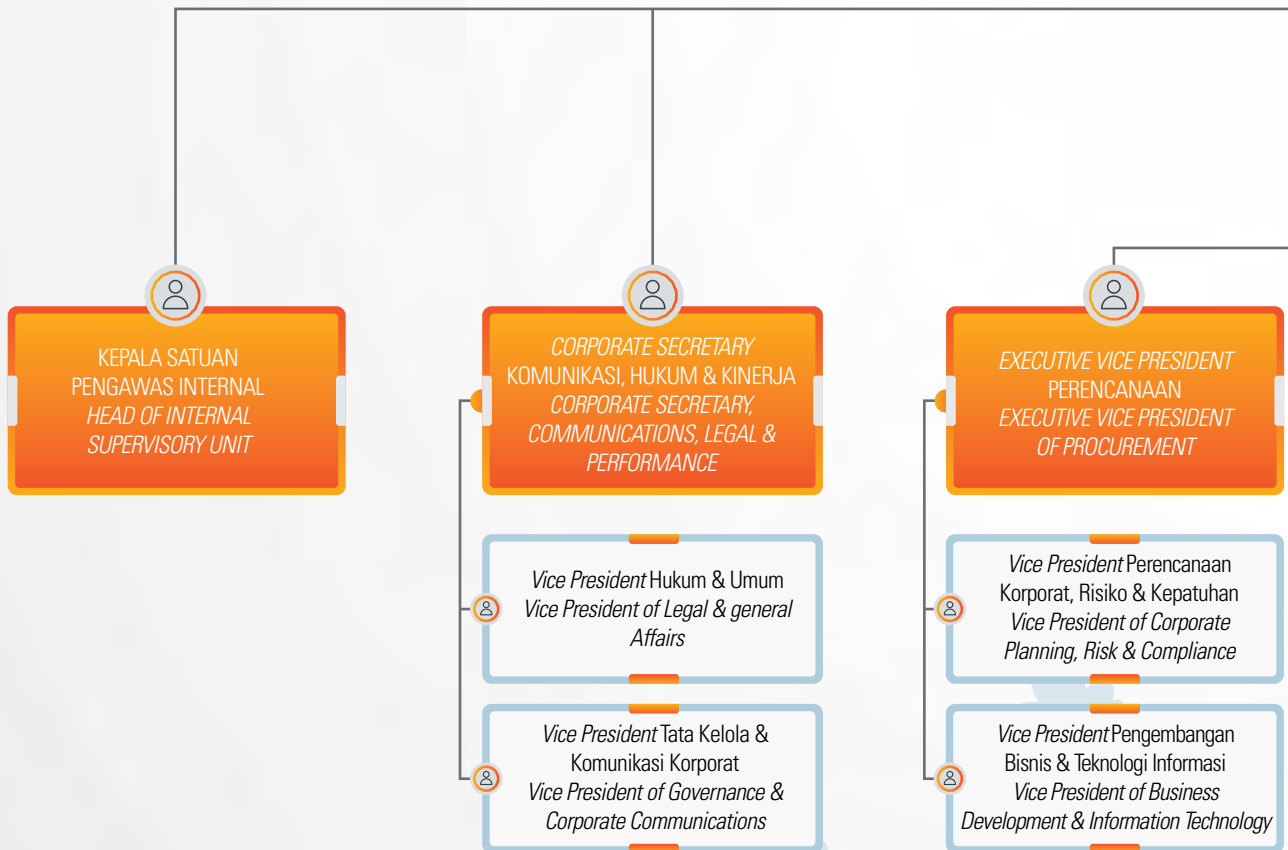
Kolaboratif

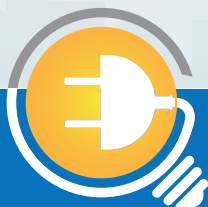
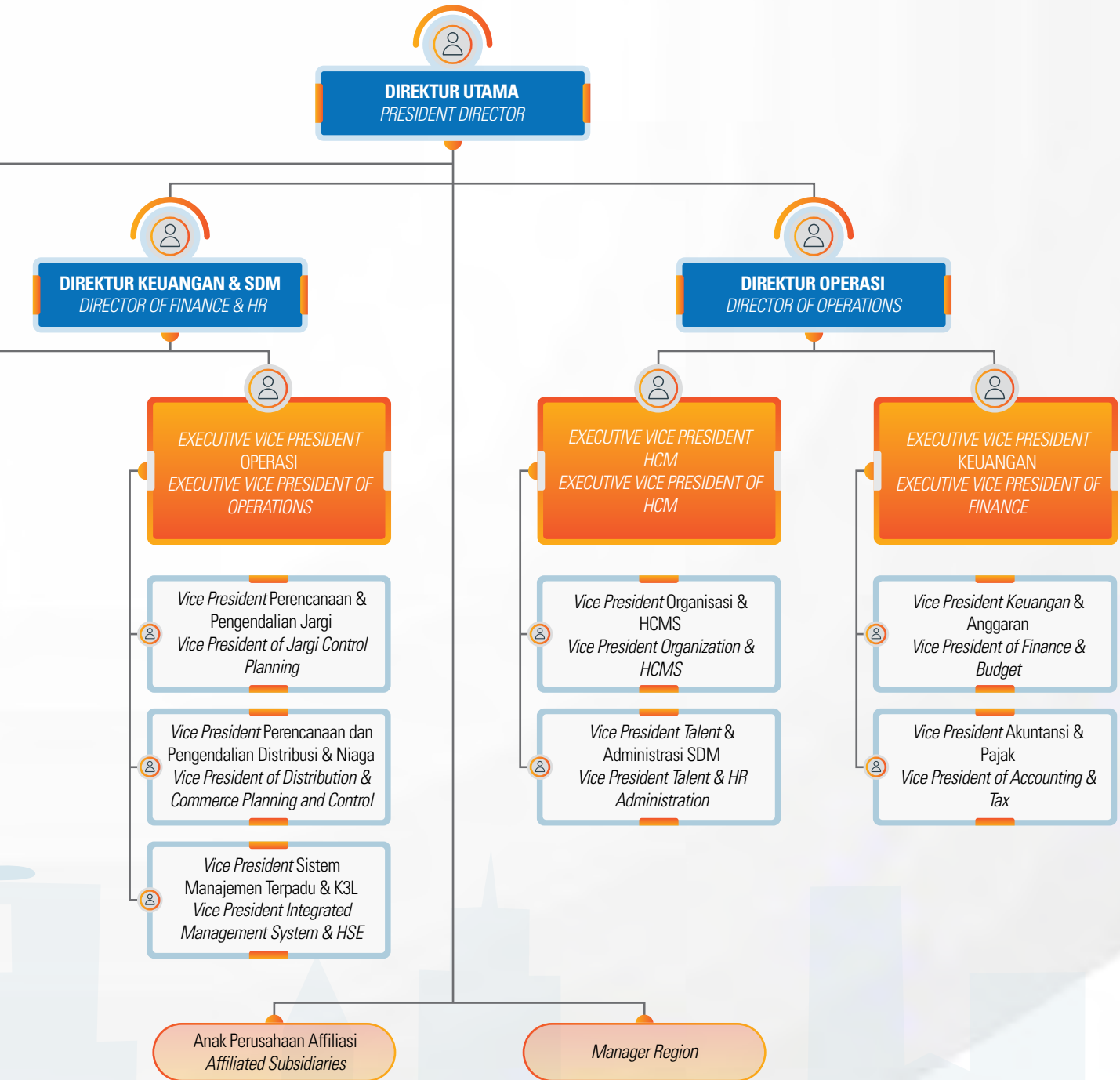
Collaborating in a synergistic manner

1. *Creating chances for diverse stakeholders to participate;*
2. *Collaborating to create additional value;*
3. *Coordinating the use of diverse resources to accomplish shared objectives.*

Struktur Organisasi

Organisational Structure





Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



| | |
|--|--|
| Nama <i>Name</i> | Bima Putrajaya |
| Jabatan <i>Position</i> | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> |
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | Keputusan Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT Haleyora Power tanggal 19 Juni 2020 <i>PT Haleyora Power Circular Shareholders' Decision (GMS) dated June 19, 2020</i> |
| Usia <i>Age</i> | 56 tahun <i>56 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • S1 Listrik Universitas Gadjah Mada (1989) • S2 Non Teknik Universiti Tenaga Nasional Malaysia (2006) • S2 Manajemen STIE IPWIJA (2003) • Gadjah Mada University offers a Bachelor's Degree in Electrical Engineering (1989) • Universiti Tenaga Nasional Malaysia, Master of Non-Engineering (2006) • Master of Management STIE IPWIJA (2003) |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President Operasi Regional Jawa Bagian Barat (2018-2020) • Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Barat (2017-2018) • General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (2016-2017) • Executive Vice President for Regional Operations in West Java (2018-2020) • Head of the Regional Operations Division for West Java (2017-2018) • PT PLN (Persero) West Kalimantan Region General Manager (2016-2017) |
| Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |



| | |
|--|--|
| <p>Nama <i>Name</i></p> | Purnama T. Sianturi |
| <p>Jabatan <i>Position</i></p> | Komisaris <i>Commissioner</i> |
| <p>Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i></p> | RUPS Sirkuler Pemberhentian Okto Rinaldi dan Pengangkatan Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris tanggal 1 September 2018. <i>On September 1, 2018, GMS issued a circular dismissing Okto Rinaldi and appointing employees Aji and Purnama T. Sianturi as Acting Commissioners.</i> |
| <p>Usia <i>Age</i></p> | 52 tahun <i>52 years of age</i> |
| <p>Kewarganegaraan <i>Citizenship</i></p> | Indonesia |
| <p>Domisili <i>Domicile</i></p> | Jakarta |
| <p>Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1990) • Magister Humaniora dari Universitas Sumatra Utara (2002) • Doktor dari Universitas Sumatra Utara (2007) • <i>Bachelor of Laws from Bandung's Padjadjaran University (1990)</i> • <i>Humanities Master's Degree from the University of North Sumatra (2002)</i> • <i>Doctor of Philosophy Degree from the University of North Sumatra (2007)</i> |
| <p>Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Departemen Keuangan (2015-sekarang) • Direktur Lelang DJKN, Kementerian Keuangan (2012-2015) • Direktur Hukum dan Humas DJKN, Kementerian Keuangan (2011-2012) • <i>Director of State Receivables and Other State Assets, Ministry of Finance, Directorate General of State Assets (DJKN) (2015-present)</i> • <i>Director of DJKN Auctions, Ministry of Finance (2012-2015)</i> • <i>Director of the Ministry of Finance's Department of Law and Public Relations (2011-2012)</i> |
| <p>Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i></p> | Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi di Kementerian Keuangan RI <i>Director of State Asset Management and Information Systems at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia</i> |
| <p>Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i></p> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |



| | |
|---|--|
| Nama <i>Name</i> | Fahmi El Amruzi |
| Jabatan <i>Position</i> | Komisaris Utama |
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan atau Pergantian Anggota Dewan Komisaris tanggal 18 September 2017 <i>Circular GMS dated September 18, 2017 Dismissal and Appointment or Replacement of Members of the Board of Commissioners</i> |
| Periode <i>Period</i> | 2017- Juni 2021 |
| Usia <i>Age</i> | 52 tahun <i>52 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Bandung |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1993) • <i>Master of Business Administration</i> dari University of Missouri Saint Louis, Amerika Serikat (2006) • <i>Bandung Institute of Technology offers a Bachelor's Degree in Electrical Engineering (1993)</i> • <i>Master of Business Administration from the University of Missouri-St. Louis in the United States of America (2006)</i> |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>EVP Supply Chain Management</i>, Direktorat Pengadaan Strategis 1, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-sekarang) • Kepala Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis PT PLN (Persero) (2015-2017) • Wakil Direktur Utama PT Unindo (2013-2015) • Direktur Perencanaan PT PLN Batam (2010-2013) • <i>Directorate of Strategic Procurement 1, PT PLN (Persero) Head Office, EVP Supply Chain Management (2017-present)</i> • <i>Head of PT PLN (Persero) Division's of Power Transactions and Business Partnerships (2015-2017)</i> • <i>PT Unindo's Deputy President and Director (2013-2015)</i> • <i>Director of Planning at PT PLN Batam (2010-2013)</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |



| | |
|--|--|
| <p>Nama <i>Name</i></p> | <p>Karyawan Aji</p> |
| <p>Jabatan <i>Position</i></p> | <p>Plt. Komisaris <i>Acting Commissioner</i></p> |
| <p>Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i></p> | <p>RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan atau Pergantian Anggota Dewan tanggal 1 September 2018 <i>On September 1, 2018, GMS issued a circular on the dismissal of board members and the appointment or replacement of board members.</i></p> |
| <p>Periode <i>Period</i></p> | <p>2018- Juni 2021</p> |
| <p>Usia <i>Age</i></p> | <p>53 tahun <i>53 years of age</i></p> |
| <p>Kewarganegaraan <i>Citizenship</i></p> | <p>Indonesia</p> |
| <p>Domisili <i>Domicile</i></p> | <p>Jakarta</p> |
| <p>Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Nuklir dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992) • <i>Master of Electrical Engineering</i> dari Curtin University of Technology, Australia (2007) • <i>Gadjah Mada University in Yogyakarta offers a Bachelor's Degree in Nuclear Engineering (1992)</i> • <i>Master of Electrical Engineering of Curtin University of Technology, Australia (2007)</i> |
| <p>Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>EVP Talent Management, Direktorat Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018-sekarang)</i> • <i>EVP Organization Development, Direktorat Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018)</i> • <i>General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (2016-2017)</i> • <i>Manajer Eksekutif Direksi, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)</i> • <i>EVP Talent Management, Directorate Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018-sekarang)</i> • <i>EVP Organization Development, Directorate Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018)</i> • <i>General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (2016-2017)</i> • <i>Manajer Eksekutif Direksi, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)</i> |
| <p>Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i></p> | <p>Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i></p> |

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



| | |
|---|---|
| Nama <i>Name</i> | Purnomo |
| Jabatan <i>Position</i> | Direktur Utama <i>President Director</i> |
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | Keputusan Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT Haleyora Power pada tanggal 8 Desember 2020 <i>PT Haleyora Power Circular Shareholders' Decision (GMS) on December 8, 2020</i> |
| Usia <i>Age</i> | 52 tahun <i>52 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • S1 Listrik Universitas Indonesia (1998) • S2 Bidang Kelistrikan, Institut Teknologi Bandung (2007) • <i>University of Indonesia, Bachelor of Electricity (1998)</i> • <i>Electrical Master's Degree, Bandung Institute of Technology (2007)</i> |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Executive Vice President</i> Operasi Regional Jawa Bagian Tengah, Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018-2020) • Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Tengah, Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018) • <i>Senior Engineer II Jaringan</i> (Plt Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Tengah, Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017) • <i>PT PLN (Persero) Head Office Executive Vice President of Central Java Regional Operations, Central Java Regional Business Directorate (2018-2020)</i> • <i>PT PLN (Persero) Head Office: Head of Central Java Regional Operations Division, Central Java Regional Business Directorate (2017-2018)</i> • <i>Senior Engineer II Network (Acting Director of Central Java Regional Operations Division, Central Java Regional Business Directorate, PT PLN (Persero) Head Office (2017)</i> |
| Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |



| | |
|---|--|
| Nama <i>Name</i> | Abdul Fatah Nasution |
| Jabatan <i>Position</i> | Direktur Keuangan & SDM <i>Director of Finance & HR</i> |
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | Keputusan Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT Haleyora Power tanggal 19 Juni 2020. <i>PT Haleyora Power circulated a General Meeting of Shareholders (GMS) on June 19, 2020.</i> |
| Usia <i>Age</i> | 54 tahun <i>54 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Medan Area (tahun 1990) <i>Medan Area University, Bachelor of Accounting and Economics (1990)</i> |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Vice President Anggaran II, Divisi Anggaran Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018) • Manajer Senior Anggaran II Divisi Anggaran Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018) • Manajer Keuangan pada PT PLN (Persero) Distribusi Banten (2014-2015) • Vice President of Budget II, Directorate of Finance, Budget Division PT PLN (Persero) Head Office (2018) • Senior Manager of Budget II, the Directorate of Finance's Budget Division PT PLN (Persero) Head Office (2017-2018) • PT PLN (Persero) Banten Distribution Finance Manager (2014-2015) |
| Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |



| | |
|--|---|
| Nama <i>Name</i> | Sinung Triwulandari |
| Jabatan <i>Position</i> | Direktur Operasi <i>Director of Operations</i> |
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 7 November 2017 <i>On November 7, 2017, GMS issued a Circular Dismissing and Appointing Members of the Board of Directors.</i> |
| Usia <i>Age</i> | 49 tahun <i>49 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah (1998) • <i>Master of Science in Information Technology</i> dari University of Abertay Dundee, Inggris (2009) • <i>Muhammadiyah University offers a Bachelor's Degree in Electrical Engineering (1998)</i> • <i>Master of Science in Information Technology from Abertay Dundee University, United Kingdom (2009)</i> |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Haleyora Power (2013-2017) • Manajer Area Metro, PLN Distribusi Lampung (2012-2013) • Manajer Cabang Kotabumi, PLN wilayah Lampung (2011-2012) • <i>Head of PT Haleyora Power's Operations and Business Development Division (2013-2017)</i> • <i>Manager Metro Area, PLN Distribution Lampung (2012-2013)</i> • <i>Branch Manager, Kotabumi, PLN Lampung (2011-2012)</i> |
| Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |



| | |
|---|--|
| Nama <i>Name</i> | Achmad Taufik Haji |
| Jabatan <i>Position</i> | Direktur Utama <i>President Director</i> |
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017 <i>GMS Circular on Dismissal and Appointment of Board of Directors Members on May 26, 2017</i> |
| Periode <i>Period</i> | 2017- Juni 2021 |
| Usia <i>Age</i> | 60 tahun <i>60 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1983) • Magister Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2001) • <i>Bandung Institute of Technology offers a Bachelor's Degree in Electrical Engineering (1983)</i> • <i>Electrical Engineering Master's Degree from Surabaya's Sepuluh Nopember Institute of Technology (2001)</i> |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Jawa dan Bali, Direktorat Operasi Jawa-Bali-Sumatra, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015) • Kepala Divisi Distribusi Jawa dan Bali, Direktorat Operasi Jawa-Bali-Sumatra, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2013) • <i>General Manager</i> PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2010-2012) • Deputi Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Direktorat Jawa, Madura, dan Bali, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2008-2009) • <i>Head of the Division of Distribution and Customer Service for Java and Bali, Directorate of Operations for Java-Bali-Sumatra, PT PLN (Persero) Headquarters (2013-2015)</i> • <i>Head of Java and Bali Distribution Division, Directorate of Operations for Java-Bali-Sumatra, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2013)</i> • <i>PLN Distribution West Java and Banten General Manager (2010-2012)</i> • <i>Deputy Director of Commerce and Customer Service, PT PLN (Persero) Head Office, Java, Madura, and Bali (2008-2009)</i> |
| Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |



| | |
|---|---|
| Nama <i>Name</i> | Sutrisno Samad |
| Jabatan <i>Position</i> | Direktur Keuangan & SDM <i>Director of Finance & HR</i> |
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017 <i>GMS Circular on Dismissal and Appointment of Board of Directors Members on May 26, 2017</i> |
| Periode <i>Period</i> | 2017- Juni 2021 |
| Usia <i>Age</i> | 58 tahun <i>58 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1983) • Magister Manajemen dari STIKUBANK (2001) • <i>Diponegoro University, Semarang, Bachelor of Economics in Accounting (1983)</i> • <i>Master in Management from STIKUBANK (2001)</i> |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Manajer Keuangan, PLN Distribusi Jawa Timur (2013-2016) • Manajer Keuangan, PLN Wilayah Sumatra Barat (2010-2013) • Deputy Manajer Akuntansi, PLN Distribusi Jawa Tengah (2009-2010) • Deputy Manajer Pengelolaan Biaya, PLN Distribusi Jawa Tengah (2006-2009) • <i>PLN East Java Distribution Finance Manager (2013-2016)</i> • <i>PLN West Sumatra Region Finance Manager (2010-2013)</i> • <i>Deputy Controller, PLN Distribution Central Java (2009-2010)</i> • <i>Deputy Manager of Cost Management at PLN Distribution's Central Java Distribution Center (2006-2009)</i> |
| Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. |

Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.



Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi

Officers' Profile One Level Down from The Board of Directors



Erwin Ardianto
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

| | |
|---|---|
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | Keputusan Direksi No.008.K/SDM.00.03/DIR-HP/2018 tentang Penempatan Pegawai Tugas Karya tanggal 9 Februari 2019 <i>On February 9, 2019, the Board of Directors Adopted Decision No.008.K/SDM.00.03/DIR-HP/2018 on the Placement of Work Assignment Employees</i> |
| Usia <i>Age</i> | 44 tahun <i>44 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • S1 Akuntansi Universitas Airlangga (2000) • Airlangga University offers a Bachelor's Degree in Accounting (2000) |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Manajer Administrasi UJP CLG PT Indonesia Power (2017) • Manajer Akuntansi Kinerja Dan Tatakelola Keuangan PT Indonesia Power (2017) • Manajer Akuntansi Manajemen PT Indonesia Power (2015) • Manajer Sistem Pengembangan Akuntansi (2013) • PT Indonesia Power UJP CLG Administration Manager (2017) • PT Indonesia Power's Manager of Performance Accounting and Financial Governance (2017) • Accounting Manager, PT Indonesia Power Management (2015) • Accounting Development Systems Manager (2013) |
| Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |



Gathut Rudi Warianto

Kepala Satuan Pengawasan Internal
Head of Internal Control Unit

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Legal References

Keputusan Direksi No.089.K/DIR-HP/2016 tentang Penempatan Pegawai Tugas Karya tanggal 19 Juli 2016.

On July 19, 2016, the Board of Directors adopted Decision No.089.K/DIR-HP/2016 on the Placement of Work Assignment Employees.

Usia
Age

55 tahun
55 years of age

Kewarganegaraan
Citizenship

Indonesia

Domisili
Domicile

Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Surabaya (1991)
- *Surabaya Institute of Technology, Bachelor of Mechanical Engineering (1991)*

Riwayat Pekerjaan
Professional Background

- *Senior Specialist II Audit Distribusi pada Bidang Audit Regional VI SPI PT PLN (Persero) (2015)*
- *Senior Specialist II Audit Transmisi dan Distribusi pada Deputy Group Audit Regional 7A, Group Head Audit Regional 7, Inspektorat Audit Regional Jawa Bagian Barat, SPI PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)*
- *Deputy Group Audit Regional 20A pada Group Head Audit Regional 20, Inspektorat Audit Regional, SPI PT PLN (Persero) (2016)*
- *SPI PT PLN (Persero) SPI PT PLN (Persero) SPI PT PLN (Persero) SPI PT PLN (Persero) SPI (2015)*
- *Senior Specialist II Audit Transmission and Distribution at the Deputy Group Audit Regional 7A, the Group Head Audit Regional 7, the Regional Audit Inspectorate for West Java, and the Head Office of SPI PT PLN (Persero) (2015-2016)*
- *Deputy Group Audit Regional 20A at SPI PT PLN (Persero) SPI PT PLN (Persero) Regional Audit Inspectorate (2016)*

Jabatan Lainnya
Other Positions

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.

Sertifikasi
Certifications

Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)
Certification as a Qualified Internal Auditor (QIA)

Komite Audit

Audit Committee



Didik Sukristiyo Yuwono

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

| | |
|---|---|
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | Keputusan Dewan Komisaris No.002.SK/DK/HP/2019 tanggal 26 Februari 2019 <i>Decision No.002.SK/DK/HP/2019 of the Board of Commissioners dated February 26, 2019</i> |
| Usia <i>Age</i> | 50 tahun <i>50 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Diploma 3 Ekonomi Akuntansi Universitas Brawijaya (1994) • Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Sumatra Utara (2004) • Register Negara Akuntan sejak 2004 • <i>Universitas Brawijaya, Diploma 3 Economics in Accounting (1994)</i> • <i>Bachelor of Economics with a concentration in accounting from the University of North Sumatra (2004)</i> • <i>Since 2004, the State Register of Accountants</i> |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vice President Akuntansi Segmen pada Divisi Akuntansi Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018-2019)</i> • <i>Manajer Senior Akuntansi Segmen pada Divisi Akuntansi Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018)</i> • <i>Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (2016-2017)</i> • <i>Vice President of Segment Accounting at PT PLN (PerseroHead)'s Office's Accounting Division of the Finance Directorate (2018-2019)</i> • <i>Senior Manager of Segment Accounting at PT PLN (PerseroHead)'s Office's Accounting Division of the Finance Directorate (2017-2018)</i> • <i>Finance, Human Resources, and Administration Manager of PLN West Java Transmission's Main Unit (2016-2017)</i> |
| Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |



I Ketut Gede Agus Sutopo

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

| | |
|---|---|
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | Keputusan Dewan Komisaris No.04.SK/DK/HP/2020 tanggal 22 September 2020 <i>Decision No.04.SK/DK/HP/2020 of the Board of Commissioners dated September 22, 2020</i> |
| Usia <i>Age</i> | 55 tahun <i>55 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | S1 Listrik Universitas Gadjah Mada (1992) <i>Bachelor of Electrical Engineering from Gadjah Mada University (1992)</i> |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vice President</i> Pengelolaan Transmisi dan Distribusi Regional Jawa Bagian Barat pada Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Barat Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, (2018-2020) • <i>Manajer Senior</i> Pengelolaan Transmisi dan Distribusi Regional Jawa Bagian Barat. Pada Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Barat Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, (2016-2018) • <i>Manajer Senior</i> Pengelolaan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Regional Jawa Bagian Barat pada Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Barat Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, (2015-2016) • <i>Vice President, West Java Regional Transmission and Distribution Management, PT PLN (Persero) Head Office, West Java Regional Operations Division, West Java Regional Business Directorate (2018-2020)</i> • <i>Senior Manager, Regional Transmission and Distribution Management in West Java. At PT PLN (Persero)'s West Java Regional Operations Division, West Java Regional Business Directorate, and West Java Regional Business Directorate, (2016-2018)</i> • <i>Senior Manager of West Java Regional Generation, Transmission, and Distribution Management at PT PLN (Persero)'s West Java Regional Business Directorate (2015-2016)</i> |
| Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |

Komite GCG dan Manajemen Risiko

GCG and Risk Management Committee



Kurniawan Andriyanto

Anggota Komite GCG & MR
Member of GCG and Risk Management Committee

| | |
|---|---|
| Dasar Hukum Pengangkatan <i>Appointment Legal References</i> | Keputusan Dewan Komisaris No.02.SK/DK/HP/2018 tanggal 1 Desember 2018 <i>Decision No.02.SK/DK/HP/2018 of the Board of Commissioners dated December 1, 2018</i> |
| Usia <i>Age</i> | 39 tahun <i>39 years of age</i> |
| Kewarganegaraan <i>Citizenship</i> | Indonesia |
| Domisili <i>Domicile</i> | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2004) • Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (2012) • Gadjah Mada University, Yogyakarta, offers a Bachelor's Degree in Mechanical Engineering (2004) • Bandung Institute of Technology Master of Electrical Engineering (2012) |
| Riwayat Pekerjaan <i>Professional Background</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Manajer Asesmen, Pemantauan, dan Pelaporan Risiko Proyek pada Bidang Manajemen Risiko Proyek dan Operasi, Divisi Manajemen Risiko Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018) • Manajer Asesmen, Pemantauan, dan Pelaporan Risiko Investasi dan Operasi pada Bidang Manajemen Risiko Proyek dan Operasi, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018) • Deputi Manajer Asesmen, Pemantauan, dan Pelaporan Risiko Investasi dan Operasi, pada Bidang Manajemen Risiko Proyek dan Operasi, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016-2018) • Manager of Risk Assessment, Monitoring, and Reporting in the Field of Project and Operational Risk Management, Risk Management Division of PT PLN (Persero) Head Office's Directorate of Corporate Planning (2018) • Manager of Investment and Operational Risk Assessment, Monitoring, and Reporting, Risk Management and Compliance Division, Directorate of Corporate Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2018) • Deputy Manager, Investment and Operational Risk Assessment, Monitoring, and Reporting, Risk Management and Compliance Division, Directorate of Corporate Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2016-2018) |
| Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i> | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama. <i>Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.</i> |



Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners



Murniati

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Dasar Hukum Pengangkatan
Appointment Legal References

Keputusan Dewan Komisaris No.005.SK/DK/HP/2017
Board of Commissioners Decision No.005.SK/DK/HP/2017

Usia
Age

65 tahun
65 years of age

Kewarganegaraan
Citizenship

Indonesia

Domisili
Domicile

Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S1 Teknik Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Nasional (STTN) (1993)
- *Electrical Engineering Bachelor's Degree from the National College of Engineering (STTN) (1993)*

Riwayat Pekerjaan
Professional Background

- Staf Senior Bidang Umum pada Sekretariat Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2012-2015)
- Manajer Senior Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan pada Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero) (2009-2011)
- Ahli Analisis Investasi pada Direktorat Perencanaan PT PLN (Persero) (2000-2009)
- *Senior Staff for General Affairs at PT PLN (Persero) Board's of Commissioners' Secretariat (2012-2015)*
- *Senior Manager of Investor Relations and Corporate Governance at PT PLN (Persero) Corporate's Secretariat (2009-2011)*
- *Investment Analyst at PT PLN Persero's Planning Directorate (2000-2009)*

Jabatan Lainnya
Other Positions

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

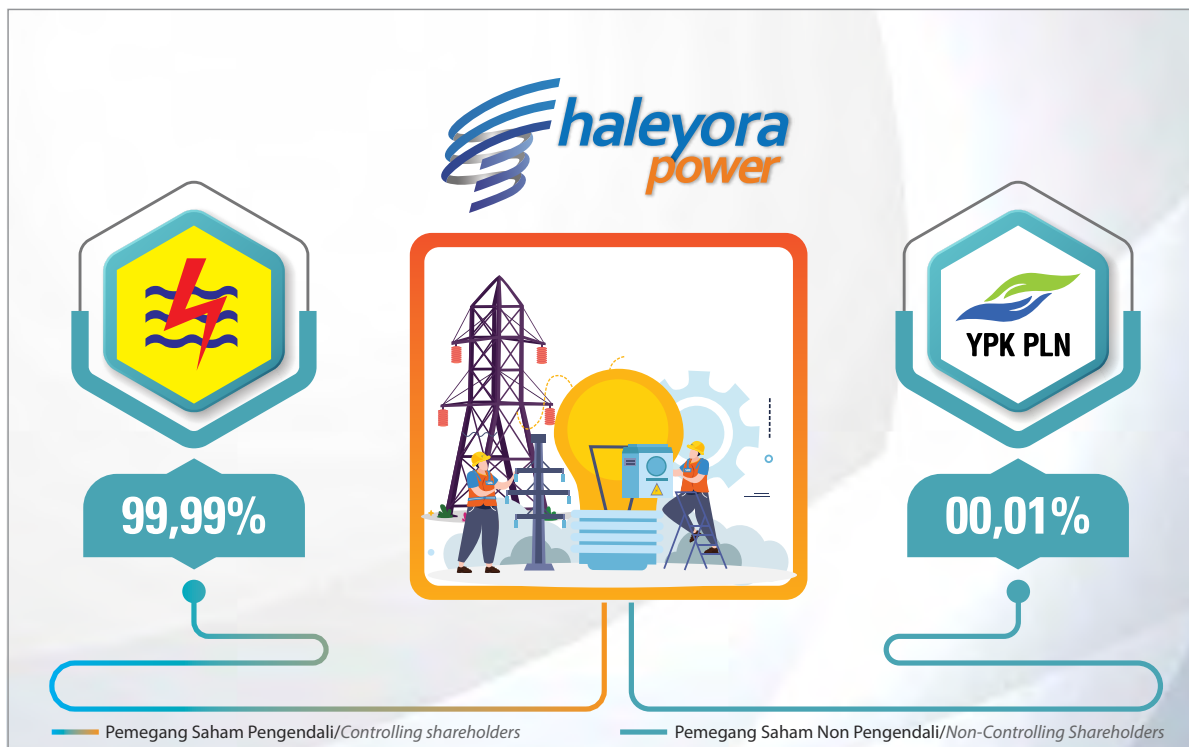
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Has no ties to the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling and significant shareholders.

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholders' Structure and Composition

Struktur Pemegang Saham

Shareholder's Organization



Komposisi Pemegang Saham

Shareholder's Composition

| No. | Pemegang Saham Shareholders | Jumlah Lembar Saham Total Shares | Persentase Kepemilikan Saham Shares Ownership Percentage |
|--------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. | PT PLN (Persero) | 99.999 | 99,99% |
| 2. | Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PT PLN (Persero) <i>PT PLN (Persero) Education and Employee Welfare Foundation</i> | 1 | 0,01% |
| Total | | 100.000 | 100,00% |

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris, Direksi & Karyawan Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Haleyora Power tidak ada yang memiliki saham Perusahaan.

The Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees Own a Share None of the members of PT Haleyora Power Board of Commissioners or Board of Directors hold shares in the company.



Profil Pemegang Saham Utama/Pengendali

Profile of the Principal/Controlling Shareholder



PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Jalan Trunojoyo Blok M-I No.135, RT.6/RW.2, Melawai - Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160
Telp : 021 – 7251234, 7261122
Fax : 021 – 7221330

Pada akhir abad 19, beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kemudian terjadi peralihan pengelolaan kepada Jepang pada tahun 1942-1945. Hingga akhirnya setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan-perusahaan listrik tersebut diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Bada Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga saat ini.

At the turn of the nineteenth century, many Dutch businesses involved in sugar and tea manufacturing established their own power plants. Then, from 1942 to 1945, administration was transferred to Japan. Until Indonesia gained independence, the electrical businesses were eventually transferred to the Government of the Republic of Indonesia. President Soekarno created the Electricity and Gas Bureau under the Ministry of Public Works and Energy on October 27, 1945, with a 157.5 MW capacity.

The Bureau of Electricity and Gas was renamed BPU-PLN (Bada Leader General of the State Electricity Company) on January 1, 1961, and was abolished on January 1, 1965. Simultaneously, two (2) businesses were inaugurated: the State Electricity Company (PLN) as manager of state-owned electricity, and the State Gas Company (PGN) as manager of state-owned gas.

In 1972, according to Government Regulation No.17, the State Energy Company (PLN) was established as a State Electricity General Company and as the Holder of the Electricity Business Authority (PKUK), charged with the responsibility of supplying electricity in the public interest.

In accordance with Government regulations that encourage private sector participation in the power supply industry, PLN has operated as a Public Company, a Limited Liability Company (Persero), and also as a PKUK since 1994, when it began supplying energy for the public benefit.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

| | |
|---|---|
| Komisaris Utama/ Komisaris Independen/President Commissioner/Independent Commissioner | : Amien Sunaryadi (Merangkap/ Concurrent) |
| Wakil Komisaris Utama/Vice President Commissioner | : Suahasil Nazara |
| Komisaris/Commissioner | : Ilya Avianti |
| Komisaris/Commissioner | : Rida Mulyana |
| Komisaris Independen/Independent Commissioner | : Deden Juhara |
| Komisaris/Commissioner | : Mohamad Ikhsan |
| Komisaris Independen/Independent Commissioner | : Murtaqi Syamsuddin |
| Komisaris/Commissioner | : Dudy Purwagandhi |
| Komisaris/Commissioner | : Mohammad Rudy Salahuddin |
| Komisaris/Commissioner | : Eko Sulistyono |
| Komisaris/Commissioner | : Ardan Adiperdana |

Direksi

Board of Directors

| | |
|--|---------------------------|
| Direktur Utama/President Director | : Zulkifli Zaini |
| Wakil Direktur Utama/Vice President Director | : Darmawan Prasodjo |
| Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/Director Finance and Risk Management | : Sinthya Roesly |
| Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia/Director of Human Resources Management | : Syofvi Felienty Roekman |
| Direktur Perencanaan Korporat/Director of Corporate Planning | : Muhammad Ikbal Nur |
| Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan/Director of Commerce and Customer Management | : Bob Saril |
| Direktur Energi Primer/Director of Primary Energy | : Rudy Hendra Prastowo |
| Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan/ Director of Mega Projects and New Renewable Energy | : M Ikhsan Asaad |
| Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan/ Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan Regional Business | : Wiluyo Kusdiharto |
| Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara/ Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara | : Syamsul Huda |
| Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, & Bali/ Director of Regional Business for Java, Madura, & Bali | : Haryanto WS |

| | |
|---------------|----------|
| % Kepemilikan | : 99,99% |
| % Ownership | : 99.99% |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Total Aset tahun 2020 | : Rp1.589.059 Miliar |
| Total Assets in 2020 | : Rp1,589,059 billion |



Kronologis Pencatatan Saham

Distribute Chronology of Listings

Hingga akhir tahun 2020, HP belum pernah mencatatkan saham di bursa saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan saham, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa saham.

HP never issued shares on a stock market until the end of 2020, and so there is no information on the chronology of share listings, the kinds of corporate activities, changes in the number of shares, or the stock exchange's name.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing History

Hingga akhir tahun 2020, HP belum pernah mencatatkan efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek.

HP has never listed any more securities on the Stock Exchange, and therefore there is no information on the listing chronology, kinds of corporate activities, changes in the number of securities, the stock exchange's name, or the rating of securities.

Struktur Grup Perusahaan

Structure of the Company Group



Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Subsidiaries and Affiliated Entities

| Entitas Anak Subsidiaries | Bidang Usaha Business Line | Domisili Domicile | Persentase Kepemilikan Ownership Percentage | | Status Operasi Operation Status | Tahun Mulai Operasi Year of Operation | Total Aset (dalam Rp juta) Total Assets (in Rp million) | |
|------------------------------|--|----------------------|--|------|--|--|--|---------|
| | | | 2020 | 2019 | | | 2020 | 2019 |
| PT Haleyora Powerindo | 1. Pelayanan Teknik 2. Management Billing 3. Non Teknik 1. Technical Service 2. Management Billing 3. Non-technical | Bandung | 95% | 95% | Beroperasi Operating | 17 Januari 2013 January 17, 2013 | 496.834 | 458.759 |

| Entitas Anak Subsidiaries | Bidang Usaha Business Line | Domisili Domicile | Persentase Kepemilikan Ownership Percentage | | Status Operasi Operation Status | Tahun Mulai Operasi Year of Operation | Total Aset (dalam Rp juta) Total Assets (in Rp million) | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|------|--|--|--|---------|
| | | | 2020 | 2019 | | | 2020 | 2019 |
| PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) | Menyalurkan dan menjual listrik di kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia II <i>PT Pelabuhan Indonesia II is responsible for distributing and selling power in the port region.</i> | Jakarta | 45% | 45% | Beroperasi Operating | 17 Januari 2013 January 17, 2013 | 175.927 | 145.324 |



Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perusahaan

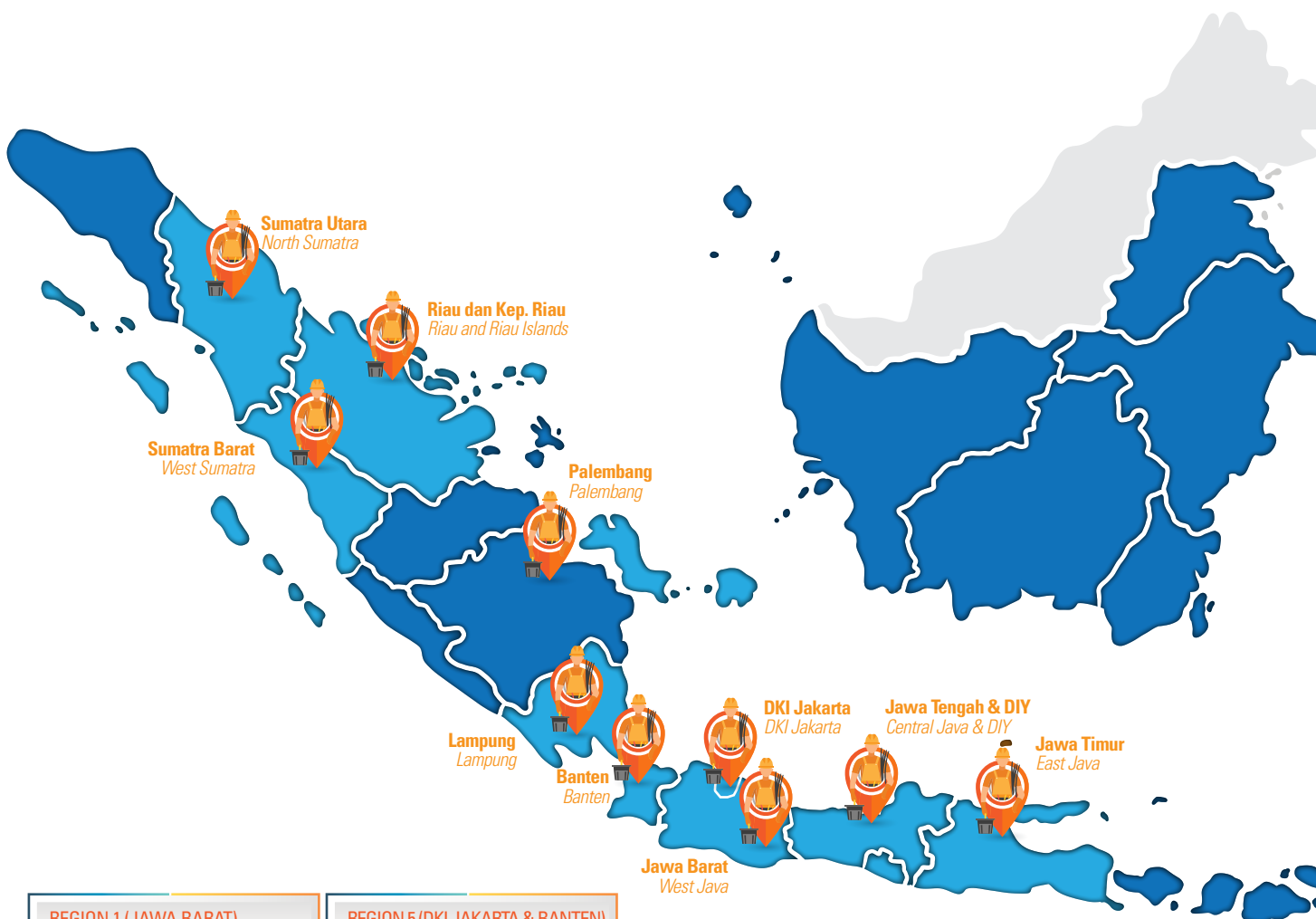
The Company Supporting Institutions and Professions

| Lembaga/Profesi Institution/Profession | Nama dan Alamat Name and Address | Jasa yang Diberikan Services Given | Periode Penugasan Assignment Period |
|--|--|--|--|
| Lembaga Sertifikasi ISO ISO Certification Institution | PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) | ISO 9001:2015 | 2020 |
| Akuntan Publik Public Accountant | KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 | Audit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak <i>Audit of the Company's and its subsidiaries' consolidated financial statements</i> | 2020 |
| Notaris Notaris | Notaris dan PPAT Muhammad Hanafi, S.H. Komp. Rukan Tendean Square No.26 Jl. Walter Mongonsidi 122-124 Kebayoran Baru, Jakarta 12180 | Jasa Pembuatan Akta Notaris untuk RUPS RKAP dan RUPS LPT tahun 2020 <i>Notary Deed Services for RKAP GMS and LPT GMS in 2020</i> | 2020 |



Wilayah Operasi

Operational Map



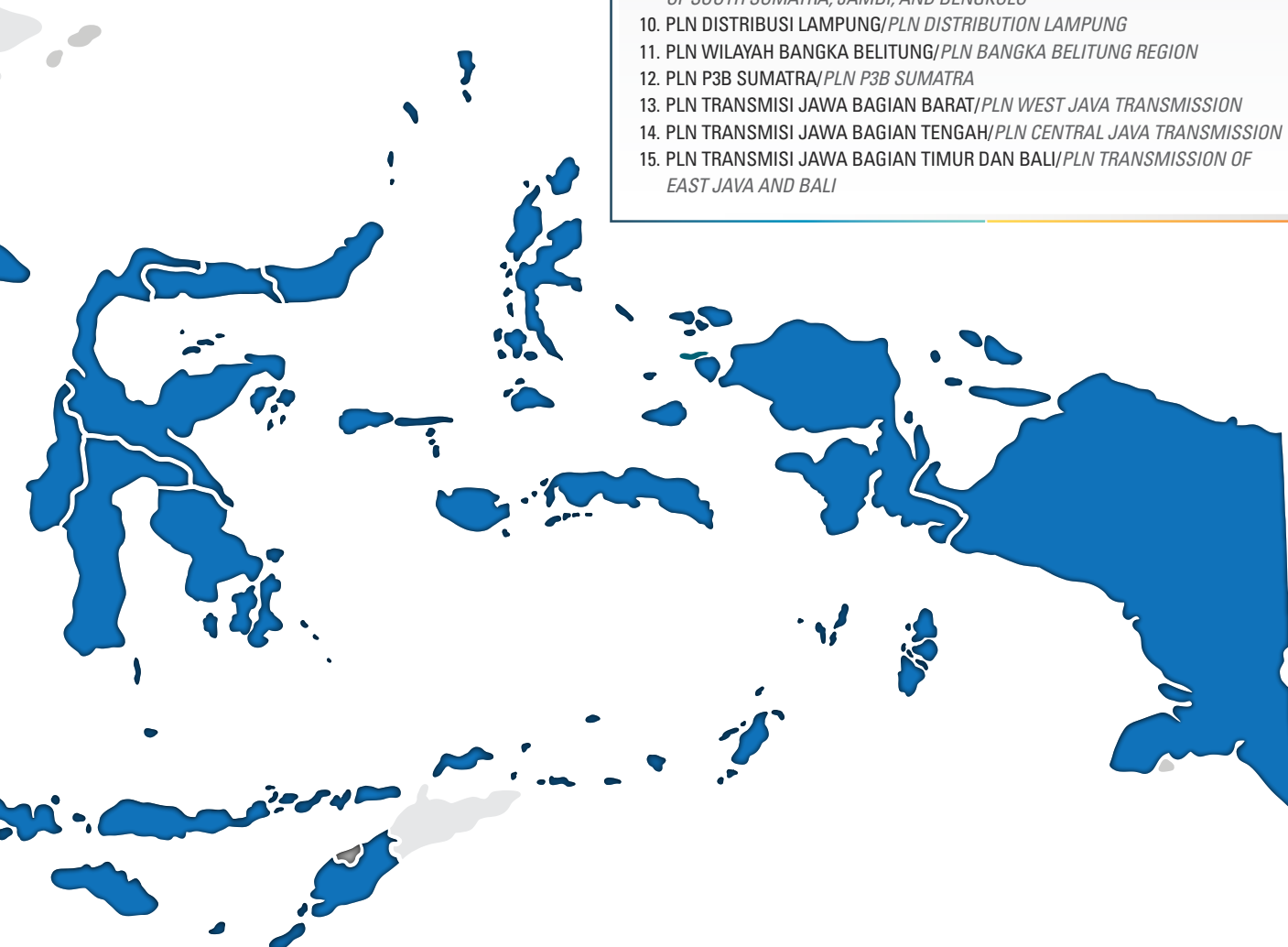
| | |
|---|--|
| REGION 1 (JAWA BARAT) REGION 1 (WEST JAVA) | REGION 5 (DKI JAKARTA & BANTEN) REGION 5 (DKI JAKARTA & BANTEN) |
| REGION 2 (JAWA TENGAH & DIY) REGION 2 (CENTRAL JAVA & DIY) | REGION 6 (RIAU & KEPULAUAN RIAU) REGION 6 (RIAU & RIAU ISLANDS) |
| REGION 3 (JAWA TIMUR) REGION 3 (EAST JAVA) | REGION 7 (SUMATRA SELATAN) REGION 6 (SOUTH SUMATRA) |
| REGION 4 (SUMATRA BARAT) REGION 4 (WEST SUMATRA) | |



PELANGGAN UTAMA

MAIN CUSTOMER

1. PLN DISTRIBUSI BANTEN/*PLN DISTRIBUTION BANTEN*
2. PLN DISTRIBUSI JAKARTA RAYA/*PLN DISTRIBUTION JAKARTA RAYA*
3. PLN DISTRIBUSI JAWA BARAT/*WEST JAVA DISTRIBUTION PLN*
4. PLN DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA/*PLN CENTRAL JAVA AND YOGYAKARTA DISTRIBUTION*
5. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR/*PLN EAST JAVA DISTRIBUTION*
6. PLN WILAYAH SUMATRA UTARA/*PLN FOR THE NORTH SUMATRA REGION*
7. PLN WILAYAH SUMATRA BARAT/*PLN WEST SUMATRA REGION*
8. PLN WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU/*PLN RIAU REGION AND RIAU ISLANDS*
9. PLN WILAYAH SUMATRA SELATAN, JAMBI, DAN BENGKULU/*PLN FOR THE REGIONS OF SOUTH SUMATRA, JAMBI, AND BENGKULU*
10. PLN DISTRIBUSI LAMPUNG/*PLN DISTRIBUTION LAMPUNG*
11. PLN WILAYAH BANGKA BELITUNG/*PLN BANGKA BELITUNG REGION*
12. PLN P3B SUMATRA/*PLN P3B SUMATRA*
13. PLN TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT/*PLN WEST JAVA TRANSMISSION*
14. PLN TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH/*PLN CENTRAL JAVA TRANSMISSION*
15. PLN TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI/*PLN TRANSMISSION OF EAST JAVA AND BALI*



Informasi Website Perusahaan

Information About the Business' Website



Haleyora memiliki *corporate website* yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh *stakeholder*, dan masyarakat luas dengan alamat <https://www.haleyorapower.co.id>. sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dalam upaya membentuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Seluruh informasi yang tersajikan menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris berupa; Informasi utama berupa tentang Perusahaan, sejarah singkat, Visi dan Misi, Laporan Tahunan, Informasi produk dan jasa, jaringan dan alamat kantor dan *Community Development*. Semua informasi yang disajikan dalam *website* tersebut senantiasa diperbaharui secara berkala.

Haleyora maintains a corporate website that is readily accessible to all stakeholders and the general public at the URL <https://www.haleyorapower.co.id> as part of its commitment to good corporate governance. All information is provided in two languages, namely Indonesian and English, and includes the following: Company profile, short history, Vision and Mission, Annual Report, product and service information, network and office location, and community development. All information on this page is updated on a regular basis.

| No. | Cakupan Informasi Information Disclosure | Ketersediaan di Situs Website Haleyora Power Availability on Haleyora Power Website |
|-----|---|---|
| 1. | Sejarah Perusahaan/ <i>Company History</i> | √ |
| 2. | Profil Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i> | √ |
| 3. | Informasi Pemegang Saham/ <i>Shareholders Data</i> | √ |
| 4. | Informasi Produk dan Jasa Layanan/ <i>Products and Services Data</i> | √ |
| 5. | Penghargaan dan Sertifikasi/ <i>Awards and Certifications</i> | √ |
| 6. | Tata Kelola Perusahaan/ <i>Corporate Governance</i> | √ |
| 7. | Informasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan/ <i>Social Activities Data</i> | √ |
| 8. | Artikel Berita, Dokumentasi Video, Foto dan Keterangan Pers/ <i>News Articles, Video Documentation, Photos and Press Releases</i> | √ |
| 9. | Peluang Karir/ <i>Career Opportunity</i> | √ |
| 10. | Kontak/ <i>Contact</i> | √ |



Program Pendidikan dan Pelatihan Manajemen

Management Education and Training Program



Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris

Education and Training of the Board of Commissioners

| Peserta Participant | Materi Pelatihan Training Subject | Penyelenggara Organizer | Tempat & Waktu Venue & Time |
|---|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Seluruh Dewan Komisaris All Board of Commissioners | Big Data | Inhouse Training | 13 Februari 2020 February 13, 2020 |
| | Enhancing Your Corporate's Values by Implementing SNI ISO 37001-2016 Bribery Management System | CRMS | 11-12 Mei 2020 May 11-12, 2020 |

Pendidikan dan Pelatihan Direksi

Education and Training of the Board of Directors

| Peserta Participant | Materi Pelatihan Training Subject | Penyelenggara Organizer | Tempat & Waktu Venue & Time |
|--|--|----------------------------|---|
| Sinung Triwulandari (Direktur Operasional/ Director of Operations) | ESQ Digiworld | ESQ Jakarta | 2020 |
| Seluruh Direksi All the Board of Directors | Big Data | Inhouse Training | 13 Februari 2020 February 13, 2020 |
| Seluruh Direksi All the Board of Directors | Building the Future Ready Organization | Pertamina Training Center | 30-31 Maret 2020 March 30-31, 2020 |
| Seluruh Direksi All the Board of Directors | Enhancing Your Corporate's Values by Implementing SNI ISO 37001-2016 Bribery Management System | Crms | 11-12 Mei 2020 May 11-12, 2020 |
| Seluruh Direksi All the Board of Directors | Awareness ISO 37001 | Inhouse Training | 10 September 2020 September 10, 2020 |

Pendidikan dan Pelatihan Komite GCG dan Manajemen Risiko

Education and Training of GCG and Risk Management Committee

| Nama Name | Jabatan Position | Materi Pelatihan Training Subject | Penyelenggara Organizer | Tempat & Waktu Venue & Time |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Didik Sukristyo Tuwono | Komite GCG dan Manajemen Risiko GCG and Risk Management Committee | Enchancing Your Corporate's Values by Implementing SNI ISO 37001-2016 Bribery Management System | CRMS | 11-12 Mei 2020 May 11-12, 2020 |

Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Education and Training of Corporate Secretary

| Nama Name | Jabatan Position | Materi Pelatihan Training Subject | Penyelenggara Organizer | Tempat & Waktu Venue & Time |
|----------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|
| Erwin Ardianto | Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary | Pelatihan Corporate Secretary Corporate Secretary Training | HRD Spot | 24 Agustus 2020 August 24, 2020 |

Pendidikan dan Pelatihan Audit Internal

Education and Training of Internal Audit

| Nama Name | Jabatan Position | Materi Pelatihan Training Subject | Penyelenggara Organizer | Tempat & Waktu Venue & Time |
|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Gathut Rudy W. | KSPI | Enchancing Your Corporate's Values by Implementing SNI ISO 37001-2016 Bribery Management System | CRMS | 11-12 Mei 2020 May 11-12, 2020 |







04

Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Industri

Industry Overview

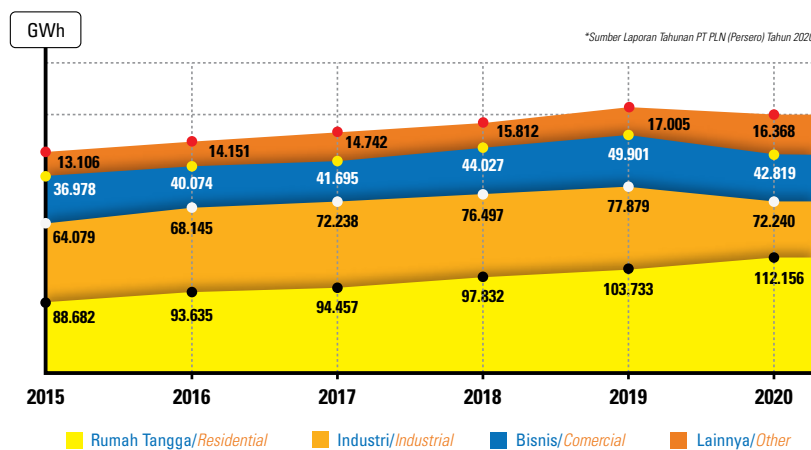
Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 juga mempengaruhi realisasi konsumsi dan produksi listrik di Indonesia. Kebijakan *work from home* (WFH) yang dikeluarkan Pemerintah menyebabkan penurunan konsumsi listrik di sektor industri dan bisnis yang merupakan pelanggan terbesar. Kegiatan masyarakat banyak dilakukan di rumah sehingga membuat konsumsi listrik rumah tangga meningkat. Kenaikan konsumsi listrik di sektor rumah tangga tidak cukup untuk mencapai target PLN sebagai BUMN ketenagalistrikan di Indonesia.

Penjualan listrik PLN mengalami sedikit penurunan sebesar 0,8% menjadi 243,6 TWh dibandingkan tahun 2019, sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh 8,1% karena kebijakan bekerja dan sekolah dari rumah.

Restriction of activity as a result of the COVID-19 epidemic has also impacted Indonesia's electricity usage and output. The Government's work-from-home policy has resulted in a reduction in power usage in the industrial and commercial sectors, which are the biggest consumers. Numerous community events are conducted at home, increasing household power usage. Increased power usage in the home sector is insufficient to meet PLN's goal as Indonesia's state-owned electricity provider.

PLN's energy sales dropped marginally by 0.8% to 243.6 TWh in comparison to 2019, but residential consumption increased by 8.1% owing to the government's work-and-study-from-home policy.

Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik 2015 - 2020
Electricity Sales Growth 2015 - 2020



*Sumber: Laporan Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2020/Source: PT PLN (Persero) Annual Report 2020

PLN berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan menjaga pasokan listrik kepada pelanggan dengan mengoptimalkan pemakaian listrik guna meningkatkan daya saing industri nasional untuk menunjang kemajuan perekonomian, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kontribusi PLN bagi perekonomian Indonesia antara lain melalui:

- 1) Pemberlakuan tarif listrik yang kompetitif sebagai daya tarik untuk industri dan menjaga daya beli masyarakat;
- 2) Peningkatan pelayanan kepada pelanggan; serta
- 3) Peningkatan keandalan layanan.

PLN is dedicated to fulfilling national energy requirements and ensuring customer access to electricity by optimising electricity usage in order to boost national industry's competitiveness, promote economic growth, and ultimately enhance the welfare of the Indonesian people. PLN contributes to the Indonesian economy in three ways:

- 1) *By offering competitive energy prices that attract business and preserve people's buying power;*
- 2) *By improving customer service; and*
- 3) *By improving service dependability.*



Menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak luas, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus pemulihan ekonomi untuk mengatasi dampak COVID-19. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain:

- Menggratiskan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan selama 3 bulan (April, Mei, Juni). Sementara untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan mendapat diskon tarif 50% untuk periode yang sama.
- Memperluas cakupan program pembebasan tarif listrik bagi masyarakat terdampak COVID-19 kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan usaha ultramikro dengan membebaskan tarif tagihan listrik dan pemberian token gratis bagi pelanggan Bisnis Skala Kecil (B1) dan Industri Skala Kecil (I1) yang memiliki sambungan daya 450VA.
- Meluncurkan Program Stimulus Tarif Tenaga Listrik (Stimulus TTL) bagi golongan tarif Bisnis, Industri dan Sosial dengan pembebasan rekening minimum bagi pelanggan Sosial, Bisnis, dan Industri dengan daya dimulai dari 1300 VA ke atas, pelanggan Sosial daya 220 VA sampai dengan 900 VA dan pelanggan Bisnis dan Industri daya 900 VA dimana pelanggan hanya perlu membayar sesuai dengan pemakaian riil.
- Penurunan *tariff adjustment* untuk pelanggan golongan rendah, harga per kWh untuk tarif golongan rendah yang sebelumnya sebesar Rp1.467 per kWh menjadi Rp1.444,70 per kWh atau turun Rp22,5 per kWh.

Faced with a pandemic of COVID-19, the government has implemented a variety of economic stimulus measures to mitigate the pandemic's effect. The government implemented a number of policies, including the following:

- *Three months of free power rates for 450 VA customers, totalling about 24 million subscribers (April, May, June). Meanwhile, 900 VA clients, who total about 7 million, will get a 50% discount for the same time.*
- *Expanding the scope of the COVID-19-affected communities' electricity tariff exemption programme to include micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) and ultra-micro businesses by waiving electricity bill rates and providing free tokens to Small-Scale Business (B1) and Small-Scale Industry (I1) customers with a 450VA power connection.*
- *Launching the Electricity Tariff Stimulus Program (TTL Stimulus) for Business, Industrial, and Social tariff groups, exempting minimum accounts for Social, Business, and Industrial customers with power capacity of 1300 VA or greater, Social customers with capacity of 220 VA to 900 VA, and Business and Industrial customers with capacity of 900 VA, where customers pay only for actual usage.*
- *Tariff adjustment for low class consumers reduced from Rp1,467 per kWh to Rp1,444.70 per kWh, a reduction of Rp22.5 per kWh.*

Pelanggan PLN

Customers of PLN

Jumlah pelanggan PLN pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 44% atau 3.294.419 menjadi 79.000.033 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 75.705.614. Segmen Rumah Tangga meningkat 4,3% atau sebanyak 2.986.804 pelanggan baru sehingga total pelanggan segmen ini menjadi 72.606.681. Segmen ini menjadi segmen yang berkontribusi terbesar yaitu 91,91% terhadap jumlah total pelanggan PLN.

Segmen Industri mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 24,6% dari 104.922 pelanggan pada tahun 2019 menjadi 130.722

In 2020, the number of PLN subscribers will rise by 44%, or 3,294,419, to 79,000,033, up from 75,705,614 in the previous year. The Household sector added 4.3% or 2,986,804 new consumers, bringing the category's total subscribers to 72,606,681. This group contributes the most, accounting for 91.91% of all PLN consumers.

Industrial clients increased by 24.6% from 104,922 in 2019 to 130,722 in 2020. Meanwhile, the Business Segment increased

pelanggan. Sedangkan Segmen Bisnis tumbuh 4,5% dari 3.829.553 pelanggan pada tahun 2019 menjadi 4.001.917 pelanggan. Masing-masing segmen memberikan kontribusi sebesar 0,17% dan 5,07%.

by 4.5%, from 3,829,553 to 4,001,917 customers in 2019. Each section provided 0.17% and 5.07%, respectively.

Tabel: Jumlah Pelanggan per Segmen Pelanggan
Customer Segmentation by Number of Customers

| Segmen Pelanggan Customers Segment | 2020 | 2019 | Perubahan (%) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Rumah Tangga Household | 72.606.681 | 69.619.877 | 4,3 |
| Industri Industry | 130.722 | 104.922 | 24,6 |
| Bisnis Business | 4.001.917 | 3.829.553 | 4,5 |
| Lainnya Others | 2.260.713 | 2.151.262 | 5,1 |
| Jumlah Total | 79.000.033 | 75.705.614 | 4,4 |

**)Sumber: Laporan Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2020/Source: Annual Report 2020, PT PLN (Persero)*

Berdasarkan wilayah, Regional Jawa Madura dan Bali yang mencatat penambahan 1.737.352 pelanggan dan berkontribusi sebesar 62,55% menjadi 49.418.380 pelanggan pada tahun 2020. Sumatra, Kalimantan dan Batam sebanyak 20.566.273 pelanggan dan Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebanyak 9.015.380 pelanggan. Masing-masing memberikan kontribusi sebesar 26,03% dan 11,41%.

According to geography, the Java, Madura, and Bali areas added 1,737,352 consumers and will account for 62.55% of the 49,418,380 customers in 2020. Sumatra, Kalimantan, and Batam accounted for 20,566,273 consumers, while Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara accounted for up to 9,015,380. Each made a contribution of 26.03% and 11.41%, respectively.

Tabel: Jumlah Pelanggan per Wilayah Regional
Customer by Regional Region

| Wilayah Regional Region | 2020 | 2019 | Perubahan (%) Deviation (%) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Sumatra, Kalimantan* | 20.566.273 | 19.582.798 | 5,0 |
| Jawa, Madura dan Bali Java, Madura, and Bali | 49.418.380 | 47.681.028 | 3,6 |
| Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara** Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara** | 9.015.380 | 8.441.788 | 6,8 |
| Jumlah Total | 79.000.033 | 75.705.614 | 4,4 |

**) Termasuk Batam/Including Batam*

****) Sumber: Laporan Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2020/Source: Annual Report 2020, PT PLN (Persero)*



Tingkat Keandalan Layanan

Level of Service Reliability

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik, mengukur tingkat keandalan layanan dengan menggunakan:

1. SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*) yang menghitung lamanya pelanggan mengalami gangguan dalam satuan menit per pelanggan.
2. SAIFI (*System Average Interruption Frequency*) yang menghitung banyaknya jumlah gangguan per pelanggan.

Data SAIDI dan SAIFI nasional yang tercatat oleh Ditjen Ketenagalistrikan pada tahun 2020 adalah data SAIDI dan SAIFI nasional yang berkaitan dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) oleh PT PLN (Persero) yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN.

SAIDI dan SAIFI nasional termasuk indikator dengan polarisasi data *minimize* yang berarti semakin rendah nilai aktual capaian realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya. Pada tahun 2020, SAIDI dan SAIFI mencatat angka yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya yaitu 763,13 dan 9,25.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), as an electrical supplier, determines the degree of service dependability using the following:

1. SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*), which estimates the duration of an interruption for each client in minutes.
2. SAIFI (*System Average Interruption Frequency*), which is used to determine the number of interruptions experienced by each subscriber.

National SAIDI and SAIFI data recorded by the Directorate General of Electricity in 2020 are national SAIDI and SAIFI data relating to the Service Quality Level (TMP) provided by PT PLN (Persero), as regulated in MEMR Regulation Number 18 of 2019 amending MEMR Regulation Number 27 of 2017 concerning Service Quality Levels and Costs Associated with Electricity Distribution by PLN.

National SAIDI and SAIFI are data-polarized indicators, which implies that the closer the actual value/accomplishment/realization is to the goal, the greater the performance achievement. SAIDI and SAIFI both reported higher levels in 2020, with 763.13 and 9.25, respectively.

Tabel: SAIDI – SAIFI per Regional

SAIDI – SAIFI Distribution by Region

| Wilayah Regional Region | SAIDI (menit/pelanggan) SAIDI (minute/customer) | | | SAIFI (kali/pelanggan) SAIFI (times/customers) | | |
|---|--|----------|----------------------------|---|-------|----------------------------|
| | 2020 | 2019 | Perubahan Deviation (%) | 2020 | 2019 | Perubahan Deviation (%) |
| Sumatra, Kalimantan* | 1.055,09 | 1.720,24 | -38,7 | 12,96 | 18,72 | -30,8 |
| Jawa, Madura dan Bali Java, Madura, and Bali | 640,16 | 875,17 | -26,9 | 7,29 | 7,34 | -0,7 |
| Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara** Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara** | 771,12 | 1.340,06 | -42,2 | 11,49 | 15,15 | -24,2 |
| Konsolidasi Consolidation | 763,13 | 1.136,72 | -32,9 | 9,25 | 11,51 | -38,4 |

*) Termasuk Batam/Including Batam

**) Sumber: Laporan Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2020/Source: Annual Report 2020, PT PLN (Persero)

Tinjauan Operasional

Operational Performance Highlights

Sebagai anak perusahaan sekaligus mitra strategis PT PLN, HP bertugas untuk mengamankan layanan operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance/O&M*) jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan untuk pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi tegangan menengah, tegangan rendah, dan jaringan distribusi.

Penugasan dari induk perusahaan juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.459.K/DIR/2012 yang diperbaharui dengan Peraturan Direksi No.734.K/DIR/2013. Dan dalam pelaksanaannya, HP berkerjasama dengan PT Haleyora Powerindo (HPI) untuk menjamin kualitas, kontinuitas dan keandalan operasi PLN dalam memberikan jasanya kepada pelanggan.

Sebagai perusahaan yang tergabung dalam PLN Group, HP juga turut menjalankan strategi SOLID:

1. *Securing Bussines Sustainability PLN Group*: Perusahaan sebagai mitra strategis bagi PLN dalam memberikan jaminan ketersediaan layanan *operation & maintenance* transmisi dan distribusi (O&M T&D);
2. *Optimizing Cost Efficiency PLN Group*: Perusahaan sebagai *asset operator* yang mampu mengoperasikan dan memelihara sistem transmisi dan distribusi (T&D) melalui *Asset Management Contract (AMC)*;
3. *Leading Industry Capabilities PLN Group*: Perusahaan berperan sebagai *trend setter* dan model bisnis bagi penyedia jasa lainnya;
4. *Developing New Edge*: Perusahaan mengembangkan layanan alternatif berbasis digital untuk mengantisipasi *disruptive technologies*.

HP is charged with obtaining operation and maintenance (O&M) services for the electricity transmission and distribution network as a subsidiary and strategic partner of PT PLN, low voltage, and distribution network.

The assignment from the parent company is also affirmed in the Board of Directors' Decree No.459.K/DIR/2012 of PT PLN (Persero), which was amended by the Board of Directors' Regulation No.734.K/DIR/2013 to be able to guarantee the quality, continuity, and reliability of PLN's operations in delivering its services to consumers, HP works with PT Haleyora Powerindo (HPI).

HP, as a PLN Group business, is likewise pursuing the SOLID (Secure, Optimize, Lead, Increase, and Develop New Age) strategy:

1. *Ensuring the Business's Survival PLN Group*: The business serves as a strategic partner to PLN by ensuring the availability of operation and maintenance services for transmission and distribution (O&M T&D);
2. *Cost-Efficiency Optimization PLN Group*: As an asset operator, the company is capable of managing and maintaining the transmission and distribution system (T&D) through Asset Management Contracts (AMCs);
3. *Industry-leading capabilities* The PLN Group serves as a trend setter and business model for other service providers.
4. *Creating a New Edge*: The business creates alternative digital-based services in anticipation of disruptive technology.

Program Prioritas

Program of Priority

| Strategic Objective | Strategic Goal | Strategic Initiatives | Realisasi Program Prioritas Priority Program Realization |
|--|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1. Transformasi PLN PLN Transformation | 1. Improving Customer Service | 1. Outage management | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Autodispatch di JAMALI 2. Yantek Optimization telah dilakukan implementasi <i>cek in</i> dan <i>cek out</i> petugas Yantek untuk pengukuran produktivitas TK dan usulan revisi SE 040 ke Divisi HTD <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementation of Autodispatch in JAMALI 2. Yantek Optimization has carried out the implementation of check-in and check-out of Yantek officers for the measurement of kindergarten productivity and the proposed revision of SE 040 to the HTD Division |



| Strategic Objective | Strategic Goal | Strategic Initiatives | Realisasi Program Prioritas Priority Program Realization |
|---|--|---|---|
| | 2. <i>Continous Performance Management</i> | <p>2. <i>New PLN Mobile</i></p> <p>3. Distribusi ekselen dengan digitalisasi <i>Excellent distribution with digitization</i></p> <p>4. Implementasi ERM dengan penerapan GRC dalam pengambilan keputusan Direksi <i>ERM implementation with GRC implementation in Board of Directors decision making</i></p> <p>5. <i>Execution machine</i> berbasis digital <i>Digital-based execution machine</i></p> | <p>1. Integrasi ListriQu dengan CC123 (Des 2020) 2. Implementasi ListriQu di JAMALI (Sinergi PLNT)</p> <p>1. <i>ListriQu integration with CC123 (Dec 2020)</i> 2. <i>Implementation of ListriQu in JAMALI (PLN Synergy)</i></p> <p>1. <i>Upgrade Yantek ke Pola 2 di 6 UP3 UID Jawa Tengah</i> 2. Implementasi EAM di UIWSB (30 ULP)</p> <p>1. <i>Upgrade Yantek to Pattern 2 at 6 UP3 UID Central Java</i> 2. <i>EAM Implementation at UIWSB (30 ULP)</i></p> <p>1. Penerbitan dan implementasi Perdir GRC 25 September 2020 2. Implementasi kepatuhan dengan sertifikasi SMAP (1 November 2020) dan COS/Compliance Online System (1 Juni 2020)</p> <p>1. <i>Issuance and implementation of Perdir GRC September 25, 2020</i> 2. <i>Implementation of compliance with SMAP certification (November 1, 2020) and COS/ Compliance Online System (June 1, 2020)</i></p> <p>1. ERP : Implementasi PSAK 73 2. Penyusunan ERP <i>Blueprint</i> (Oktober 2020)</p> <p>1. <i>ERP : Implementation of PSAK 73</i> 2. <i>Preparation of ERP Blueprint (October 2020)</i></p> |
| 2. Pengembangan Bisnis <i>Business development</i> | 3. <i>Developing New Business</i> | 6. <i>Beyond kWh</i> | <p>1. <i>Roll out fiber optic</i> (aktivasi iconet) sinergi dengan ICON+ di Jawa Sumatra sebesar 180jt dan tahun 2021 ditargetkan mencapai 14,4 M 2. <i>Electric Vehicle</i> : menyediakan motor listrik Yantek 120 unit 3. <i>Beyond kWh</i> ListriQu sebesar Rp941jt 4. O&M PVR : Pelatihan teknisi PV Rooftop 24 TK 5. <i>Power Quality Management</i> : Melakukan supervisi ke Pelanggan PT Plasindo bersinergi dengan PLN, Puslitbang, LAPI ITB dan Schneider</p> <p>1. <i>Roll out fiber optic (iconet activation) synergy with ICON+ in Java Sumatra is 180 million and in 2021 it is targeted to reach 14.4 billion</i> 2. <i>Electric Vehicle: provides 120 units of Yantek electric motor</i> 3. <i>Beyond kWh ListriQu Rp941 million</i> 4. <i>O&M PVR : 24 Kindergarten Rooftop PV technician training</i> 5. <i>Power Quality Management : Supervise PT Plasindo customers in synergy with PLN, Research and Development Center, LAPI ITB and Schneider</i></p> |
| 3. Penguatan Bisnis Inti | 4. <i>Improving Organization and Human Capital</i> | 7. <i>Core Business Competency</i> | <p>1. Penyiapan Tim CBM di Transmisi dan Distribusi : sertifikasi level 4; 5; 6; <i>e-learning</i> untuk level MR & MAL ; penugasan khusus pengembangan kompetensi untuk level MAL 2. Implementasi AMC di ULP : Persiapan rencana implementasi <i>Pilot Project</i> (Lingkup, Organisasi, Kontrak) 3. <i>Talent Khusus</i>: Tugas belajar & tugas karya ke PLN (4 Orang)</p> <p>1. <i>Preparation of the CBM Team in Transmission and Distribution: level 4 certification; 5; 6; e-learning for MR & MAL levels; special assignment of competency development for MAL level</i> 2. <i>AMC Implementation at ULP : Preparation of Pilot Project implementation plan (Scope, Organization, Contract)</i> 3. <i>Special Talents: Study assignments & work assignments to PLN (4 Persons)</i></p> |

| Strategic Objective | Strategic Goal | Strategic Initiatives | Realisasi Program Prioritas Priority Program Realization |
|---------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | 8. <i>Business Development</i> | Penyiapan <i>talent</i> untuk : CBM Manajemen dasar (3 orang); Supervisory atas (3 orang) <i>Preparation of talents for: CBM Basic management (3 people); Supervisory above (3 people)</i> |
| | 5. <i>Improving Financial Capability</i> | 9. Efisiensi <i>Efficiency</i> | SCM: efisiensi Rp46,1M (17,22% terhadap pagu proyek) <i>SCM: Rp46.1B efficiency (17.22% of project ceiling)</i> |
| | 6. Implementasi HSE demi tercapai Zero Accident HSE implementation to achieve Zero Accident | 10. <i>Zero Accident</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. "Leader bicara <i>safety</i>" oleh Direksi, EVP, M. Region & M. Area minimal 2 kali sebulan 2. <i>Safety Patrol</i> yang menargetkan pelaksanaan inspeksi dengan hasil tahun 2020 temuan 406 ditindaklanjuti 406 dan tahun 2021 temuan 440 ditindaklanjuti 440 (<i>dashboard</i> data inspekta) 3. <i>Monitoring</i> personil dan alat melalui aplikasi siAsset dan SIQ 4. Tilang K3 yang merupakan <i>synergy safety patrol penalty</i> bagi pelaku <i>unsafe action</i> 5. Peningkatan <i>skill</i> tenaga kerja melalui <i>e-learning</i> dan <i>onsite upskilling</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Leader talking about <i>safety</i>" by the Board of Directors, EVP, M. Region & M. Area at least 2 times a month 2. <i>Safety Patrol</i> targeting the implementation of inspections with the results of 2020 findings of 406 being followed up by 406 and in 2021 the findings of 440 being followed up by 440 (<i>inspecta data dashboard</i>) 3. <i>Monitoring</i> personnel and tools through siAsset and SIQ applications 4. OHS ticket which is a <i>synergy safety patrol penalty</i> for unsafe action actors 5. <i>Improvement of workforce skills</i> through <i>e-learning</i> and <i>onsite upskilling</i> |

Kontrak Penugasan

Contract of Assignment

Pada tahun 2020, Perusahaan memiliki 132 (seratus tiga puluh dua) kontrak penugasan pengaman layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi dan Transmisi yang terdapat pada 6 (enam) Unit Induk Distribusi (UID), 5 (lima) Unit Induk Wilayah (UIW), 1 (satu) Unit Induk Penyaluran dan Pengaturan Beban (UIP3B), 1 (satu) Unit Induk Pengaturan Beban (UIP2B) dan 3 (tiga) Unit Induk Transmisi (UIT), yang meliputi 92 (sembilan puluh dua) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)/ Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D)/ Unit Pelaksana Transmisi (UPT)/ Unit Pelaksana Beban (UPB) dan setingkat Unit Layanan Pelanggan (ULP)/ Unit Layanan Transmisi Gardu (ULTG) sebanyak 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh).

In 2020, the Company has 132 (one hundred and thirty-two) contracts for the assignment of security services for Operation and Maintenance of Distribution and Transmission which are located in six Main Distribution Units (UID), five Regional Parent Units (UIW), one Main Unit of Distribution and Load Management (UIP3B), one Main Unit of Load Management (UIP2B) and three Main Unit of Transmission (UIT), which includes ninety two Customer Service Implementing Units (UP3)/Distribution Management Unit (UP2D)/Transmission Implementing Unit (UPT)/Load Implementing Unit (UPB) and at the level of Customer Service Unit (ULP)/Substation Transmission Service Unit (ULTG) as many as 337 (three hundred and thirty seven).



Pertumbuhan Pelanggan

Increase in Customer Base

Bidang Distribusi

Pertumbuhan pelanggan baru Tahun 2020 pada Distribusi sebesar 29 dari target 29 ULP yang ditetapkan, sehingga pencapaian realisasi atas target untuk indikator adalah 100%. Berikut adalah detail dari pelanggan baru pada tahun 2020:

Area of Distribution

In 2020, the growth of new customers in Distribution will be 29 more than the goal of 29 ULP, indicating that the indicator will achieve 100% of its target. The following table summarises the new consumers expected in 2020:

| No. | Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Implementing Customer Service Unit | ULP |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Muara Bungo | Kota Bungo |
| 2. | Muara Bungo | Bangko |
| 3. | Muara Bungo | Sarlangun |
| 4. | Muara Bungo | Muara Tebo |
| 5. | Muara Bungo | Rimbo Bujang |
| 6. | Muara Bungo | KersikTuo |
| 7. | Muara Bungo | Sungai Penuh |
| 8. | Surakarta | Palur |
| 9. | Surakarta | Sumber Lawang |
| 10. | Surakarta | Sragen |
| 11. | Sukaharjo | Karanganyar |
| 12. | Sukaharjo | Wonogiri |
| 13. | Sukaharjo | Jatisrono |
| 14. | Purwokerto | Purwokerto Kota |
| 15. | Purwokerto | Purbalingga |
| 16. | Purwokerto | Ajibarang |
| 17. | Purwokerto | Banjarnegara |
| 18. | Purwokerto | Wonosobo |
| 19. | Belitung | Tanjung Pandan |
| 20. | Belitung | Manggar |
| 21. | Cirebon | Cirebon Kota |
| 22. | Cirebon | Cileduk |
| 23. | Cirebon | Cilimus |
| 24. | Cirebon | Kuningan |
| 25. | Cirebon | Sumber |
| 26. | Indramayu | Hargeulis |
| 27. | Indramayu | Indramayu |
| 28. | Indramayu | Jatibarang |
| 29. | Indramayu | Cikedung |

Bidang Transmisi

Pertumbuhan pelanggan baru tahun 2020 pada Transmisi sebesar 14 dari target 11 ULTG yang ditetapkan, sehingga pencapaian realisasi atas target untuk indikator adalah 110%.

Berikut adalah detail dari pelanggan baru pada tahun 2020:

Field of Transmission

Transmission increased new subscribers by 14 of the 11 ULTG targets in 2020, achieving the indicator's goal of 110%.

The following table summarises the new consumers expected in 2020:

| No. | Unit Pelaksana Transmisi Transmission Executing Unit | ULTG |
|-----|---|--------------------|
| 1. | ULTG Rembang | ULTG Rembang |
| 2. | ULTG Kudus | ULTG Kudus |
| 3. | ULTG Bandung Barat | ULTG Bandung Barat |
| 4. | ULTG Cikarang | ULTG Cikarang |
| 5. | ULTG Purwokerto | ULTG Purwokerto |
| 6. | ULTG Tegal | ULTG Tegal |
| 7. | ULTG Glugur | ULTG Glugur |
| 8. | UPT Padang | ULTG Padang |
| 9. | UPT Padang | ULTG Pariaman |
| 10. | UPT Padang | ULTG Kiliranjao |
| 11. | UPT Padang | ULTG Payakumbuh |
| 12. | UPT Padang | ULTG Bukit tinggi |
| 13. | UPT Pematang Siantar | ULTG Toba |
| 14. | UPT Banda Aceh | ULTG Meulaboh |

Asset Management Contract Distribusi

Contract Distribution for Asset Management

Project Asset Management Contract (AMC) Distribusi meliputi bidang operasi dan pemeliharaan distribusi yang diukur dari penambahan unit PLN setingkat UP3 yang sudah menandatangani kontrak kerja sama AMC Distribusi pada suatu periode tertentu. Kontrak AMC merupakan kontrak yang meliputi peran Perusahaan sebagai *asset operator* sekaligus *asset manager*.

Dalam indikator pertumbuhan AMC Distribusi pada tahun 2020, UP3 yang bekerjasama dengan Perusahaan mencapai target yaitu sebesar 11 UP3 dari target 8 UP3 yang ditetapkan, sehingga pencapaian realisasi atas target untuk indikator adalah 110%. Berikut adalah detail kontrak AMC Distribusi pada tahun 2020:

Project Asset Management Contract (AMC) Distribution encompasses the operation and maintenance of distribution systems as measured by the addition of PLN units at the UP3 level that have signed a cooperation contract with AMC Distribution for a certain term. The AMC contract is a multi-year agreement that includes the Company's responsibilities as both an *asset operator* and an *asset manager*.

In the AMC Distribution growth indication for 2020, UP3 collaborated with the Company to reach the goal of 11 UP3 from the established aim of 8 UP3, achieving a 110% realisation of the indicator's target. The following facts pertain to the AMC Distribution deal for 2020:



| No. | UP3 | ULP |
|-----|---------------|-------------|
| 1. | UP3 Palembang | Rivai |
| 2. | UP3 Palembang | Kenten |
| 3. | UP3 Palembang | Sukarami |
| 4. | UP3 Palembang | Ampera |
| 5. | UP3 Palembang | Mariana |
| 6. | UP3 Palembang | P. Balai |
| 7. | UP3 Palembang | Sekayu |
| 8. | UP3 Ggan Ilir | Inderalaya |
| 9. | UP3 Ggan Ilir | Kayuagung |
| 10. | UP3 Ogan Ilir | Prabumulih |
| 11. | UP3 Ogan Ilir | Tugu Mu Iye |

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA)

Secara gabungan, pencapaian SLA pada periode Tahun 2020 sebesar 98,00%, mengalami kenaikan dari kondisi pencapaian SLA 2019 sebesar 97,78%.

The combined SLA accomplishment rate for the 2020 period was 98.00%, an improvement over the 97.78% achieved in 2019.

| No. | Region | Rata-rata Pencapaian SLA (%) Average SLA Achievement (%) |
|-----|--|---|
| 1. | Region 1 Jawa Barat <i>Region 1 West Java</i> | 98,94 |
| 2. | Region 2 Jawa Tengah dan DIY <i>Region 2 Central Java and DIY</i> | 99,99 |
| 3. | Region 3 Jawa Timur <i>Region 3 East java</i> | 98,08 |
| 4. | Region 4 Sumatera Barat <i>Region 4 West Sumatera</i> | 92,97 |
| 5. | Region 5 DKI Jakarta and Banten <i>Region 5 DKI Jakarta and Banten</i> | 99,07 |
| 6. | Region 6 Wilayah Riau dan Kepulauan Riau <i>Region 6 Riau Region and Riau Islands</i> | 99,93 |
| 7. | Region 7 Sumatera Bagian Selatan <i>Region 7 South Sumatera Region</i> | 97,54 |
| | Jumlah Rata-rata Total Average | 98,00 |

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Quality Management System Certification

Pada tahun 2020, Perusahaan telah memiliki sertifikasi ISO 9001-2015. Dengan standar operasi yang mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, dipastikan Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan *stakeholder*-nya sesuai persyaratan Perundangan, hukum dan peraturan. ISO 9001:2015 yang lebih menekankan pemikiran berbasis risiko dengan keluaran yang diharapkan adalah peningkatan kinerja dan kepuasan pelanggan.

The Company got ISO 9001-2015 certification in 2020. By adhering to operational standards based on the ISO 9001 Quality Management System, the Company ensures that it can fulfil the demands of its customers and stakeholders while adhering to applicable legislation, rules, and regulations. ISO 9001:2015 places a premium on risk-based thinking with the goal of improving performance and customer satisfaction.

Seluruh proses bisnis di Perusahaan telah dinilai oleh LMK-Certification dan telah memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2015 berdasarkan sertifikat No.0542-M tanggal 9 Desember 2019. Sehingga pada tahun 2020 Perusahaan melakukan Resertifikasi proses bisnis sesuai dengan *list* proses bisnis yang tersertifikasi ISO 9001:2015, sebagai berikut:

The Company's business processes have been evaluated by LMK-Certification and found to comply with SNI ISO 9001:2015 standards, as shown by certificate No.0542-M dated December 9, 2019. Thus, in 2020, the Company will recertify business processes in line with the following list of ISO 9001:2015-certified business processes:

| No. | Core Business | Proses Bisnis Tersertifikasi 2019 Certified Business Process 2019 | Proses Bisnis yang akan di Resertifikasi 2020 Business Process to be Recertified 2020 |
|-----|--|--|--|
| 1. | Distribusi <i>Distribution</i> | | |
| | a. Operasi Distribusi : <i>Operational Distribution:</i> | | |
| | - Pelayanan Keandalan Distribusi <i>Distribution Reliability Service</i> | 1 | 1 |
| | b. Pemeliharaan Distribusi : <i>Distribution Maintenance:</i> | | |
| | - Inspeksi Distribusi <i>Distribution Inspection</i> | 1 | 1 |
| | - Pemeliharaan Distribusi <i>Distribution Maintenance</i> | 1 | 1 |
| | c. Deteksi Kabel <i>Cable Detection</i> | 1 | 1 |
| | d. Assessment Kabel | 1 | 1 |
| | e. Operator Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) <i>Diesel Power Plant Operator (PLTD)</i> | 1 | 1 |
| | f. <i>Command Center</i> | 1 | 1 |



| No. | Core Business | Proses Bisnis Tersertifikasi 2019 Certified Business Process 2019 | Proses Bisnis yang akan di Resertifikasi 2020 Business Process to be Recertified 2020 |
|---|--|--|--|
| 2. | Niaga Commerce | | |
| a. | Management Billing Management Billing | 1 | 1 |
| b. | Penyambungan Pelanggan Customer Connection | 1 | 1 |
| c. | Retail Account Marketing (RAM) | 1 | - |
| 3. | Transmisi Transmission | | |
| a. | Operator GI TM GI TM Operator | 1 | 1 |
| b. | Pemeliharaan GI TM GI TM Maintenance | 1 | 1 |
| c. | Operator GI TT GI TT Operator | 1 | 1 |
| d. | Pemeliharaan GI TT GI TT Maintenance | - | - |
| e. | Petugas Ground Patrol (PGP) TT Ground Patrol (PGP) TT Officer | 1 | 1 |
| f. | Pemeliharaan SCADA SCADA Maintenance | 1 | 1 |
| 4. | ListriQu | 1 | 1 |
| Total Proses Bisnis Total Business Process | | 16 | 15 |



Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar

Marketing Aspects and Market Share

Strategi Pemasaran

Marketing Strategies

Saat ini, pelanggan utama Perusahaan adalah PLN. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan selalu mengedepankan misinya mendukung PLN dalam merealisasikan pelayanan sistem distribusi yang andal dan berkualitas dengan secara konsisten memberikan standar layanan tertinggi dan mendukung PLN dalam menerapkan sistem *revenue assurance* (REVASS) dan efisiensi jaringan distribusi tenaga listrik.

The Company's primary client at the moment is PLN. By consistently providing the highest service standards and assisting PLN in implementing a revenue assurance system (REVASS) and increasing the efficiency of the electricity distribution network, the Company has always placed a premium on its mission of assisting PLN in realising reliable and quality distribution system services.

Pangsa Pasar

Market Share

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0030.P/DIR/2017, HP ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja Sumatra, Jawa dan Bali. Saat ini, Perusahaan memiliki 7 *region* dan 3 area khusus yang berada di Sumatra dan Jawa. Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan menguasai 65,81% pangsa pasar pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 72,14% pada tahun 2021.

HP has been appointed to administer the operating regions of Sumatra, Java, and Bali according to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number: 0030.P/DIR/2017. The Company now operates seven regions and three special zones in Sumatra and Java. The Company controls 65.81% of the market in 2020 and is targeting 72.14% in 2021.





Kelangsungan usaha

Continuity of Business

Kondisi lingkungan internal dan eksternal Perseroan masih berada pada posisi yang baik sebagaimana tergambar dalam *roadmap* transformasi hingga tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan program transformasi PT PLN (Persero).

The Company's internal and external environmental circumstances remain favourable, as shown by the transformation roadmap through 2022, which has been modified to align with PT PLN's transformation programme (Persero).



Perusahaan memiliki orientasi jangka panjang untuk mengoptimalkan peran HP dalam mendukung keberlanjutan bisnis PLN sebagai pemegang saham utama. Sasaran utama dari transformasi ini adalah kualitas, reliabilitas, efektivitas biaya dan kepuasan pelanggan sebagai upaya dalam menjaga terus keberlangsungan usahanya.

The firm is focused on the long term in order to maximise HP's contribution to PLN's business sustainability as a significant stakeholder. The primary goals of this change are to preserve company continuity via improved quality, dependability, cost efficiency, and customer happiness.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LPT pada tanggal 23 Juni 2020, HP diminta untuk menyiapkan transformasi usaha yang sebelumnya berbasis penyedia alih daya menjadi perusahaan *services provisioning* yang menerapkan *platform digital* dengan berkoordinasi intensif dengan PLN Pusat.

According to the Minutes of LPT's General Meeting of Shareholders (GMS) on June 23, 2020, HP was tasked with preparing for a business transition from an outsourced provider to a service provider that implements a digital platform in close collaboration with PLN.

Saat ini Perusahaan tengah fokus kepada pencapaian pasar *non captive* yang selaras dengan program Transformasi HP yang terdiri dari:

- ListriQu
- Stroomnet
- Autodispatch

Perusahaan senantiasa melakukan upaya meningkatkan transaksi antar anak perusahaan sebagai wujud dari harmonisasi dan implementasi SOLID di dalam PLN Group.

The Company is now focused on attaining the non-captive market in accordance with the HP Transformation programme, which includes:

- *ListriQu*
- *Stroomnet*
- *Autodispatch*

The firm is continuing to expand interactions across subsidiaries as a means of harmonising and implementing SOLID throughout the PLN Group.



Prospek Usaha Prospective Business

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 secara praktis melumpuhkan perekonomian Indonesia. Pemerintah melakukan segala daya upaya untuk menggerakkan ekonomi dan industri agar dapat memulihkan ekonomi nasional. Dengan adanya relaksasi pembatasan sosial membuat permintaan listrik di sektor komersial dan industri perlahan bergerak naik.

Didalam RUPTL tahun 2020-2029, proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik nasional sebesar 6,42% per tahun. Dasar penentuan meliputi data historis penjualan per segmen pelanggan serta asumsi pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi 10 tahun mendatang. Berdasarkan asumsi tersebut, pada tahun 2028 kebutuhan listrik nasional akan mencapai 432.713 GWh dengan proyeksi jumlah pelanggan mencapai 88,1 juta pelanggan.

The COVID-19 epidemic, which lasted from 2020 until mid-2021, almost brought the Indonesian economy to a halt. The administration is making every effort to re-establish economic and industrial activity in order to rehabilitate the national economy. As societal constraints are eased, demand for electricity in the commercial and industrial sectors gradually increases.

In the 2020-2029 RUPTL, national power consumption is expected to increase at a 6.42% annual rate. The calculation is based on historical sales data by consumer group and projections for population growth, economic growth, and inflation over the following decade. According to these projections, national energy consumption will reach 432,713 GWh in 2028, with a predicted customer base of 88.1 million.

Proyeksi Pertumbuhan Listrik Indonesia 2020 - 2029 Indonesia's Electricity Growth Projection 2020 - 2029

Keterangan/Note:

Untuk skenario Moderat, dengan adanya pandemi COVID-19, target penjualan tertunda selama 2 tahun dibandingkan target sebelum terjadinya pandemi (RO)

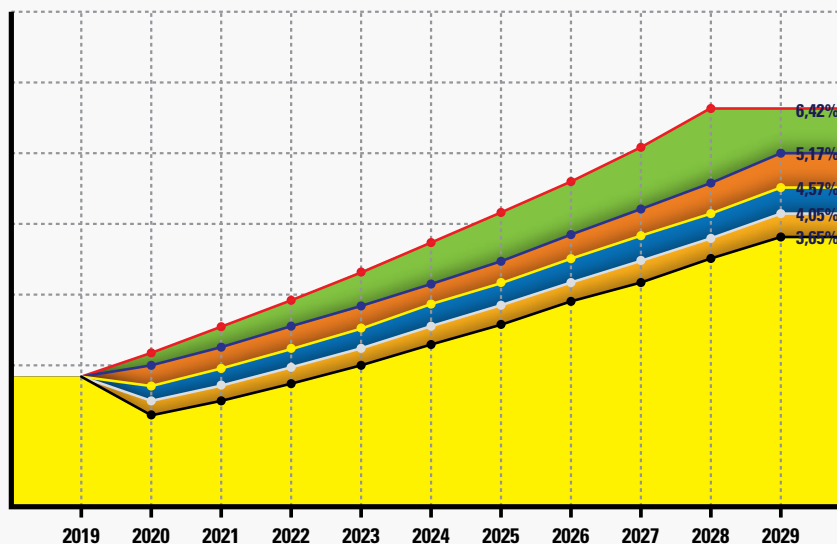
In the Moderate scenario, the sales goal is delayed by two years due to the COVID-19 epidemic (RO)

Recovery Penjualan terhadap 2019/
Sales Rebound in 2019:

■ Draft RUPL 2020 - 2029 Optimis : 2021
2020 - 2029 RUPL Draft Optimistic about the future: 2021

■ Draft RUPL 2020 - 2029 Moderat : 2022
RUPL 2020 - 2029 Draft 2022 : Moderate

■ Draft RUPL 2020 - 2029 Pesimis : 2023
2020 - 2029 RUPL Draft 2023 : pessimistic

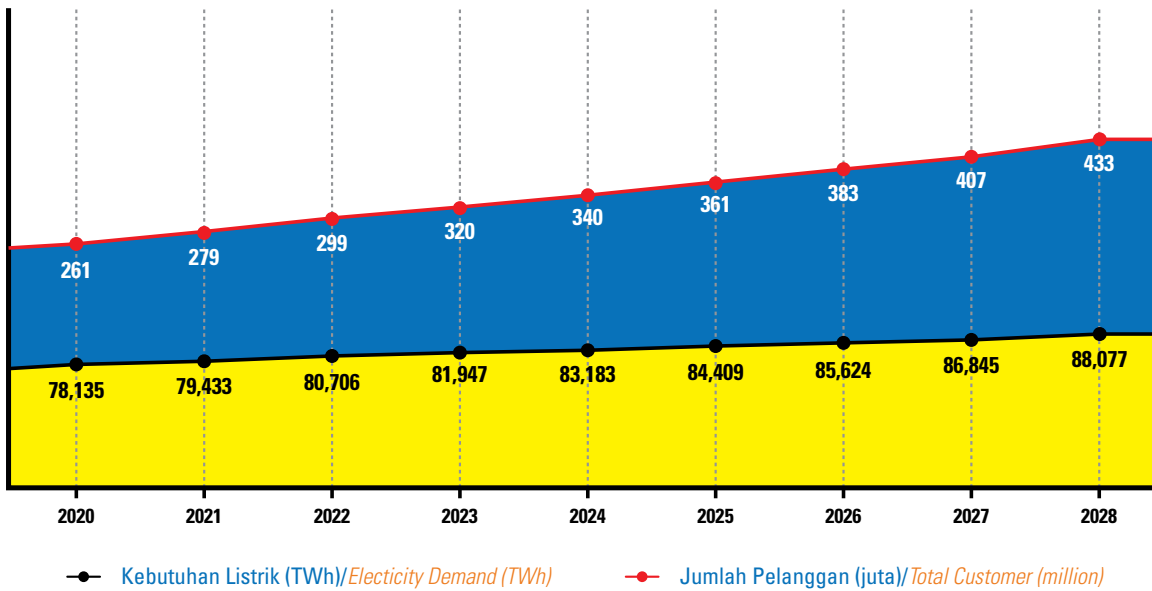


| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ● RUPTL 2019 - 2028 | 245 | 261 | 279 | 299 | 320 | 340 | 361 | 383 | 407 | 433 | - |
| ● Draf RUPTL 2020 - 2029 sebelum COVID | 243 | 254 | 266 | 280 | 295 | 311 | 327 | 345 | 364 | 383 | 402 |
| ● Draf RUPTL 2020 - 2029 Optimis | 243 | 238 | 250 | 265 | 279 | 296 | 311 | 328 | 344 | 361 | 379 |
| ● Draf RUPTL 2020 - 2029 Moderat | 243 | 228 | 239 | 252 | 265 | 281 | 296 | 311 | 327 | 343 | 360 |
| ● Draf RUPTL 2020 - 2029 Pesimis | 243 | 219 | 228 | 241 | 254 | 269 | 283 | 298 | 313 | 328 | 344 |

*)Sumber RUPTL 2019-2028/Refer to RUPTL's 2019-2028 forecast.

Proyeksi Pertumbuhan Pelanggan VS Kebutuhan Daya Listrik

Project Growth of Customer VS Electricity Power Demand



*)Sumber RUPTL 2019-2028/Source RUPTL 2019-2028

Perusahaan menangkap besarnya peluang usaha yang ada di tahun mendatang dengan penugasan dari perusahaan induk dan menargetkan pertumbuhan pangsa pasar sebesar 72,14% di tahun 2021 serta menargetkan pencapaian SLA sebesar 100% dengan tujuan dapat terus mengoptimalkan kualitas kinerja keuangan dan operasional HP.

The company capitalises on the significant business opportunities that exist in the coming year through assignments from the parent company and targets a market share increase of 72,14% in 2021 while maintaining an SLA of 100% with the goal of continuously optimising HP's financial and operational performance.

Perusahaan berkomitmen melaksanakan penugasan PLN dengan sebaik-baiknya untuk memberikan kontribusi penting di dalam meningkatkan kualitas keandalan dan intensitas layanan kepada pelanggan PLN.

The business is dedicated to completing the PLN assignment as efficiently as possible in order to make a significant contribution to PLN customers' service quality, dependability, and intensity.



Tinjauan Keuangan

Analysis of the Financial Situation

Analisis dan pembahasan pada bagian ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang juga disajikan dalam *annual report* (laporan tahunan) ini dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

The analysis and discussion in this part should be read in combination with the audited consolidated financial statements for the fiscal years ended December 31, 2020 and 2019, which are also included in the annual report. and acquire an opinion that is fair in all relevant ways, in line with Indonesian Financial Accounting Standards.

Posisi Keuangan

Financial Position

Aset

Total Aset Perusahaan hingga 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.208,30 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 24,96% atau Rp241,31 miliar dari tahun sebelumnya yaitu Rp966,98 miliar. Kenaikan aset antara lain disebabkan pengakuan Aset Hak Guna sebesar Rp100,3 miliar sebagai akibat implementasi PSAK 73 yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2020, dan peningkatan Kas dan Setara Kas sebesar Rp240 miliar dibandingkan dengan tahun 2019, serta peningkatan jumlah Aset Tetap sebesar 18 miliar dibandingkan dengan tahun 2019.

Asset

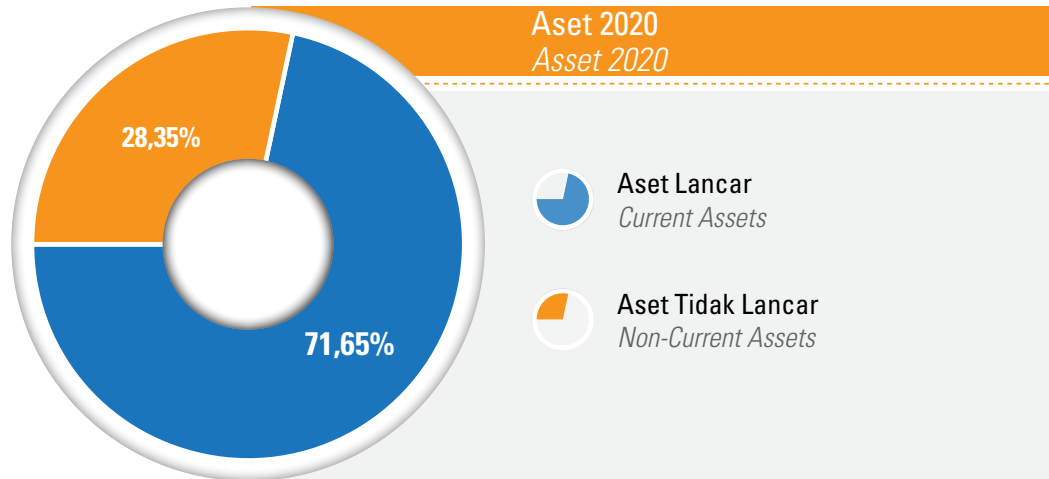
As of December 31, 2020, the Company's total assets were at Rp1,208.30 billion, up 24.96% or Rp241.31 billion from the previous year's level of Rp966.98 billion. The increase in assets was partly due to the recognition of Rp100.3 billion in Right to Use Assets as a result of the implementation of PSAK 73, which became effective on January 1, 2020, and an increase of Rp240 billion in Cash and Cash Equivalents compared to 2019, as well as an increase of 18 billion in the number of Fixed Assets compared to 2019.

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|------------------|----------------|--|---------------|
| | | | Rp | % |
| Aset Lancar Current Assets | 865.803 | 831.622 | 34.181 | 4,11% |
| Aset Tidak Lancar Non-Current Assets | 342.492 | 135.361 | 207.131 | 153,02% |
| Total Aset Total Assets | 1.208.295 | 966.983 | 241.312 | 24,96% |

Komposisi total aset di dominasi oleh aset lancar sebesar 71,65% atau Rp865,80 miliar sedangkan aset tidak lancar sebesar Rp342,49 miliar atau 28,35% dari keseluruhan jumlah aset, sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini:

Current assets accounted for 71.65% or Rp865.80 billions of total assets, while non-current assets accounted for Rp342.49 billion or 28.35% of total assets, as shown in the following chart:


Aset Lancar
Current Assets

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|---------|---------|--|----------|
| | | | Rp | % |
| Kas dan setara kas <i>Cash and cash equivalents</i> | 545.637 | 305.598 | 240.039 | 78,55% |
| Kas yang dibatasi penggunaannya <i>Restricted cash</i> | 3.075 | 59.039 | (55.964) | -94,79% |
| Piutang usaha <i>Accounts receivable</i> | | | | |
| - Pihak berelasi <i>Related Party</i> | 305.944 | 400.621 | (94.677) | -23,63% |
| - Pihak ketiga <i>Third Party</i> | 344 | 335 | 9 | 2,69% |
| Piutang non-usaha <i>Non-trade receivable</i> | | | | |
| - Pihak berelasi <i>Related Party</i> | 5.174 | 126 | 5.048 | 4006,35% |
| - Pihak ketiga <i>Third Party</i> | 3.411 | 4.339 | (928) | -21,39% |
| Pajak dibayar dimuka, bagian lancar <i>Prepaid taxes, current share</i> | | | | |
| - Pajak penghasilan badan <i>Corporate Income Tax</i> | - | 3.075 | (3.075) | -100,00% |
| - Pajak lainnya <i>Other Taxes</i> | 4 | 41.782 | (41.778) | -99,99% |
| Uang muka dan biaya dibayar dimuka <i>Advances and Prepaid Fees</i> | 2.214 | 16.707 | (14.493) | -86,75% |
| Jumlah aset lancar <i>Total Current Assets</i> | 865.803 | 831.622 | 34.181 | 4,11% |



Jumlah aset lancar Perusahaan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,11% menjadi Rp865,80 miliar dari Rp831,62 miliar di tahun 2019. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan:

- Kas dan Setara Kas meningkat dari Rp306 miliar menjadi Rp546 miliar pada akhir tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan dari penjualan dan pelunasan piutang usaha dari pelanggan, serta pemindahan dana dari rekening yang dibatasi penggunaannya dikembalikan kepada Kas dan setara kas.
- Piutang usaha menurun dari Rp401 miliar menjadi Rp306 miliar pada akhir tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan pelunasan piutang yang dilakukan oleh pelanggan, baik atas piutang usaha tahun sebelumnya maupun pelunasan atas piutang tahun berjalan.

Total current assets of the Company grew by 4.11% to Rp865.80 billion in 2020, up from Rp831.62 billion in 2019. Among other factors, the rise was brought about by:

- At the end of 2020, cash and cash equivalents rose from Rp306 billion to Rp546 billion. The rise was mostly attributable to revenues from sales and settlement of customer trade receivables, as well as the repatriation of money from restricted accounts to cash and cash equivalents.
- At the end of 2020, trade receivables fell from Rp401 billion to Rp306 billion. The reduction was attributed to a rise in customer settlements, both for prior-year trade receivables and current-year receivables.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|---------|---------|--|---------|
| | | | Rp | % |
| Aset tetap Fixed Assets | 60.786 | 42.732 | 18.054 | 42,25% |
| Aset hak-guna Right-of-use assets | 100.253 | - | 100.253 | 100,00% |
| Aset tak berwujud Intangible assets | 1.842 | 694 | 1.148 | 165,42% |
| Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates | 49.808 | 48.889 | 919 | 1,88% |
| Pajak dibayar dimuka, bagian tidak lancar Prepaid taxes, non-current parts | | | | |
| - Pajak penghasilan badan Corporate income tax | 28.816 | - | 28.816 | 100,00% |
| - Pajak lainnya Other taxes | 63.993 | - | 63.993 | 100,00% |
| Aset pajak tangguhan Deferred tax assets | 36.105 | 41.442 | (5.337) | -12,88% |
| Aset tidak lancar lain Other non-current assets | 889 | 1.604 | (715) | -44,58% |
| Jumlah aset tidak lancar Total Non-Current Assets | 342.492 | 135.361 | 207.131 | 153,02% |

Peningkatan signifikan juga tercatat pada aset tidak lancar. Pada tahun 2020 aset tidak lancar HP sebesar Rp342,49 miliar dengan pertumbuhan sebesar 153,02% dibanding dengan tahun 2019 sebesar Rp135,36 miliar. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh:

- Aset Hak-Guna meningkat Rp100 miliar pada akhir tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan oleh implementasi PSAK 73 yang berlaku efektif per 1 Januari 2020.
- Pajak dibayar dimuka bagian tidak lancar meningkat Rp93 miliar pada akhir tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan oleh reklasifikasi Pajak dibayar dimuka bagian tidak lancar yang semula dicatat pada Aset Lancar.

Non-current assets also increased significantly. HP's non-current assets were Rp342.49 billion in 2020, up 153.02% from Rp135.36 billion in 2019. Non-current assets increased mostly as a result of the following:

- *At the end of 2020, the right to utilise assets will be raised by Rp100 billion. The increase was necessary owing to the introduction of PSAK 73 on January 1, 2020.*
- *At the end of 2020, the non-current part of prepaid taxes rose by Rp93 billion. The rise was a result of the non-current part of prepaid taxes being reclassified from Current Assets to Non-current Assets.*

Liabilitas

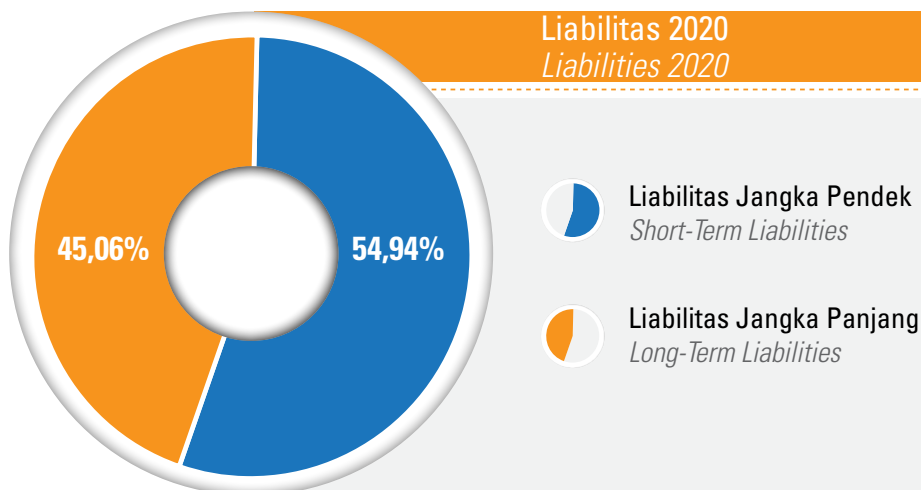
Liabilities

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|---------|---------|--|---------|
| | | | Rp | % |
| Liabilitas Jangka Pendek <i>Short-Term Liabilities</i> | 205.244 | 97.663 | 107.581 | 110,16% |
| Liabilitas Jangka Panjang <i>Long-Term Liabilities</i> | 168.303 | 161.925 | 6.378 | 3,94% |
| Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i> | 373.547 | 259.588 | 113.959 | 43,90% |

Total Liabilitas HP per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp373,55 miliar, meningkat 43,90% atau Rp113,96 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu Rp259,59 miliar. Liabilitas jangka panjang berkontribusi sebesar 54,94% dari total liabilitas sedangkan liabilitas jangka pendek 45,06% dari total keseluruhan liabilitas Perusahaan pada tahun 2020.

As of December 31, 2020, HP's total liabilities were Rp373.55 billion, up 43.90% or Rp113.96 billion from Rp259.59 billion in 2019. In 2020, long-term obligations amounted for 54.94% of total liabilities, while current obligations accounted for 45.06%.

**Liabilitas Jangka Pendek****Short-Term Liabilities**

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian <i>Description</i> | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|---|----------------|---------------|---|----------------|
| | | | Rp | % |
| Utang Usaha <i>Accounts payable</i> | | | | |
| - Pihak Berelasi <i>Related Party</i> | 654 | 420 | 234 | 55,71% |
| - Pihak Ketiga <i>Third Party</i> | 34.215 | 28.126 | 6.089 | 21,65% |
| Utang Lain-Lain <i>Other Payables</i> | | | | |
| - Pihak Berelasi <i>Related Party</i> | 3.094 | 1.604 | 1.490 | 92,89% |
| - Pihak Ketiga <i>Third Party</i> | 15.814 | 1.381 | 14.433 | 1045,11% |
| Biaya Masih Harus Dibayar <i>Accrual Payable</i> | 72.754 | 55.347 | 17.407 | 31,45% |
| Liabilitas Sewa, Jangka Pendek <i>Lease Liability, Short Term</i> | 49.005 | - | 49.005 | 100,00% |
| Utang Pajak <i>Tax debt</i> | | | | |
| - Pajak Penghasilan Badan <i>Corporate Income Tax</i> | - | 7.068 | (7.068) | -100,00% |
| - Pajak Lainnya <i>Other Taxes</i> | 2.835 | 3.717 | (882) | -23,73% |
| Liabilitas Imbalan Pascakerja, Jangka Pendek <i>Post-employment Benefits Liabilities, Short Term</i> | 26.873 | - | 26.873 | 100,00% |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek <i>Total of Short-Term Liabilities</i> | 205.244 | 97.663 | 107.581 | 110,16% |

Liabilitas jangka pendek Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp205,24 miliar meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp97,66 miliar. Penyebab meningkatnya liabilitas jangka pendek dikarenakan peningkatan Liabilitas sewa jangka pendek sebesar Rp49 miliar yang disebabkan oleh implementasi PSAK 73 yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, dan peningkatan liabilitas imbalan pasca kerja jangka pendek yang disebabkan oleh reklasifikasi porsi jangka pendek dari liabilitas imbalan pasca kerja.

The Company's short-term liabilities were Rp205.24 billion in 2020, up from Rp97.66 billion the previous year. The increase in short-term liabilities was caused by an increase of Rp49 billion in short-term rental liabilities as a result of the implementation of PSAK 73 on January 1, 2020, and an increase in short-term post-employment benefits liabilities as a result of the reclassification of the short-term portion of post-employment benefits liabilities.

Liabilitas Jangka Panjang

Long-Term Liabilities

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|---------|---------|--|---------|
| | | | Rp | % |
| Liabilitas Sewa, Jangka Panjang <i>Lease Liability, Long Term</i> | 37.632 | - | 37.632 | 100,00% |
| Liabilitas Imbalan Pascakerja, Jangka Panjang <i>Post-employment Benefits Liability, Long-Term</i> | 130.671 | 161.925 | (31.254) | -19,30% |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang <i>Total of Long-Term Liabilities</i> | 168.303 | 161.925 | 6.378 | 3,94% |

Pada tahun 2020 Liabilitas jangka panjang Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 3,94% dari tahun sebelumnya Rp161,93 miliar menjadi Rp168,30 miliar. Peningkatan tersebut antara lain peningkatan liabilitas sewa jangka panjang sebesar Rp38 miliar yang disebabkan oleh implementasi PSAK 73 yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, dan penurunan liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang yang disebabkan oleh reklasifikasi porsi jangka pendek ke liabilitas jangka pendek.

In 2020, the Company's long-term liabilities rose by 3.94%, from Rp161.93 billion in the previous year to Rp168.30 billion in 2020. The rise was attributable to an increase of Rp38 billion in long-term rental liabilities as a result of the adoption of PSAK 73 on January 1, 2020, and a reduction in long-term post-employment benefits liabilities as a result of the short-term component being reclassified to current liabilities.

Ekuitas

Equity

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|---------|---------|--|-------|
| | | | Rp | % |
| Modal saham: <i>Capital stock:</i> | | | | |
| Modal dasar, ditempatkan dandiseter penuh 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham <i>Authorized, issued and fully paid capital 100,000 shares with a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share</i> | 100.000 | 100.000 | - | 0,00% |



(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|---------|---------|--|--------|
| | | | Rp | % |
| Tambahan modal disetor Additional paid-in capital | 315 | 315 | - | 0,00% |
| Saldo laba Retain earning | 644.858 | 539.919 | 104.939 | 19,44% |
| Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income | 71.258 | 50.759 | 20.499 | 40,38% |
| | 816.431 | 690.993 | 125.438 | 18,15% |
| Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests | 18.317 | 16.402 | 1.915 | 11,68% |
| Jumlah Ekuitas Total Equity | 834.748 | 707.395 | 127.353 | 18,00% |

Ekuitas Perusahaan pada akhir tahun 2020 sebesar Rp834,75 miliar dengan peningkatan sebesar 18,00% dari tahun sebelumnya yaitu Rp707,40 miliar. Peningkatan ekuitas terutama dipengaruhi oleh perolehan laba perusahaan dan penghasilan komprehensif perusahaan.

At the end of 2020, the Company's equity was at Rp834.75 billion, up 18.00% from Rp707.40 billion the previous year. The rise in equity was primarily driven by the profit and comprehensive income of the business.

Laba Rugi dan Penghasilan

Profit and Loss and Income

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|-------------|-------------|--|-------------|
| | | | Rp | % |
| Pendapatan Income | 2.767.679 | 2.513.910 | 253.769 | 10,09% |
| Beban pokok pendapatan Cost of revenue | (2.558.205) | (2.225.980) | (332.225) | 14,92% |
| LABA BRUTO GROSS PROFIT | 209.474 | 287.930 | (78.456) | -27,25% |
| Beban umum dan administrasi General and administrative expenses | (66.802) | (58.753) | (8.049) | 13,70% |
| Penghasilan keuangan Financial income | 7.924 | 9.141 | (1.217) | -13,31% |
| Bagian laba bersih entitas asosiasi Share of net income of associates | 5.956 | 6.717 | (761) | -11,33% |
| Penghasilan/(beban) lain-lain, bersih Other income/(expenses), net | (8.365) | (76) | (8.289) | 10.906,58% |
| Beban keuangan Financial burden | 3.991 | (39) | 4.030 | -10.333,33% |

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------|----------|--|----------|
| | | | Rp | % |
| LABA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE TAX | 152.178 | 244.920 | (92.742) | -37,87% |
| Beban pajak penghasilan Income tax expense | (44.983) | (65.598) | 20.615 | -31,43% |
| LABA TAHUN BERJALAN CURRENT YEAR PROFIT | 107.195 | 179.322 | (72.127) | -40,22% |
| Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan: Other comprehensive income/(loss) for the year: | | | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Items that will not be reclassified to profit or loss: | | | | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Remeasurement of employee benefit liabilities | 26.281 | (8.103) | 34.384 | -424,34% |
| Pajak penghasilan terkait Related income tax | (5.782) | 2.026 | (7.808) | -385,39% |
| Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan Other comprehensive income/(loss) for the year | 20.499 | (6.077) | 26.576 | -437,32% |
| JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR | 127.694 | 173.245 | (45.551) | -26,29% |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to: | | | | |
| Pemilik entitas induk Parent entity owner | 104.939 | 177.350 | (72.411) | -40,83% |
| Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests | 2.256 | 1.972 | 284 | 14,40% |
| | 107.195 | 179.322 | (72.127) | -40,22% |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada: Total comprehensive income for the year attributable to: | | | | |
| Pemilik entitas induk Parent entity owner | 125.438 | 171.273 | (45.835) | -26,76% |
| Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests | 2.256 | 1.972 | 284 | 14,40% |
| | 127.694 | 173.245 | (45.551) | -26,29% |

Pendapatan Usaha

Pendapatan Perusahaan terdiri dari pendapatan O&M dan pendapatan lainnya di mana pendapatan O&M mencakup pekerjaan Pelayanan Jasa Teknik dan Pelayanan Jasa Non Teknik. Pelayanan Jasa Teknik adalah kontributor terbesar dari struktur pendapatan Perusahaan. Pada Tahun 2020, Pendapatan usaha Perusahaan meningkat 10,09% atau sebesar Rp253,77 miliar dari tahun sebelumnya yaitu Rp2.513,91 miliar menjadi Rp2.767,68 miliar.

Operating Revenues

The Company generates revenue via operations and maintenance (O&M) and other sources, with O&M income consisting of Technical and Non-Technical Services. Technical Services accounts for the majority of the Company's income. The Company's operational sales rose by 10.09%, or Rp253.77 billion, to Rp2.767.68 billion in 2020, up from Rp2.513.91 billion the previous year.

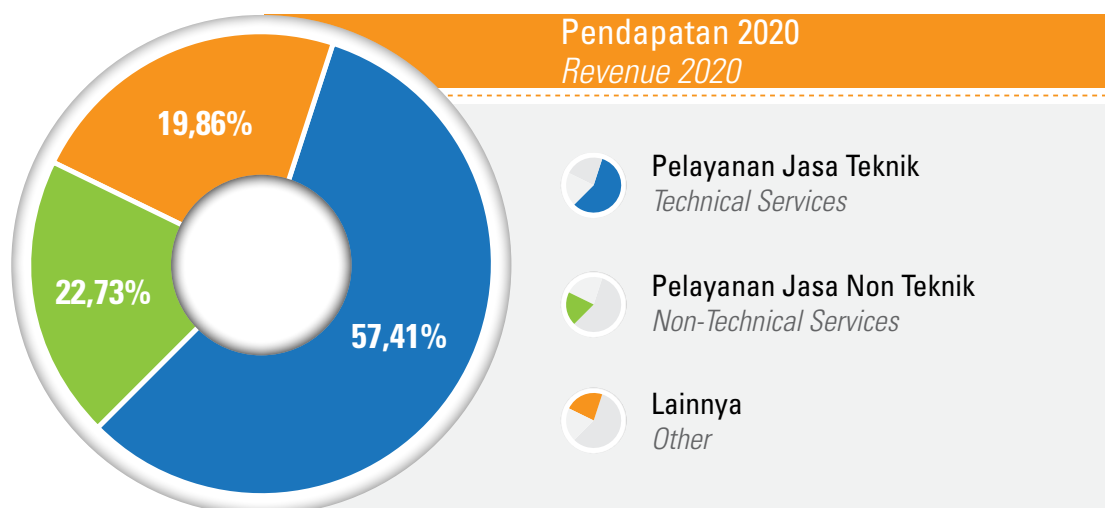


(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|-----------|-----------|--|--------|
| | | | Rp | % |
| Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance | | | | |
| Pelayanan Jasa Teknik Technical Services | 1.588.979 | 1.538.022 | 50.957 | 3,31% |
| Pelayanan Jasa Non Teknik Non-Technical Services | 629.060 | 500.280 | 128.780 | 25,74% |
| Lainnya Other | 549.640 | 475.608 | 74.032 | 15,57% |
| Jumlah Total | 2.767.679 | 2.513.910 | 253.769 | 10,09% |

Peningkatan didominasi oleh pelayanan jasa teknik sebesar 57,41%; diikuti pelayanan jasa non teknik 22,73% dan pendapatan lainnya sebesar 19,86% sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:

The growth was led by technical services, which increased by 57.41%, followed by non-technical services, which increased by 22.73%, and other revenue, which increased by 19.86%, as shown in the following diagram:



Beban Pokok Pendapatan

Pada tahun 2020, beban pokok pendapatan Perusahaan tercatat sebesar Rp2.558,21 miliar, mengalami peningkatan sebesar 14,92% atau Rp332,23 miliar dari tahun sebelumnya yaitu Rp2.225,99 miliar. Peningkatan terutama disebabkan oleh penambahan jumlah proyek *captive* dan ekspansi usaha *non-captive*.

Revenue Costs

The Company's cost of revenue was Rp2,558.21 billion in 2020, up 14.92% or Rp332.23 billion from Rp2,225.99 billion the previous year. The rise was mostly due to the development of non-captive companies and the increase in the number of captive projects.

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|-----------|-----------|--|---------|
| | | | Rp | % |
| Jasa tenaga kerja langsung <i>Direct labour services</i> | 2.108.495 | 1.815.101 | 293.394 | 16,16% |
| Kendaraan operasional <i>Operational vehicle</i> | 103.958 | 153.249 | (49.291) | -32,16% |
| Alat kerja dan material <i>Work tools and materials</i> | 72.262 | 71.875 | 387 | 0,54% |
| Imbalan kerja <i>Work benefits</i> | 46.980 | 42.109 | 4.871 | 11,57% |
| Denda operasional <i>Operational fines</i> | 36.128 | 27.899 | 8.229 | 29,50% |
| Subkontraktor <i>Subcontractor</i> | 32.954 | 12.079 | 20.875 | 172,82% |
| Pemeliharaan <i>Maintenance</i> | 7.697 | 6.933 | 764 | 11,02% |
| Lain-lain <i>Others</i> | 149.731 | 96.735 | 52.996 | 54,78% |
| Jumlah <i>Total</i> | 2.558.205 | 2.225.980 | 332.225 | 14,92% |

Laba Kotor

Laba bruto Perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp209,47 miliar menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu Rp287,93 miliar. Penurunan sebesar 27,25% ini dikarenakan penurunan pencapaian SLA Pekerjaan tahun 2020 sebesar 98,03% turun sebesar 0,1% dari tahun 2019 dan perusahaan merealisasikan biaya COVID-19 untuk menunjukkan kegiatan operasional perusahaan selama masa pandemi sebesar Rp4,2 miliar.

Gross Profit

The Company's gross profit was Rp209.47 billion in 2020, down from Rp287.93 billion in 2019. This reduction of 27.25% was caused by a 98.03% fall in job SLA accomplishment in 2020, a decrease of 0.1% from 2019, and the business realised a cost of Rp4.2 billion for COVID-19 to demonstrate the company's operational operations during the pandemic time.

Beban Umum dan Administrasi

General and Administrative Expenses

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|------------------------------------|--------|--------|--|--------|
| | | | Rp | % |
| Kepegawaian <i>Staffing</i> | 38.965 | 33.063 | 5.902 | 17,85% |
| Honorarium | 11.612 | 11.082 | 530 | 4,78% |
| Pemeliharaan <i>Maintenance</i> | 4.452 | 4.143 | 309 | 7,46% |
| Lain-lain <i>Others</i> | 11.773 | 10.465 | 1.308 | 12,50% |
| Jumlah <i>Total</i> | 66.802 | 58.753 | 8.049 | 13,70% |



Beban umum dan administrasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan 13,70% dari tahun 2019 sebesar Rp58,75 miliar menjadi Rp66,80 miliar. Peningkatan beban umum dan administrasi banyak dikontribusi oleh beban kepegawaian sebesar 58,33%. Beban kepegawaian Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 17,85% menjadi Rp38,97 miliar dari tahun sebelumnya Rp33,06 miliar.

Laba Sebelum Pajak

Perusahaan mencatat laba sebelum pajak pada tahun 2020 sebesar Rp152,18 miliar, terdapat penurunan sebesar 37,87% atau Rp92,74 miliar dari tahun sebelumnya yaitu Rp244,92 miliar. Penurunan laba sebelum pajak Perusahaan dikarenakan Penurunan sebesar 27,25% ini dikarenakan pertama, penurunan pencapaian SLA Pekerjaan tahun 2020 sebesar 98,03% turun sebesar 0,1% dari tahun 2019. Kedua, perusahaan merealisasikan biaya COVID-19 untuk menunjukkan kegiatan operasional perusahaan selama masa pandemi sebesar Rp4,2 miliar. Ketiga, Penurunan Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi pada tahun 2020 sebesar Rp761 Juta atau sebesar 0,11% atas tahun 2019.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp44,98 miliar menurun 31,43% atau Rp20,62 miliar bila diperbandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp65,60 miliar. Penurunan beban pajak penghasilan lebih dikarenakan perolehan laba sebelum pajak tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 37,70% atau sebesar Rp92,742 miliar.

General and administrative expenditures rose 13.70% to Rp66.80 billion in 2020, up from Rp58.75 billion in 2019. The rise in general and administrative costs was mostly due to a 58.33% increase in staff expenses. Personnel expenditures rose 17.85% to Rp38.97 billion from Rp33.06 billion the previous year.

Profit before taxes

Profit before tax was Rp152.18 billion in 2020, down 37.87% or Rp92.74 billion from the previous year's Rp244.92 billion. The Company's profit before tax decreased by 27.25% as a result of the first, a 98.03% drop in job SLA performance in 2020, a decrease of 0.1% from 2019. Second, the business realised a cost of Rp4.2 billion for COVID-19 to demonstrate the company's operational operations during the epidemic. Third, a reduction in associates' net profit share of Rp761 million or 0.11% in 2020 compared to 2019.

Income Taxes

Income tax cost was Rp44.98 billion in 2020, down 31.43% or Rp20.62 billion from Rp65.60 billion the previous year. The reduction in income tax expenditure was attributed to a 37.70% drop in earnings before tax in 2020, or Rp92.742 billion.

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|--------|---------|--|---------|
| | | | Rp | % |
| Beban pajak kini Current tax burden | 45.428 | 74.458 | (29.030) | -38,99% |
| Manfaat pajak tangguhan Deferred tax benefits | (445) | (8.860) | 8.415 | -94,98% |
| Jumlah Total | 44.983 | 65.598 | (20.615) | -31,43% |

Laba Tahun Berjalan

Perusahaan mencatatkan laba tahun berjalan untuk tahun 2020 sebesar Rp107,20 miliar. Mengalami penurunan 40,22% dari tahun sebelumnya yaitu Rp179,32 miliar. Penurunan lebih dikarenakan penurunan pencapaian *service level agreement* sebesar 0,1% dan perusahaan merealisasikan biaya COVID-19 untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan selama masa pandemi sebesar Rp4,2 miliar serta penurunan Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi pada tahun 2020 sebesar Rp761 Juta atau sebesar 0,11% atas tahun 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|---------|---------|--|----------|
| | | | Rp | % |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: <i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i> | | | | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja <i>Remeasurement of employee benefit liabilities</i> | 26.281 | (8.103) | 34.384 | 424,34% |
| Pajak penghasilan terkait <i>Related income tax</i> | (5.782) | 2.026 | (7.808) | -385,39% |
| Jumlah <i>Total</i> | 20.499 | (6.077) | 26.576 | 437,32% |

Pada tahun 2020 Perusahaan mencatat penghasilan komprehensif lain setelah pajak sebesar Rp20,50 miliar dengan peningkatan cukup signifikan sebesar 437,32% dari tahun sebelumnya yaitu (Rp6,08) miliar. Peningkatan terjadi dikarenakan perusahaan mencatat kenaikan keuntungan aktuarial sebesar Rp26,28 miliar berdasarkan hasil laporan akutaria yang telah diterbitkan oleh KKA Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan.

Arus Kas

Jumlah kas dan setara kas HP pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp545,64 miliar, meningkat 78,55% dibanding posisi awal tahun yaitu Rp305,60 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan adanya peningkatan arus kas dari aktivitas operasi.

Current year profit

The business earned Rp107.20 billion in profit for the fiscal year 2020. It dropped by 40.22% from Rp179.32 billion the previous year. The decrease was primarily due to a 0.1% decrease in service level agreement compliance and a Rp4.2 billion cost of COVID-19 to demonstrate the company's operational activities during the pandemic period, as well as a 0.11% decrease in the Net Profit Share of Associated Entities in 2020 over 2019.

Other Comprehensive Income

In 2020, the Company reported other comprehensive revenue after tax of Rp20.50 billion, a substantial increase of 437.32% over the previous year's figure of (Rp6.08) billion. The rise happened as a consequence of an increase in actuarial profit of Rp26.28 billion as a result of the findings of the audit conducted by KKA Tubagus Syafrial and Amran Nangasan.

Cash Flow

HP's cash and cash equivalents were Rp545.64 billion at the end of 2020, up 78.55% from the starting position of Rp305.60 billion. The rise was mostly attributable to an increase in operational cash flows.



(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------|----------|--|----------|
| | | | Rp | % |
| Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Cash Flow From Operating Activities | 274.750 | 24.399 | 250.351 | 1026,07% |
| Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Cash Flow From Investing Activities | 17.897 | (23.185) | 41.082 | -177,19% |
| Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow From Funding Activities | (52.608) | (79.160) | 26.552 | -33,54% |
| Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalents | 240.039 | (77.947) | 317.986 | -407,95% |
| Kas dan Setara Kas Awal Tahun Early Year Cash and Cash Equivalents | 305.598 | 383.545 | (77.947) | -20,32% |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Year End Cash and Cash Equivalents | 545.637 | 305.598 | 240.039 | 78,55% |

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2020 sebesar Rp274,75 miliar, meningkat signifikan 1026,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp24,40 miliar. Peningkatan tersebut utamanya dikarenakan peningkatan penerimaan dari pelanggan akibat penambahan proyek-proyek baru dan proyek-proyek beyond kwh.

Cash Flow from Operating Activities

Net cash flow generated by operational operations was Rp274.75 billion in 2020, a remarkable rise of 1026.07% over the previous year's figure of Rp24.40 billion. The rise was mostly attributable to an increase in customer income as a result of the inclusion of new projects and non-kilowatt-hour projects.

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|-------------|-------------|--|------------|
| | | | Rp | % |
| Penerimaan Dari Pelanggan Receipt From Customers | 2.862.347 | 2.341.358 | 520.989 | 22,25% |
| Pembayaran Kepada Pemasok dan Karyawan Payments to Suppliers and Employees | (2.505.320) | (2.263.037) | (242.283) | 10,71% |
| Penerimaan Penghasilan Keuangan Financial Income Receipt | 7.924 | 9.141 | (1.217) | -13,31% |
| Pembayaran Beban Keuangan Payment of Financial Expense | (8.365) | (76) | (8.289) | 10.906,58% |
| Penerimaan Pengembalian Pajak Tax Return Receipt | 0 | 5.191 | (5.191) | -100,00% |
| Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Payment | (81.836) | (68.179) | (13.657) | 20,03% |
| Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Net Cash Obtained From Operating Activities | 274.750 | 24.398 | 250.352 | 1.026,12% |

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2020, sebesar Rp17,90 miliar meningkat 177,19% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp23,19 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh reklasifikasi akun kas yang dibatasi penggunaannya ke akun Kas dan setara kas.

Cash Flow from Investing Activities

In 2020, net cash flow from investment operations was Rp17.90 billion, up 177.19% from (Rp23.19) billion in 2019. The rise was a result of restricted cash accounts being reclassified as cash and cash equivalents.

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------|----------|--|------------|
| | | | Rp | % |
| Pembelian Aset Tetap Fixed Asset Purchase | (38.775) | (24.275) | (14.500) | 59,73% |
| Pembelian Aset Tak Berwujud Penerimaan/(Penempatan) Purchase of Intangible Assets Receipt/(Placement) | (1.092) | (745) | (347) | 46,58% |
| Kas Yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash | 55.964 | -3470 | 59.434 | -1.712,80% |
| Penerimaan Dividen Entitas Asosiasi Associated Entity Dividend Receipt | 1.800 | 5305 | (3.505) | -66,07% |
| Kas Bersih Diperoleh Dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Obtained From/(Used For) Investing Activities | 17.897 | (23.185) | 41.082 | -177,19% |

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2020, arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp52,61 miliar, menurun 33,54% dari tahun sebelumnya Rp79,16 miliar. Penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan utamanya digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa atas dampak penerapan PSAK 73 yang telah diimplementasikan sejak awal tahun 2020, sedangkan pada 2019 pembayaran liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai Arus Kas Aktivitas Operasi.

Cash Flow from Funding Activities

Cash flows utilized for financing operations were Rp52.61 billion in 2020, down 33.54% from Rp79.16 billion the previous year. Cash is mostly utilized for financing operations due to the impact of PSAK 73, which has been in effect since the beginning of 2020, while in 2019, payment of lease obligations is categorized as Cash Flows from Operating Activities.

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------|----------|--|----------|
| | | | Rp | % |
| Pembayaran Kembali Liabilitas Sewa Pembayaran Dividen Kepada Repayment of Lease Liability Dividend Payment to | (52.267) | 0 | (52.267) | 100,00% |
| Pemilik Entitas Induk Pembayaran Dividen Kepada Owner of Parent Entity Payment of Dividend to | 0 | (69.339) | 69.339 | -100,00% |
| Kepentingan Non-Pengendali Perolehan Modal dari Non-Controlling Interest Capital Acquisition from | (341) | (994) | 653 | -65,69% |
| Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests | 0 | (8.827) | 8.827 | -100,00% |
| Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used for Funding Activities | (52.608) | (79.160) | 26.552 | -33,54% |



Rasio Keuangan

Financial Ratio

| Uraian Description | 2020 | 2019 |
|--|-------|-------|
| Rasio Beban Pokok Pendapatan (%) <i>Cost of Revenue Ratio (%)</i> | 89,61 | 88,55 |
| Rasio Operasi (%) <i>Operating Ratio (%)</i> | 94,85 | 90,26 |
| Rasio Kas (Kali) <i>Cash Ratio (Times)</i> | 3,06 | 3,13 |
| Rasio Lancar (Kali) <i>Current Ratio (Times)</i> | 5,36 | 8,23 |
| Rasio Utang terhadap Aset (%) <i>Debt to Assets Ratio (%)</i> | 30,92 | 26,85 |
| Rasio Utang terhadap Modal (%) <i>Debt to Equity Ratio (%)</i> | 44,75 | 36,70 |
| Margin EBITDA (%) <i>EBITDA Margin (%)</i> | 8,09 | 9,86 |
| Margin Operasi (%) <i>Operating Margin (%)</i> | 5,15 | 9,74 |
| Margin Bersih (%) <i>Net Margin (%)</i> | 3,87 | 7,13 |
| Tingkat Pengembalian Aset (%) <i>Rate of Return on Assets (%)</i> | 9,61 | 18,54 |
| Tingkat Pengembalian Modal (%) <i>Return on Capital (%)</i> | 13,91 | 22,74 |
| Umur Piutang (Hari) <i>Receivable Age (Days)</i> | 47 | 45 |

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dapat diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Tingkat Likuiditas

Ability to Pay Debt and Level of Receivable Collectibility

Solvency and liquidity ratios may be used to determine a company's capacity to fulfil all of its commitments. The solvency ratio is a financial statistic that indicates a business's capacity to repay all of its obligations, both short- and long-term. While the liquidity ratio is a ratio used to assess a business's capacity to service short-term debt.

Ability to Pay Short-Term Debt

The liquidity ratio is used to determine the Company's capacity to pay short-term debt. The cash ratio, quick ratio, and current

Perusahaan dapat dilihat dari rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio lancar (*current ratio*). Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo.

ratio all indicate the company's liquidity level. The greater these ratios are, the more capable the Company is of meeting its maturing commitments.

Pada tahun 2020 seluruh komponen rasio likuiditas perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh naiknya liabilitas sewa jangka pendek atas dampak penerapan PSAK 73 yang telah diimplementasikan sejak awal tahun 2020.

All components of the Company's liquidity ratio declined in 2020 compared to 2019 owing to a rise in short-term lease obligations as a result of the effect of PSAK 73 implementation, which began in early 2020.

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Perubahan (%) Change (%) |
|-------------------------------------|------|------|-----------------------------|
| Rasio Likuiditas Liquidity Ratio | | | |
| Current Ratio (%) | 5,36 | 8,23 | -34,87% |
| Cash Ratio (%) | 3,06 | 3,13 | -2,24% |
| Quick Ratio (%) | 5,36 | 8,23 | -34,87% |

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan Perusahaan membayar kewajiban jangka panjang maupun seluruh utangnya. Rasio ini terdiri dari rasio utang terhadap jumlah aset (*debt to total assets ratio/DAR*) dan rasio utang terhadap jumlah ekuitas (*debt to total equity ratio/DER*). Rasio solvabilitas Perusahaan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Ability to Pay Long-Term Debt

The Solvency Ratio is used to determine the Company's capacity to repay all of its debts and long-term commitments. This ratio is made up of two components: the debt-to-total-assets ratio (DAR) and the debt-to-total-equity ratio (DER). In the past two years, the Company's solvency ratio has been as follows:

Pada tahun 2020, rasio solvabilitas perusahaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan dampak penerapan PSAK 73 yang telah diimplementasikan sejak awal tahun 2020.

The Company's solvency ratio rose in 2020 compared to 2019 as a result of the effect of PSAK 73, which was enacted in early 2020.

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Perubahan (%) Change (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|
| Rasio Solvabilitas | | | |
| Debt to Equity Ratio (DER) | 44,75% | 36,70% | 8,05% |
| Debt to Assets Ratio (DAR) | 30,92% | 26,85% | 4,07% |

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung nilai *collection period*. Nilai *collection period* semakin kecil maka semakin baik kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang.

Accounts Receivable Collectable Level

Calculating the value of the collection period enables the Company's capacity to recover receivables to be evaluated. The shorter the collection time, the more capable the Company is of collecting receivables.



Tahun 2020, *collection period* Perusahaan turun menjadi 47 hari dari tahun sebelumnya 45 hari. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang menurun di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

The Company's collecting period decreased to 47 days in 2020, down from 45 days the previous year. This is because economic circumstances will deteriorate in 2020 as a result of the COVID-19 pandemic.

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Perubahan (%) Change (%) |
|---|--------|-------|-----------------------------|
| Rasio Profitabilitas Profitability Ratio | | | |
| Operating Margin (%) | 5,15 | 9,74 | -47,13% |
| Net Profit Margin (%) | 3,87 | 7,13 | -45,72% |
| Return on Equity (ROE) (%) | 13,91 | 22,74 | -38,83% |
| Return on Investment (ROI) (%) | 18,54% | 24,95 | -25,69% |
| Rasio Aktivitas Activity Ratio | | | |
| Total Asset Turn Over (kali/times) | 2,60 | 2,29 | 13,54% |
| Inventory Turn Over (kali/times) | 0 | 0 | 0% |

Rasio Profitabilitas

Pada tahun 2020, perusahaan mengalami penurunan rasio profitabilitas dikarenakan penurunan *margin* yang dimana pada tahun 2020 telah ditetapkan sebesar 10% sedangkan pada tahun 2019 rata-rata margin pekerjaan sebesar 12,5%.

Profitability Ratio

In 2020, the Company's profitability ratio decreased owing to a reduction in margin, which was set at 10% in 2020 but increased to 12.5% in 2019.

Struktur Modal

Capital Structure

Kebijakan Struktur Modal

Manajemen mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa Perusahaan akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batas rasio kecukupan modal. Manajemen perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. HP berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, dalam mencari pendanaan, Perusahaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

Capital Structure Policy

Capital risk is managed by management to guarantee the Company's viability as a going concern and compliance with the capital adequacy ratio limit. The capital structure of the business is reviewed on a frequent basis by the management. HP tries to keep capital costs low in order to enhance the company's value. As a result, while seeking financing, the Company will constantly consider potential financial risks.

Dasar Pemilihan Struktur Modal

Perusahaan menetapkan kebijakan terkait struktur modal dengan mempertimbangkan:

1. Memperhitungkan penggunaan utang yang proporsional untuk menjaga kemampuan pembayaran kewajiban keuangan (tingkat bunga) dan pokok pinjaman yang sejalan dengan pengendalian likuiditas Perusahaan.
2. Struktur modal terdiri atas kombinasi yang optimal atas utang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan memastikan pelaksanaan program pengembangan usaha.
3. Perusahaan telah memilih kebijakan struktur modal dengan menetapkan batas pemenuhan covenant dari para kreditor.

Basis for Choosing Capital Structure

The Company develops rules regarding modal structure by taking the following into account:

1. Taking into consideration the proportion of debt used to meet financial commitments (interest rate) and loan principal in accordance with the Company's liquidity management.
2. The capital structure is composed of an optimum mix of debt and equity (equity) that maximises the Company's value and enables the Company to execute business growth plans.
3. The business has selected a capital structure strategy that places restrictions on creditors' covenant compliance.

Rincian Struktur Modal

Capital Structure Details

| Uraian Description | 2020 | | 2019 | |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | Jumlah (Rp juta) Amount (Rp million) | Komposisi (%) Composition (%) | Jumlah (Rp juta) Amount (Rp million) | Komposisi (%) Composition (%) |
| Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities | 205.244 | 16,99% | 97.663 | 10,10% |
| Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities | 168.303 | 13,93% | 161.925 | 16,75% |
| Jumlah Liabilitas Total Liabilities | 373.547 | 30,92% | 259.588 | 26,85% |
| Jumlah Ekuitas Total Equity | 834.748 | 69,08% | 707.395 | 73,15% |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity | 1.208.295 | 100,00% | 966.983 | 100,00% |

Struktur modal HP didominasi oleh Ekuitas dibandingkan dengan Liabilitas. Namun pembiayaan aset oleh Liabilitas pada tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 30,92% dan 26,85%. Sedangkan aset yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar 69,08% atau lebih kecil dari tahun 2019 yaitu 73,15%.

In comparison to liabilities, equity dominates HP's capital structure. However, asset financing as a percentage of liabilities remained greater in 2020 than it was the previous year, at 30.92% and 26.85%, respectively. Meanwhile, equity-financed assets were 69.08%, down from 73.15% in 2019.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Bonds for Capital Goods Investment

Sepanjang tahun 2020, HP tidak melakukan pengikatan dengan pihak manapun yang berkaitan dengan investasi barang modal.

Throughout 2020, HP made no commitments to any party on capital goods investment.



Realisasi Investasi Barang Modal

Nilai Aset Tetap Perusahaan pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp60,79 miliar, meningkat 42,25% dibandingkan Rp42,73 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset tetap disebabkan oleh peningkatan investasi yang dilakukan Perusahaan, khususnya pada komponen perlengkapan umum.

Rincian investasi barang modal tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| Jenis Barang Modal Types of Capital Goods | 2020 (Rp juta/million) | 2019 (Rp juta/million) | Selisih Difference | % |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| Tanah Land | - | - | - | - |
| Bangunan Building | - | 165 | (165) | -100,00% |
| Kendaraan Bermotor Motor vehicle | - | - | - | - |
| Perlengkapan umum General equipment | 38.775 | 23.685 | 15.090 | 63,71% |
| Aset dalam penyelesaian Assets in progress | 702 | 425 | 277 | 65,18% |
| Jumlah Total | 39.477 | 24.275 | 15.202 | 62,62% |

Tujuan Investasi Barang Modal

Investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan bertujuan untuk mendukung kinerja operasional Perusahaan sebagai penyedia solusi dalam sistem ketenagalistrikan dan bidang lainnya, yang bergerak di bidang *Distribution, Transmission*, yang berperan sebagai *Service Provisioning* yang *Lean-Green-Innovative-Customer Focused*.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Pada bulan November 2020, Undang-Undang No.11/2020 ("UU Cipta Kerja") tentang Cipta Kerja mulai berlaku. Selanjutnya di bulan Februari 2021, Pemerintah secara resmi mengesahkan 51 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Salah satu dari peraturan pelaksana ini adalah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan pelaksana ini mengatur, antara lain, jangka waktu kontrak untuk

Realization of Capital Goods Investment

At the end of 2020, the Company's Fixed Assets were worth Rp60.79 billion, up 42.25% from Rp42.73 billion the previous year. Fixed assets increased as a result of the Company's increased investment, particularly in the general equipment component.

The following table summarises capital goods investment in 2020:

Purpose of Capital Goods Investment

The Company's capital goods investment seeks to bolster its operational performance as a solution provider in the energy system and other areas, including distribution and transmission, and acting as a *Lean-Green-Innovative-Customer Focused Service Provisioning*.

Material Information and Facts Occurring After the Accountant's Report Date

In November 2020, the Employment Law No.11/2020 ("UU Cipta Kerja") took effect. Additionally, the Government adopted 51 implementing rules for the Job Creation Law in February 2021. Government Regulation No. 35 of 2021 on Certain Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment is one of these implementing rules. This implementing rule provides, among other things, that workers covered by a fixed-term employment agreement have a maximum

karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah lima tahun maksimum dan karyawan ini berhak atas uang kompensasi yang dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja, termasuk pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Grup masih melakukan penilaian atas potensi dampak dari peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

contract length of five years and are entitled to remuneration calculated proportionately to years of service, including severance pay and long service awards. The Group is currently evaluating the possible effect of the Employment Act's implementation restrictions on the Group's consolidated financial statements.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Comparison Between Targets and Realizations and Projections for the Next Year

Perbandingan Target dan Realisasi

Comparison of Target and Actual

| Uraian Description | RKAP 2020 (Rp juta) RKAP 2020 (Rp million) | Realisasi 2020 (Rp juta) Realization 2020 (Rp million) | Realisasi 2019 (Rp juta) 2019 Realization (Rp million) | Pencapaian Achievement (%) |
|---|---|--|--|----------------------------------|
| Pendapatan Usaha Operating revenues | 2.774.481 | 2.767.679 | 2.513.910 | 99,75% |
| Beban Pokok Pendapatan Expenses Cost of Revenue | (2.411.977) | (2.558.205) | (2.225.980) | 106,06% |
| Laba Usaha (Bruto) Operating Profit (Gross) | 275.228 | 209.474 | 287.930 | 76,11% |
| Pendapatan (Beban) Diluar Usaha Income (Expense) Outside Business | 9.089 | 9.506 | 15.743 | 104,59% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax | 284.318 | 152.178 | 244.920 | 53,52% |
| Beban Pajak Tax expense | (80.569) | (44.983) | (65.598) | 55,83% |
| Laba Setelah Pajak Profit After Tax | 203.748 | 107.195 | 179.322 | 52,61% |
| Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year | 0 | 20.499 | (6.077) | - |
| Laba Komprehensif Comprehensive Profit | 203.748 | 127.694 | 173.245 | 62,67% |
| Total Aset Total Assets | 1.135.505 | 1.208.295 | 966.983 | 106,41% |
| Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity | 1.135.505 | 1.208.295 | 966.983 | 106,41% |

Kinerja Perusahaan pada tahun 2020 secara umum belum berada dibawah target yang ditetapkan dalam RKAP 2020. Hal tersebut merupakan dampak pandemi COVID-19 yang membuat tantangan usaha yang dihadapi Perusahaan semakin berat.

In general, the Company's performance in 2020 has been in line with the 2020 RKAP goal. This is the effect of the COVID-19 pandemic, which has exacerbated the Company's commercial difficulties.



Target/Proyeksi 1 (satu) Tahun ke Depan

Target/Projection for the Next 1 (one) Year

| Uraian Description | RKAP 2021 (Rp juta/million) |
|--|-----------------------------|
| Pendapatan Usaha Operating revenues | 3.050.516 |
| Beban Usaha Operating expenses | 2.794.285 |
| Laba Usaha Operating profit | 256.230 |
| Laba Tahun Berjalan Current year profit | 203.712 |
| Laba Bersih Net profit | 203.712 |
| Aset Asset | 1.290.897 |
| Liabilitas Liability | 299.653 |
| Ekuitas Equity | 991.243 |

Memasuki tahun 2021 Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang tertuang pada RKAP 2021. Secara umum Perusahaan menargetkan rata-rata pertumbuhan sebesar 10%.

The Company has established a number of goals for 2021, which are detailed in the 2021 RKAP. In general, the Company aims for an average annual growth rate of 10%.

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Dividen

Perusahaan berusaha untuk memperhatikan hak para pemegang saham tanpa mengabaikan kondisi keuangan Perusahaan. Keputusan pembagian dividen Perusahaan dikaitkan dengan, antara lain laba bersih yang didapat pada tahun fiskal dan kewajiban Perusahaan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku serta kondisi keuangan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ke depan dan rencana ekspansi dalam keputusan pembagian dividen.

Dasar kebijakan pembagian dividen Perusahaan berlandaskan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pembagian dividen dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan.

Dividend Policy

The Company aims to protect shareholders' interests without jeopardising the Company's financial position. Dividend distribution is determined by many factors, including the fiscal year's net profit and the Company's responsibility to deploy reserve money in line with relevant laws and the Company's financial situation. Additionally, the Company analyses future growth rates and development plans when determining dividend distributions.

The Company's dividend distribution policy is based on the provisions of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies, which require that dividends be distributed in line with the Annual GMS resolutions.

Pembagian Dividen Tahun 2020

Dividend Distribution in 2020

| Uraian Description | Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year | Tahun Buku 2018 Fiscal Year 2018 |
|---|-------------------------------------|--|
| Laba Bersih Tahun Sebelumnya (Rp Juta) Previous Year's Net Profit (Rp Million) | 179.322 | 138.681 |
| Jumlah Dividen (Rp Juta) Total Dividend (Rp Million) | - | 69.339 |
| Dividen per Saham (Rp) Dividend per Share (Rp) | - | 69,34 |
| Payout Ratio (%) Payout Ratio (%) | - | 49,99% |
| Tanggal Pengumuman Announcement Date | - | 1 Juli 2019 |
| Tanggal Pembayaran Payment date | - | Termin 1: 11 Desember 2019 Termin 2: 20 Desember 2019 |

Pada tahun 2020, pemegang saham memutuskan untuk tidak melakukan penarikan dividen dan menyalurkan laba untuk pengembangan usaha Perusahaan.

In 2020, the shareholders decided not to withdraw dividends and distribute profits for the Company's business development.

Kepatuhan Pembayaran Pajak

Tax Payment Compliance

Saldo pajak dibayar dimuka per 31 Desember 2020 lebih besar dari Saldo 31 Desember 2019 dikarenakan adanya kenaikan PPN Masukan yang terus terkompensasi ke masa berikutnya dikarenakan Perusahaan bertransaksi dengan Wajib Pungut (WAPU) dan belum melakukan restitusi pajak tahun 2017 s.d 2019.

The balance of prepaid taxes as of December 31, 2020 is higher than the amount at December 31, 2019 owing to an increase in input VAT that will be compensated for in the future as a result of the Company dealing with the Collector (WAPU) and not issuing tax refunds for 2017 to 2019.

Sampai dengan 31 Desember 2020 pelaporan yang sudah dilakukan oleh bidang pajak, antara lain :

As of December 31, 2020, the following reports have been completed by the tax sector:

1. Pelaporan PPh dan pelaporan PPN masa Januari – Desember 2020
2. Pengumpulan bukti potong PPh 23 tahun 2020 yang akan digunakan sebagai kredit pajak dalam PPh Badan tahun 2020 walaupun diasumsikan Setoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 nya sudah menjadi kredit pajak.

1. *Periodic reporting of Income Tax (PPh) and VAT for the period January – December 2020*
2. *Collecting evidence of 23 Income Tax withholding in 2020 that will be utilised as a tax credit in the 2020 Corporate Income Tax, despite the fact that it is anticipated that the Article 23 and Article 25 Income Tax Deposits have been converted to tax credits.*



| No. | Uraian Description | Saldo 31 Desember 2020 Balance December 31, 2020 | Saldo 31 Desember 2019 Balance December 31, 2019 |
|-----|--|---|---|
| 1. | Setoran PPh ps. 22 <i>PPh deposit ps. 22</i> | - | - |
| 2. | Setoran PPh ps. 23 <i>PPh deposit ps. 23</i> | - | - |
| 3. | Setoran PPh ps. 25 <i>PPh deposit ps. 25</i> | - | - |
| 4. | PPH karyawan ps. 21 yg lebih disetor <i>PPh employees ps. 21 more deposited</i> | 2.922 | 54.389 |
| 5. | PPN Masukan <i>Input VAT</i> | 63.992.484 | 35.921.784 |
| 6. | Bea materai yang disetorkan lebih dahulu <i>Stamp duty deposited in advance</i> | - | - |
| 7. | Setoran Pajak lainnya <i>Other Tax Deposit</i> | 28.816.917 | 9.417.344 |
| 8. | Setoran Pajak Fikal ps 24 <i>Fical Tax Deposit ps 24</i> | - | - |
| 9. | Lebih Bayar PPN Masukan - PPN Keluaran <i>Overpaying Input VAT - Output VAT</i> | - | - |
| | Jumlah Total | 92.812.323 | 45.393.518 |

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan atau Manajemen

Share Ownership Program by Employees and/or Management

HP dimiliki oleh PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dan belum pernah melakukan *Go-Public* atau penjualan saham kepada masyarakat; oleh karena itu, tidak ada kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) dan tidak ada kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise*.

HP is owned by PT PLN (Persero) and the PT PLN (Persero) Education and Welfare Foundation, and has never gone public or sold shares to the public; as a result, there is no employee stock ownership or an employee stock option programme (ESOP), and no management stock ownership or a management stock option programme (MSOP). Thus, there is no information on the quantity of ESOP/MSOP shares issued and their realisation, the time period during which they were issued, the eligibility criteria for eligible workers and/or management, or the exercise price.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat informasi dan fakta material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang dan modal yang terkait dengan HP.

Throughout 2020, there was no significant information or facts pertaining to HP's investments, expansions, divestitures, company mergers/consolidations, acquisitions, debt or capital restructuring.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Proceeds From the Public Offering

Hingga 31 Desember 2020, Perusahaan bukan merupakan perusahaan publik dan belum pernah melakukan aktivitas penawaran umum. Dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana dan rincian penggunaan dana.

The Company is not a public company and has never engaged in public offering activity as of December 31, 2020. As a result, there is no information on the overall amount of funds acquired, the plans for their use, or the specifics of their usage.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information on Material Transactions That Contain Conflicts of Interest and/or Transactions With Affiliated Parties

Transaksi Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan. PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), memiliki sifat hubungan relasi sebagai pemegang saham Perusahaan. Sehingga tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama periode pelaporan.

Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.

Conflict of Interest Transactions and/or Transactions with Affiliated Parties

Conflict of Interest exists when the economic interests of the business conflict with the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or significant shareholders. PT PLN (Persero) and the PT PLN (Persero) Education and Welfare Foundation have a connection as shareholders of the Company. So that no transactions with potential conflicts of interest occur throughout the reporting period.

Affiliated Transactions are those in which the Company or Controlled Companies engage in business with Affiliates of the Company or Affiliates of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the Company's major shareholders.

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga Perusahaan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK Nomor 7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa HP telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar.

Fairness and Reasons for the Transaction

Because all transactions with related parties were conducted in line with the rules and conditions agreed upon by both parties, the Company believes that all transactions remain within acceptable limitations under PSAK Number 7 (Revised 2010) regarding Related Party Disclosure. This demonstrates that HP dealt equitably with connected parties.



Kebijakan Perusahaan tentang Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan Terkait

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan telah diaudit oleh auditor independen.

Company Policy regarding the Review Mechanism of Transactions and Compliance with Related Regulations

Transactions involving linked parties are reviewed via an audit procedure conducted by both internal and external auditors. To verify the fairness of transactions and compliance with Indonesia's generally accepted accounting standards, the Company's related transaction reports have been audited by independent auditors.

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau pengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.

- Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN merupakan pemegang saham Perusahaan.
- EPI merupakan entitas asosiasi Perusahaan.
- IP, PJB, PLN Batam, ICON+, PLNE, PLN Batubara, PLN Tarakan, PLN Gas dan Geothermal dan BAG merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personel manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Name and Nature of Relationship

Related parties are companies and individuals who have direct or indirect ownership or management relationships with the Company.

- The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PLN and State-Owned Enterprises (BUMN).*
- PLN and the PLN Education and Welfare Foundation are shareholders of the Company.*
- EPI is an associate entity of the Company.*
- IP, PJB, PLN Batam, ICON+, PLNE, PLN Coal, PLN Tarakan, PLN Gas and Geothermal and BAG are companies whose shareholders are the same as the main shareholders of the Company and or part of the management is the same as the Company.*
- The Board of Commissioners and the Board of Directors are key management personnel of the Company and its subsidiaries.*

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Perusahaan beserta sifat dari transaksi tersebut

The table below shows the details of related parties with the Company and the nature of the transactions

| Nama Pihak Berelasi <i>Related Party Name</i> | Sifat Pihak Berelasi <i>Nature of Related Parties</i> | Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i> |
|--|--|---|
| PLN | Entitas induk Perusahaan <i>Parent entity of the Company</i> | Piutang usaha, piutang non-usaha, utang usaha, utang lain-lain, pendapatan Jasa dan denda operasional. <i>Trade receivables, non-trade receivables trade payables, other payables, service revenue and operational penalty</i> |
| BNI | Entitas berelasi dengan Pemerintah <i>Government-related entity</i> | Penempatan kas dan setara kas dan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya. <i>Placement of cash and cash equivalents and placement of restricted cash</i> |
| YPK PLN | Pemegang saham <i>Shareholder</i> | Utang lain-lain <i>Other payables</i> |

| Nama Pihak Berelasi Related Party Name | Sifat Pihak Berelasi Nature of Related Parties | Jenis Transaksi Transaction Type |
|---|---|--|
| Mandiri | Entitas berelasi dengan Pemerintah <i>Government-related entity</i> | Penempatan kas dan setara kas dan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya <i>Placement of cash and cash equivalents and placement of restricted cash</i> |
| BRI | Entitas berelasi dengan Pemerintah <i>Government-related entity</i> | Penempatan kas dan setara kas <i>Placement of cash and cash equivalents</i> |
| BRI Syariah | Entitas berelasi dengan Pemerintah <i>Government-related entity</i> | Penempatan kas dan setara kas <i>Placement of cash and cash equivalents</i> |
| BNI Syariah | Entitas berelasi dengan Pemerintah <i>Government-related entity</i> | Penempatan kas dan setara kas <i>Placement of cash and cash equivalents</i> |
| ICON | Entitas sependali dengan Perusahaan <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha, utang lain-lain dan dan pendapatan jasa <i>Trade receivables, other payables and service revenue</i> |
| PLNT | Entitas sependali dengan Perusahaan <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha dan pendapatan jasa <i>Trade receivables and service revenue</i> |
| PLN Batam | Entitas sependali dengan Perusahaan <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha, utang lain-lain dan dan pendapatan jasa <i>Trade receivables, other payables and service revenue</i> |
| IP | Entitas sependali dengan Perusahaan <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha, utang lain-lain dan dan pendapatan jasa <i>Trade receivables, other payables and service revenue</i> |
| PJB | Entitas sependali dengan Perusahaan <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha dan pendapatan jasa <i>Trade receivables and service revenue</i> |
| PLNE | Entitas sependali dengan Perusahaan <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha dan pendapatan jasa <i>Trade receivables and service revenue</i> |
| PLNBB | Entitas sependali dengan Perusahaan <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha, utang usaha dan pendapatan jasa <i>Trade receivables, trade payables and service revenue</i> |
| BAG | Entitas sependali dengan Perusahaan <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha dan pendapatan jasa <i>Trade receivables and service revenue</i> |
| PLNGG | Entitas sependali dengan Perusahaan <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha dan pendapatan jasa <i>Trade receivables and service revenue</i> |

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Realization of Related Party Transactions

| | 2020 | | 2019 | |
|-----------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | Rp (juta/million) | %*) | Rp (juta/million) | %*) |
| Pendapatan <i>Income</i> | | | | |
| PLN | 2.516.424 | 90,95% | 2.274.054 | 90,46% |
| ICON | 99.418 | 3,59% | 75.851 | 3,02% |
| PLN Batam | 81.051 | 2,93% | 75.468 | 3,00% |
| IP | 33.170 | 1,20% | 34.990 | 1,39% |
| PLNBB | 12.416 | 0,45% | 12.042 | 0,48% |
| PJB | 7.972 | 0,29% | 18.704 | 0,74% |
| PLNT | 6.747 | 0,24% | 14.436 | 0,57% |
| PLNE | 6.103 | 0,22% | 5.966 | 0,24% |



| | 2020 | | 2019 | |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Rp (juta/million) | %*) | Rp (juta/million) | %*) |
| PLNGG | 1.489 | 0,05% | 1.894 | 0,08% |
| BAG | 2.027 | 0,07% | 443 | 0,02% |
| | 2.766.817 | 100,00% | 2.513.848 | 100,00% |
| Denda operasional <i>Operational fines</i> | | | | |
| PLN | 36.128 | 100,00% | 27.899 | 100,00% |

%)*) Persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas/ pendapatan/ beban yang bersangkutan/Percentage of total assets/liabilities/income/expenses concerned

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi telah melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Hal ini adalah sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Fulfilment of Relevant Rules and Conditions

The method for evaluating transactions involving linked parties has been an audit procedure conducted by both internal and external auditors. This is an attempt to guarantee transactional fairness and compliance with Indonesia's generally recognised accounting standards.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Changes in the Laws and Regulations of the Company in the Last Financial Year

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan.

Throughout 2020, no major changes in laws or regulations impacted the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Changes in Accounting Policies Applied by the Company in the Last Financial Year

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap Kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan dari standar-standar dan amandemen yang relevan terhadap kegiatan operasional Grup dan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

The Company adopted a new PSAK and ISAK on January 1, 2020, which became effective on that date. The Company's accounting policies have been adjusted in accordance with transitory provisions included in the applicable standards and interpretations. The following describes the application of standards and changes that are relevant to the Group's activities and may have a material effect on the consolidated financial statements:

1. Penerapan atas PSAK 71
PSAK 71 "Instrumen Keuangan" menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan

1. PSAK 71 application
PSAK 71 "Financial Instruments" supersedes PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces

memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian ("KKE"), yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Perusahaan menerapkan metode sederhana untuk mengukur KKE yang disyaratkan oleh PSAK 71 yang mengharuskan penggunaan provisi kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang. Penerapan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, tidak ada perubahan jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020 sesuai klasifikasi baru atas penerapan PSAK 71.

2. Penerapan atas PSAK 72

Perusahaan menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

3. Penerapan atas PSAK 73

Perusahaan menerapkan PSAK 73 "Sewa" yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi Grup tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Pada saat penerapan PSAK 73, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30: Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar

new arrangements for classifying and measuring financial instruments based on the business model and contractual cash flows, as well as for the recognition and measurement of allowance for impairment losses on financial instruments using the loss model expected credit ("KKE").

The Company uses a straightforward approach to calculate KKE in accordance with PSAK 71, which mandates the adoption of a lifetime anticipated loss provision for all receivables. The adoption has had no material effect on the consolidated financial statements of the Company.

According to the revised categorization for the application of PSAK 71, there was no change in the carrying amount of financial assets and liabilities as of January 1, 2020 based on the evaluation of the business model and contractual cash flows.

2. PSAK 72 application

For the fiscal year beginning January 1, 2020, the Company adopted PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" successfully. PSAK 72 adoption had no material effect on the Company's consolidated financial statements.

3. PSAK 73 application

The Company implemented PSAK 73 "Leases" on January 1, 2020, but did not restate comparable data for the prior reporting period as allowed by the standard's specific transitional provisions.

When PSAK 73 was implemented, the Company recognised right-of-use assets and lease liabilities in connection with leases that were previously categorised as 'operating leases' in accordance with the criteria set out in PSAK 30: Leases. Lease obligations are determined by discounting the remaining lease payments to the Company's incremental borrowing rate on January 1, 2020. The incremental interest rate chosen is a weighted average of 7.42% to 7.95%. Right-of-use assets



7,42%-7,95%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran dimuka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset tidak lancar Perusahaan meningkat sebesar Rp132.602 dan total kewajiban Perusahaan meningkat sebesar Rp120.501.

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Penyesuaian tahunan 2020 "Kerangka Konseptual 2019"
- PSAK 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- PSAK 102 "Akuntansi Murabahah"
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- ISAK 36 "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16, Aset Tetap dan PSAK No 73, Sewa"
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Amandemen PSAK 73 "Konsesi Sewa terkait COVID-19"
- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55 dan Amandemen PSAK 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga
- Penyesuaian tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ("PPSAK") 13 mengenai pencabutan PSAK 45 "Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba"

are valued at the same level as lease liabilities, less any advance payments or accumulated lease payments related to leases reported in the statement of financial position as of December 31, 2019. By adopting this standard, the Company's non-current assets rose by Rp132,602 and its total liabilities increased by Rp120,501 as of January 1, 2020.

The adoption of new accounting standards, interpretations, amendments, and annual adjustments to accounting standards, all of which become effective on January 1, 2020, did not result in material changes to the Company's accounting policies or have a material effect on the amounts reported in the current year's consolidated financial statements:

- *Annual modification for 2020 to the "2019 Conceptual Framework"*
- *PSAK 101 "Islamic Financial Statements Presentation"*
- *PSAK 102 "Murabaha Accounting"*
- *ISAK 35 "Presentation of Non-Profit Entity-Oriented Financial Statements"*
- *ISAK 36 "Interpretation of the Land Rights Provisions in PSAK 16, Fixed Assets, and PSAK No. 73, Rent"*
- *ISAK 101 "Acknowledgement of Tangguh Murabahah Revenue Without Significant Inventory Ownership Risks"*
- *ISAK 102 "Murabahah Receivables Impairment"*
- *Amend PSAK 1 "Presentation of Financial Statements" with regard to the title of the financial statements*
- *Modification of PSAK 15 "Investments in Associates and Joint Ventures"*
- *Modification of PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors"*
- *Modification of PSAK 62 "Insurance Contract"*
- *Modification of PSAK 71 "Financial Instruments - Accelerated Repayment with Negative Compensation"*
- *Amending PSAK 73, "Lease Concessions for COVID-19"*
- *Amendments to PSAK 71, PSAK 55, and PSAK 60 relating to Interest Rate Reference Reform*
- *Adjustment of PSAK 1 "Presentation of Financial Statements" on an annual basis*
- *Statement of Revocation of Financial Accounting Standards ("PPSAK") 13 relating to the repeal of PSAK 45 "Financial Reporting for Non-Profit Organizations"*

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level

Skor penilaian KPI Perusahaan pada tahun 2020 adalah 95,51 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 91,57. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk pada kategori "AAA" atau kondisi "SEHAT".

In 2020, the Company's KPI evaluation score was 95.51, up from 91.57 the previous year. According to the Minister of State's Decree KEP-100/MBU/2002, the company's health status is "AAA" or "HEALTHY".

| No. | Perspektif Perspective | Nilai % Score % | |
|-------|---|--------------------|-------|
| | | 2020 | 2019 |
| 1. | Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction</i> | 9,70 | 9,70 |
| 2. | Efektifitas Produk dan Proses <i>Product and Process Effectiveness</i> | 53,96 | 53,96 |
| 3. | Fokus Tenaga Kerja <i>Workforce Focus</i> | 3,93 | 3,93 |
| 4. | Keuangan dan Pasar <i>Finance and Markets</i> | 26,76 | 26,76 |
| 5. | Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan <i>Leadership, Governance and Community Responsibility</i> | 1,16 | -3,60 |
| TOTAL | | 95,51 | 91,57 |

Tabel Pencapaian KPI

Table of KPI Achievement

| No. | Indikator Kinerja Performance Indicator | Satuan Unit | Bobot Weight | Target | Realisasi (%) Realization (%) | Pencapaian Achievement | Nilai Score |
|-----|---|------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| I. | FOKUS PELANGGAN <i>CUSTOMER FOCUS</i> | | 12 | | | | 9,70 |
| 1.1 | Indeks Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Index</i> | Indeks <i>Index</i> | 12 | 88,50 | 71,54 | 80,84% | 9,70 |
| II. | EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES <i>PRODUCT AND PROCESS EFFECTIVENESS</i> | | 52 | | | | 53,96 |
| 2.1 | Pencapaian Service Level Agreement (SLA) Pekerja sesuai penugasan <i>Achievement of Service Level Agreement (SLA) Work as assigned</i> | % | 12 | 100,00 | 98,00 | 98,00% | 11,76 |
| 2.2 | Pertumbuhan Pelanggan Baru: <i>New Customer Growth:</i> | | | | | | |
| a. | Transmisi <i>Transmission</i> | % | 12 | 100,00 | 127,27 | 110,00% | 13,20 |
| b. | Distribusi <i>Distribution</i> | % | 12 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 12,00 |
| 2.3 | AMC Distribusi <i>AMC Distribution</i> | Unit | 10 | 8 | 11 | 110,00% | 11,00 |



| No. | Indikator Kinerja Performance Indicator | Satuan Unit | Bobot Weight | Target | Realisasi (%) Realization (%) | Pencapaian Achievement | Nilai Score |
|------|--|--------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---|----------------|
| 2.4 | Sertifikasi Tenaga Kerja <i>Labour Certification</i> | % | 6 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 6,00 |
| III. | FOKUS TENAGA KERJA <i>LABOR FOCUS</i> | | 4 | | | | 3,93 |
| 3.1 | HCR (Level/Levels) | Level | 2 | 4,18 | 4,18 | 100,00% | 2,00 |
| 3.2 | OCR (Level/Levels) | Level | 2 | 4,18 | 4,05 | 96,89% | 1,93 |
| IV. | KEUANGAN DAN PASAR <i>FINANCE AND MARKET</i> | | 27 | | | | 26,76 |
| 4.1 | Pendapatan Usaha Pengembangan Produk "ListriQu" <i>Product Development Business Revenue "ListriQu"</i> | Rp Juta <i>Rp Million</i> | 9 | 833,33 | 847,20 | 101,66% | 9,14 |
| 4.2 | Rasio Operasi <i>Operating Ratio</i> | % | 13 | 90,08 | 94,85 | 94,70% | 12,31 |
| 4.3 | Sinergi Antar Anak Perusahaan lain <i>Synergy Between Other Subsidiaries</i> | Rp Miliar <i>Rp billion</i> | 5 | 240,08 | 255,33 | 106,35% | 5,31 |
| V. | KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN <i>LEADERSHIP, GOVERNANCE & COMMUNITY RESPONSIBILITY</i> | | 5 | | | | 1,16 |
| 5.1 | Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) <i>Implementation of Good Corporate Governance (GCG)</i> | Skor <i>Score</i> | 5 | 87,19 | 83,05 | 95,25% | 4,76 |
| 5.2 | Penyelesaian Temuan Audit (BPK, KAP, SPI dan Auditor lainnya) <i>Completion of Audit Findings (BPK, KAP, SPI and other Auditors)</i> | | Max -5 | | | | |
| 5.3 | Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup) <i>Compliance with K3LH (Health, Occupational Safety & Environment)</i> | | Max -10 | | -3,60 | | -3,60 |
| 5.4 | Keselaran terhadap Program Strategis Korporat <i>Alignment with Corporate Strategic Programs</i> | | | | | | |
| | Total Skor <i>Total Score</i> | | 100 | | | Hasil Evaluasi LEK <i>LEK Evaluation Results</i> | 95,51 |



Perusahaan menyadari akan pentingnya Sumber Daya Manusia sebagai ujung tombak dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan usaha.

The Company recognises the critical role of Human Resources in driving productivity and company development.



05

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Functions

Sumber Daya Manusia

Human Resources

HP menyadari akan pentingnya sumber daya manusia sebagai ujung tombak dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan usaha. Sebagai salah satu anak usaha dari PLN yang merupakan perusahaan penyedia listrik utama, HP bertugas untuk mengamankan kinerja sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik PLN kepada pelanggan dari berbagai potensi gangguan.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah yang tengah mendorong agar perusahaan swasta turut mendukung dalam pemenuhan energi listrik nasional, dipastikan persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan kemajuan teknologi. Untuk itu, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sebuah keharusan dalam menjawab tantangan bisnis dan mendukung keberlanjutan usaha. Perusahaan harus memiliki tenaga kerja sektor ketenagalistrikan yang kompeten dan berdedikasi agar serta memiliki integritas tinggi dan kepedulian terhadap pelanggannya.

HP telah menyusun rencana strategis pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia sebagai upaya pembenahan dan penguatan elemen-elemen dasar organisasi dan human capital melalui kebijakan yang berbasis kompetensi untuk menciptakan keunggulan operasi.

HP understands the critical role of human resources in driving productivity and company development. As a subsidiary of PLN, the country's primary energy supplier, HP is responsible for protecting PLN's electrical transmission and distribution system against different possible disruptions.

With the Government's goal of encouraging private businesses to contribute to the fulfilment of national electrical energy needs, it is likely that corporate rivalry will become more intense as technology develops. As a result, human resource management is critical for reacting to business problems and ensuring the company's survival. Companies in the energy industry must have knowledgeable and committed employees to maintain a high level of integrity and care for their consumers.

HP has developed a strategy plan for human resource development and management in an attempt to enhance and reinforce the organization's fundamental components and human capital via competency-based policies that foster operational excellence.





Divisi Human Capital

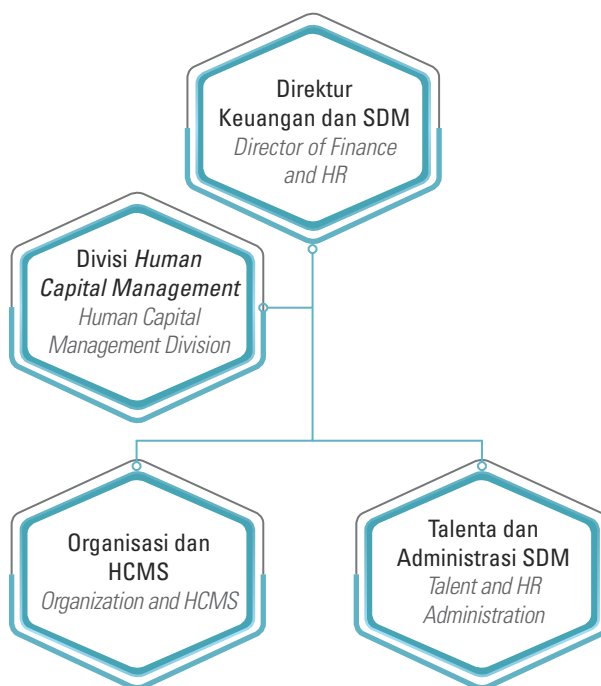
Human Capital Division

Divisi *Human Capital Management* (Divisi HCM) bertanggung jawab dalam pengelolaan *human capital* di HP. Divisi ini berada dibawah Direktur Keuangan dan SDM dan dipimpin oleh *Executive Vice President Human* (EVP) HCM. Divisi HCM membawahi unit Organisasi dan HCMS serta unit Talenta dan Administrasi SDM.

HP's Human Capital Management Division (HCM Division) is in charge of human capital management. This division reports to the Director of Finance and Human Resources and is headed by the Executive Vice President Human Capital Management (EVP HCM). The Human Capital Management Division is responsible for the Organization and Human Capital Management Systems divisions, as well as the Talent and Human Capital Administration units.

Struktur Organisasi Divisi HC

Organizational Structure of the HC Division



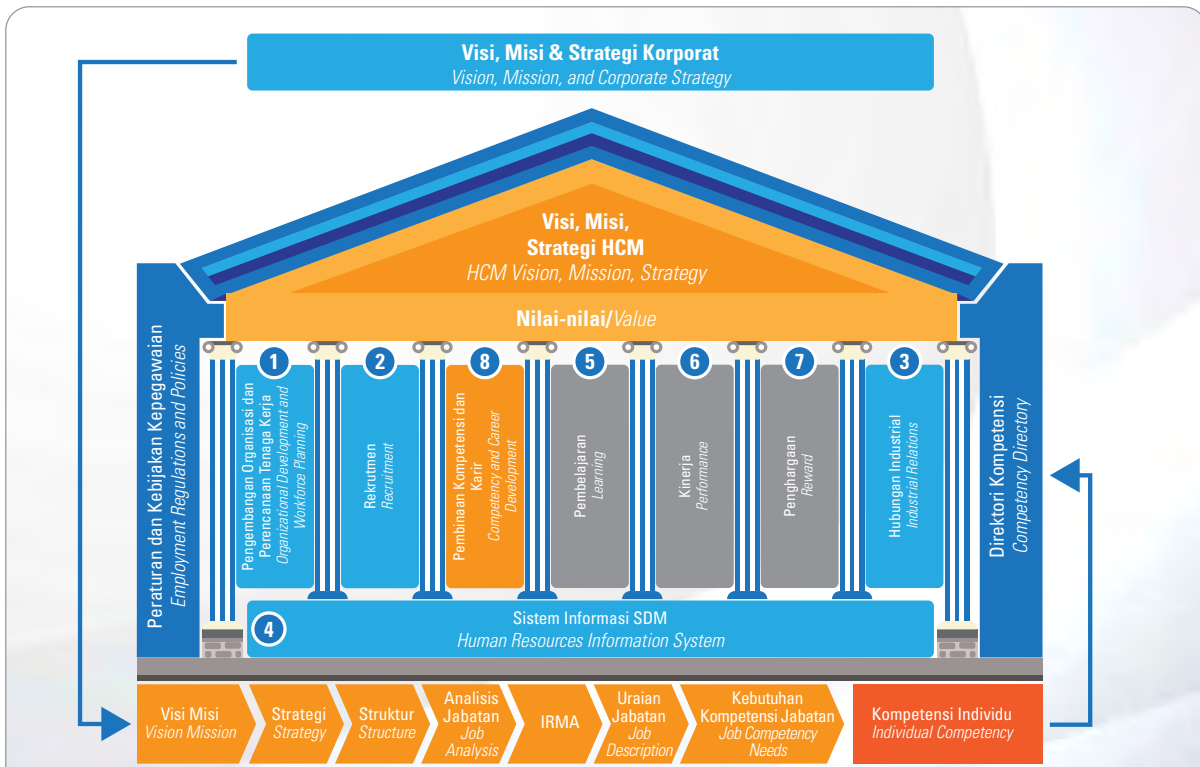
Visi, Misi dan Strategi *Vision, Mission, and Strategy*

Divisi HCM berkomitmen untuk mendukung implementasi dari strategi korporasi dengan melakukan penguatan pada SDM sehingga dapat menjadi *asset operator* di bidang distribusi dan retail ketenagalistrikan. Strategi pengelolaan *human capital* telah sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 002.K/DIR-HP/2013 tanggal 26 April 2013 yang difokuskan pada pembenahan dan penguatan 8 aspek kepegawaian di grup HP.

1. Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja
2. Rekrutmen
3. Hubungan Industrial
4. Sistem Informasi SDM
5. Pembelajaran
6. Kinerja
7. Penghargaan
8. Pembinaan Kompetensi dan Karir

The Human Capital Management Division is dedicated to assisting the company in implementing its goal by developing human capital and preparing it to become asset operators in the energy distribution and retail sectors. The human capital management plan adheres to the Board of Directors' Decree 002.K/DIR-HP/2013 dated April 26, 2013, which focuses on enhancing and strengthening eight areas of staffing throughout the HP group.

1. *Organizational development and human resource planning;*
2. *Recruitment;*
3. *Labour relations;*
4. *Human Resource Information System;*
5. *Education;*
6. *Performance;*
7. *Recognition;*
8. *Career Development and Competence.*



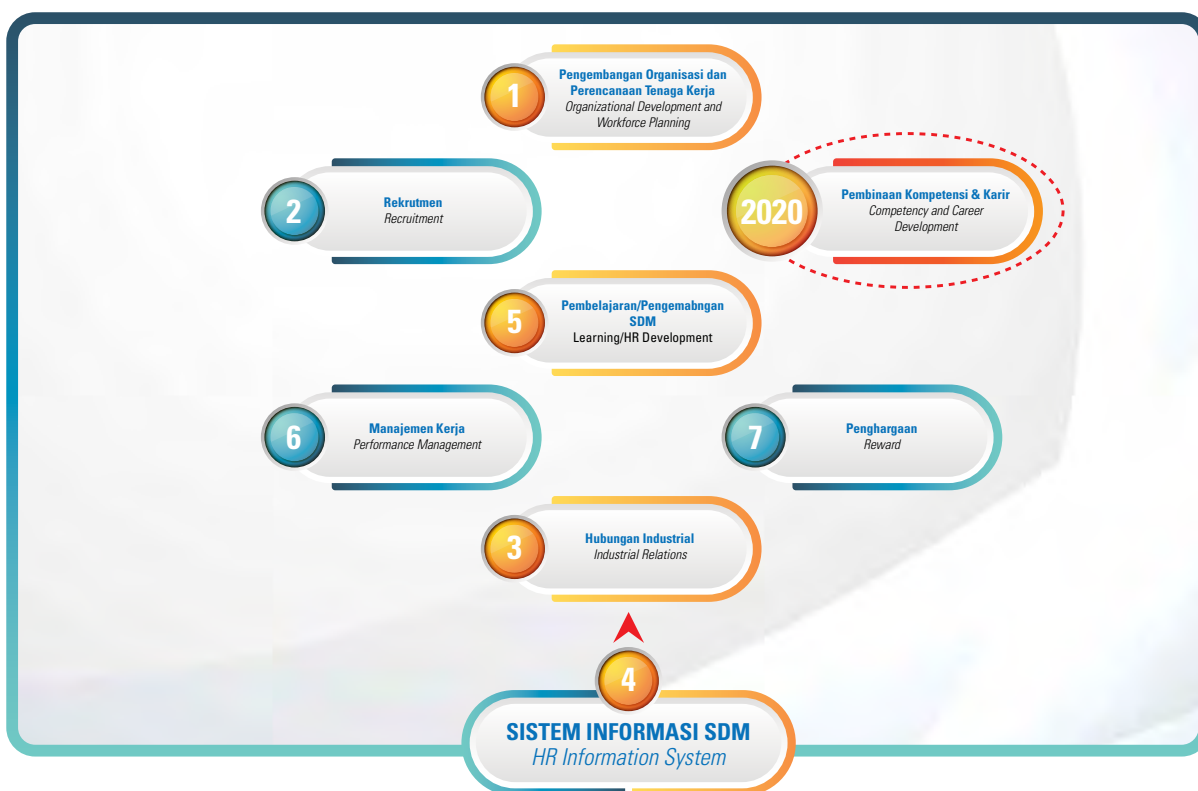


Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana tergambar dalam bagan di atas, Perusahaan telah menyelesaikan pembenahan pada aspek-aspek: 1) pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja, 2) rekrutmen, 3) hubungan industrial dan pembenahan pengelolaan *human capital* yang difokuskan pada aspek pembelajaran/pengembangan *human capital*, manajemen kinerja dan penghargaan.

Human Resources Management and Development

As shown in the chart above, the Company has improved the following areas: 1) organizational development and workforce planning; 2) recruiting; and 3) industrial relations and human capital management improvement, with an emphasis on elements of human capital learning/development, performance management, and reward.



Pada tahun 2020 Perusahaan menitikberatkan pada Pembinaan Kompetensi dan Karir bagi para karyawannya dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang andal dan kompeten sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

In 2020, the Company will place a premium on competency and career development for its workers with the goal of developing dependable and competent human resources that meet the Company's requirements.

Berikut merupakan *roadmap* pengembangan karir di PT Haleyora Power.

The following is a path for professional advancement at PT Haleyora Power.



Human Capital Readiness

Human Capital Readiness (HCR) adalah indikator yang digunakan untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan sasaran dan strategi Perusahaan. HCR diukur dari penilaian tingkat kematangan pada periode tertentu. Formulasi yang digunakan dalam penilaian tingkat kematangan HCR adalah dengan menggunakan pengukuran pada aspek peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan implementasi *knowledge management* (KM), pemetaan kompetensi, perencanaan pelaksanaan evaluasi, *monitoring* program peningkatan kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim HCROCR PLN Kantor Pusat dan telah disampaikan melalui surat No.00014/SKK.00/01/EVP HCMS/2020 tanggal 7 Januari 2020, nilai HCR yang diperoleh HP adalah 3,90 dari target 3,90 atau tercapai 100%.

Human Capital Readiness

Human Capital Readiness (HCR) is a metric used to determine if an employee's competence growth is aligned with the company's objectives and strategy. HCR is calculated based on an evaluation of a person's maturity level over a certain time period. The methodology for determining the maturity level of HCR is to collect data on various aspects of employee competency development, including knowledge management (KM) implementation activities, competency mapping, evaluation implementation planning, monitoring of competency improvement programmes, and competency certification.

According to the findings of the evaluation performed by the PLN Head Office HCROCR team and submitted on January 7, 2020 through letter No.00014/SKK.00/01/EVP HCMS/2020, the HCR value attained by HP was 3.90, exceeding the goal of 3.90 by 100%.



Organization Capital Readiness

Organization Capital Readiness (OCR) adalah indikator yang digunakan untuk memastikan kesiapan organisasi untuk menjalankan agenda perubahan Perusahaan yang diukur melalui penilaian tingkat kematangan pada periode tertentu. Formulasi yang digunakan dalam penilaian *maturity level* OCR adalah dengan menilai kematangan pengelolaan *human capital* pada aspek implementasi *leadership, alignment, culture* dan *teamwork*. Formulasi yang digunakan mengacu pada perhitungan rata-rata dari KPI dan kematangan pencapaian. Tingkat kematangan yang digunakan adalah dengan pemeringkatan level 1 sampai 5 yang merupakan cerminan dari setiap indikator.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim HCROCR PLN Kantor Pusat dan telah disampaikan melalui surat No.00014/SKK.00.01/EVP HCMS/2020 tanggal 7 Januari 2020, nilai OCR yang diperoleh HP adalah 3,90 dari target 3,90 atau tercapai 100%.

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP)

SIMKP merupakan sistem manajemen strategis dan terpadu untuk menyalurkan pencapaian kinerja pegawai terhadap sasaran kinerja korporat yang dapat mengevaluasi pencapaian kinerja pegawai secara objektif, transparan, dan terukur. SIMKP diterapkan di grup PLN berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.045.P/DIR/2017.

Pengisian SIMKP dilakukan pada awal tahun berjalan dan penilaian semester pertama dilaksanakan setiap bulan Agustus mencakup penilaian kinerja individu, kenaikan tingkat atau *grading*, promosi jabatan, kriteria talenta, dan pengembangan karir pegawai. Dengan menggunakan SIMKP, kinerja setiap pegawai dapat termonitor lebih cepat dan mudah dan Perusahaan dapat melakukan kalibrasi/penyelarasan target organisasi dengan target individu berdasarkan realisasi pencapaian kinerja.

Dalam rangka sinergi *Holding PLN* dengan HP sesuai dengan Surat Direktur HCM PT PLN (Persero) No.2420/SDM.07.01/DITHCM/2017-R tanggal 19 Desember 2017 perihal *Sinergi Holding* dan Anak Perusahaan, maka pengelolaan pegawai organik HP telah menggunakan

Organization Capital Readiness

Organization Capital Readiness (OCR) is a metric used to determine an organization's readiness to implement the Company's change agenda, as determined by an evaluation of its maturity level over a certain time period. The OCR maturity level assessment formulation is used to determine the maturity of human capital management in terms of leadership implementation, alignment, culture, and collaboration. The formulation is for calculating the average KPI and maturity of accomplishment. The maturity level used is a scale of 1 to 5, with 1 being the most mature and 5 being the least mature.

According to the findings of the evaluation performed by the PLN Head Office HCROCR team and filed through letter No.00014/SKK.00.01/EVP HCMS/2020 on January 7, 2020, HP received an OCR value of 3.90, which is 100% of the goal value of 3.90.

Employee Performance Management System (SIMKP)

SIMKP is a strategic and integrated management system for aligning employee performance accomplishments with company performance goals and evaluating employee performance successes objectively, transparently, and measurably. SIMKP is implemented in the PLN group in accordance with the Board of Directors of PT PLN (Persero) Regulation No.045.P/DIR/2017.

The SIMKP is completed at the start of each year, and the first semester evaluation is conducted in August. This assessment includes individual performance assessments, level raises or grades, promotions, talent criteria, and employee career development. By using SIMKP, the performance of each person can be tracked more quickly and simply, and the company may calibrate/align corporate goals with individual goals based on performance accomplishments.

To facilitate the integration of Holding PLN and HP, in accordance with the Director of Human Capital Management PT PLN (Persero) Letter No.2420/SDM.07.01/DITHCM/2017-R dated December 19, 2017 regarding Synergy Holding and Subsidiaries, the management

SAP yang terintegrasi dengan PLN sesuai dengan Surat EVP *Talent Development* PLN No.2809/SDM.03.03/010403/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penyampaian *Workshop* Migrasi Data Pegawai Anak Perusahaan ke SAP.

of HP organic employees utilised SAP, which is integrated with PLN, in accordance with PLN Talent Development EVP Letter No.2809/SDM.03.03/010403/2019.

Manajemen SDM

HP melakukan pengelolaan SDM secara komprehensif, mulai dari perencanaan kebutuhan karyawan hingga pelaksanaan program pensiun. Manajemen SDM berperan untuk memastikan kesiapan, kesediaan dan kemampuan organisasi untuk mengakomodasi perubahan yang dibutuhkan dan mengantisipasi kesiapan internal dalam menghadapi dinamika bisnis yang ada.

HR Management

HP provides complete human resource management services, from workforce planning to retirement programme implementation. Human resource management is critical in assuring the organization's preparedness, willingness, and capacity to adapt to necessary changes and predict internal readiness to deal with the dynamics of the current company.

Rekrutmen

Fase rekrutmen menjadi sangat penting dari urutan proses pengelolaan SDM. Pelaksanaan rekrutmen dilakukan secara terbuka tanpa diskriminasi selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen dapat berasal dari internal maupun eksternal Perusahaan.

Recruitment

Recruitment is a critical stage in the human resource management process. The execution of recruiting is carried out openly without prejudice as long as it fulfils the criteria that have been established. The recruiting process may originate from inside or outside the Company.

Proses rekrutmen internal dapat berupa promosi, rotasi, dan *job posting* untuk berbagai jenjang jabatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk memperkaya pengalaman, mengembangkan kompetensi dan meningkatkan karir. Sedangkan dari eksternal, proses rekrutmen dilaksanakan melalui proses seleksi *fresh graduate* maupun tenaga ahli/profesional dengan menitikberatkan pada kompetensi melalui kualifikasi dan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan serta rencana yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas serta dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik dan fleksibel terhadap perkembangan di masa depan. Dalam memenuhi kebutuhan pegawai organik, Perusahaan melaksanakan rekrutmen dan seleksi bersama dengan PLN dan anak perusahaan lainnya (*joint recruitment*).

The internal recruiting process may take the shape of promotions, rotations, and job postings for different levels of jobs which seeks to offer chances for workers to enrich experience, build skills and improve careers. While externally, the recruiting process is carried out via a selection procedure for new graduates and experts/professionals with a focus on competency through specific credentials and expertise according to the requirements and plans established. This is designed so that the Company is able to generate excellent human resources and can carry out its duties correctly and flexibly towards future developments. In fulfilling the requirements of organic workers, the Company carries out collaborative recruiting and selection with PLN and other subsidiaries (joint recruitment) (joint recruitment).

Kebutuhan pegawai baru tahun 2020 sesuai dengan perencanaan tenaga kerja adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan realisasi sebagai berikut:

According to workforce planning, the requirement for additional workers in 2020 is 25 (twenty-five) individuals who have come to the following realisations:



| No. | Jurusan Major Field of Study | Kebutuhan (orang) Needs (person) | Realisasi (orang) Realisation (person) |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. | S1 Akuntansi <i>Bachelor of Accounting</i> | 2 | 2 |
| 2. | S1 Hukum <i>Bachelor of Law</i> | 1 | - |
| 3. | S1 Keuangan <i>Bachelor of Finance</i> | 2 | 2 |
| 4. | S1 K3/K3 Fire Engineer <i>Bachelor of OHS/OHS Fire Engineer</i> | 1 | - |
| 5. | S1 Teknik Elektro <i>Bachelor of Electrical Engineering</i> | 10 | 5 |
| 6. | S1 Teknik Informatika <i>Bachelor of Informatics Engineering</i> | 2 | - |
| 7. | D3 Administrasi <i>Diploma of Administration</i> | 2 | 2 |
| 8. | D3 Perpajakan <i>Diploma of Taxation</i> | 1 | 1 |
| 9. | D3 Teknik Elektro <i>Diploma of Electrical Engineering</i> | 4 | 4 |
| Jumlah Total | | 25 | 16 |

Dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai dari sumber internal dilakukan dengan dengan *Job Posting* untuk jenjang jabatan sebagai berikut:

Employee recruiting from internal sources is accomplished via the use of Job Postings for the following positions:

| Rekrutmen / Seleksi Recruitment/Selection | Jan Jan | Feb Feb | Mar Mar | Apr Apr | Mei May | Jun Jun | Jul Jul | Agu Aug | Sep Sep | Okt Oct | Nov Nov | Des Dec |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tugas Karya PLN <i>PLN's Work Assignments</i> | | | | | | | | | | | | |
| Manajemen Atas <i>Top Management</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manajemen Menengah <i>Middle Management</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manajemen Dasar <i>Basic Management</i> | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supervisor Atas <i>Top Supervisor</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supervisor Dasar <i>Basic Supervisor</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fungsional <i>Functional</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| HPI <i>HPI</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |

Hingga akhir tahun 2020, jumlah pegawai HP tercatat sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) orang meningkat dibandingkan jumlah pegawai di akhir tahun 2019 sebanyak 103 orang. Kenaikan ini disebabkan dalam rangka penguatan organisasi PT Haleyora Power.

Until the end of 2020, HP employed 134 (one hundred and thirty-four) workers, an increase from the 103 employees at the end of 2019. This growth was made possible by the strengthening of PT Haleyora Power's structure.

| No. | Tingkat Jabatan Position Level | Jul Jul | Agu Aug | Sep Sep | Okt Oct | Nov Nov | Des Dec |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Manajemen Atas Top Management | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Manajemen Menengah Middle Management | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Manajemen Dasar Basic Management | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4. | Supervisor Atas Top Supervisor | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 5. | Supervisor Dasar Basic Supervisor | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 31 |
| 6. | Fungsional III Functional III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Fungsional IV Functional IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Fungsional V Functional V | 22 | 22 | 18 | 20 | 30 | 31 |
| 9. | Fungsional VI Fungsional VI | 17 | 17 | 11 | 11 | 15 | 18 |
| Total | | 109 | 110 | 111 | 113 | 127 | 134 |

| No. | Usia Age | Jul Jul | Agu Aug | Sep Sep | Okt Oct | Nov Nov | Des Dec |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | < 25*) | 19 | 19 | 19 | 21 | 30 | 35 |
| 2. | 26 – 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 39 |
| 3. | 31 – 35 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| 4. | 36 – 40 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 5. | 41 – 45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | 46 - 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7. | ≥ 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Total | | 109 | 110 | 111 | 113 | 127 | 134 |

Pelatihan dan Pendidikan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan, HP membutuhkan SDM yang berkualitas, berintegritas, profesional, serta berkompetensi kelas dunia. Oleh karena itu, Perusahaan telah menyusun program-program pengelolaan di bidang SDM yang disusun berdasarkan

Training and Education

HP demands quality, honesty, professionalism, and world-class expertise in order to fulfil the Company's vision and purpose. As a result, the Company has developed human resource management programmes that are based on the results of the PLN Education



Learning Needs Analysis (LNA) yang dilakukan oleh Pusdiklat PLN dan mengacu pada *Roadmap Transformasi HP* yang membutuhkan standardisasi kompetensi. LNA merupakan program dari PLN, untuk membantu keberhasilan anak perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diberikan secara berjenjang, mulai dari tingkatan tenaga kerja (*workforce*), supervisor dan para manajer. Program pelatihan yang diberikan terbagi menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Pelatihan *hard skill* yang dilaksanakan oleh HP seperti pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Pengelolaan Gardu Induk, Gardu Distribusi dan Asesmen Kabel, dan sebagainya.
2. Pelatihan *soft skill/leadership* yang dilaksanakan oleh Pusdiklat PLN, seperti pelatihan *Supervisory Education* atau *Executive Education*.
3. Pelatihan di luar masalah ketenagalistrikan seperti *Awareness ISO 9001:2015*, pembelajaran manajemen bisnis area, *Safety and Quality* bagi para Manajer Area dan Supervisor (SPV).
4. Sertifikasi Kompetensi yang merupakan prasyarat *mandatory* bagi tenaga kerja teknik Perusahaan.

Sepanjang tahun 2020 Perusahaan melaksanakan program pelatihan/ pengembangan bagi pegawai antara lain:

and Training Centre's Learning Needs Analysis (LNA) and reference the HP Transformation Roadmap, which calls for competence standardisation. LNA is a PLN programme designed to assist subsidiaries in successfully carrying out their business operations and overcoming obstacles.

Training and competence development programmes are offered in phases, beginning with the workers (workforce), and progressing through supervisors and managers. The training programmes offered fall into four categories:

1. *HP provides hard skill training in areas such as general occupational safety and health expert certification (AK3U), first aid in accidents certification (P3K), substation management, distribution substation and cable assessment, and so on.*
2. *The PLN Education and Training Centre provides skills/ leadership training, such as Supervisory Education or Executive Education.*
3. *Training on topics other than electricity, such as ISO 9001: 2015 awareness, area business management, safety, and quality management for area managers and supervisors (SPV).*
4. *Certification of Competence is a necessary requirement for the Company's technical staff.*

In 2020, the Company will undertake a variety of training and development initiatives, including the following:

| No. | Materi Pelatihan Training Subject | Penyelenggara Organizer | Jumlah Peserta Total Participant | Waktu Time |
|-----|--|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | <i>Awarenes ISO 9001: 2015</i> | Inhouse Training | 30 | 15 Januari 2020 January 15, 2020 |
| 2. | <i>Quantum Excellnce</i> | ESQ | 100 | 20-21 Januari 2020 January 20-21, 2020 |
| 3. | Operator Transmisi Gardu Induk <i>Substation Transmission Operator</i> | PUSDIKLAT PLN | 80 | 3-14 Februari 2020 February 3-14, 2020 |
| 4. | <i>ISO 9001:2015 Lead Auditor Big Data</i> | WQA | 1 | 17-21 Februari 2020 February 17-21, 2020 |
| 5. | <i>Big Data</i> | Inhouse Training | 80 | 13 Februari 2020 February 13, 2020 |
| 6. | <i>Human Capital Business Partner</i> | PUSDIKLAT PLN | 2 | 5-6 Maret 2020 March 5-6, 2020 |
| 7. | <i>Managing Stakeholder</i> di lingkungan PLN <i>Managing Stakeholders within PLN</i> | PUSDIKLAT PLN | 2 | 12-13 Maret 2020 March 12-13, 2020 |
| 8. | <i>Executive Education III</i> | PUSDIKLAT PLN | 3 | 9-30 Maret 2020 March 9-30, 2020 |
| 9. | <i>Building the Future Ready Organization</i> | PERTAMINA Training Center | 3 | 30-31 Maret 2020 March 30-31, 2020 |
| 10. | <i>Corporate Law For Executive</i> | PERTAMINA Training Center | 3 | 26-27 Maret 2020 March 26-27, 2020 |

| No. | Materi Pelatihan Training Subject | Penyelenggara Organizer | Jumlah Peserta Total Participant | Waktu Time |
|---------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 11. | Basic Human Resource Profesional | CRBP | 5 | 23-26 Juni 2020 June 23-26, 2020 |
| 12. | Corporate Culture Specially | ACT Consulting | 7 | 20-22 Juli 2020 July 20-22, 2020 |
| 13. | Awareness ISO 37001 | Inhouse Training | 30 | 10 September 2020 September 10, 2020 |
| 14. | Pelatihan Pemadam Kebakaran Firefighter Training | Inhouse Training | 25 | 03 September 2020 September 03, 2020 |
| 15. | Seminar Anti Terorisme | | 1 | 12 Agustus 2020 Agustus 12, 2020 |
| 16. | Pelatihan Pengawas K3 OHS Supervisor Training | Patrari Jaya Consulting | 80 | 24-27 Agustus 2020 Agustus 24-27, 2020 |
| 17. | Pembebasan Direksi dari Tanggung Jawab (<i>Acquit Et de Charge</i>) dalam Perspektif Pidana dan Perdata <i>Exemption of Directors from Liability (Acquit Et de Charge) in Criminal and Civil Perspectives</i> | Universitas Indonesia | 1 | 11 September 2020 September 11, 2020 |
| Jumlah | | | 453 | |

Dengan adanya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020, pelatihan pegawai/tenaga kerja diselenggarakan secara *online* terkait himbuan Pemerintah untuk melakukan aktivitas dari rumah selain itu pelatihan dilakukan mandiri di setiap *region* terutama untuk memastikan bahwa setiap personel dapat memahami dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, aman, dan sesuai prosedur operasi standar (SOP).

Throughout the COVID-19 pandemic in 2020, training for employees/labour is conducted online in response to the Government's appeal to conduct activities from home; in addition, training is conducted independently in each region, with the goal of ensuring that all personnel understand and are capable of performing their duties properly and safely, and in accordance with established processes (SOP).

Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi bersifat *mandatory* sesuai dengan amanat Undang - Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009). Berdasarkan UU 30/2009, pekerja di bidang ketenagalistrikan harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pembekalan berupa pelatihan/ workshop dan memfasilitasi proses untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi bekerja sama dengan lembaga sertifikasi kompetensi dimana hal ini sejalan dengan upaya pengembangan kompetensi pegawai antara lain Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Himpunan Ahli Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (Gema PDKB).

Competency Certification

Competency certification is required according to the requirement of Electricity Law No.30 of 2009 (Law 30/2009). Workers in the electrical industry are required to possess a competence certificate issued by a professional certifying authority under Law 30/2009. The company is required to provide debriefing in the form of training/workshops and to facilitate the process of obtaining competency certification in collaboration with competency certification institutions, including the National Professional Certification Agency (BNSP) and the Association of Work Experts in Tension Conditions, where this is consistent with efforts to develop employee competencies (Echo PDKB).



Pada tahun 2020, Perusahaan merencanakan sertifikasi untuk 8.163 tenaga kerja teknik yang tersebar di seluruh region dengan pencapaian 100,1% dari target atau sebanyak 8.170 tenaga kerja.

By 2020, the Company intends to certify 8,163 engineering employees distributed across the area, achieving 100.1% of the goal or up to 8,170 people.

Realisasi Jumlah Sertifikasi Tenaga Kerja sampai dengan akhir tahun 2020, adalah sebagai berikut:

The following chart illustrates the amount of Manpower Certifications that will be achieved by the end of 2020:

| Region | TK Wajib Sertifikasi Mandatory Certification TK | Realisasi Sertifikasi Certification Realisation | Belum tersertifikasi Certification Realisation | % |
|--|--|--|---|--------|
| Region 1 - Jawa Barat Region 1 - West Java | 1.900 | 1.900 | - | 100,0% |
| Region 2 - Jawa Tengah & DIY Region 2 - Central Java & DIY | 1.389 | 1.391 | - | 100,1% |
| Region 3 - Jawa Timur Region 3 - East Java | 1.679 | 1.680 | - | 100,1% |
| Region 4 - Sumatera Barat Region 4 - West Sumatera | 813 | 813 | - | 100,0% |
| Region 5 - DKI Jakarta & Banten Region 5 - DKI Jakarta & Banten | 753 | 753 | - | 100,0% |
| Region 6 - Riau dan Kepulauan Riau Region 6 - Riau and Riau Islands | 863 | 866 | - | 100,3% |
| Region 7 - Sumatera Bagian Selatan Region 7 - South Sumatera | 766 | 767 | - | 100,1% |
| Jumlah Tenaga Kerja Total Workers | 8.163 | 8.170 | - | 100,0% |

Investasi Pengembangan SDM

Investment in Human Resources Development

Perusahaan telah mengalokasikan biaya sebesar Rp6.809.654.034 untuk pengembangan SDM di lingkungan PT Haleyora Power.

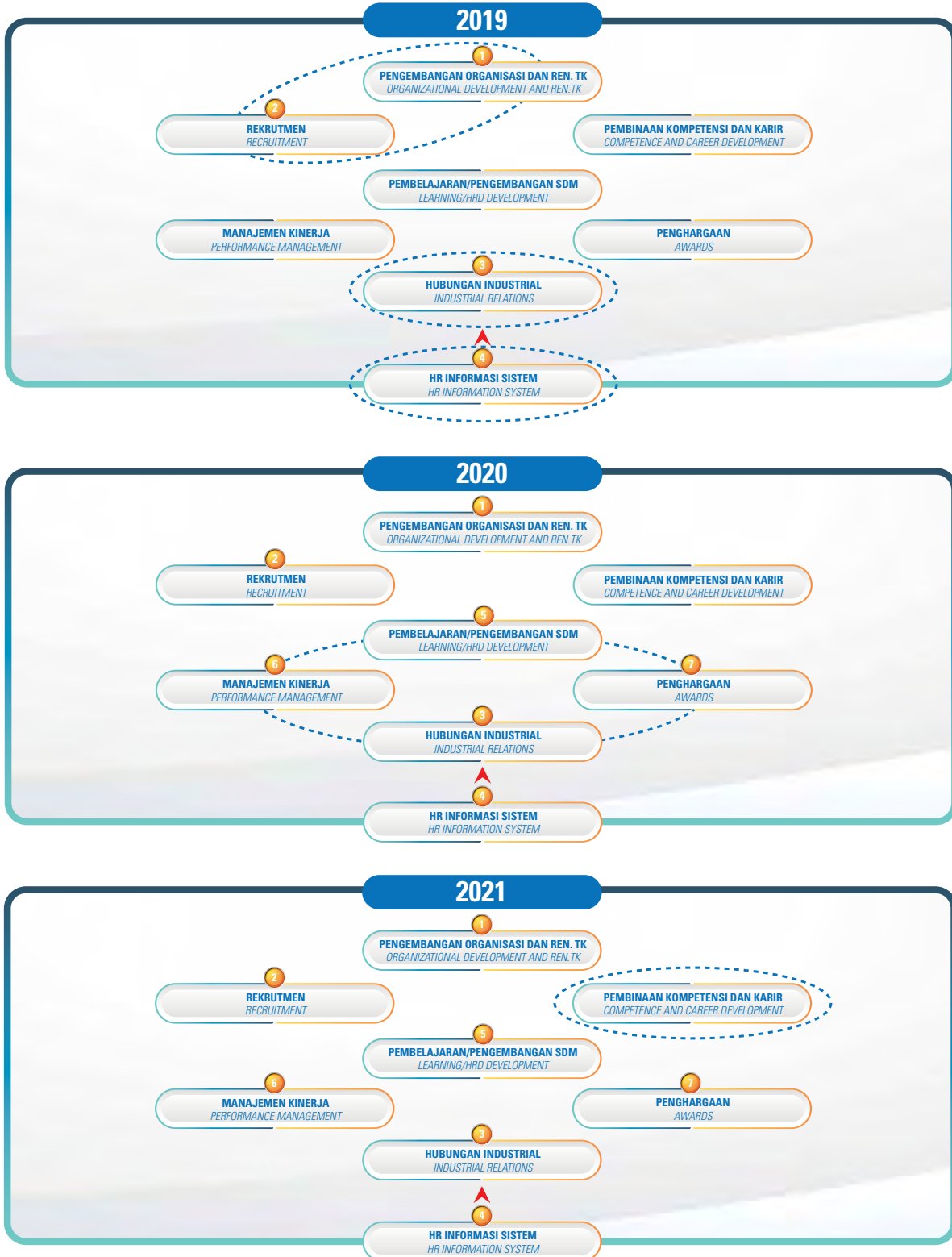
PT Haleyora Power has budgeted Rp6,809,654,034 for human resource development.

Rencana Pengembangan SDM 2021

Plan for Human Resource Development in 2021

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Terkait hal tersebut, Perusahaan telah menyusun rencana pengembangan SDM yang akan dijalankan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Human resource management and development are ongoing processes. In this respect, the Company has developed the following human resource development strategy, which will be executed in 2021:





| | ACTIVITIES | OUTPUT |
|----|--|--|
| A. | Perencanaan <i>Talent Pool</i> <i>Talent Pool Planning</i> | Dokumen Pedoman HAV <i>HAV Guideline Document</i> |
| 1. | Lembaga <i>Talent Committee</i> <i>Talent Committee Institution</i> | SK <i>Talent Committee</i> <i>SK Talent Committee</i> |
| 2. | Perencanaan <i>Talent</i> <i>Talent Planning</i> | Daftar kandidat <i>talent</i> MM dan MD <i>List of MM and MD talent candidates</i> |
| 3. | Evaluasi data kinerja kandidat <i>talent</i> <i>Evaluation of talent candidate performance data</i> | Data Kinerja <i>Performance Data</i> |
| B. | Penetapan <i>Talent Pool</i> <i>Talent Pool Determination</i> | |
| 1. | Evaluasi HAV <i>Talent level</i> MM <i>HAV Talent level MM Evaluation</i> | Klasifikasi HAV <i>talent</i> MM <i>HAV talent MM Classification</i> |
| 2. | Evaluasi HAV <i>Talent level</i> MD <i>HAV Talent level MD Evaluation</i> | Klasifikasi HAV <i>talent</i> MD <i>HAV talent MD Classification</i> |
| 3. | Pelaksanaan <i>Talent Committee Meeting</i> <i>Talent Committee Meeting Enforcement</i> | BA penetapan <i>talent</i> <i>BA talent determination</i> |
| C. | Pengembangan <i>Talent</i> <i>Talent Development</i> | |
| 1. | Penyusunan Rencana Pengembangan <i>Talent</i> <i>Preparation of Talent Development Plan</i> | Dokumen <i>Workplan</i> pengembangan <i>talent</i> 2021-2022 <i>Workplan for talent development 2021-2022</i> |
| 2. | Pelaksanaan Program Pengembangan <i>Talent</i> <i>Implementation of Talent Development Program</i> | Dokumen <i>Talent Development Progress</i> <i>Talent Development Progress Document</i> |
| | 2.1. Pengusulan diklat kepemimpinan <i>2.1. Leadership training proposal</i> | Surat Usulan <i>Proposal letter</i> |
| | 2.2. Pelaksanaan diklat kepemimpinan <i>2.2. Implementation of leadership training</i> | Sertifikat Dikpim <i>Dikpim Certificate</i> |
| | 2.3. Pelaksanaan IDP <i>2.3. IDP Implementation</i> | Sertifikat IDP/Assignment/Self Directing <i>IDP/Assignment/Self Directing Certificate</i> |
| D. | <i>Talent Mobility</i> | |
| 1. | Penyusunan rencana <i>talent mobility</i> <i>Preparation of talent mobility plans</i> | Dokumen <i>Talent Mobility Workplan</i> 2021-2022 <i>Talent Mobility Workplan 2021-2022 Document</i> |
| 2. | Progress <i>talent mobility level</i> MM atau MD <i>Progress talent mobility level MM or MD</i> | Mengikuti FnP/ Mutasi <i>Following FnP/Mutation</i> |

Strategi Pengelolaan SDM ke Depan

HP bersinergi dengan PLN selaku Induk Perusahaan (*holding*) dalam *Human Capital Management System* (HCMS) dalam rangka mewujudkan Sistem SDM PLN *Group* sebagaimana Surat Direktur *Human Capital Management* PT PLN (Persero) Nomor: 2420/SDM.07.01/DITHCM/2017-R tanggal 19 Desember 2017 perihal Sinergi *Holding* dan Anak Perusahaan dan Risalah Rapat Umum Pemegang HP tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018.

Future Human Resources Management Strategy

HP collaborates with PLN as the holding company in the *Human Capital Management System* (HCMS) in order to implement the *PLN Group Human Capital Management System*, as stated in the Letter of the Director of *Human Capital Management* of PT PLN (Persero) No.2420/SDM.07.01/DITHCM/2017-R dated December 19, 2017 regarding *Holding and Subsidiary Synergy and Minutes of the General Meeting of HP Holders concerning Ratification*.

Divisi HCM berencana menyelaraskan peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai terhadap sasaran kinerja HP melalui optimalisasi sumber daya manusia, antara lain:

1. Melakukan ratifikasi penyempurnaan atas keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1504.K/DIR/2011.
2. Penggunaan Aplikasi Manajemen Kinerja Pegawai untuk anak perusahaan dengan link <http://simkpnas.pln.co.id/> yang harus terimplementasi mulai di semester II tahun 2019.
3. Penilaian Kinerja Individu dengan menggunakan aplikasi SIMKP dan penetapan hasil pengukuran Kinerja Pegawai Anak Perusahaan dari Komite Appraisal B PT PLN (Persero).
4. Perencanaan Kinerja Pegawai (PKP) Anak Perusahaan Tahun 2021.

Through human resource optimization, the HCM Division intends to match employee competence and performance gains with HP's performance goals, including:

1. *Approving amendments to the Board of Directors' decision 1504.K/DIR/2011 of PT PLN (Persero).*
2. *Implementing the Employee Performance Management Application for subsidiaries at <http://simkpnas.pln.co.id/> beginning in the second semester of 2019.*
3. *Conducting an individual performance assessment using the SIMKP programme and analysing the findings of the PT PLN (Persero) Appraisal B Committee's Subsidiary Employee Performance measurement.*
4. *Subsidiary Performance Planning (PKP) in 2021.*

Statistik SDM

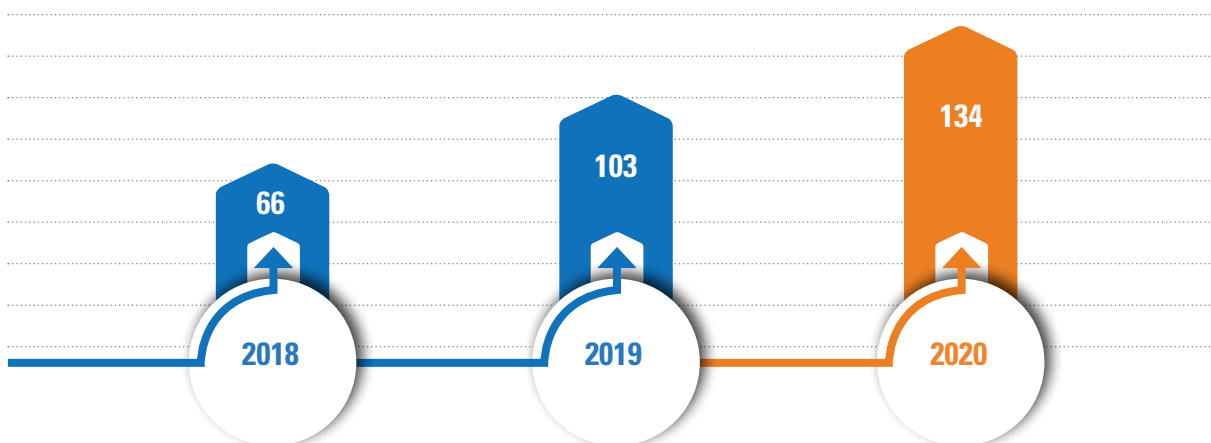
Human Resources Statistics

Per 31 Desember 2020, jumlah pegawai grup HP mencapai 34.080 orang, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 31.372 orang. Hal ini sejalan dengan adanya penambahan jumlah pelanggan dan peningkatan kontrak pekerjaan pada tahun 2020.

As of December 31, 2020, the HP group employed 34,080 individuals, a rise of 8% over the previous year's total of 31,372 persons. This is in line with the anticipated growth in client base and work contracts in 2020.

Jumlah Karyawan 2018-2020

Total Employees 2018-2020





Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Tenaga Kerja

Employee Composition by Employment Status

| Organisasi Organization | Tugas Karya Work Assignments | | | Organik Organic | | | Proyek Project | | | Jumlah Total | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 2020 | 2019 | % | 2020 | 2019 | % | 2020 | 2019 | % | 2020 | 2019 | % |
| HP | 35 | 21 | 40% | 96 | 79 | 21,52% | 24.285 | 21.909 | 10,84% | 24.416 | 22.007 | 10,95% |
| HPI | 5 | 5 | 0% | 134 | 127 | 5,51% | 9.520 | 9.232 | 3,12% | 9.659 | 9.363 | 3,16% |
| EPI | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 0,00% |
| Jumlah Total | 42 | 28 | 33% | 230 | 206 | 11,65% | 33.805 | 31.141 | 8,55% | 34.077 | 31.372 | 8,62% |

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan/ Penurunan Increase/Decrease | |
|-----------------------|------------|------------|---|------------|
| | | | Jumlah Total | % |
| Laki-laki Male | 96 | 76 | 20 | 21% |
| Perempuan Female | 38 | 27 | 11 | 29% |
| Jumlah Total | 134 | 103 | 31 | 23% |

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition by Position Level

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan/ Penurunan Increase/Decrease | |
|---|------------|------------|---|------------|
| | | | Jumlah Total | % |
| Manajemen Atas Top Management | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
| Manajemen Menengah Middle Management | 8 | 8 | 0 | 0,00% |
| Manajemen Dasar Basic Management | 14 | 11 | 3 | 21% |
| Supervisor Atas Top Supervisor | 29 | 17 | 12 | 41% |
| Supervisor Dasar Basic Supervisor | 31 | 19 | 12 | 39% |
| Fungsional Functional | 51 | 47 | 4 | 8% |
| On The Job Training (OJT) | - | - | 0 | 0,00% |
| Jumlah Total | 134 | 103 | 31 | 23% |

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

| Usia (Tahun) Age (Years of Age) | 2020 | 2019 | Pertumbuhan/ Penurunan Increase/Decrease | |
|--|------------|------------|---|------------|
| | | | Jumlah Total | % |
| <25 (sudah termasuk OJT/ <i>included OJT</i>) | 35 | 24 | 11 | 31% |
| 26-30 | 39 | 38 | 1 | 3% |
| 31-35 | 31 | 18 | 13 | 42% |
| 36-40 | 14 | 9 | 5 | 36% |
| 41-45 | 5 | 3 | 2 | 40% |
| 46-50 | 4 | 4 | 0 | 0% |
| >50 | 6 | 7 | (1) | -17% |
| Jumlah Total | 134 | 103 | 31 | 23% |

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Employee Composition by Education

| Uraian Description | 2020 | 2019 | Pertumbuhan/ Penurunan Increase/Decrease | |
|--|------------|------------|---|------------|
| | | | Jumlah Total | % |
| S2 <i>Master's Degree</i> | 12 | 9 | 3 | 25% |
| S1 <i>Bachelor's Degree</i> | 89 | 69 | 20 | 22% |
| Diploma 3 <i>Diploma</i> | 31 | 25 | 6 | 19% |
| SMP/SMA/SMK <i>Junior High/Senior High/Vocational</i> | 2 | 0 | 2 | 100% |
| Jumlah Total | 134 | 103 | 31 | 23% |



Teknologi Informasi

Technology Information

Teknologi informasi (TI) merupakan aspek penting lain yang dibutuhkan HP dalam pengembangan usaha. Keandalan TI turut memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan di dalam Perusahaan. Melalui otomatisasi sistem, berbagai proses bisnis menjadi lebih mudah dan lebih cepat, terutama terkait analisis data serta pelaporan dalam skala korporat.

Mengikuti pesatnya perkembangan teknologi serta untuk mendukung proses bisnis yang lebih cepat, akurat dan akuntabel, maka Teknologi Informasi (TI) kini diposisikan sebagai “enabler”, yaitu sistem yang mampu mendukung dan menjawab seluruh tantangan pertumbuhan operasi yang cepat dan akurat. Dengan kegiatan usaha yang berinteraksi secara langsung dengan pelanggan membutuhkan kecepatan dalam merespons keluhan pelanggan. Adanya dukungan sistem informasi yang andal, petugas di lapangan dapat bergerak lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan yang mengalami gangguan instalasi.

IT is another critical component of HP's commercial growth. Additionally, IT dependability has an impact on the efficacy and efficiency of business management and decision-making inside the organisation. Numerous business activities become simpler and quicker as a result of system automation, particularly those involving data analysis and reporting on a corporate scale.

Following rapid technological advancements and in order to support faster, more accurate, and accountable business processes, Information Technology (IT) is now positioned as a “enabler,” that is, a system capable of supporting and responding to all challenges associated with rapid and accurate operating growth. With company operations that include direct contact with consumers, responsiveness to customer complaints is critical. With the assistance of a dependable information system, field officers can respond more quickly to clients experiencing installation difficulties.

Tata Kelola Teknologi Informasi

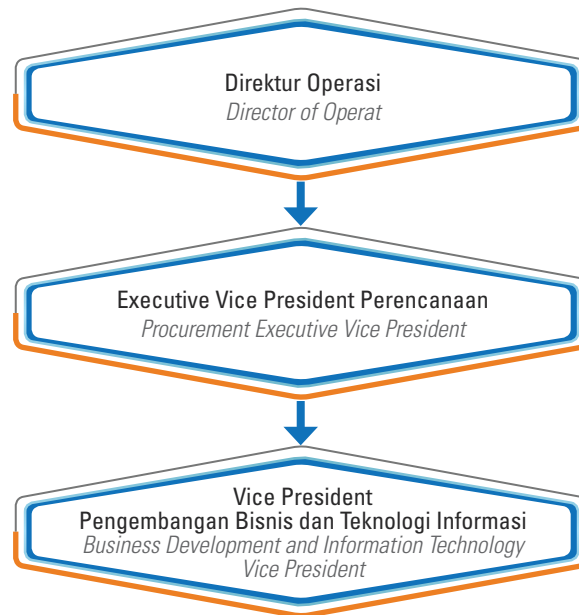
Governance of Information Technology

Perusahaan telah menyusun pedoman tata kelola teknologi informasi atau *IT Governance* untuk menjaga agar pengembangan dan pemanfaatan IT dapat berlangsung secara terukur dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Pedoman telah disahkan dalam Keputusan Direksi No.0032.K/STH.03.01/2016 tanggal 19 September 2016 Tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan PT HALEYORA POWER. *IT Governance* memberikan pedoman untuk menjaga agar pengembangan dan pemanfaatan IT dapat berlangsung secara terukur dan memenuhi prinsip-prinsip GCG.

The business has developed standards for information technology governance, or IT Governance, to guarantee that the creation and use of information technology can be quantified and adhere to GCG principles. The guidelines were adopted in PT HALEYORA POWER's Board of Directors Decree No.0032.K/STH.03.01/2016 on September 19, 2016 about General Policies and Guidelines for Information Technology Governance. IT Governance establishes rules to guarantee that the development and use of information technology are quantifiable and consistent with GCG principles.

Struktur Organisasi Divisi TI

IT Division Organizational Structure



Jumlah dan Sertifikasi Personil TI

Number and Certification of IT Personnel

Total Pegawai pada Bidang IT adalah sebanyak 4 Orang dengan pembagian adalah: satu orang VP Teknologi Informasi, satu orang *Manager IT*, 2 orang *Asisten Analyst*. Dengan sertifikasi yang dimiliki meliputi PMBOK, *Big Data for Beginner*, Pelaksana Pengadaan Di Lingkungan PT PLN Corporate, *Quality Management System ISO 9001:2015 Awareness and Internal Audit*, *ESQ QUANTUM EXCELLENCE* serta Pembelajaran Pengenalan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

The IT industry employs a total of four individuals, who are divided into the following categories: one Vice President of Information Technology, one Information Technology Manager, and two Analyst Assistants. PMBOK, Big Data for Beginners, Procurement Operators in PT PLN Corporate, ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness and Internal Audit, ESQ QUANTUM EXCELLENCE, and Learning Introduction of Superior Performance Assessment Criteria are among the qualifications held (KPKU).

IT Master Plan

IT Master Plan

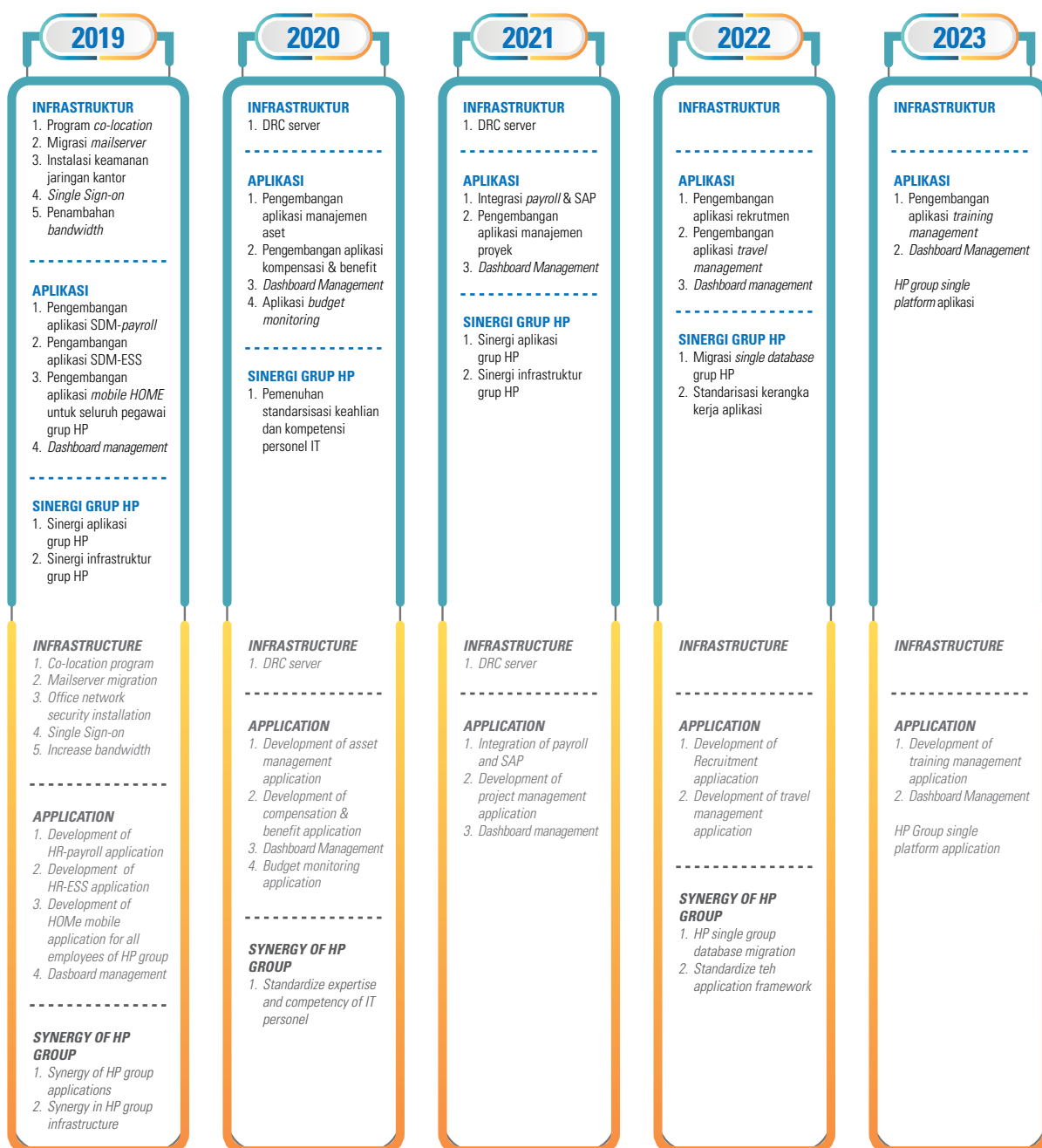
HP telah menyusun *IT Master Plan* untuk jangka waktu (lima) tahunan sebagai arahan kebijakan dan strategi dalam rangka menyusun perencanaan dan pelaksanaan sistem dan infrastruktur

HP has developed a five-year IT Master Plan as a policy and strategy direction for planning and executing IT systems and infrastructure in a more methodical, quantifiable, focused, and



IT sehingga lebih sistematis, terukur, terarah dan berkesinambungan. Dalam *IT Master Plan 2019-2023*, fokus pengembangan IT dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: 1) Infrastruktur, 2) Aplikasi, dan 3) Sinergi grup HP. Rencana pengembangan masing-masing kelompok dalam 5 tahun ke depan digambarkan dalam diagram berikut:

sustainable manner. The 2019-2023 IT Master Plan divides IT development into four categories: infrastructure, applications, and HP group synergies. The following graphic depicts the development strategy for each group for the next five years:



Pencapaian Tahun 2020

2020 Achievements

Pada tahun 2020, Divisi TI telah melakukan beberapa program pengembangan aplikasi Teknologi informasi di lingkungan Perusahaan dengan meliputi 6 (enam) divisi yaitu: Operasi, Pengembangan Bisnis, HCM, Keuangan, SETPER, dan juga Unit-unit di Area. Sedangkan aplikasi yang dikembangkan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Portal HOME, DIVA, SAP, dan Aplikasi untuk gangguan listrik pelanggan, ListriQu.

In 2020, the IT Division completed numerous information technology application development projects for the Company, spanning six (six) divisions: Operations, Business Development, Human Capital Management, Finance, SETPER, and Area Units. Meanwhile, the created programme is split into four components: the HOME Portal, DIVA, SAP, and ListriQu, which is used in the event of a client power outage.

Kinerja dan program pengembangan teknologi informasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, sebagai berikut:

The following performance and information technology development initiatives were implemented in 2020:

1. Pengembangan SWP versi 2.0

PT Haleyora Power menerapkan system pengawasan K3 berbasis *Mobile* yaitu Aplikasi *Mobile Standard Work Procedure (Mobile SWP)*. Berbeda dengan Versi 1 sebelumnya pada pengembangan kali ini telah diintegrasikan dengan 5 LMS dan juga pembaharuan proses bisnis laporan pengawasan dengan menggunakan *Mobile SWP*.

1. *SWP 2.0 version development*

PT Haleyora Power has implemented a mobile-based occupational health and safety surveillance system, dubbed the Mobile Standard Work Procedure (Mobile SWP) Application. In comparison to the previous version 1, this development incorporates 5 LMS and also updates the supervisory report business process through Mobile SWP.





2. Pengembangan Aplikasi *Budgeting*

Aplikasi *Budgeting* berfungsi untuk merekam seluruh informasi *budgeting* yang tertuang pada RKAP. Aplikasi ini terintegrasi mulai dari penyusunan RKAP, penerbitan SKKO/SKKI, integrasi dengan *system E-Procurement*, hingga pada proses penyerapan anggaran (Realisasi)

3. Q-Meter

Merupakan salah satu sub layanan dari *platform* ListriQu yaitu penggantian kWh Meter. Hingga TW IV/2020 ini Q-Meter telah diimplementasikan di UID DKI, UID Jatim, UID Bali, UIW Sulutenggo, UIW Sulselrabar. Khusus untuk UID Jatim aplikasi Q-Meter telah dilakukan integrasi dengan *system deposit* dan *payment* antara ListriQu Q-Meter dengan pihak Mitra. Aplikasi Q-Meter memberikan kemudahan kepada Mitra dalam penyajian laporan realisasi kepada PLN (*paperless*), serta proses penugasan yang mudah karena sudah didukung oleh Aplikasi *Mobile*.

4. ListriQu

Aplikasi ListriQu version 3.0 diluncurkan di Android Playstore dalam triwulan IV 2020. Hal ini untuk memastikan aplikasi tetap prima melayani pelanggan. Beberapa *update* terbaru *version 3.0* adalah, *revamp* atau pembaruan tampilan pada aplikasi, dimana tampilan barunya lebih *fresh* dan intuitif, untuk memudahkan pelanggan. Selanjutnya adalah dimulainya pemberlakuan *Geofencing*. Sehingga pelanggan akan mengetahui jika berada pada daerah yang belum terjangkau oleh ListriQu. *Geofencing* juga memungkinkan BPO (*Business Process Owner*) untuk mengeset harga berdasarkan daerah, hal ini untuk memudahkan mitra di lapangan dalam melaksanakan pekerjaan di pelanggan. Dan terakhir, untuk memudahkan pelanggan dalam memastikan ketersediaan petugas, pada aplikasi dibuatkan peta petugas, sehingga pelanggan dapat mengetahui apakah ada petugas di sekitarnya atau tidak. Hal ini dapat meminimalisir keluhan pelanggan akan kurangnya petugas di lapangan, dan juga memudahkan *Contact Center* ListriQu untuk menjadwalkan petugas kepada pelanggan.

5. Pembuatan ERP *Blueprint*

Dalam upaya mendukung program digitalisasi proses bisnis dan rencana program *single source of truth* maka penerapan *ERP System* di PT Haleyora Power menjadi sangatlah penting.

2. *Application Development for Budgeting*

The Budgeting application is used to maintain a record of all budgeting data included in the RKAP. This application is integrated from the creation of the RKAP, through the issue of SKKO/SKKI, to the integration with the E-Procurement system, and finally to the budget absorption process (Realization).

3. *Q-Meter*

It is one of the ListriQu platform's sub-services, namely the replacement of kWh Meters. The Q-Meter was deployed at UID DKI, UID Jatim, UID Bali, UIW Sulutenggo, and UIW Sulselrabar till TW IV/2020. The Q-Meter application has been linked with the deposit and payment mechanism between ListriQu Q-Meter and the Partners, specifically for UID East Java. Because the Q-Meter application is supported by the Mobile Application, it enables Partners to easily provide realisation reports to PLN (paperless), as well as a simple assignment procedure.

4. *ListriQu*

The Android Playstore version 3.0 of the ListriQu application was released in the fourth quarter of 2020. This is to guarantee that the application continues to provide great customer service. Several of the most recent changes to version 3.0 include revamping or upgrading the application's design, making it fresher and more straightforward for consumers. Following that, geofencing will begin. So that consumers are aware if they are in an area that ListriQu has not yet reached. Geofencing also enables BPOs (Business Process Owners) to establish pricing depending on geographic location, which makes it simpler for field partners to do work at clients. Finally, to assist consumers in determining the availability of police, the programme includes a map of officers, allowing customers to determine whether or not cops are nearby. This may help reduce customer complaints about a shortage of officers in the field and also makes scheduling officers for consumers simpler for the ListriQu Contact Center.

5. *Developing an ERP blueprint*

The ERP system installation at PT Haleyora Power is critical in order to support the business process digitalization programme and the single source of truth programme plans.

Dimulai pada semester ke 2 tahun 2020, telah dilakukan penyusunan ERP *Blueprint* untuk memetakan proses bisnis, kebutuhan *feature*, serta rencana investasi yang dibutuhkan. Hal ini sangat penting agar pengembangan ERP System kedepannya lebih terarah dan terukur.

Beginning in the second semester of 2020, an ERP Blueprint will be developed to map business operations, feature needs, and necessary investment plans. This is critical in order to ensure that future ERP System development is more targeted and quantifiable.

6. Pembuatan Aplikasi keuangan PSAK 73

Seiring diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 Per 1 Januari 2020 menggantikan PSAK Nomor 30 terkait Akuntansi Sewa, menyebabkan perhitungan aset sewa yang sebelumnya dihitung menggunakan Sewa Operasi menjadi seperti sewa pembiayaan, sehingga PT Haleyora Power memiliki kebutuhan akan dapat menyajikan informasi laporan keuangan secara akurat dan tepat dan dapat menyajikan data-data sewa kendaraan secara handal pada *disclosure* laporan keuangan. Untuk dapat mengakomodir hal tersebut dan mempertimbangkan jumlah populasi aset sewa kami sebanyak +/- 1.000 Aset identifikasian baik dari aset sewa kendaraan (Mobil) dan Rumah yang masa sewa > 12 bulan serta aset identifikasian bernilai minimal Rp70 Juta, maka dibutuhkan suatu alat bantu untuk dapat menghasilkan hitungan dan laporan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

6. Obtaining Financial Support for PSAK 73

Along with the enactment of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 73 on January 1, 2020, which will replace PSAK Number 30 on Lease Accounting, causing the calculation of leased assets that were previously calculated using an Operating Lease to become more similar to a finance lease, PT Haleyora Power has a requirement to be able to present financial statement information accurately and predictably. To accommodate this and taking into account the population of our rental assets of +/- 1,000, Identifying assets from vehicle rental assets (Cars) and houses with a rental term more than 12 months, as well as identifying assets worth a minimum of IDR 70 million, requires a tool that can generate the computations and reports required by the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK).

Rencana 2021

2021 Plans

Beberapa rencana Perusahaan untuk tahun mendatang antara lain:

Among the Company's objectives for the next year are the following:

1. Pengembangan Aplikasi ITN (*Individual Training Need*)
Aplikasi ITN berfungsi untuk mendata kebutuhan pelatihan untuk pegawai PT Haleyora Power. Dimana aplikasi ini memuat data pegawai, jenis, waktu, dan biaya pelatihan. Saat ini aplikasi sudah mencapai tahap UAT oleh *user*, yaitu divisi HCM.
2. Pengembangan Aplikasi *Management* Kontrak
Aplikasi *Management* Kontrak berfungsi untuk mendata kontrak yang dibuat oleh PT Haleyora Power dan PT PLN (Persero). Dimana aplikasi ini akan membantu Divisi Perencanaan dan perusahaan memantau kontrak yang sedang berjalan, nominal tiap kontrak, dan kebutuhan pada kontrak tersebut.

1. *Application Development for ITN (Individual Training Need)*
The ITN programme is used to track training requirements for PT Haleyora Power staff. Where this programme stores employee information, as well as the kind, duration, and cost of training. Currently, the application is undergoing user acceptance testing (UAT) by the user, namely the HCM division.
2. *Development of a contract management application*
The Contract Management programme is used to keep track of contracts entered into by PT Haleyora Power and PT PLN (Persero). Where this programme will assist the Planning Division and the business in monitoring current contracts, their nominal value, and contract needs.



3. ListriQu

Perusahaan sedang mempersiapkan aplikasi untuk bisa digunakan di wilayah timur Indonesia yang dikelola oleh PT PLN Tarakan. Infrastruktur ListriQu akan tetap berada pada *datacenter* PT Haleyora Power.

Saat ini sedang dilakukan pengembangan Aplikasi ListriQu Pelanggan untuk *Platform* IOS. Proses pengembangan telah berjalan sejak 2020 yang diharapkan akan dapat *launching* pada TW I 2021. Layanan ListriQu telah dikembangkan dengan feature Layanan Premium dan Konsultasi. Untuk perkembangan pada *Fintech* selain bekerjasama dengan LinkAja, ListriQu tengah menjalin Kerjasama dengan Bank Mandiri dan Bank BNI dalam penyediaan *Virtual Account*. Disamping itu untuk fungsi deposit pada Petugas ListriQu, kali ini bekerjasama dengan PT GSP yang mengawasi arus transfer deposit petugas ListriQu. Diharapkan seluruh Kerjasama Sistem pembayaran ini dapat *Go-Live* secara menyeluruh pada TW I 2021.

3. ListriQu

The firm is now developing an application for usage in eastern Indonesia, where PT PLN Tarakan is in charge. The ListriQu infrastructure will stay in the datacenter of PT Haleyora Power.

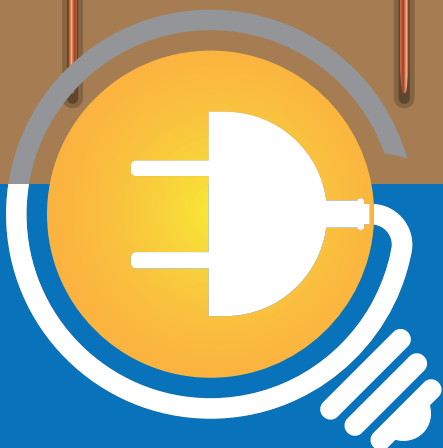
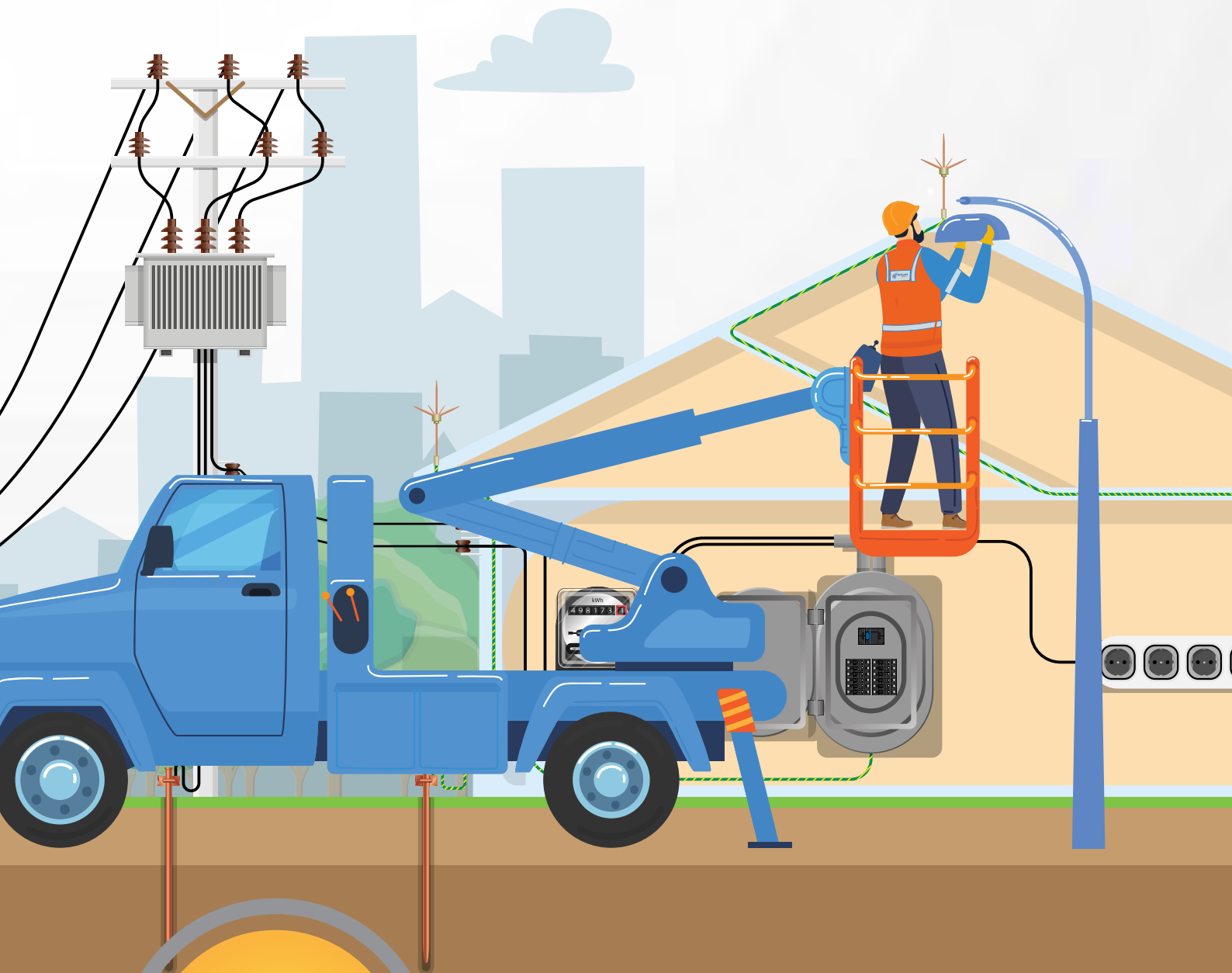
Customer ListriQu is now being developed for the iOS platform. The development process began in 2020 and is scheduled to conclude in the first quarter of 2021. ListriQu was built with Premium Services and Consulting features in mind. Apart from working with LinkAja on Fintech advancements, ListriQu is presently collaborating with Bank Mandiri and Bank BNI on the provision of Virtual Accounts. Additionally, for the ListriQu Officer's deposit function, this time in cooperation with PT GSP, which manages the ListriQu officer's deposit transfers. All of these payment system partnerships are anticipated to be fully operational by the first quarter of 2021.





Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional agar dapat menguatkan posisi Perusahaan dalam persaingan global serta pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

The Company is dedicated to continually improve its application of GCG principles across all operational activities in order to bolster its position in global competitiveness and maintain company development.



06

Tata Kelola
Perusahaan
Corporate Governance

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan dalam Menerapkan GCG

Commitments and Policies of the Company in Applying

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* ("GCG") merupakan aspek penting dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien guna memenuhi kewajiban secara bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, mitra bisnis, serta masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional agar dapat menguatkan posisi Perusahaan didalam persaingan global serta pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

The application of good corporate governance principles ("GCG") is critical in order to increase and maximise the value of the company, to promote professional, transparent, and efficient management of the company, and to ensure that the company complies with its obligations to shareholders, business partners, and society in general. As a result, the Company is dedicated to continually improve its application of GCG principles across all operational activities in order to enhance its position in global competitiveness and achieve sustainable business development.

Dasar Penerapan Corporate Governance

Implementation of Corporate Governance Fundamentals

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Perusahaan dalam penerapan GCG, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah, di antaranya adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perubahannya Nomor 45 Tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di antaranya adalah:
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
 - b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The term "Good Corporate Governance" refers to a set of formal standards that serve as the foundation for the Company's application of GCG, specifically:

1. *Indonesian legislation, including:*
 - a. *Law No.19 of 2003, dated June 19, 2003, on State-Owned Enterprises;*
 - b. *Limited Liability Company Law, No.40 of 2007, enacted on August 16, 2007;*
 - c. *Public Information Disclosure Law No.14 of 2008, enacted on April 30, 2008.*
2. *Government Regulations, including: a. Government Regulation No. 12 of 1998, dated January 17, 1998, and its Amendment No. 45 of 2001, dated June 5, 2001, regulating Limited Liability Companies (Persero).*
3. *Regulations promulgated by the Minister of State-Owned Enterprises, which include the following:*
 - a. *Regulation No.PER-01/MBU/2011 of the Minister of State for State-Owned Enterprises dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and its Amendment No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012.*
 - b. *Regulation No.PER-12/MBU/2012 of the Minister of State for State-Owned Enterprises dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs of Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises.*



- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020, tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

- c. *Regulation No. PER-12/MBU/11/2020 of the Minister of State-Owned Enterprises dated November 25, 2020, relating to the Fifth Amendment to Regulation No. PER-04/MBU/2014 of the Minister of State-Owned Enterprises relating to Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Board of Directors State-Owned Enterprise Supervisor.*

Tujuan Penerapan GCG

GCG Implementation's Objectives

1. Memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham, bahwa Perusahaan dikelola secara baik dan benar dengan tujuan agar memberikan tingkat pengembalian yang wajar dan bernilai tinggi.
2. Mendorong pencapaian visi dan misi Perusahaan.
3. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya dan pengelolaan risiko Perusahaan secara lebih berhati-hati (*prudent*) dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.
4. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak.
5. Mendorong terciptanya budaya kerja Perusahaan ke arah yang lebih baik dengan penuh kebersamaan.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan di dalam pengelolaan Perusahaan.

1. *Instilling confidence in Shareholders that the Company is being managed appropriately and correctly with the objective of generating a fair rate of return and a high return on investment.*
2. *Promoting the Company's vision and purpose.*
3. *Encouraging and supporting the Company's cautious and responsible growth, resource management, and risk management in accordance with GCG principles.*
4. *Adding value to all parties.*
5. *Encouraging the development of the Company's work culture in a positive direction via collaboration.*
6. *Preventing anomalies in the Company's management.*

Prinsip GCG

GCG Fundamentals

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perusahaan bertekad kuat untuk menerapkan lima prinsip dasar GCG yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU.2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, serta dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yakni:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Pertanggungjawaban
4. Independensi
5. Kewajaran

In achieving the Vision and fulfilling the Mission, the Company is committed to adhering to the five fundamental principles of GCG as outlined in the Minister of SOEs Regulations No. PER-01/MBU.2011 dated August 1, 2011 and No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, as well as the General Guidelines for Good Corporate Governance (GCG) issued by the National Committee on Governance Pte Ltd.

1. *Transparency*
2. *Accountability*
3. *Responsibility*
4. *Independency*
5. *Fairness*

Struktur dan Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate Government's Structure and Mechanism

GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada seluruh *stakeholders* bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsipnya.

GCG is both a system and a structure designed to instil trust in all stakeholders that the business is managed and regulated in accordance with applicable laws and regulations and its principles.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Governance Structure

Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2007, tergambar pada Organ Utama Perseroan, yaitu:

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris
Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Direksi
Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Sufficient Corporate Governance The structure as defined in Law No.40 of 2007 is described in the Company's Main Organs, namely:

- *General Meeting of Shareholders (GMS)*
The Company's organs that exercise authority not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 and/or the Articles of Association.
- *Board of Commissioners*
An organ of the company charged for carrying out general and/or specialised monitoring in line with the Articles of Association and advising the Board of Directors.
- *Board of Directors*
The Company organ that is authorised and completely responsible for managing the Company for the benefit of the Company, in line with the Company's goals and objectives, and representing the Company both within and outside the court, in accordance with the Articles of Association.

Selain organ utama Perusahaan, HP juga memiliki organ-organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengawasi dan menjalankan kegiatan operasional Perusahaan untuk mencapai visi dan misi.

Along with its primary organs, HP has supporting organs that help the Board of Commissioners and the Board of Directors in overseeing and carrying out the Company's operational operations in order to accomplish the vision and purpose.

Organ Pendukung Dewan Komisaris:

1. Sekretaris Dewan Komisaris
2. Komite Audit
3. Komite GCG dan Manajemen Risiko

The Board of Commissioners' Supporting Organs include the following:

1. *Board of Commissioners' Secretary*
2. *Committee of Auditors*
3. *GCG and Committee on Risk Management*

Organ Pendukung Direksi:

1. Sekretaris Perusahaan, Komunikasi, Hukum dan Kinerja
2. Satuan Pengawasan Intern

The Board of Directors' Supporting Organs are as follows:

1. *Corporate Secretary, Communication, Legal, and Performance.*
2. *Control Unit Internal*

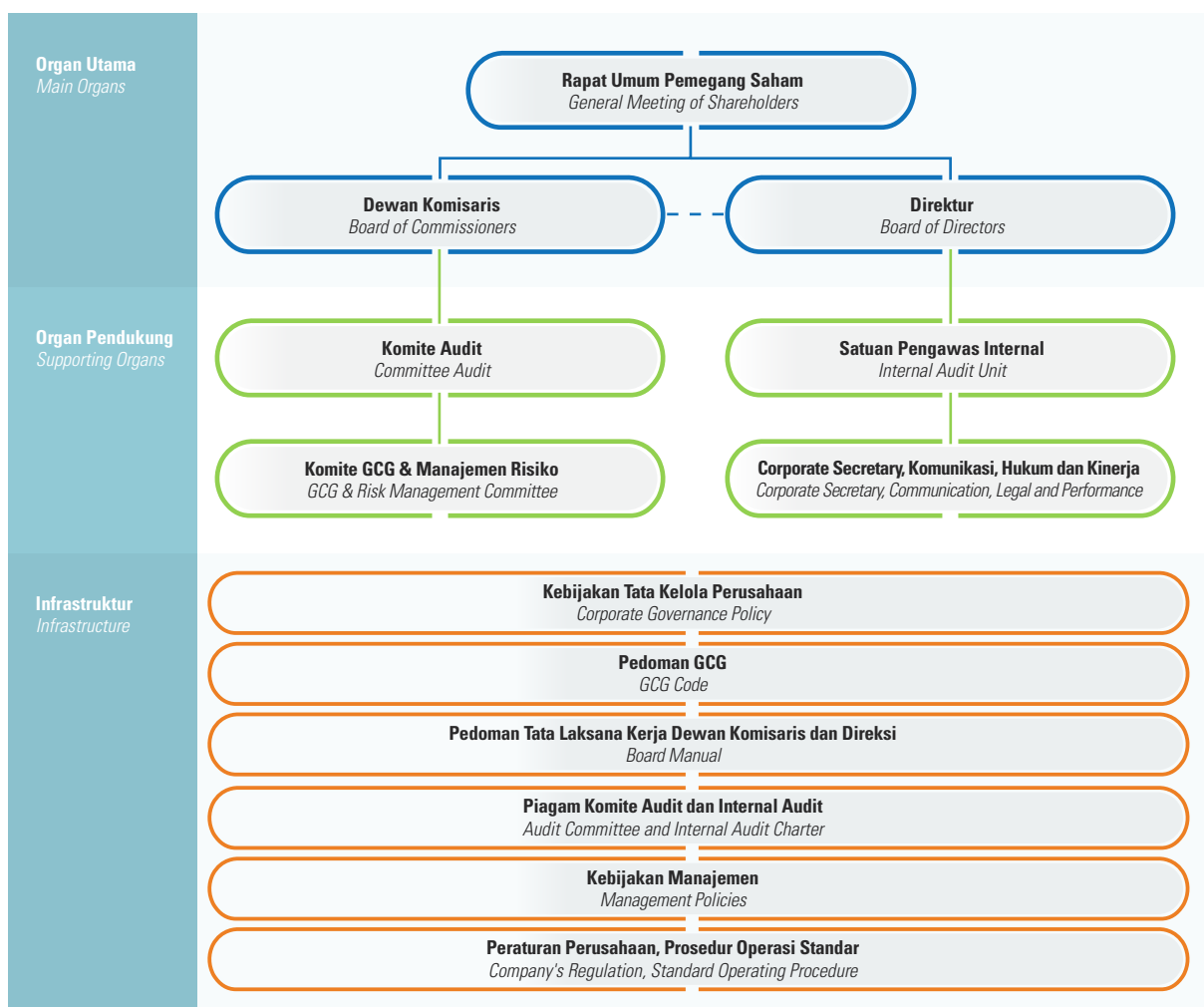


Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Instruments

Keberhasilan dalam menerapkan GCG di dalam Perusahaan sangat bergantung kepada hubungan antar organ Perusahaan di mana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tegas telah memisahkan tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ Perusahaan tersebut selalu berhubungan atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing dibantu oleh organ-organ pendukung dan bertindak demi kepentingan Perusahaan. Setiap keputusan dan tindakan yang dijalankan dilandasi oleh itikad baik, nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dimiliki oleh Perusahaan dengan kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

The success of GCG implementation within the Company is highly dependent on the relationship between the Company's organs, which have clearly separated the duties and authorities of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations. The Company's three organs are constantly linked on the basis of cooperation and mutual respect, adhering to their individual duties and roles, supported by supporting organs, and working in the Company's best interests. Every decision and action made by the Company is based on good faith, moral principles, and compliance with applicable laws, regulations, and policies, as well as an understanding of the Company's corporate social responsibility to stakeholders and environmental sustainability.



Soft Structure GCG

GCG Soft Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi GCG, Perusahaan telah memiliki perangkat pedoman GCG, kebijakan serta prosedur proses bisnis terkait GCG (*GCG softs tructure*) sebagai panduan bagi seluruh insan Perusahaan dalam menerapkan praktik GCG terbaik di setiap aktivitas bisnis Perusahaan antara lain:

1. Pedoman GCG (*GCG Code*) yang dikeluarkan pada bulan September 2016;
2. Pedoman Perilaku/*Code of Conduct* (CoC) yang dikeluarkan pada bulan September 2016;
3. Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang dikeluarkan pada bulan September 2016;
4. Keputusan Direksi No.170.K/DIR-HP/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT Haleyora Power;
5. Keputusan Direksi No.171.K/DIR-HP/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pedoman Pengawasan Internal PT Haleyora Power;
6. Peraturan Direksi No.001.P/DIR-HP/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Haleyora Power;
7. Peraturan Direksi No.0003.P/DIR-HP/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Haleyora Power;
8. Peraturan Direksi No.0015.P/DIR-HP/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Haleyora Power;
9. Peraturan Direksi No.0141.P/DIR-HP/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pedoman *Safety, Integrity* dan *Quality* di Lingkungan PT Haleyora Power;
10. Keputusan Direksi No.0016/DIR-HP/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Haleyora Power dan Edaran Direksi No.0001.E/DIRHP/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT Haleyora Power;
11. Keputusan Direksi No.0031.K/DIR-HP/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Haleyora Power;
12. Peraturan Perusahaan PT Haleyora Power No.KEP646/PHIJSK-PK/PP/V/2018 tanggal 24 Maret 2018 edisi 2018-2020;
13. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berdasarkan Surat Edaran Direksi No.001.E/DIR-HP/2018 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System*;

In order to improve the quality of GCG implementation, the Company already has a set of GCG guidelines, policies and business process procedures related to GCG (GCG soft structure) as a guide for all Company personnel in implementing the best GCG practices in each of the Company's business activities, including:

1. *GCG Guidelines (GCG Code) issued in September 2016;*
2. *Code of Conduct (CoC) issued in September 2016;*
3. *The Board Manual issued in September 2016;*
4. *Decision of the Board of Directors No.170.K/DIR-HP/2014 dated December 1, 2014 regarding the Internal Control System Policy within PT Haleyora Power;*
5. *Decision of the Board of Directors No.171.K/DIR-HP/2014 dated December 1, 2014 concerning Guidelines for Internal Control of PT Haleyora Power;*
6. *Board of Directors Regulation No.001.P/DIR-HP/2017 concerning Guidelines for Reporting on State Administrators Wealth (LHKPN) within PT Haleyora Power;*
7. *Board of Directors Regulation No.0003.P/DIR-HP/2017 concerning Guidelines for Gratification Control in PT Haleyora Power;*
8. *Board of Directors Regulation No.0015.P/DIR-HP/2016 dated 11 May 2016 concerning the Implementation of Risk Management in PT Haleyora Power;*
9. *Board of Directors Regulation No.0141.P/DIR-HP/2017 dated August 29, 2017 concerning Guidelines for Safety, Integrity and Quality in the PT Haleyora Power Environment;*
10. *Decision of the Board of Directors No.0016/DIR-HP/2016 dated May 25, 2016 concerning Guidelines for the Procurement of Goods and Services for PT Haleyora Power and Circular of the Board of Directors No.0001.E/DIRHP/2016 concerning Technical Guidelines for the Procurement of Goods/Services for PT Haleyora Power;*
11. *Decision of the Board of Directors No.0031.K/DIR-HP/2016 dated September 16, 2016 concerning Guidelines for Service Implementation, Disclosure and Disclosure of Public Information within PT Haleyora Power;*
12. *PT Haleyora Power Company Regulation No.KEP646/PHIJSK-PK/PP/V/2018 dated December 24, 2018; 2018-2020 edition;*
13. *Whistleblowing System based on the Circular of the Board of Directors No.001.E/DIR-HP/2018 Regarding the Whistleblowing System.*



- | | |
|--|--|
| <p>14. Keputusan Direksi Nomor 0010.P/DIR-HP/2020 tentang Kebijakan <i>Anti Fraud</i> di lingkungan Haleyora Power;</p> <p>15. Keputusan Direksi Nomor 0010.P/DIR-HP/2020 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT Haleyora Power;</p> <p>16. Keputusan Direksi Nomor 0006.E/DIR/2020 tentang Protokol Pelaksanaan Kerja Tahap Persiapan dan Tahap New Normal di Lingkungan PT Haleyora Power;</p> <p>17. Keputusan Direksi Nomor 0014.P/DIR/2020 tentang Pedoman Umum Penerapan <i>Three Lines of Defense</i>;</p> <p>18. Keputusan Direksi Nomor 0015.P/DIR/2020 tentang Penerapan <i>Governance, Risk Management, and Compliance (GRC)</i>.</p> | <p>14. <i>Board of Directors Resolution No.0010.P/DIR-HP/2020 on Haleyora Power's Anti-Fraud Policy;</i></p> <p>15. <i>Board of Directors Resolution No.0010.P/DIR-HP/2020 on Conflicts of Interest at PT Haleyora Power;</i></p> <p>16. <i>Resolution No. 0006.E/DIR/2020 of the Board of Directors on the Protocol for the Implementation of the Preparatory Phase and the New Normal Phase in PT Haleyora Power;</i></p> <p>17. <i>Board of Directors Resolution No.0014.P/DIR/2020 on General Guidelines for Implementing Three Lines of Defense;</i></p> <p>18. <i>Board of Directors Resolution No.0015.P/DIR/2020 on Governance, Risk Management, and Compliance (GRC).</i></p> |
|--|--|

Penilaian Penerapan GCG

Assessment of GCG Implementation

Asesmen Penerapan GCG Tahun 2020

Assessment of GCG Implementation in 2020

Secara berkala Perusahaan melaksanakan penilaian penerapan GCG (Penilaian GCG) untuk mengukur tingkat kepatuhan penerapan GCG di Perusahaan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Penilaian penerapan GCG Perusahaan pada tahun 2020 dilakukan secara mandiri dimana hasil penilaian GCG akan memberikan gambaran terkini terkait kondisi penerapan GCG di Perusahaan.

The Company conducts periodic GCG implementation assessments (GCG Assessments) to determine the extent to which GCG is being implemented in the Company, in accordance with the Minister of SOEs' Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and the Secretary of the Ministry of SOEs' Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012. The evaluation of corporate GCG implementation in 2020 is conducted independently, and the findings of the GCG assessment will give an updated image of the Company's GCG implementation status.

Adapun hasil dari asesmen tersebut adalah sebagai berikut:

The evaluation produced the following results:

| No. | Aspek Governance Governance Aspects | Bobot Weight | Capaian HP HP's Achievement | | Penjelasan Exegesis |
|------|--|--------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | Skor Score | (%) | |
| I. | Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainably Applying Good Corporate Governance</i> | 7,00 | 6,474 | 92,486 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| II. | Pemegang Saham dan RUPS <i>Shareholders and GMS</i> | 9,00 | 7,687 | 85,411 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| III. | Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | 35,00 | 30,975 | 88,500 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |

| No. | Aspek Governance Governance Aspects | Bobot Weight | Capaian HP HP's Achievement | | Penjelasan Exegesis |
|-------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Skor Score | (%) | |
| IV. | Direksi <i>Board of Directors</i> | 35,00 | 31,321 | 89,489 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| V. | Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i> | 9,00 | 6,593 | 73,256 | Cukup Baik <i>Adequate</i> |
| VI. | Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i> | 5,00 | 0,000 | | |
| Jumlah Total | | 100,00 | 83,050 | 83,05% | Baik Good |

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Description: 0-50 : Not Good | 50-60 : Not Good | 60-75 : Adequate | 75-85 : Good | 85-100 : Excellent

Berdasarkan hasil asesmen GCG tahun buku 2020, Perusahaan memperoleh skor 83,05 dengan predikat "BAIK". Pencapaian tersebut mengalami sedikit menurun dibandingkan hasil asesmen GCG periode tahun buku sebelumnya, dimana Perusahaan memperoleh skor 86,186 dengan predikat "Sangat Baik".

The Company received an overall score of 83.05 with the predicate "GOOD" based on the findings of the GCG evaluation for the 2020 fiscal year. This accomplishment was somewhat lower than the previous financial year's GCG evaluation results, when the Company earned a score of 86.186 and the designation "Excellent."

Rekomendasi 2020 dan tindak lanjut hasil penilaian 2019

Recommendations for 2020 and follow-up on the findings of the 2019 assessment

Berdasarkan hasil asesmen GCG tahun buku 2020, Perusahaan memperoleh sejumlah rekomendasi yang menjadi *area of improvement* dalam proses peningkatan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

The Company received a number of suggestions based on the findings of the GCG evaluation for the 2020 fiscal year, which became areas of focus in the process of enhancing the quality of GCG implementation throughout the Company.

Pemegang Saham/RUPS

1. Menetapkan mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap Direksi, termasuk ketentuan paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkap jabatan.
2. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Memberitahukan alasan pemberhentian sebelum pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi dengan memberikan hak jawab.
4. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
5. Melakukan penilaian kinerja individu Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Melakukan pembahasan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
7. Meningkatkan upaya untuk menindaklanjuti *areas of improvement* hasil *assessment* tahun sebelumnya.

Shareholders/GMS

1. *Establishing a mechanism for Directors to resign from concurrent positions, including rules that require resignation no later than 30 days after the occurrence of multiple posts.*
2. *Determining the maximum number of Board of Commissioners seats that a member may hold simultaneously.*
3. *Informing the Board of Commissioners/Directors of the cause for dismissal prior to dismissal by granting the right of accountability.*
4. *Endorsement of the Company's Long-Term Strategic Plan (RJPP).*
5. *Evaluating the Board of Commissioners' and Board of Directors' individual performance.*
6. *Deliberating and assessing the Governance Company's implementation.*
7. *Boosting efforts to address areas for improvement identified in the previous year's evaluation findings.*



Dewan Komisaris

1. Memasukkan dalam Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris kebijakan Dewan Komisaris mengambil keputusan yang mengikat pada Rapat Direksi secara fisik.
2. Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP yang diajukan oleh Direksi agar mencakup target-target kinerja yang akan dicapai.
3. Dewan Komisaris agar memberikan arahan tentang sistem pengendalian intern perusahaan, yaitu dengan merencanakan kegiatan tersebut dalam program kerja tahunan, melaksanakan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan audit intern serta menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Direksi.
4. Dewan Komisaris agar memastikan pelaksanaan audit eksternal dilaksanakan secara efektif, yaitu dengan merencanakan kegiatan tersebut dalam program kerja tahunan, melaksanakan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan audit eksternal serta menyampaikan hasil penilaian kepada Direksi.
5. Melaksanakan telaah atas hasil *Risk Assessment* dan mitigasi risiko serta menuangkan hasil telaahan dalam laporan tugas pengawasannya.
6. Melaksanakan penilaian Direksi secara individu (*soft skill*) dan menyampaikan hasilnya dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
7. Menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) setiap tahun dan melakukan penilaian capaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit, yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan menyempurnakan pedoman tata tertib rapat Dewan Komisaris.
9. Meningkatkan upaya dalam menindaklanjuti *areas of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* tahun sebelumnya.

Direksi

1. Menetapkan kebijakan Direksi mengenai standar waktu kesegeraan dalam pengambilan keputusan Direksi.
2. Menyampaikan RJPP kepada Pemegang Saham/RUPS tepat waktu dan selanjutnya mensosialisasikan RJPP yang telah disahkan oleh RUPS/PS.
3. Menyusun kebijakan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan perusahaan patungan.
4. Mengisi Jabatan VP Hukum dan Umum yang kosong.

Commissioners' Board

1. *Including in the Board of Commissioners' Work Procedures the Board of Commissioners' policy of physically making binding decisions at the Board of Directors Meeting.*
2. *The Board of Commissioners' reaction to the RKAP as suggested by the Board of Directors, which includes performance goals to be met.*
3. *The Board of Commissioners is responsible for directing the company's internal control system, specifically by planning these activities into the annual work programme, supervising and evaluating the internal audit's implementation, and reporting to the Board of Directors on the results of the assessment.*
4. *The Board of Commissioners is responsible for ensuring the effective implementation of external audits, including planning these activities into the annual work programme, supervising and evaluating the implementation of external audits, and reporting the results of the assessment to the Board of Directors.*
5. *Conducting a review of the Risk Assessment and risk mitigation outcomes, as well as including the study's findings in the supervisory job report.*
6. *Conducting individual evaluations of the Board of Directors (soft skills) and incorporating the findings into the Board of Commissioners' supervisory job report.*
7. *Each year, establishing key performance indicators and evaluating the performance of each member of the Board of Commissioners and the Audit Committee, as detailed in the Board of Commissioners' meeting minutes.*
8. *Evaluating the follow-up to the previous meeting's outcomes and refining the standards for the Board of Commissioners' meeting's norms of conduct.*
9. *Intensifying efforts to address areas for improvement identified in the previous year's evaluation.*

Directors' Committee

1. *Establishing the Board of Directors' policy on the standard time of immediacy in decision-making.*
2. *Delivering the RJPP on time to the shareholders/GMS and then sharing the RJPP after it has been approved by the GMS/PS.*
3. *Developing policies for subsidiaries and joint ventures (subsidiary governance).*
4. *Filling the vacant Vice President of Legal and General Affairs position.*

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern tingkat operasional entitas/aktivitas dengan melibatkan SPI, serta menerbitkan <i>internal control report</i>. 6. Menyampaikan laporan manajemen triwulanan, laporan semester dan laporan tahunan kepada pemegang saham minoritas. 7. Menyempurnakan tata tertib rapat yaitu pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, dan pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut atas tanggapan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi. 8. Meningkatkan fungsi SPI untuk merealisasikan rencana penugasan yang tercantum dalam PKPT dengan maksimal. 9. Berpartisipasi dalam memperoleh penghargaan atau <i>award</i> lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> 5. <i>Evaluating/auditing the effectiveness of internal control at the entity/operational activity's level through the use of SPI, as well as issuing internal control reports.</i> 6. <i>Providing minority shareholders with quarterly management reports, semester reports, and yearly reports.</i> 7. <i>Improving meeting procedures, including the adoption of follow-up assessments on previous meetings' outcomes, and discussion/review of directions/recommendations and/or follow-up on the Board of Commissioners' replies to the Board of Directors' proposals.</i> 8. <i>Enhancing the SPI's ability to fully materialise the assignment plan specified in the PKPT.</i> 9. <i>Assisting in the acquisition of prizes or other honours.</i> |
|---|---|

Kepala SPI

1. Melakukan penilaian kapabilitas SPI oleh lembaga independen.
2. Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dan operasional/aktivitas, dan menerbitkan *internal control report*.
3. Meningkatkan kapabilitas SPI dan melaksanakan program jaminan kualitas fungsi audit internal serta melakukan penilaian secara *self assessment*.

Head of SPI

1. *Conducting an impartial institution's capacity evaluation of the SPI.*
2. *Evaluating/assessing the efficacy of the entity's internal controls, operations, and activities, and preparing an internal control report.*
3. *Strengthening SPI's capacity and establishing a quality assurance programme for the internal audit function, as well as performing a self-assessment.*

Sekretaris Perusahaan

1. Menyusun risalah rapat yang dapat menggambarkan dinamika rapat dan mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) bila ada.
2. Melengkapi persyaratan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi dalam SRA (*Sustainability Reporting Award*), dan juga di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.

Corporate Secretary

1. *Preparing meeting minutes that accurately reflect the meeting's dynamics and include any opposing remarks.*
2. *Fulfilling the criteria for participation in the SRA (Sustainability Reporting Award), as well as in the area of publishing and sharing of information.*

Penilaian Pihak Eksternal

External Party Assessment

Penilaian dilakukan oleh pihak eksternal yang independen dua tahun sekali dan di antara periode tersebut Perusahaan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*). Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan penilaian secara mandiri dengan tim yang telah ditunjuk oleh Perusahaan dengan penjelasan sebagaimana di atas.

Every two years, an impartial external party performs an evaluation, and in the meantime, the Company conducts a self-assessment. With the foregoing explanation, the Company undertook an independent evaluation in 2020 with a team selected by the Company.



Peningkatan Kualitas GCG

Improvement in GCG Quality

Upaya meningkatkan kualitas GCG antara lain dilakukan dengan menerbitkan dan melakukan sosialisasi berbagai pedoman dan kebijakan terkait GCG, penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct/COC*) yang konsisten, serta melakukan penilaian penerapan GCG oleh pihak independen secara berkala.

To enhance the quality of GCG, different guidelines and rules relating to GCG are issued and disseminated, the Code of Conduct (COC) is consistently enforced, and the implementation of GCG is evaluated on a regular basis by independent parties.

Sosialisasi GCG di Lingkungan Perusahaan

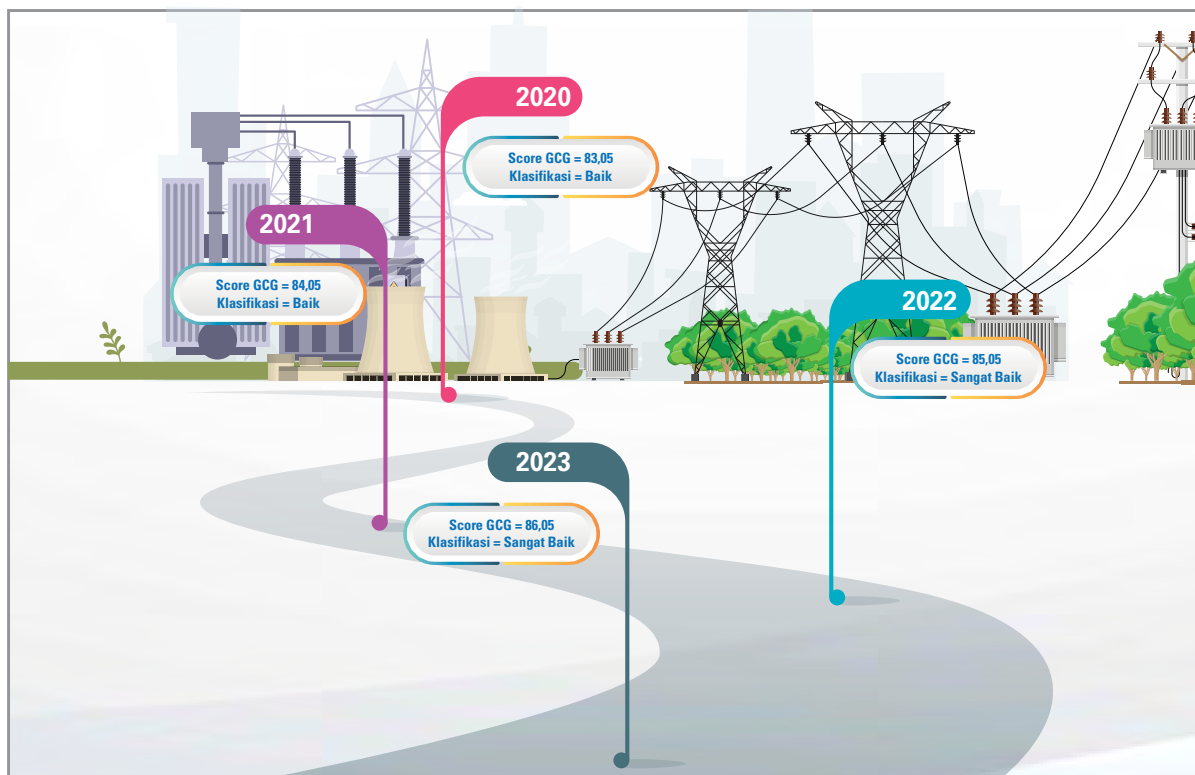
Dissemination of GCG in the Workplace

HP senantiasa melakukan kegiatan sosialisasi dalam lingkungan internal dengan menitikberatkan pada pemahaman GCG sehingga timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan antara lain dengan menerbitkan dan menyebarkan/menginformasikan berbagai pedoman dan kebijakan terkait GCG dan penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct/COC*) yang konsisten

HP will continue to conduct dissemination efforts inside the internal environment, concentrating on GCG knowledge, in order to raise awareness and the need to continuously apply GCG. The dissemination efforts include publishing and disseminating/in forming different rules and regulations pertaining to GCG, as well as enforcing the Code of Conduct Consistently (COC).

Roadmap Pengembangan GCG

GCG Development Road



Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Primary Shareholders and Information Controlling

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN merupakan pemegang saham utama PT Haleyora Power dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%. Informasi singkat mengenai pemegang saham utama dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

PT Haleyora Power is owned by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PLN, which owns 99.99% of the company. In this Annual Report's Company Profile chapter, you'll find some basic information on the main shareholders.

Rapat Umum Pemegang Saham

Shareholders' General Meeting

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Within the limitations stated in the Articles of Association and existing laws and regulations, the General Meeting of Shareholders ("GMS") is an organ of the Company with power not given to the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Jenis RUPS

Type of GMS

Berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS terdiri dari:

1. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang bersifat rutin diselenggarakan tiap tahun, yang terdiri dari RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan, serta RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. RUPS Luar Biasa (RUPS LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang terdapat hal-hal tertentu yang memerlukan pembahasan dan pengambilan keputusan yang sifatnya mendesak dan signifikan.

The GMS consists of:

1. *Annual GMS, which is a GMS that is held every year and consists of the Annual GMS concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements, as well as the Annual GMS concerning the Ratification of the Company's Work Plan and Budget, according to the provisions of the Company Law and the Company's Articles of Association.*
2. *Extraordinary GMS (EGMS), which is a GMS that may be convened at any moment if it is determined that specific issues need immediate and substantial debate and resolution.*

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 91 UUPT, Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan di luar RUPS ("Keputusan RUPS Sirkuler") yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan RUPS secara fisik. Keputusan RUPS Sirkuler berkekuatan hukum setara keputusan RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan tersebut.

Shareholders may make choices outside the GMS ("Circular GMS Decisions") that have the same legal power as the GMS physically, as indicated in article 91 of the Company Law. Circular GMS decisions have the same legal force as GMS resolutions if all shareholders with voting rights agree to the decision in writing by signing it.



Wewenang RUPS

GMS Authorities

Wewenang RUPS di antaranya adalah mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur, meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pengelolaan Perusahaan, merubah permodalan, mengubah Anggaran Dasar, merencanakan penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan, serta pembentukan anak perusahaan.

The GMS has the authority to appoint and dismiss Directors and Commissioners, to decide on the division of tasks and management authority among the Directors, to hold the Board of Commissioners and Directors accountable for the Company's management, to change capital, to change the Articles of Association, to plan the use of profits, to merge, consolidate, takeover, and dissolve the company, the creation of subsidiaries as well as the company.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Shareholders' Rights and Responsibilities

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan yang memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi namun memiliki kepentingan terhadap peningkatan keuntungan Perusahaan, peningkatan nilai Perusahaan dan bagaimana Perusahaan dikelola.

Individuals or legal entities that legally own the Company's shares have rights and obligations that are governed by laws and regulations as well as the Company's Articles of Association. Shareholders have an interest in growing the Company's earnings, improving the Company's worth, and how the Company is managed, but they do not interfere in the activities, duties, or powers of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Pemegang Saham melalui RUPS memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan dan mengesahkan RKAP serta memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

Shareholders have the authority to approve and ratify the RKAP, as well as the Annual Report and the Board of Commissioners' Financial Statements, Performance Reports, and Supervisory Reports, via the GMS.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2020

Implementation of the 2020 GMS

Sepanjang tahun 2020, HP menyelenggarakan beberapa kali RUPS yang dihadiri oleh kuasa dari Pemegang Saham dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

HP conducted five GMSs during 2020, which were attended by proxy from Shareholders and all members of the Board of Commissioners and Directors:

1. RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tanggal 30 Januari 2020. Dengan suara bulat RUPS telah menyetujui dan mengesahkan 2 (dua) mata acara dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - Perhitungan laba (rugi) setelah pajak tahun buku dianggarkan sebesar Rp218,77 miliar.
1. January 30, 2020, GMS Work Plan and Corporate Budget (RKAP). The GMS unanimously agreed and ratified the following 2 (two) agenda items:
 - a) Approving and ratifying the Work Plan and Budget of the Company (RKAP).
 - Profit (loss) after tax is projected at Rp218.77 billion for the fiscal year.

- Perhitungan posisi keuangan per 31 Desember 2020 dianggarkan ditutup dengan jumlah aktiva/pasiva masing-masing sebesar Rp1.215,90 miliar
- Perhitungan saldo arus kas per 31 Desember 2020 dianggarkan sebesar Rp579,76 miliar
- Perhitungan investasi tahun buku 2020 dianggarkan sebesar Rp52,73 miliar dengan *disburse* sebesar Rp52,7 miliar.

b) Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* Tahun 2020.

2. RUPS Tahunan tentang Persetujuan dan pengesahan Laporan Perhitungan Tahunan Tahun 2019. RUPS Tahunan menghasilkan keputusan atas 4 mata acara sebagaimana berikut:

1. Agenda Pertama

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 serta Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Keputusan:

- a) RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
- b) RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.
- c) RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dimaksud dalam laporannya No.00377/2.1030/AU.1/05/0645-1/1/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
- d) RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam

The financial situation as of December 31, 2020 is projected to be Rp1,215.90 billion in total assets/liabilities.

Rp579.76 billion is allocated for the calculation of the cash flow balance as of December 31, 2020.

The 2020 financial year investment estimate is Rp52.73 billion, with a payout of Rp52.7 billion.

b) *Approving and ratifying the 2020 Management Contract/ Key Performance Indicator.*

2. *Annual General Meeting of Stockholders (GMS) to approve and ratify the 2019 Annual Calculation Report. The Annual GMS made the following decisions on four agenda items:*

1. *The Initial Agenda*

Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the 2019 Fiscal Year, including the Report on the Board of Commissioners' Implementation of Supervision for the 2019 Fiscal Year and the Granting of a Full Liability Release (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Management and Supervision that occurred during the fiscal year.

Decision:

- a) *The GMS approves and accepts the 2019 Annual Report on the Company's Condition and Operation, which includes financial statements, performance evaluation reports, and compliance reports.*
- b) *The GMS authorised and accepted the Report on the Board of Commissioners' Supervisory Duties in the 2019 Fiscal Year.*
- c) *The GMS ratified the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019, which included a Statement of Financial Position, a Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, a Statement of Cash Flows, and a Statement of Changes in Equity, as well as their accompanying explanations. These financial statements had been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan with a "Unqualified" opinion March 16, 2020, as referenced in report No. 00377/2.1030/AU.1/05/0645-1/1/III/2020*
- d) *The GMS grants full release (Volledig Acquit Et De Charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision in accordance with their respective*



bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

2. Agenda Kedua
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.
Keputusan:
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.
3. Agenda Ketiga
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019 dan Remunerasi Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2019.
Keputusan:
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2019 dan Remunerasi Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2019.
4. Agenda Keempat
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Perseroan Tahun Buku 2020.
Keputusan:
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2020.

Selain itu, pada tahun 2020 Perusahaan juga melangsungkan 4 (empat) kali RUPS yang dilakukan secara sirkuler dengan keputusan sebagai berikut:

responsibilities and actions during the 2019 Fiscal Year, provided that these actions do not conflict with applicable laws and regulations or with the provisions of the F.

The ratification and discharge of responsibility do not absolve the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of legal liability if it is later determined that the disclosed report violated applicable legal provisions and procedures and/or there were deviant actions and/or detrimental to the Company.

2. Second Agenda
Calculation of Net Profit for Fiscal Year 2019.
Decision:
The GMS delegated authority to the majority shareholder to decide how net earnings would be used in the 2019 fiscal year.
3. Third Agenda
Tantiem for Fiscal Year 2019 and Compensation for Fiscal Year 2020 for Directors and Commissioners, as well as Bonuses for Fiscal Year 2019 Employees.
Decision:
The GMS empowers the majority Shareholders to decide the 2019 Financial Year Bonuses and 2020 Financial Year Remunerations for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as staff bonuses for the 2019 Financial Year.
4. Fourth Agenda
Appointment of a public accounting firm to audit the company's financial statements for the fiscal year 2020.
Decision:
The GMS empowers the majority shareholder to choose the auditor who will review the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Reports, and Compliance Reports for the 2020 Fiscal Year.

Additionally, the Company had 4 (four) GMS in 2020, which were performed in a cyclical fashion and resulted in the following decisions:

3. RUPS Sirkuler tanggal 12 Juni 2020, dengan keputusan sebagai berikut:
 - a. Memberhentikan dengan segala hormat Sdr. Sutrisno Samad sebagai Direktur Keuangan dan SDM.
 - b. Mengangkat dan menetapkan Sdr. Abdul Fatah Nasution sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan SDM.
 - c. Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, menjadi sebagai berikut :
 - Achmad Taufik Haji : Direktur Utama
 - Abdul Fatah Nasution : Plt. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
 - Sinung Triwulandari : Plt. Direktur Operasi
4. RUPS Sirkuler tanggal 19 Juni, dengan keputusan sebagai berikut:
 - ~ Memberhentikan dengan segala hormat Sdr. Achmad Taufik Haji sebagai Direktur Utama dan Sdr. Sutrisno Samad sebagai Direktur Keuangan dan SDM.
 - a) Mengangkat dan menetapkan Sdr. Sulistyio Biantoro sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Sdr. Abdul Fatah Nasution sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan SDM.
 - b) Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, menjadi sebagai berikut :
 - Sulistyio Biantoro : Plt. Direktur Utama
 - Abdul Fatah Nasution : Plt. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
 - Sinung Triwulandari : Plt. Direktur Operasi
 - ~ Memberhentikan dengan segala hormat Sdr. Fahmi El Amruzi D sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Karyawan Aji sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris.
 - ~ Mengangkat dan menetapkan Sdr. Bima Putrajaya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama.
 - ~ Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, menjadi sebagai berikut:
 - Bima Putrajaya : Plt. Komisaris Utama
 - Purnama T Sianturi : Plt. Komisaris
3. *On June 12, 2020, GMS will issue a circular containing the following resolutions:*
 - a. *With all due respect, dismissal Mr. Sutrisno Samad has been named Director of Finance and Human Resources.*
 - b. *Mr. Abdul Fatah Nasution should be appointed as Acting Director of Finance and Human Resources.*
 - c. *For the avoidance of dispute, the Shareholders thus reaffirm the following composition of the Company's Board of Directors as of the enactment of this Decree:*
 - *Achmad Taufik Haji : President Director*
 - *Abdul Fatah Nasution: Acting Director of Finance and Human Resources*
 - *Sinung Triwulandari : Acting Director of Operations*
4. *On June 19, GMS issued a circular with the following resolutions:*
 - ~ *With all due respect, dismissal Mr. Achmad Taufik Haji will serve as President Director, while Mr. Sutrisno Samad will serve as Director of Finance and Human Resources.*
 - a) *Assigning Mr. Sulistyio Biantoro to the position of Acting President Director and Mr. Abdul Fatah Nasution to the position of Acting Director of Finance and Human Resources.*
 - b) *For the avoidance of dispute, the Shareholders thus reaffirm the following composition of the Company's Board of Directors as of the enactment of this Decree:*
 - *Sulistyio Biantoro : Acting President Director*
 - *Abdul Fatah Nasution: Acting Director of Finance and Human Resources*
 - *Sinung Triwulandari : Acting Director of Operations*
 - ~ *Dismiss with all due respect Dr. Fahmi El Amruzi D as President Commissioner and Mr. Aji's employees as Acting Commissioner Duties.*
 - ~ *Appointing and assigning Mr. Bima Putrajaya as Acting President Commissioner*
 - ~ *For the avoidance of doubt, the Shareholders hereby reaffirm the composition of the members of the Company's Board of Commissioners as of the stipulation of this Decree, to be as follows:*
 - *Bima Putrajaya : Acting President Commissioner*
 - *Purnama T Sianturi : Acting Commissioner*



5. RUPS Sirkuler tanggal 12 November 2020, dengan keputusan sebagai berikut:
- ~ Mengangkat dan menetapkan Sdr. Bima Putrajaya sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Purnama T Sianturi sebagai Komisaris.
 - ~ Mengangkat dan menetapkan Sdr. Abdul Fatah Nasution sebagai Direktur Keuangan dan SDM dan Sdri. Sinung Triwulandari sebagai Direktur Operasi.
 - ~ Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Dirkesi Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, menjadi sebagai berikut:
 - Bima Putrajaya : Komisaris Utama
 - Purnama T. Sianturi : Komisaris
 - Sulistyو Biantoro : Plt. Direktur Utama
 - Abdul Fatah Nasution : Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
 - Sinung Triwulandari : Direktur Operasi
6. RUPS Sirkuler dengan akta No.23 Notaris Muhammad Hanafi, S.H., tanggal 8 Desember 2020 dengan keputusan sebagai berikut:
- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Sulistyو Biantoro sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan.
 - b. Mengangkat dan menetapkan Tuan Purnomo sebagai Direktur Utama Perseroan dengan tugas, kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab serta hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang mana pengangkatan tersebut mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 - c. Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, menjadi sebagai berikut :
 - Purnomo : Direktur Utama
 - Abdul Fatah Nasution : Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
 - Sinung Triwulandari : Direktur Operasi
5. *Circular GMS on November 12, 2020, with the following resolutions:*
- ~ *Appointing and assigning Mr. Bima Putrajaya as President Commissioner and Mr. Purnama T Sianturi as Commissioner.*
 - ~ *Appointing and assigning Mr. Abdul Fatah Nasution as Director of Finance and HR and Mrs. Sinung Triwulandari as Director of Operations.*
 - ~ *For the avoidance of doubt, the Shareholders hereby reaffirm the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the stipulation of this Decree, to be as follows:*
 - *Bima Putrajaya : President Commissioner*
 - *Purnama T Sianturi : Commissioner*
 - *Sulistyo Biantoro : Acting President director*
 - *Abdul Fatah Nasution : Director of Finance and Human Resources*
 - *Sinung Triwulandari : Director of Operations*
6. *Circular GMS with deed No.23 Notary Muhammad Hanafi, S.H., dated December 8, 2020 with the following decision:*
- a. *Honourably dismissed Mr. Sulistyو Biantoro as the Acting President Director of the Company.*
 - b. *To appoint and assign Mr. Purnomo as the Company's President Director with duties, obligations, authorities and responsibilities as well as rights in accordance with the provisions in force in the Company's Articles of Association, with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, in which the appointment shall take effect as of the stipulation of this decision by does not reduce the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.*
 - c. *For the avoidance of doubt, the Shareholders hereby reaffirm the composition of the members of the Company's Board of Directors as of the stipulation of this Decree, to be as follows:*
 - *Purnomo : President Director*
 - *Abdul Fatah Nasution : Director of Finance and Human Resources*
 - *Sinung Triwulandari : Director of Operations*

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

GMS Decision from the Previous Year

Pada tahun 2019, Perusahaan melangsungkan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham dengan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta kuasa dari Pemegang Saham sebagai berikut:

1. RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
RUPS RKAP diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2019 dengan menghasilkan 2 keputusan dengan 16 arahan Pemegang Saham yang seluruhnya telah direalisasikan pada tahun 2019.
2. RUPS Tahunan tentang Persetujuan dan pengesahan Laporan Perhitungan Tahunan Tahun 2018
RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2019, menghasilkan 4 Keputusan dan 8 arahan Pemegang Saham yang seluruh keputusan tersebut telah direalisasikan pada tahun 2019.

All members of the Board of Commissioners and Directors, as well as the following proxies from Shareholders, attended the Company's two (two) General Meetings of Shareholders in 2019.

1. *Workplan for the GMS and the corporate budget (RKAP)*
The RKAP General Meeting of Shareholders was conducted on January 10, 2019 and resulted in two decisions and sixteen instructions from Shareholders, all of which were implemented in 2019.
2. *Annual General Meeting of the Stakeholders on the Approval and Ratification of the 2018 Annual Calculation Report*
The Annual General Meeting of Shareholders was conducted on July 13, 2019, and resulted in four decisions and eight instructions from Shareholders, all of which were implemented in 2019.





Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham.

The Board of Commissioners is the Company's organ that oversees the Board of Directors' administration of the company and is in charge of the Annual General Meeting of Shareholders.

Kriteria Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Criteria

Sebagaimana tercantum dalam UUPT Pasal 110 jo Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 dan Anggaran Dasar Perusahaan, Persyaratan umum bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menyebabkan suatu Perusahaan pailit atau dihukum atas tindak pidana yang merugikan keuangan negara/ Badan Usaha Milik Negara.
2. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.
3. Tidak memiliki rangkap jabatan lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

The following are the general criteria for members of the Board of Commissioners, as specified in Article 110 of the Company Law, in combination with the Minister of SOE Number PER-01/MBU/2011 and the Company's Articles of Association:

1. *Capable of carrying out legal proceedings without causing a business to go bankrupt or being penalised for a criminal conduct that harms state finances/State-Owned Enterprises.*
2. *Not having a third-degree blood connection to other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.*
3. *Does not hold any other concurrent positions that may create a conflict of interest, as defined by the law.*

Ketentuan Masa Jabatan

Terms of Office

Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS.

The Board of Commissioners has a 4 (four)-year term of office and may be reappointed for 1 (one) term without prejudice to the General Meeting of Shareholders' authority to remove members of the Board of Commissioners at any time. Members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS when their term expires.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020.

Members of the Board of Commissioners in 2020: Structure, Amount, Composition, and Basis of Appointment.

Sepanjang tahun 2020, susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris mengalami perubahan sebagai berikut:

The following changes occurred in the makeup and composition of the members of the Board of Commissioners during the year 2020:

Periode 1 Januari - 19 Juni 2020
January 1 to June 19, 2020 Period

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Appointment Basis | Periode Jabatan Terms |
|----------------------|--|--|----------------------------------|
| Fahmi El Amruzi D. | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | RUPS Sirkuler tanggal 18 September 2017 <i>Circular GMS on September 18, 2017</i> | 2017-2021 |
| Karyawan Aji | Plt. Komisaris <i>Acting Commissioner</i> | RUPS Sirkuler tanggal 1 September 2018 <i>Circular GMS on September 1, 2018</i> | 2018-2022 |
| Purnama T. Sianturi | Plt. Komisaris <i>Acting Commissioner</i> | RUPS Sirkuler tanggal 1 September 2018 <i>Circular GMS on September 1, 2018</i> | 2018-2022 |

Periode 19 Juni - 31 Desember 2020
June 19 to December 31, 2020 Period

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Appointment Basis | Periode Jabatan Terms |
|----------------------|--|--|----------------------------------|
| Bima Putrajaya | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | RUPS Sirkuler tanggal 19 Juni 2020 <i>Circular GMS on June 19, 2020</i> | 2020-2024 |
| Purnama T. Sianturi | Komisaris <i>Commissioner</i> | RUPS Sirkuler tanggal 19 Juni 2020 <i>Circular GMS on June 19, 2020</i> | 2020-2024 |

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Fit and Proper Test Assessment

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama yaitu PT PLN (Persero).

All members of the Board of Commissioners have attended and passed the Main Shareholder's fit and proper test notably PT PLN (Persero).

Pedoman Kerja/Piagam Dewan Komisaris

Work Instructions/BOC Charter

Perusahaan telah menyusun *Board Manual* sebagai pedoman tata laksana kerja bagi Dewan Komisaris yang disahkan pada bulan September 2016 dan berisikan antara lain: Persyaratan dan komposisi Dewan Komisaris, Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Hak dan Wewenang, Etika, Aturan rapat, serta penjelasan tentang organ pendukung Dewan Komisaris.

The Company created a Board Manual as a work management guideline for the Board of Commissioners, which was ratified in September 2016 and includes, among other things, Board requirements and composition, Duties, Obligations and Responsibilities, Rights and Authorities, Ethics, Meeting rules, and an explanation of the Board of Commissioners' supporting organs.



Tugas dan Tanggung Jawab

Occupational Duties and Obligations

Sebagai salah satu organ Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dan memastikan pengelolaan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dijabarkan di dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang telah ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada September 2016.

Tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat atas pengendalian internal Perusahaan, yaitu seluruh sistem dan proses yang terdapat di dalam Perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners, as one of the Company's organs, has the function and responsibility of supervising and advising the Board of Directors, as well as ensuring that the Company's management is in accordance with the laws and regulations, the Company's Articles of Association, GMS resolutions, and the principles of GCG.

The Board Manual, which was signed jointly by the Board of Commissioners and the Board of Directors in September 2016, outlines the roles and responsibilities of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners' supervisory responsibilities include reviewing, discussing, and advising on the Company's internal control, which includes all systems and processes within the Company that are designed to provide adequate assurance on the achievement of the Company's objectives, particularly in increasing the effectiveness and efficiency of operations, and the financial stability.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Responsibilities

Pembagian tugas dan wewenang di antara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris sendiri dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Haleyora Power Nomor: 05.SK/DK/HP/2020 tentang Pembagian Tugas Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk senantiasa memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perseroan dan arahan pemegang saham.

The division of duties and authorities among the members of the Board of Commissioners is regulated by the Board of Commissioners themselves in the Decree of the Board of Commissioners of PT Haleyora Power Number: 05.SK/DK/HP/2020 concerning the Division of Duties of the Commissioners. Each member of the Board of Commissioners is responsible for constantly evaluating the efficacy of the Board of Directors' execution of policies and decision-making procedures to ensure that they are always in line with the Company's goals and shareholder direction.

| Nama /Jabatan Name/Position | Bidang Tugas Field of Duties |
|--|--|
| Bima Putrajaya/ Komisaris Utama <i>Bima Putrajaya/ President Commissioner</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Dewan Komisaris • Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko Dewan Komisaris • Pengawasan terhadap inisiatif strategis yang sudah ditetapkan • Pengawasan terhadap Tata Kelola Perusahaan Yang Baik <ul style="list-style-type: none"> • <i>Coordinator of the Board of Commissioners</i> • <i>Chairman of the GCG and Risk Management Committee of the Board of Commissioners</i> • <i>Oversight of established strategic initiatives</i> • <i>Supervision of Good Corporate Governance</i> |
| Purnama T. Sianturi/ Komisaris <i>Purnama T. Sianturi/ Commissioner</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Audit Dewan Komisaris • Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan • Pengawasan terhadap aspek SDM dan Pengembangan Usaha <ul style="list-style-type: none"> • <i>Chairman of the Audit Committee of the Board of Commissioners</i> • <i>Supervision of Financial Performance</i> • <i>Supervision of HR and Business Development aspects</i> |

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Decisions that Need Approving by the Board of Commissioners

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas permohonan perubahan tata nilai perusahaan menjadi AKHLAK sebagaimana dihimbau oleh Kementerian BUMN dan persetujuan untuk revisi RKAP 2020.

The Board of Commissioners accepted the proposal for a change in the company's values to AKHLAK, as requested by the Ministry of SOEs, as well as approval of the 2020 RKAP revision.

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2020

Decisions, Recommendations and Implementation of Duties of the Board of Commissioners in 2020

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Dewan Komisaris melangsungkan 17 kali rapat gabungan dan 11 kali rapat internal dengan membahasa permasalahan/*issue* strategis Perusahaan. Dewan Komisaris juga telah melakukan kunjungan kerja sebanyak 3 kali ke sejumlah region guna memperoleh informasi kondisi di lapangan.

Throughout 2020, the Company's Board of Commissioners performed its duties and responsibilities in overseeing the Board of Directors' administration of the Company. To address the Company's strategic issues/issues, the Board of Commissioners conducted 17 joint sessions and 11 internal meetings. Additionally, the Board of Commissioners conducted three working trips to a variety of areas to gather information about field conditions.

Program Pengenalan Perusahaan Bagi Komisaris Baru

Company's New Board of Commissioners' Orientation Program

Agar Dewan Komisaris Perusahaan selalu dapat bekerja selaras dengan Organ Perusahaan lainnya, maka Sekretaris Perusahaan atau pihak yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, yang sekurang-kurangnya mencakup:

The Corporate Secretary or the party performing the corporate secretary role is responsible for executing the introduction programme for newly appointed members of the Board of Commissioners, which at a minimum includes:



1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) oleh perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan dapat dilakukan dalam bentuk presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai.

1. *The company's use of good corporate governance (GCG) principles;*
2. *A description of the company's goals, nature, scope of operations, financial and operational performance, strategies, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic concerns;*
3. *Delegated authority, internal and external audits, internal control systems and procedures, including the Audit Committee;*
4. *Information on the Board of Commissioners' and Board of Directors' roles and obligations, as well as what is and is not permitted.*

Presentations, meetings, business visits, document checks, and other programmes considered suitable may all be included in the introduction programme.

Mekanisme Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Mechanism for Board of Commissioners Resignation

Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh hari) dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri;
2. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya sampai tanggal penetapan pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya;

The Board of Commissioners may submit a resignation request if the following criteria are met:

1. *Provide written notice of his intention to the Company, with copies to the Shareholders, other members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors, at least 30 (thirty) days prior to his resignation date. It is considered not to mention the effective date of resignation if the resignation letter states that the effective date is less than 30 (thirty) days from the date of receipt of the letter;*
2. *The member of the Board of Commissioners who resigns is still held accountable from the date of his appointment until the date of his resignation at the next GMS.*

Penilaian Kinerja Komite-komite yang Berada di bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners Have Their Performance Evaluated

Dewan Komisaris memiliki organ pendukung yaitu Komite Audit dan Komite GCG & Manajemen Risiko untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas aspek-aspek operasional dan strategis Perusahaan.

The Audit Committee and the GCG & Risk Management Committee are supporting organs of the Board of Commissioners that help in the execution of the Board of Commissioners' responsibilities and supervisory tasks on operational and strategic elements of the Company.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit sepanjang tahun 2020 cukup baik berdasarkan laporan dan rekomendasi yang diberikan serta skor dari capaian KPI sebagai berikut:

Evaluation of the Audit Committee's Work

Based on the reports and suggestions given, as well as ratings from the KPI accomplishments, the Board of Commissioners determined that the Audit Committee's performance during 2020 was very good:

| No. | Program Kerja Work Programs | Target Target | | Realisasi Realization | |
|--------------|--|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | Parameter Parameter | Bobot Weight | Parameter Parameter | Bobot Weight |
| 1. | Rapat Komite Termasuk Rapat dengan Dewan Komisaris <i>Committee Meetings Including Meetings with the Board of Commissioners</i> | 14 kali | 20 | 41 kali | 20 |
| 2. | Risalah Rapat Komite <i>Committee Meeting Minutes</i> | 100% | 15 | 100% | 15 |
| 3. | Kajian atas Usulan yang disampaikan oleh Direksi <i>Review of Proposals submitted by the Board of Directors</i> | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 4. | Peningkatan Kompetensi Anggota Komite <i>Committee Member Competence Improvement</i> | 1 kali | 10 | 1 kali | 10 |
| 5. | Kunjungan Kerja Komite <i>Committee Working Visit</i> | 1 kali | 5 | 2 kali | 5 |
| 6. | Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komite <i>Report on the Results of the Committee's Working Visit</i> | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 7. | Rencana Kerja dan KPI Komite <i>Committee Work Plans and KPIs</i> | 1 paper | 20 | 1 paper | 20 |
| 8. | Laporan Realisasi Kegiatan dan KPI Komite <i>Report on Realization of Committee Activities and KPIs</i> | 1 paper | 15 | 2 paper | 15 |
| Total | | | 100 | | 100 |

Penilaian Kinerja Komite GCG dan Manajemen Risiko

Performance Evaluation of the GCG and the Risk Management Committee

Penilaian kinerja bagi Komite GCG dan Manajemen Risiko untuk tahun 2020 dilihat dari laporan kegiatan, jumlah rapat dan rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite GCG dan Manajemen Risiko untuk tahun 2020 cukup baik melihat hasil capaian KPI sebagai berikut:

Activity reports, the number of meetings held, and recommendations made to the Board of Commissioners are used to evaluate the GCG and Risk Management Committee's performance for 2020. The Board of Commissioners believes that the GCG and Risk Management Committee's performance for 2020 is very excellent, based on the following KPI achievements:



| No. | Program Kerja Work Programs | Target Target | | Realisasi Realisation | |
|--------------|--|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | Parameter Parameter | Bobot Weight | Parameter Parameter | Bobot Weight |
| 1. | Penyusunan Rencana Kerja Komite <i>Preparation of Committee Work Plan</i> | 1 berkas | 20 | 1 berkas | 20 |
| 2. | Rapat Komite Termasuk Rapat dengan Dewan Komisaris <i>Committee Meetings Including Meetings with the Board of Commissioners</i> | 14 kali | 20 | 39 kali | 20 |
| 3. | Risalah Rapat Komite <i>Committee Meeting Minutes</i> | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 4. | Kajian atas Laporan Manajemen <i>Review of Management Reports</i> | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 5. | Kajian atas Usulan yang disampaikan oleh Direksi <i>Review of Proposals submitted by the Board of Directors</i> | 1 kali | 10 | 1 kali | 10 |
| 6. | Peningkatan Kompetensi Anggota Komite <i>Committee Member Competence Improvement</i> | 1 kali | 10 | 2 kali | 10 |
| 7. | Kunjungan Kerja Komite <i>Committee Working Visit</i> | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 8. | Laporan Kegiatan Komite (Triwulanan & Tahunan) <i>Committee Activity Report (Quarterly & Annually)</i> | 2 berkas | 10 | 2 berkas | 10 |
| Total | | | 100 | | 100 |

Komisaris Independen *Independent Commissioner*

Komisaris Independen merupakan anggota dari Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan belum memiliki Komisaris Independen dengan kriteria sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who have no financial, management, share ownership, or family ties to other members of the Board of Commissioners/Supervisory Board, members of the Board of Directors, or controlling shareholder, or relationship with the SOE in question.

Until the end of 2020, the Company will lack an Independent Commissioner who meets the requirements set out in Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ perusahaan yang mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola untuk mencapai visi dan misi perusahaan disertai dengan itikad baik guna memaksimalkan nilai Perusahaan bagi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

The Board of Directors is the corporate organ responsible for managing the business in line with governance principles in order to accomplish the company's vision and purpose in good faith and to maximise the firm's value for the benefit of shareholders and other stakeholders.

Kriteria Direksi

Criteria for Board of Directors

Berdasarkan *board manual* yang dimiliki, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Melaksanakan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan sesuai maksud dan tujuan perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Cakap dalam pembuatan hukum
3. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya;
4. Memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang usaha perusahaan
5. Memiliki integritas dan jiwa kepemimpinan serta kemauan yang kuat
6. Berdedikasi tinggi

According to the board manual owned, the following criteria must be met:

1. *Perform responsibilities in good faith in the interests of the Company's goals and objectives while adhering to applicable laws and regulations;*
2. *Skilled in legal proceedings*
3. *There must be no blood family relationships with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors up to the third degree, either straight or curved, or marital relationships (son-in-law or brother-in-law) with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors;*
4. *Possess sufficient experience in the company's line of business*
5. *Possess integrity and a sense of leadership, as well as a strong will.*
6. *Extremely devoted*

Ketentuan Masa Jabatan

Terms of Office

Masa jabatan anggota Direksi 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Members of the Board of Directors serve for a period of 4 (four) years without prejudice to the GMS's right to remove at any time and may be reappointed for 1 (one) term of office.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi di Sepanjang Tahun 2020

Members of the Board of Directors in 2020: Composition, Amount, Composition, and Basis of Appointment

Sepanjang tahu 2020, susunan dan komposisi anggota Direksi mengalami beberapa kali perubahan yaitu :

Throughout 2020, the makeup and composition of the Board of Directors members experienced numerous changes, including the following:



Periode 1 Januari - 12 Juni 2020

January 1, 2020 - June 12, 2020 Period

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Appointment Basis | Periode Jabatan Terms |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| Achmad Taufik Haji | Direktur Utama President Director | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017 <i>Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on May 26, 2017</i> | 2017-2021 |
| Sutrisno Samad | Direktur Keuangan Director of Finance | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017 <i>Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on May 26, 2017</i> | 2017-2021 |
| Sinung Triwulandari | Plt. Direktur Operasi Acting Director of Operations | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 7 November 2017 <i>Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on November 7, 2017</i> | 2017-2021 |

Periode 12 Juni - 19 Juni 2020

June 12 - June 19, 2020 Period

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Appointment Basis | Periode Jabatan Terms |
|----------------------|--|--|--------------------------|
| Achmad Taufik Haji | Direktur Utama President Director | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017 <i>Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on May 26, 2017</i> | 2017-2021 |
| Abdul Fatah Nasution | Plt. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Acting Director of Finance and Human Resources | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 <i>Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on June 12, 2020</i> | 2020-2024 |
| Sinung Triwulandari | Plt. Direktur Operasi Acting Director of Operations | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 7 November 2017 <i>Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on November 7, 2017</i> | 2017-2021 |

Periode 19 Juni - 8 Desember 2020

June 19 - December 8, 2020 Period

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Appointment Basis | Periode Jabatan Terms |
|----------------------|--|--|--------------------------|
| Sulistyo Biantoro | Plt. Direktur Utama Acting President Director | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 19 Juni 2020 <i>Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on June 19, 2020</i> | 2020-2024 |
| Abdul Fatah Nasution | Plt. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Acting Director of Finance and Human Resources | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 <i>Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on June 12, 2020</i> | 2020-2024 |
| Sinung Triwulandari | Plt. Direktur Operasi Acting Director of Operations | RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 7 November 2017 <i>Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on November 7, 2017</i> | 2017-2021 |

Periode 8 Desember - 31 Desember 2020

December 8 - December 31, 2020 Period

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Appointment Basis | Periode Jabatan Terms |
|----------------------|---|--|--------------------------|
| Purnomo | Direktur Utama <i>President Director</i> | RUPS Sirkuler tanggal 8 Desember 2020 <i>Circular GMS on December 8, 2020</i> | 2020-2024 |
| Abdul Fatah Nasution | Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia <i>Director of Finance and Human Resources</i> | RUPS Sirkuler tanggal 8 Desember 2020 <i>Circular GMS on December 8, 2020</i> | 2020-2024 |
| Sinung Triwulandari | Direktur Operasi <i>Director of Operations</i> | RUPS Sirkuler tanggal 8 Desember 2020 <i>Circular GMS on December 8, 2020</i> | 2020-2024 |

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Fit and Proper Test Assessment

Seluruh anggota Direksi telah mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama yaitu PT PLN (Persero).

All members of the Board of Directors have undergone and passed a fit and proper test performed by the Company's primary shareholder, PT PLN (Persero).

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Work Procedures/Charter of the Board of Directors

Perusahaan telah menyusun *board manual* sebagai pedoman tata laksana kerja bagi Direksi dan disahkan pada September 2016 dan masih berlaku hingga saat ini. Pedoman berisikan persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, hak dan wewenang, etika jabatan, tata cara penetapan kebijakan pengelolaan perusahaan, pembagian tugas, rapat dan etika jabatan.

The business developed a board manual to serve as a work management guideline for the Board of Directors. It was authorised in September 2016 and is in use to this day. Membership criteria, duties and responsibilities, rights and powers, position ethics, processes for establishing business management policies, task division, meetings, and office ethics are all included in the rules.

Tugas dan Tanggung Jawab

Occupational Duties and Obligations

Sebagaimana telah diatur dalam *board manual*, tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain: melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

As specified in the board manual, the Board of Directors' duties and responsibilities include the following: performing their duties, responsibilities, and authorities in the best interests of the Company in accordance with the Company's Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations.

Direksi juga bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan usaha dan kegiatan Perusahaan demi kepentingan

Additionally, the Board of Directors is completely accountable for carrying out its responsibilities to seek and guarantee the execution of the Company's business operations and activities for the benefit



Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi juga memiliki tugas terkait RUPS, keuangan perusahaan, manajemen risiko, tanggung jawab sosial dan penerapan GCG dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dari berbagai *stakeholders* sesuai dengan ketentuan.

of the Company's aims and objectives. Additionally, the Board of Directors has responsibilities for the GMS, corporate finance, risk management, social responsibility, and GCG implementation, which require it to constantly prioritise the interests of different stakeholders in line with applicable laws.

Direksi berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban.

The Board of Directors is bound by the values of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness in carrying out its tasks and obligations.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Division of the Board of Directors' Duties and Responsibilities

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan oleh Direksi.

The Articles of Association govern and define the responsibilities and powers of each member of the Board of Directors. If the GMS does not specify the distribution of responsibilities and powers, the Board of Directors shall decide the division of tasks and authority.

| Nama /Jabatan Name/Position | Bidang Tugas Field of Duties |
|---|---|
| Purnomo Direktur Utama <i>President Director</i> | <p>Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh anggota Direksi, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum Perusahaan; 2. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh; 3. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan; 4. Menyiapkan RJP; 5. Menyampaikan RJP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan; 6. Menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJP; 7. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup untuk memperoleh pengesahan; 8. Menyiapkan kebijakan umum sistem pengendalian internal; 9. Melaksanakan kebijakan sistem pengendalian internal; 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS. <p><i>The duties and responsibilities of the President Director are to coordinate the activities and implementation of the duties of all members of the Board of Directors, in terms of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Planning, developing, and determining the general policies of the Company;</i> 2. <i>Directing, developing, and determining the overall management strategy of the Company;</i> 3. <i>Controlling and evaluating all activities of the Company;</i> 4. <i>Preparing RJP;</i> 5. <i>Submitting the RJP which has been signed together with the Board of Commissioners to the GMS for approval;</i> 6. <i>Preparing RKAP which is the annual elaboration of the RJP;</i> 7. <i>Submitting the Annual Report to the GMS within 5 (five) months after the financial year closes for approval;</i> 8. <i>Preparing the general policy of the internal control system;</i> 9. <i>Implementing internal control system policies;</i> 10. <i>Carrying out other tasks determined by the GMS.</i> |

| Nama /Jabatan Name/Position | Bidang Tugas Field of Duties |
|--|--|
| <p>Abdul Fatah Nasutio Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia <i>Director of Finance and Human Resources</i></p> | <p>Tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi perencanaan sumber dana keuangan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan di masa depan; 2. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi penyusunan RKAP serta dokumen keuangan lainnya; 3. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi pengelolaan anggaran pendapatan dan biaya, serta pengelolaan dan pengamanan pendapatan dari arus kas; 4. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi akuntansi dan audit internal di bidang keuangan; 5. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaporan keuangan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK); 6. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi pengawasan kinerja usaha untuk tahun fiskal yang lalu dan berjalan, serta mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di masa depan; 7. Menetapkan dan memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan sudah didukung oleh pengambilan keputusan yang sesuai; 8. Memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pejabat di bawahnya. <p><i>The duties and responsibilities of the Director of Finance include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Establishing and ensuring the implementation, policies and strategies for planning financial sources of funds in accordance with the Company's future needs;</i> 2. <i>Establishing and ensuring the implementation, policies and strategies for the preparation of the RKAP and other financial documents;</i> 3. <i>Establishing and ensuring the implementation, policies and strategies for managing revenue and cost budgets, as well as managing and securing income from cash flows;</i> 4. <i>Establishing and ensuring the implementation of accounting and internal audit policies and strategies in the financial sector;</i> 5. <i>Establishing and ensuring that the implementation, policies and strategies of financial management and reporting are in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK);</i> 6. <i>Establishing and ensuring the implementation, policies and strategies for monitoring business performance for the past and current fiscal year, as well as taking steps to improve performance in the future;</i> 7. <i>Determining and ensuring that all activities related to finance have been supported by appropriate decision making;</i> 8. <i>Giving instructions, guiding, and supervising the officials under him.</i> |
| <p>Sinung Triwulandari Direktur Operasi <i>Director of Operations</i></p> | <p>Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasi antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam mencapai visi melalui perencanaan dan pengembangan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik serta pengembangan bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam RKAP dan RJP, termasuk di dalamnya merencanakan proyeksi keuangan Perusahaan dan merancang sistematis pendanaannya; 2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pengadaan; 3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan teknologi ketenagalistrikan, penelitian dan pengembangan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik, perencanaan pengadaan barang dan jasa strategis, termasuk di dalamnya hasil studi kelayakan, disain <i>engineering</i>, serta Rencana Kerja dan Spesifikasi (RKS) untuk pelaksanaan pengadaan; 4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan transaksi tenaga listrik, kemitraan bisnis, pengembangan model bisnis layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik serta pengembangan anak perusahaan dan usaha patungan; 5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam manajemen risiko, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan ketenagalistrikan (K2), serta kepatuhan; 6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko, melakukan pembinaan dan pengembangan anak perusahaan dan usaha patungan, serta pembinaan dan pengembangan <i>region</i> dan unit di bawah Direktorat Operasi; 7. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik serta mengelola pendapatan dan biaya operasi; 8. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam hal pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pemusatan serta integrasi sistem dan aplikasi teknologi informasi korporat. |



| Nama /Jabatan Name/Position | Bidang Tugas Field of Duties |
|--------------------------------|---|
| | <p><i>The duties and responsibilities of the Director of Operations include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Establishing and ensuring the implementation of corporate policies and strategies in achieving the vision through planning and development of electricity transmission and distribution operation and maintenance services as well as the Company's business development as outlined in the RKAP and RJP, including planning the Company's financial projections and designing a funding systematic;</i> <i>2. Establishing and ensuring the implementation of corporate policies and strategies in planning, development and implementation of procurement;</i> <i>3. Establishing and ensuring the implementation of corporate policies and strategies in the development of electricity technology, research and development of operation and maintenance services for electricity transmission and distribution, planning for the procurement of strategic goods and services, including the results of feasibility studies, engineering designs, as well as Work Plans and Specifications (RKS) for the implementation of procurement;</i> <i>4. Establishing and ensuring the implementation of corporate policies and strategies in the management of electricity transactions, business partnerships, development of business models for the operation and maintenance of electricity transmission and distribution services as well as the development of subsidiaries and joint ventures;</i> <i>5. Establishing and ensuring the implementation of corporate policies and strategies in risk management, occupational safety and health (OHS), electricity safety (K2), and compliance;</i> <i>6. Establishing and ensuring the implementation of business development and risk management, fostering and developing subsidiaries and joint ventures, as well as fostering and developing regions and units under the Directorate of Operations;</i> <i>7. Establishing and ensuring the implementation of operation and maintenance services for electricity transmission and distribution as well as managing revenue and operating costs;</i> <i>8. Establishing and ensuring the implementation of corporate policies and strategies in terms of system management and information technology, centralisation and integration of systems and applications of corporate information technology.</i> |

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru

Company's New Board of Directors' Orientation Program

Program pengenalan bagi Direksi baru dilakukan dengan tujuan agar Direksi Perusahaan selalu dapat bekerja selaras dengan Organ Perusahaan lainnya. Sekretaris Perusahaan merupakan penanggung jawab atas pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat. Materi yang diberikan yang sekurang-kurangnya mencakup:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh Perusahaan;
- Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Anggaran Dasar.

The orientation programme for new Directors is designed to ensure that the Company's Directors constantly work together with the other Company Organs. The Corporate Secretary is responsible for executing the Board of Directors' orientation programme for newly appointed members. The information supplied includes, but is not limited to:

- The Company's compliance with the principles of sound corporate governance;*
- A description of the Company's goals, nature, scope of operations, financial and operational performance, strategies, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and many other strategic problems;*
- Data pertaining to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and procedures, as well as the Audit Committee;*
- Information about the Board of Commissioners and the Board of Directors' roles and responsibilities under the Articles of Association.*

Pada tahun 2020, program ini dilaksanakan bagi Abdul Fatah Nasution pada tanggal 15 Juni 2020, sedangkan untuk Purnomo pada tanggal 9 Desember 2020.

In 2020, this programme was executed for Abdul Fatah Nasution on June 15, 2020 and for Purnomo on December 9, 2020.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Board of Directors' Resignation and Dismissal Procedures

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran dirinya disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

A member of the Board of Directors has the right to resign from his or her position by notifying the Company in writing of his or her intention, with a copy to the Shareholders, the Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors, at least 30 (thirty) days prior to the date of his or her resignation. If the resignation letter indicates that the effective date is fewer than 30 (thirty) days from the date of receipt of the letter, the effective date of the resignation is considered to be omitted.





Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners' and Board of Directors' Independence and Transparency

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi

Management of the Board of Commissioners' and the Board of Directors' Conflicts of Interest

Board manual telah mengatur etika terkait dengan benturan kepentingan yang mungkin terjadi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Perusahaan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan yang dikelolanya.
2. Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan, menyimpan dan mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain.
3. Dewan Komisaris dan Direksi wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut.

As follows, the board handbook regulates ethics in relation to potential conflicts of interest between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Company:

1. *The Board of Commissioners and the Board of Directors are forbidden from engaging in conflicting acts and reaping personal advantages from the Company's operations.*
2. *The Board of Commissioners and the Board of Directors are obliged to create, maintain, and update a Special Register listing their and/or their family members' ownership interests in other businesses.*
3. *The Board of Commissioners and the Board of Directors are obliged to declare any conflict of interest, and the individual affected must abstain from participating in the decision-making process on this issue.*

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Shared Ownership

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 serta Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

In Government Regulation No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and Minister of SOE Regulation No.PER-09/MBU/2012 dated July 06, 2012, the Minister of State-Owned Enterprises amended Regulation No.PER-01/MBU/2011 concerning Governance Implementation. Sufficient Corporate Governance in State-Owned Enterprises, it is stated that the Board of Commissioners and the Board of Directors are obliged to report to SOEs on their share ownership and/or family members' share ownership in the relevant SOEs and other businesses, as well as any changes to their share ownership.

| Nama Name | Jabatan Position | Kepemilikan Saham Share Ownership | |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | PT Haleyora Power | Perusahaan/Lembaga Lain Other Companies/Institutions |
| Bima Putrajaya | Komisaris Utama President Commissioner | Nihil None | Nihil None |
| Purnama T. Sianturi | Komisaris Commissioner | Nihil None | Nihil None |
| Purnomo | Direktur Utama President Director | Nihil None | Nihil None |
| Abdul Fatah Nasution | Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Resources | Nihil None | Nihil None |
| Sinung Triwulandari | Direktur Operasi Director of Operations | Nihil None | Nihil None |

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Positions Held by the Board of Commissioners and the Board of Directors Concurrently

Rangkap jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan terbebas dari benturan kepentingan dengan penjabaran sebagai berikut:

All members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors hold concurrent roles in accordance with relevant rules and regulations and are free of conflicts of interest, as described below:

| Nama <i>Name</i> | Jabatan <i>Position</i> | Rangkap Jabatan Pada <i>Concurrent Positions at</i> | |
|----------------------|---|---|---|
| | | PT Haleyora Power | Perusahaan/Lembaga Lain <i>Other Companies/Institutions</i> |
| Bima Putrajaya | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko <i>Chairman of the GCG and Risk Management Committee</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Purnama T. Sianturi | Komisaris <i>Commissioner</i> | Ketua Komite Audit <i>Chairman of Audit Committee</i> | Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi di Kementerian Keuangan RI <i>Director of State Asset Management and Information Systems at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia</i> |
| Purnomo | Direktur Utama <i>President Director</i> | Tidak Ada <i>None</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Abdul Fatah Nasution | Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia <i>Director of Finance and Human Resources</i> | Tidak Ada <i>None</i> | Tidak Ada <i>None</i> |
| Sinung Triwulandari | Direktur Operasi <i>Director of Operations</i> | Tidak Ada <i>None</i> | Tidak Ada <i>None</i> |





Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners and the Board of Directors are Affiliated

Seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan atau Pengendali baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Hubungan yang terjalin semata-mata karena hubungan kerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab Direksi seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar, Board Manual, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

All present members of the Board of Directors have no financial or familial connections with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major and/or Controlling Shareholders, either directly or indirectly, including marriage-related relationships. The connection exists only as a result of a working relationship established in accordance with the Board of Directors' duties and obligations as defined in the Articles of Association, the Board Manual, and relevant laws and regulations.

| Nama Name | Jabatan Position | Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with | | | | | | Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With | | | | | | Hubungan Kepengurusan Management Relationship with | |
|-------------------------|--|---|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|-------------|
| | | Dewan Komisaris Board of Commissioners | | Direksi Board of Directors | | Pemegang Saham Shareholders | | Dewan Komisaris Board of Commissioners | | Direksi Board of Directors | | Pemegang Saham Shareholders | | Ya Yes | Tidak No |
| | | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | | | | |
| Bima Putrajaya | Komisaris Utama President Commissioner | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |
| Purnama T. Sianturi | Komisaris Commissioner | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| Purnomo | Direktur Utama President Director | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| Abdul Fatah Nasution | Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Resources | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| Sinung Triwulandari | Direktur Operasi Director of Operations | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| | | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Diversity Policy

Perusahaan menilai perlu adanya keberagaman komposisi untuk keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi baik dalam hal pendidikan, gender, usia maupun pengalaman. Keberagaman dapat memberikan alternatif pemecahan masalah dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif, dengan mempertimbangkan unsur keberagaman dari bidang keilmuan, kompetensi, usia, keahlian, pengalaman kerja, dan gender agar paradigma dalam pengambilan keputusan menjadi lebih luas.

The business recognises the importance of diversity in terms of education, gender, age, and experience among members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Diversification may help find alternate answers to issues and promote more objective and thorough decision-making by incorporating aspects of variety from the areas of science, competence, age, expertise, job experience, and gender, thus broadening the paradigm of decision-making.

Berikut tabel keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan usia, pendidikan dan keahlian yang dimiliki:

The following table illustrates the Board of Commissioners and Board of Directors' diversity in terms of age, education, and expertise:

| Nama Name | Jabatan Position | Jenis Kelamin Gender | Usia Age (th) | Pendidikan Terakhir Most Recent Education | | | Keahlian Expertise | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| | | | | S1 Bachelor's Degree | S2 Master's Degree | S3 Doctoral Degree | Manajemen/ Keuangan Management/ Finance | Tata Kelola Governance | SDM HR | Produksi Production | Lainnya Others |
| Bima Putrajaya | Komisaris Utama President Commissioner | Pria Male | 56 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| Purnama T. Sianturi | Komisaris Commissioner | Pria Male | 52 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Purnomo | Direktur Utama President Director | Pria Male | 52 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| Abdul Fatah Nasution | Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Resources | Pria Male | 54 | √ | | | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sinung Triwulandari | Direktur Operasi Director of Operations | Wanita Female | 49 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors' Performance

Penilaian Kinerja Oleh RUPS

GMS's Performance Evaluation

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Dengan melihat hasil evaluasi kinerja masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.

Pada tahun 2020, seluruh kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah diterima dalam RUPS tahunan, dengan dilakukannya pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada yang bersangkutan dari Pemegang Saham.

The performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be assessed in the GMS by the Shareholders in accordance with relevant laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Shareholders' mandate. The results of the evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors as a whole, as well as the performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors individually, will be incorporated into the Board of Commissioners and the Board of Directors' compensation and incentive scheme.

By examining the findings of each Board of Commissioners and Board of Directors' performance evaluations separately, Shareholders may choose whether to dismiss and/or reappoint the relevant Board of Commissioners and Board of Directors.

By 2020, all Board of Commissioners and Board of Directors members' performances will have been approved at the annual GMS, together with the settlement and release (acquit et decharge) of those involved from the Shareholders.

Penilaian Kinerja Berdasarkan Assessment GCG aspek Dewan Komisaris dan Direksi

GCG-based performance evaluations of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sesuai pasal 15 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01A/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Dewan Komisaris mengusulkan *Key Performance Indicators* (KPI)/Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

Indikator dan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

In accordance with Article 15 of the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER-01A/MBU/2011 dated August 1, 2011, the Board of Commissioners proposes Key Performance Indicators (KPI)/Indicators of Performance Achievement for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which serves as a gauge for evaluating the successful execution of duties and responsibilities.

In 2020, the following metrics and outcomes will be used to evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors:

Aspek Dewan Komisaris

Aspek *governance* yang terkait dengan Dewan Komisaris yang dinilai berdasarkan 12 indikator dengan 44 parameter menunjukkan capaian skor 30,975 dari skor maksimum 35,00 atau 88,50% dengan predikat Sangat Baik. Hasil penilaian Indikator Aspek Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Aspects of Board of Commissioners

Aspects of governance pertaining to the Board of Commissioners are evaluated using 12 indicators and 44 factors, resulting in a score of 30.975 out of a possible maximum of 35.00 or 88.50% with a very excellent predictor. The following are the findings from the evaluation of the Board of Commissioners' Aspect Indicators.

| No Indikator No Indicator | Uraian Indikator Indicator Description | Skor Score | Predikat Predicate |
|------------------------------|---|---------------|--------------------------|
| 1. | Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan <i>The Board of Commissioners undertakes training/learning programs on an ongoing basis</i> | 100 | Sangat Baik Excellent |
| 2. | Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners achieves a clear division of duties, authorities and responsibilities and regulates the factors required to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners</i> | 96 | Sangat Baik Excellent |
| 3. | Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi <i>The Board of Commissioners favours the draft of the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget submitted by the Board of Directors</i> | 92 | Baik Good |
| 4. | Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. <i>The Board of Commissioners advises the Board of Directors on how to carry out the company's goals and policies.</i> | 68 | Cukup Baik Adequate |
| 5. | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. <i>The Board of Commissioners is responsible for supervising the Board of Directors in carrying out the company's goals and policies.</i> | 93 | Baik Good |
| 6. | Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. <i>The Board of Commissioners supervises the implementation of subsidiary/joint venture management policies.</i> | 100 | Sangat Baik Excellent |
| 7. | Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. <i>The Board of Commissioners is responsible for nominating Board of Directors members, reviewing the Board of Directors' performance (individual and collective), and proposing performance bonuses/incentives in line with relevant laws and taking performance into consideration.</i> | 95 | Sangat Baik Excellent |
| 8. | Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. <i>The Board of Commissioners takes action against potential conflicts of interest concerning him.</i> | 100 | Sangat Baik Excellent |
| 9. | Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. <i>The Board of Commissioners oversees and guarantees that effective and sustainable corporate governance procedures are applied.</i> | 100 | Baik Good |
| 10. | Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. <i>The Board of Commissioners holds effective Board of Commissioners meetings and attends Board of Commissioners meetings in accordance with statutory provisions.</i> | 91 | Sangat Baik Excellent |
| 11. | Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. <i>The Board of Commissioners has a Secretary to the Board of Commissioners to support the secretarial duties of the Board of Commissioners.</i> | 100 | Sangat Baik Excellent |
| 12. | Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif. <i>The Board of Commissioners has an effective Board of Commissioners Committee.</i> | 100 | Sangat Baik Excellent |



Aspek Direksi

Aspek *governance* yang terkait dengan Direksi dinilai berdasarkan 13 indikator dengan 52 parameter menunjukkan capaian skor 31,321 dari skor maksimum 35,00 atau 89,49% dengan predikat Sangat Baik. Hasil penilaian indikator Aspek Direksi adalah sebagai berikut:

Aspect of Board of Directors

Aspects of *governance* pertaining to the Board of Directors are evaluated using 13 indicators and 52 factors, resulting in a score of 31.321 out of a possible maximum of 35.00 or 89.49% with a very excellent predictor. The following are the findings from the evaluation of the Board of Directors Aspect indicators:

| No Indikator No Indicator | Uraian Indikator Indicator Description | Skor Score | Predikat Predicate |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------------|
| 1. | Direksi memiliki program pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan <i>The Board of Directors has an introduction and training/learning program and implements the program on an ongoing basis</i> | 100 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| 2. | Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas <i>The Board of Directors performs a clear division of duties/functions, authorities and responsibilities</i> | 85 | Baik <i>Good</i> |
| 3. | Direksi menyusun perencanaan perusahaan <i>The Board of Directors prepares the company plan</i> | 94 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| 4. | Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan <i>The Board of Directors is important in achieving the company's performance objectives.</i> | 87 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| 5. | Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan <i>The Board of Directors exercises operational and financial oversight over the company's goals and policies.</i> | 89 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| 6. | Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar <i>The Board of Directors is responsible for the company's management in line with relevant laws and regulations and the company's articles of organization.</i> | 93 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| 7. | Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> <i>The Board of Directors conducts value-added relationships for the company and stakeholders</i> | 92 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| 8. | Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. <i>The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest between members of the Board of Directors and management under the Board of Directors.</i> | 96 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| 9. | Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. <i>The Board of Directors ensures that the business discloses and communicates information in compliance with relevant laws and regulations and that information is sent to the Board of Commissioners and Shareholders on a timely basis.</i> | 79 | Baik <i>Good</i> |
| 10. | Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. <i>The Board of Directors holds Board of Directors meetings and attends Board of Commissioners Meetings in accordance with statutory provisions.</i> | 97 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| 11. | Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. <i>The Board of Directors is responsible for effective internal oversight.</i> | 87 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| 12. | Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif. <i>The Board of Directors performs the function of a qualified and effective corporate secretary.</i> | 91 | Sangat Baik <i>Excellent</i> |
| 13. | Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. <i>The Board of Directors holds the Annual GMS and other GMS in accordance with the laws and regulations.</i> | 79 | Baik <i>Good</i> |

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

Prosedur Pengusulan dan Penetapan

Procedure for Proposal and Determination

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Pemegang saham di dalam RUPS akan menyetujui dan menetapkan besaran remunerasi/tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah diusulkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi setelah melalui pengkajian oleh Komite GCG & MR yang salah satu tugas pokoknya adalah bidang nominasi dan remunerasi. Untuk nilai remunerasi/tantiem tahun 2019, Pemegang Saham telah mengesahkannya dalam RUPS Tahunan PT Haleyora Power tanggal 23 Juni 2020.

The Shareholders determine the Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors through the GMS mechanism, taking into account the provisions of the Articles of Association and the Minister of SOEs Regulation PER-01/MBU/05/2019 concerning the Fourth Amendment to the Minister of SOEs Regulation PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determination.

Shareholders at the GMS will approve and decide the amount of compensation/bonus for members of the Board of Commissioners and Board of Directors after a review by the GCG & MR Committee, one of whose primary responsibilities is nomination and remuneration. For the 2019 remuneration/tantiem value, the Shareholders have ratified it at the PT Haleyora Power Annual GMS on June 23, 2020.

Struktur Remunerasi

Structure of Remuneration

Berdasar Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 maka struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas kesehatan, komunikasi dan lainnya
4. Tantiem/Insentif Kinerja.

According to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/05/2019, the Company's Board of Commissioners and Directors is compensated as follows:

1. *Compensation/Honorarium*
2. *Allowance*
3. *Infrastructure for health, communication, and other purposes*
4. *Tantiem/Incentives for Performance.*



Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan

Board of Commissioners Meeting and Joint Meeting

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat dengan organ-organ pendukung serta Direksi dalam rapat gabungan dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi; membahas kondisi dan prospek usaha; dan membahas kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Adapun realisasi tanggal, agenda, peserta, dan frekuensi kehadiran masing-masing Anggota Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi adalah sebagai berikut:

Throughout 2020, the Board of Commissioners met in joint sessions with supporting organs and the Board of Directors to discuss the Board of Directors' periodic reports; business conditions and prospects; and national policies affecting the Company's performance, as well as to provide feedback, notes, and advice as specified in the Minutes of Meeting.

The Board of Commissioners and the Board of Directors met together seventeen (17) times. The following schedule details the date, agenda, participants, and frequency of attendance of each Member of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors:

| No. | Tanggal Date | Agenda Timetable | Peserta Participant |
|-----|---|--|--|
| 1. | 1 Februari 2020 February 1, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> RUPS RKAP 2020 HCM'S Journey 2018 – 2019 dan rencana 2020 Asset Management Contract (AMC) – Distribusi SDM PT HPI 2019-2020 Kunjungan Kerja ke Area Yogyakarta <ol style="list-style-type: none"> The Company's 2020 Work Plan and Budget GMS HCM'S Journey 2018 – 2019 and 2020 plans Asset Management Contract (AMC) – Distribution PT HPI HR 2019-2020 Working Visit to Yogyakarta Area | <p>Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Board of Commissioners and Board of Directors</p> |
| 2. | 30 Maret 2020 March 30, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Progres menghadapi COVID -19 Tindaklanjut Tanggapan Dekom atas LM & LMR TW III Tahun 2019 Laporan Manajemen <i>Unaudited</i> 2019 Laporan Tahunan SPI Tahun 2019 dan PKPT SPI Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> Progress against COVID -19 Follow-up on the Board of Commissioners' response to the 2019 LM & LMR TW III Unaudited Management Report 2019 SPI Annual Report 2019 and SPI PKPT 2020 | <p>Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Board of Commissioners and Board of Directors</p> |
| 3. | 24 April 2020 April 24, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Business Countinuity Plan (BCP) Laporan Manajemen TW I Tahun 2020 dan Laporan Manajemen Risiko TW I Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> Business Continuity Plan (BCP) Q1 2020 Management Report and 2020 Q1 Risk Management Report | <p>Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Board of Commissioners and Board of Directors</p> |

| No. | Tanggal Date | Agenda Timetable | Peserta Participant |
|-----|------------------------------------|---|--|
| 4. | 20 Mei 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Audit KAP LM Audit 2019 dan KPI Direktorat 2019 Persiapan RUPS LPT 2019 Lain-lain | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | May 20, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Public Accounting Firm Audit Result Report LM Audit 2019 and KPI Directorate 2019 Preparation for the 2019 LPT GMS Others | Board of Commissioners and Board of Directors |
| 5. | 18 Juni 2020 June 18, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Persiapan RUPS LPT 2019 Preparation for the 2019 LPT GMS | Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors |
| 6. | 30 Juni 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Informasi Terkini RJP 2020-2024 KPI Direktorat 2019 Tindaklanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris 2019 | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | June 30, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Up-to-date Information CPR 2020-2024 2019 Directorate KPI Follow up on the Decision of the 2019 Board of Commissioners Meeting | Board of Commissioners and Board of Directors |
| 7. | 16 Juli 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Realisasi PKPT SPI dan Tindak lanjut Temuan SPI/Eksternal sd TW II 2020 Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dekom – Direksi Bulan Februari SD Juni 2020 | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | July 16, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Realisation of SPI PKPT and Follow-up on SPI/External Findings until Q2 2020 Follow-up Evaluation of the Decisions of the Board of Commissioners – Directors Meeting in February SD June 2020 | Board of Commissioners and Board of Directors |
| 8. | 29 Juli 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Realisasi LM & LMR Realisasi Kontrak Manajemen TWII–2020 dan KPI Direktorat TW II -2020 Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan RUPS dan Tanggapan Dekom RKAP 2020 SD Juni 2020 | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | July 29, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Realization of LM & LMR Realization of TWII–2020 Management Contract and TW II Directorate KPI -2020 Follow-up Evaluation of GMS Decisions and Responses of the Board of Commissioners towards the Company's 2020 Work Plan and Budget for SD June 2020 | Board of Commissioners and Board of Directors |
| 9. | 14 Agustus 2020 August 14, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> AMC ListriQu | Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors |
| 10. | 28 Agustus 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Kinerja Korporat Evaluasi Business Continuity Plan | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | August 28, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Corporate Performance Evaluation of the Business Continuity Plan | Board of Commissioners and Board of Directors |
| 11. | 14 September 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Revisi RKAP 2020 dan Kinerja Korporat 2020 Likuiditas (Terkait penggunaan dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp56 milyar) RJP 2020 – 2024 | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | September 14, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Revised of the Company's 2020 Work Plan and Budget and Corporate Performance 2020 Liquidity (Regarding the use of restricted funds of Rp56 billion) Long-Term Plan of 2020 - 2024 | Board of Commissioners and Board of Directors |



| No. | Tanggal Date | Agenda Timetable | Peserta Participant |
|-----|--------------------|---|---|
| 12. | 29 September 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi RKAP 2020 dan Revisi Kontrak Manajemen 2020 2. Restitusi Pajak 3. Tenaga Kerja 4. RJP 2020 – 2024 | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | September 29, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revised of the Company's 2020 Work Plan and Budget and Revision of Management Contract 2020 2. Tax Refund 3. Labour 4. Long-Term Plan of 2020 - 2024 | Board of Commissioners and Board of Directors |
| 13. | 15 Oktober 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Terkini : Progres Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 2. Realisasi Kontrak Manajemen 2020 Sd TW III 2020 3. Tindaklanjut Temuan SPI/Audit External Sd TW III 2020 4. Tindaklanjut Temuan SPI/Audit External Sd TW III 2020 | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | October 15, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Latest Information: Progress of Implementation of ISO 37001:2016 Anti. Management System Bribery (SMAP) 2. Realisation of Management Contract 2020 to TW III 2020 3. Follow-up on SPI/External Audit Findings for TW III 2020 4. Follow-up on SPI/External Audit Findings for TW III 2020 | Board of Commissioners and Board of Directors |
| 14. | 30 Oktober 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 2. Laporan Manajemen TW III 2020 3. Laporan Manajemen Risiko TW III 2020 4. KPI Direktorat TW III -2020 5. Likuiditas Oktober 2020 6. Tindaklanjut Tanggapan Dewan Komisaris atas LM TW II 2020 | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | October 30, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anti-Bribery Management System (SMAP) 2. TW III Management Report 2020 3. TW III 2020 Risk Management Report 4. KPI Directorate TW III -2020 5. Liquidity October 2020 6. Follow-up to the Board of Commissioners' Response to LM TW II 2020 | Board of Commissioners and Board of Directors |
| 15. | 13 November 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft RKAP 2021 2. Laporan Keuangan Oktober 2020 3. Progres Pembangunan Sistem Pengelolaan Keuangan Region | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | November 13, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft of the Company's 2021 Work Plan and Budget 2. Financial Report October 2020 3. Progress of Regional Financial Management System Development | Board of Commissioners and Board of Directors |
| 16. | 27 November 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft RJP 2020-2024 dan Draft RKAP 2021 (hasil pembahasan teknis RUPS) 2. Progres AMC, ListriQu, dan Outage Management 3. Masalah Hukum Perseroan | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | November 27, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. The Draft of Long-Term Plan of 2020-2024 and Draft of the Company's 2021 Work Plan and Budget (results of the GMS technical discussion) 2. Progress of AMC, ListriQu, and Outage Management 3. Company Legal Issues | Board of Commissioners and Board of Directors |
| 17. | 18 Desember 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft RKAP 2021 Final 2. Laporan Keuangan November 2020 3. Kinerja Korporat November 2020 | Dewan Komisaris dan Direksi |
| | December 18, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Final Draft of the Company's 2021 Work Plan and Budget 2. Financial Report November 2020 3. Corporate Performance November 2020 | Board of Commissioners and Board of Directors |

Rapat Direksi

Meeting of the Board of Directors

Direksi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rapat minimal sebulan sekali dan risalah rapat akan dibuat oleh Sekretaris Perusahaan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi untuk kemudian diarsipkan. Sepanjang tahun 2020, Direksi melaksanakan rapat Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

The Board of Directors is required to meet at least once a month, and the Corporate Secretary will produce meeting minutes that will be signed by all members of the Board of Directors and preserved. During 2020, the Board of Directors conducted 18 (eighteen) meetings with the following agenda and attendance frequency:

| No. | Tanggal Date | Agenda Timetable | Peserta Participant |
|-----|--|---|--|
| 1. | 3 Januari 2020 <i>January 3, 2020</i> | 1. Evaluasi Survei Kepuasan Pelanggan 2. Pembahasan <i>Corporate Branding</i> <i>1. Evaluation of Customer Satisfaction Survey</i> <i>2. Discussion of Corporate Branding</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 2. | 17 Februari 2020 <i>February 17, 2020</i> | 1. RJP 2020-2024 2. Kajian Legal terhadap Implementasi Perdir PLN Nomor 061.P/DIR/2019 <i>1. Long-Term Plan of 2020-2024</i> <i>2. Legal Study on the Implementation of PLN Perdir Number 061.P/DIR/2019</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 3. | 26 Februari 2020 <i>February 26, 2020</i> | Implementasi Program Utama RKAP 2020 <i>Implementation of the Company's 2020 Work Plan and Budget Main Program</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 4. | 27 Februari 2020 <i>February 27, 2020</i> | 1. Implementasi SK DIR 219.P/DIR/2019 2. Pengendalian PRK 2020 3. Kompetensi CBM & Transmisi 4. Kompetensi Bisnis Turunan <i>1. Implementation of SK DIR 219.P/DIR/2019</i> <i>2. Controlling CRP 2020</i> <i>3. CBM & Transmission Competence</i> <i>4. Derived Business Competence</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 5. | 28 Februari 2020 <i>February 28, 2020</i> | 1. Implementasi SK DIR 219.P/DIR/2019 2. Kondisi <i>cashflow</i> atas pembayaran unit PLN terkait isu implementasi perdir 2019 <i>1. Implementation of SK DIR 219.P/DIR/2019</i> <i>2. Cashflow conditions for PLN unit payments related to the issue of implementing the 2019 regulation</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |



| No. | Tanggal Date | Agenda Timetable | Peserta Participant |
|-----|---|---|--|
| 6 | 17 Maret 2020 <i>March 17, 2020</i> | Penanganan Virus Corona (COVID-19) di lingkungan PT Haleyora Power <i>Handling the Corona Virus (COVID-19) in PT Haleyora Power</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 7 | 6 April 2020 <i>April 6, 2020</i> | Penanganan COVID-19 di lingkungan <i>Region & Area</i> PT Haleyora Power <i>Handling COVID-19 in the Region & Area of PT Haleyora Power</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 8 | 8 Mei 2020 <i>May 8, 2020</i> | 1. Hasil Diskusi Radekom April 2020 2. Hasil Pembahasan <i>Meeting</i> dengan Dirren <i>1. Results of the April 2020 Board of Commissioners Meeting Discussion</i> <i>2. Results of the Discussion Meeting with the Director</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 9 | 27 Mei 2020 <i>May 27, 2020</i> | Persiapan menghadapi <i>New Normal</i> di PT Haleyora Power <i>Preparation for the New Normal at PT Haleyora Power</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 8 | 29 Mei 2020 <i>May 29, 2020</i> | <i>Approval</i> hasil BA LEK HPI tahun 2019 <i>Approval of BA LEK HPI results in 2019</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 9 | 2 Juni 2020 <i>June 2, 2020</i> | 1. <i>Approval</i> Skema Q-Meter 2. <i>Approval</i> Project Belitung dan Sumut <i>1. Q-Meter Schematic Approval</i> <i>2. Belitung and North Sumatra Project Approval</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 10 | 5 Juni 2020 <i>June 5, 2020</i> | 1. Pencapaian KPI Juni 2020 2. Persiapan RUPS LPT 2019 <i>1. KPI Achievement June 2020</i> <i>2. Preparation for the 2019 LPT GMS</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 11 | 31 Agustus 2020 <i>August 31, 2020</i> | 1. Penyediaan Sarana dan Fasilitas Kerja 2. <i>Governance Risk Compliance & Three Lines of Defence.</i> 3. Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT HP 4. Penerapan SMAP 5. Perizinan ListriQu 6. Rencana Perubahan Logo Perusahaan <i>1. Provision of Work Facilities and Facilities</i> <i>2. Governance Risk Compliance & Three Lines of Defense.</i> <i>3. Limitation of Decision-Making Authority within PT HP</i> <i>4. Application of SMAP</i> <i>5. ListriQu Licensing</i> <i>6. Company Logo Change Plan</i> | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |

| No. | Tanggal Date | Agenda Timetable | Peserta Participant |
|-----|---------------------------|---|--|
| 12. | 14 September 2020 | 1. Penambahan SKKO Sub Kontraktor <i>Region 1 Jawa Barat, Region 5 DKI Jakarta & Banten, Region 6 Riau & Kepulauan Riau, Region 7 S2JB, Lampung, Bangka</i> tahun 2020 | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait |
| | <i>September 14, 2020</i> | 1. <i>Addition of SKKO for Sub Contractors Region 1 West Java, Region 5 DKI Jakarta & Banten, Region 6 Riau & Riau Islands, Region 7 S2JB, Lampung, Bangka in 2020</i> | <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 13. | 22 September 2020 | Usulan Perubahan Logo Perusahaan | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait |
| | <i>September 22, 2020</i> | <i>Company Logo Change Proposal</i> | <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 14. | 24 September 2020 | 1. Stroomnet 2. Semata 3. ListriQu 4. SMAP 5. Pengadaan 6. Pengurusan Perizinan | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait |
| | <i>September 24, 2020</i> | 1. <i>Stroomnet</i> 2. <i>Semata</i> 3. <i>ListriQu</i> 4. <i>SMAP</i> 5. <i>Procurement</i> 6. <i>Licensing Management</i> | <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 15. | 1 Oktober 2020 | 1. Batas Kewenangan Pengadaan 2. Kontrak Kemitraan | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait |
| | <i>October 1, 2020</i> | 1. <i>Limits of Procurement Authority</i> 2. <i>Partnership Contract</i> | <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |
| 16. | 9 Oktober 2020 | 1. Program Strategis PT HP 2. Semata 3. Laporan COVID-19 4. Autodispatche 5. ListriQu 6. Stroomnet 7. HUT HP | Seluruh Direksi dan EVP yang terkait |
| | <i>October 1, 2020</i> | 1. <i>PT HP's Strategic Programs</i> 2. <i>Semata</i> 3. <i>Covid-19 Report</i> 4. <i>Autodispatche</i> 5. <i>ListriQu</i> 6. <i>Stroomnet</i> 7. <i>HP Anniversary</i> | <i>All related Board of Directors and EVPs</i> |



| No. | Tanggal Date | Agenda Timetable | Peserta Participant |
|-----|--|--|--|
| 17. | 9 November 2020 <i>November 9, 2020</i> | <ol style="list-style-type: none"> Perubahan pembebanan iuran peserta dan iuran pemberi kerja DPLK Perubahan pembebanan iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> <i>Changes in the imposition of DPLK participant and employer contributions</i> <i>Changes in the imposition of Participant Contributions and Employer Contributions for BPJS Employment and BPJS Health</i> | <p>Seluruh Direksi dan EVP yang terkait</p> <p><i>All related Board of Directors and EVPs</i></p> |
| 18. | 18 Desember 2020 <i>December 18, 2020</i> | <p>Penambahan Setoran Saham PT HPI</p> <p><i>Additional Shares of PT HPI</i></p> | <p>Seluruh Direksi dan EVP yang terkait</p> <p><i>All related Board of Directors and EVPs</i></p> |



Komite Audit

Audit Committee

Dewan Komisaris memiliki Komite Audit sebagai organ penunjang yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan rekomendasi dalam penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta memberikan pendapat profesional terkait laporan keuangan/audit.

The Board of Commissioners has an Audit Committee that helps in the execution of duties and makes suggestions to improve the company's management control system, as well as giving expert views on financial/audit reports.

Kriteria Anggota Komite Audit

Criteria for Appointing Members to the Audit Committee

Anggota Komite Audit dipimpin salah satu anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang dibantu pihak independen dengan keahlian/sertifikasi dan pengalaman dalam bidang audit/keuangan.

The Audit Committee is chaired by a member of the Company's Board of Commissioners and supported by an independent party with auditing/finance expertise/certification and experience.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

The Audit Committee's Appointment and Dismissal

Keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dengan masa jabatan yang tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners appoints and dismisses members of the Audit Committee, who serve terms that do not exceed the tenure of the Board of Commissioners.

Susunan, Jumlah, Komposisi, Masa Jabatan dan Dasar Pengangkatan Komite Audit

The Audit Committee's Structure, Composition, Term of Office, and Method of Appointment

Pada tahun 31 Desember 2020, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit terdiri dari:

As of December 31, 2020, the Audit Committee's composition and membership consists of the following:

| Nama Name | Jabatan Keahlian Head of Audit Committee | Dasar Pengangkatan Appointment Basis | Keahlian Expertise |
|--------------------------|---|---|--|
| Purnama T Sianturi | Ketua Komite Audit Head of Audit Committee | Keputusan Dewan Komisaris No.002.SK/DK/HP/2020 tanggal 29 Juni 2020 <i>Decision of the Board of Commissioners No.002.SK/DK/HP/2020 dated June 29, 2020</i> | Hukum, Keuangan dan Audit <i>Legal, Financial and Audit</i> |
| Didik Sukristiyo Yuwono | Anggota Komite Audit Member of Audit Committee | Keputusan Dewan Komisaris No.002.SK/DK/HP/2019 tanggal 26 Februari 2019 <i>Decision of the Board of Commissioners No.002.SK/DK/HP/2019 dated February 26, 2019</i> | Akuntansi dan Audit <i>Accounting and Audit</i> |
| I Ketut Gede Agus Sutopo | Anggota Komite Audit Member of Audit Committee | Keputusan Dewan Komisaris No.04.SK/DK/HP/2020 tanggal 22 September 2020 <i>Decision of the Board of Commissioners No.04.SK/DK/HP/2020 dated September 22, 2020</i> | Operasi Distribusi dan transmisi <i>Operational Distribution and Transmission</i> |



Profil Komite Audit

Profile of the Audit Committee

Profil anggota Komite Audit dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Members of the Audit Committee are profiled in this Annual Report's Company Profile chapter.

Independensi Anggota Komite Audit

Members of the Audit Committee's Independence

Merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER01/MBU/2011, seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

According to the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No.PER01/MBU/2011, all members of the Audit Committee meet the following independence criteria:

| Kriteria Criteria | Purnama T Sianturi | Didik Sukristiyo Yuwono | I Ketut Gede Agus Sutopo |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. <i>Not a member of a public accounting company, legal consulting firm, public appraisal service office, or other party that has provided the Company with insurance, non-insurance, appraisal, or other consulting services in the previous six months.</i> | √ | √ | √ |
| Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. <i>Has no direct or indirect ownership in the Company.</i> | √ | √ | √ |
| Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. <i>Not a person who has worked for the Company or has the power and responsibility for planning, leading, controlling, or supervising its operations in the past six months.</i> | √ | √ | √ |
| Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama Perusahaan. <i>Has no familial ties to the Commissioners, Directors, or the Company's Major Shareholders as a result of marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically.</i> | √ | √ | √ |
| Tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. <i>Has no direct or indirect commercial connection with the Company.</i> | √ | √ | √ |
| Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. <i>Not presently employed by a company whose operations offer services to the Company.</i> | √ | √ | √ |

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit

Work Instructions/Charter of the Audit Committee

Perusahaan telah menyusun Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja yang telah disahkan dengan SK Dewan Komisaris No. 007. SK/DK/HP/2017 tanggal 12 Desember 2017. Piagam Komite Audit menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit.

The Company developed the Audit Committee Charter as a working document, which was approved by the Board of Commissioners Decree No. 007.SK/DK/HP/2017 dated December 12, 2017. The Audit Committee Charter details the Audit Committee's roles, responsibilities, and obligations.

Tugas dan Tanggung Jawab

Occupational Duties and Obligations

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit. Secara garis besar, tugas pokok Komite Audit adalah sebagai berikut:

The Audit Committee Charter regulates the Audit Committee's roles and obligations. The Audit Committee's primary responsibilities are as follows:

Bidang Audit

1. Memonitor efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor internal maupun eksternal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit baik yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap setiap informasi keuangan yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Auditing

1. Monitor the internal control system's efficacy and the effectiveness of internal and external auditors' audits;
2. Evaluating the execution of operations and the outcomes of internal and external audits conducted by the Internal Supervisory Unit (SPI);
3. Make suggestions for the management control system's enhancement and implementation;
4. Ensure that any financial information provided by the Company is evaluated in a suitable manner;
5. Make recommendations to the GMS about the nomination of public accountants and public accounting companies to the Board of Commissioners.

Bidang Perencanaan dan Implementasi

1. Menelaah dan memberikan hasil kajian/tanggapan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Manajemen (LM), dan informasi lainnya;
2. Menelaah pengaduan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Perusahaan;

Planning and Implementation

1. Conduct reviews and give answers to studies/responses on the Company, its Long-Term Plan (RJP), its Work Plan and Budget (RKAP), its Management Report (LM), and other information.
2. Investigate concerns made by stakeholders about the Company;

Bidang Kinerja

1. Memberikan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja;

Area of Performance

1. Make recommendations to the Board of Directors on the establishment of key performance indicators at the start of each fiscal year;



2. Memberikan rekomendasi penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dan/atau instrumen lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan evaluasi lebih lanjut;

Bidang Pengembangan Usaha

1. Memantau dan mengevaluasi realisasi rencana bisnis Perusahaan;
2. Mengevaluasi rencana pengembangan/ekspansi bisnis Perusahaan;

Rencana Kerja dan Pelaporan Komite Audit

1. Membuat rencana kerja dan KPI Komite tahunan;
2. Menyampaikan laporan kegiatan Komite dan realisasi KPI Komite triwulanan dan tahunan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Komite Audit

Meeting of the Audit Committee

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit melaksanakan termasuk dengan menghadiri rapat bersama dengan Dewan komisaris sebanyak 41 (empat puluh satu) kali rapat dengan rincian agenda sebagai berikut:

1. Evaluasi Usulan RKAP HP Tahun 2020.
2. Evaluasi Usulan RKAP Tahun 2021
3. Evaluasi Usulan Revisi RKAP Tahun 2020.
4. Evaluasi Usulan RJP HP 2020-2024.
5. Evaluasi Laporan Manajemen dan Pencapaian KPI HP *Unaudited* dan *Audited* 2019.
6. Evaluasi Laporan Keuangan 2019 *Audited*
7. Evaluasi Program Kerja HP-Upaya mencapai Kinerja 2020
8. Evaluasi Laporan Manajemen dan Pencapaian KPI HP Tahunan Tahun 2020 *Unaudited*.
9. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dan internal HP tahun 2019 dan Evaluasi Efektifitas Pengendalian Internal Tahun 2019.
10. Evaluasi Laporan Pengendalian Internal Tahun 2020.

2. *Make suggestions for assessing the Board of Directors' performance using key performance indicators and/or other instruments that will be sent to the Board of Commissioners for further assessment;*

Business Development

1. *Monitor and assess the Company's business plan's implementation;*
2. *Evaluate the business development/expansion strategy of the company;*

Plan of Work and Report of the Audit Committee

1. *Develop yearly work plans and key performance indicators for the Committee;*
2. *Submit quarterly and yearly reports on the Committee's activities and progress toward meeting the Committee's key performance indicators;*
3. *Perform any other responsibilities assigned by the Board of Commissioners in accordance with applicable law.*

Throughout 2020, the Audit Committee had as many as 41 (forty one) sessions, including joint meetings with the Board of Commissioners, with the following agenda:

1. *Evaluation of the Proposal for the 2020 HP RKAP.*
2. *Assessment of the Proposed RKAP 2021*
3. *Evaluation of the Proposed 2020 RKAP Revision.*
4. *Evaluation of the HP RJP Proposal for 2020-2024.*
5. *Evaluation of HP's unaudited management reports and KPI achievement, as well as the 2019 audited financial statements.*
6. *Review of the Audited Financial Statements for the Fiscal Year 2019*
7. *HP's Work Program Evaluation - Efforts to Achieve Performance 2020*
8. *Unaudited Evaluation of Management Reports and Achievement of Annual HP Key Performance Indicators for 2020.*
9. *Follow-up on the results of HP's 2019 external and internal audits, as well as the results of HP's 2019 Internal Control Effectiveness Evaluation.*
10. *Internal Control Report for 2020 Evaluation.*

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 11. Kajian Usulan Pembentukan <i>Region 7</i> (Memorandum Analisa Komite Audit - Dewan Komisaris PT Haleyora Power (HP) Diluar Rapat (Sirkuler) Tentang "Evaluasi atas Usulan Pembentukan Organisasi PT Haleyora Power <i>Region 7</i> Lampung") 12. Kajian Usulan Pembentukan <i>Region 7</i> Memorandum Analisa Komite Audit – Dewan Komisaris PT Haleyora Power (HP) Diluar Rapat (Sirkuler) Tentang "Evaluasi atas Usulan Pembentukan Organisasi PT Haleyora Power <i>Region 8</i> S2JB Dan BABEL") 13. Evaluasi Perkembangan <i>Asset Management Contract</i> (AMC) 14. Evaluasi Perkembangan Produk Layanan Listrik 15. Evaluasi <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) HP 16. Evaluasi Revisi <i>Audit Charter 2020</i>. Penyeragaman <i>Audit Charter</i> Terintegrasi antara PLN Holding dan Anak Perusahaan 17. Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus Kecelakaan Kerja Area Menteng 18. Evaluasi Tindak Lanjut HP atas Tanggapan Dekom 19. Evaluasi Pencapaian KPI Direktorat Tahun 2020 20. Evaluasi Likuiditas HP atas Pandemi COVID-19 21. Evaluasi Usulan Program Kerja Perencanaan Tahunan (PKPT) 2021 SPI HP 22. Pendapat yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris | <ol style="list-style-type: none"> 11. <i>Evaluation of Proposed Region 7 Formation (Memorandum of Analysis of the Audit Committee - Board of Commissioners of PT Haleyora Power (HP) Outside Meeting (Circular) Regarding "Evaluation of Proposed Region 7 Lampung Formation of PT Haleyora Power")</i> 12. <i>Evaluation of Proposed Organizational Establishment of PT Haleyora Power Region 7 Memorandum of Analysis of the Audit Committee – Board of Commissioners of PT Haleyora Power (HP) Outside the Meeting (Circular) Regarding "Evaluation of the Proposed Organizational Establishment of PT Haleyora Power Region 8 S2JB and BABEL")</i> 13. <i>Asset Management Contract (AMC) Development Evaluation</i> 14. <i>Evaluation of Electrical Service Product Development</i> 15. <i>Business Continuity Plan Evaluation of HP (BCP)</i> 16. <i>2020 Assessment of the Revised Audit Charter: Alignment of the Integrated Audit Charter for PLN Holding and its Subsidiaries</i> 17. <i>Work Accident Special Examination Menteng Area Follow-up Evaluation</i> 18. <i>HP's Post-Response Evaluation of the Board of Commissioners</i> 19. <i>Evaluation of the Directorate's 2020 Key Performance Indicators</i> 20. <i>HP Liquidity Assessment for the Pandemic of COVID-19</i> 21. <i>Evaluation of the 2021 SPI HP Proposed Annual Planning Work Program (PKPT)</i> 22. <i>Opinions stated during the Board of Commissioners meeting</i> |
|---|--|

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2020

Implementation of the Duties of the Audit Committee in 2020

Pelaksanaan tugas Komite Audit dijabarkan dalam bentuk KPI Komite Audit tahun 2020, sebagai berikut :

1. Telah melaksanakan rapat komite termasuk dengan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dengan mengarsipkan risalah sebanyak 15 (lima belas) buah.
2. Melakukan kajian atas usulan yang disampaikan oleh Direksi
3. Melaksanakan peningkatan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan
4. Melakukan kunjungan kerja komite serta melaporkan hasil dari kunjungan tersebut kepada Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali
5. Menyusun rencana kerja dan KPI untuk Komite
6. Menyerahkan laporan realisasi kegiatan dan KPI komite kepada Dewan Komisaris

The Audit Committee's responsibilities are summarised in the following 2020 Audit Committee KPI:

1. *Having convened committee meetings, including joint sessions with the Board of Commissioners, 41 (forty one) occasions and filed fifteen (15) minutes.*
2. *Conducting a study of the Board of Directors' suggestions*
3. *Increasing competence via participation in different forms of training and education*
4. *Conducting committee work trips and reporting to the Board of Commissioners on the outcomes of these visits five (five) times*
5. *Developing work goals and key performance indicators for the Committee*
6. *Reporting to the Board of Commissioners on the committee's actions and key performance indicators*



Komite GCG dan Manajemen Risiko

Committee on GCG and Risk Management

Komite GCG & Manajemen Risiko (GCG & MR) dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan kegiatan Perusahaan di bidang manajemen risiko, GCG, nominasi dan remunerasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

The Board of Commissioners established the GCG & Risk Management Committee (GCG & RM) to help in the execution of the job of monitoring the Company's operations in the areas of risk management, GCG, nomination and compensation, and human resource development.

Kriteria Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko

Criteria for Members of the GCG and Risk Management Committees

Anggota Komite GCG dan MR dipimpin salah satu anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang dibantu pihak independen dengan keahlian/sertifikasi dan pengalaman dalam bidang manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

The GCG and RM Committees are chaired by a member of the Company's Board of Commissioners and supported by an independent party with risk management and corporate governance expertise/certification and experience.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite GCG dan Manajemen Risiko

The GCG and Risk Management Committees are Appointed and Dismissed

Keanggotaan Komite GCG & MR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners appoints and dismisses members of the GCG & RM Committees.

Susunan, Jumlah, Komposisi, Masa Jabatan dan Dasar Pengangkatan Komite GCG dan Manajemen Risiko

GCG and Risk Management Committee Structure, Amount, Composition, Term of Office, and Basis of Appointment

Pada tahun 31 Desember 2020, susunan dan komposisi keanggotaan Komite GCG dan MR adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020, the GCG and RM Committees are as follows:

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Appointment Basis | Keahlian Expertise |
|----------------------|---|---|--|
| Bima Putrajaya | Ketua Komite GCG & MR <i>Head of GCG & Risk Management Committee</i> | Keputusan Dewan Komisaris No.002.SK/DK/HP/2020 tanggal 29 Juni 2020 <i>Decision of the Board of Commissioners No.002.SK/DK/HP/2020 dated June 29, 2020</i> | Operasi Distribusi Transmisi dan Manajemen Risiko serta GCG <i>Transmission Distribution Operations and Risk Management and GCG</i> |
| Kurniawan Andriyanto | Anggota Komite GCG & MR <i>Member of GCG & Risk Management Committee</i> | SK No.05.sk/DK/HP/2020 tanggal 10 November 2020 <i>SK No.05.sk/DK/HP/2020 dated November 10, 2020</i> | Manajemen Risiko <i>Risk Management</i> |

Profil Komite GCG dan Manajemen Risiko

Profiles of the GCG and the Risk Management Committee

Profil anggota Komite GCG dan MR dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Members of the GCG and MR Committees are profiled in this Annual Report's Company Profile chapter.

Independensi Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko

Independency of Members of the GCG and Risk Management Committee

Merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER01/MBU/2011, seluruh anggota Komite GCG dan MR telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

According to the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER01/MBU/2011, all members of the GCG and RM Committee have fulfilled the following independence criteria:

| Kriteria Criteria | Bima Putrajaya | Kurniawan Andriyanto |
|---|----------------|-------------------------|
| Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. <i>Not a member of a public accounting company, legal consulting firm, public appraisal service office, or other party that has provided the Company with insurance, non-insurance, appraisal, or other consulting services in the previous six months.</i> | √ | √ |
| Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. <i>Has no direct or indirect ownership in the Company.</i> | √ | √ |
| Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. <i>Not a person who has worked for the Company or has the power and responsibility for planning, leading, controlling, or supervising its operations in the past six months.</i> | √ | √ |
| Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama Perusahaan. <i>Has no familial ties to the Commissioners, Directors, or the Company's Major Shareholders as a result of marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically.</i> | √ | √ |
| Tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. <i>Has no direct or indirect commercial connection with the Company.</i> | √ | √ |
| Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan <i>Not presently employed by a company whose operations offer services to the Company.</i> | √ | √ |

Pedoman Kerja/Piagam Komite GCG dan Manajemen Risiko

Work Guidelines/Charter for the GCG and Risk Management Committee

Perusahaan telah menyusun Piagam Komite GCG & MR sebagai pedoman kerja Komite GCG & MR yang telah disahkan dengan

The Company developed the GCG & RM Committee Charter as a working document for the Committee, which was approved by



SK Dewan Komisaris No.006.SK/DK/HP/2017 tanggal 12 Desember 2017. Piagam Komite GCG & MR menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite GCG & MR.

the Board of Commissioners Decree No.006.SK/DK/HP/2017 dated December 12, 2017. The GCG & RM Committee Charter details the committee's roles, responsibilities, and obligations.

Tugas dan Tanggung Jawab

Occupational Duties and Obligations

Tugas dan tanggung jawab Komite GCG & MR diatur dalam Piagam Komite GCG & MR. Secara garis besar, tugas pokok Komite GCG & MR adalah sebagai berikut:

The GCG & RM Committee's charter specifies its tasks and responsibilities. The GCG & MR Committee's primary responsibilities are as follows:

Bidang Manajemen Risiko

1. Memberikan tanggapan atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan;
2. Mengevaluasi model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan tanggapan untuk penyempurnaan lebih lanjut;
3. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;

Risk Management

1. *Make recommendations on the Company's risk management policies and procedures;*
2. *Evaluate the Company's risk measurement methodology and offer comments for future development;*
3. *Monitor the Company's different possible hazards.*

Bidang GCG

1. Melakukan kajian atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bisnis Perusahaan;
2. Melakukan kajian dan memantau penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;
3. Memastikan jalannya pengurusan Perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan mengenai GCG;
4. Memastikan GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;

GCG

1. *Conduct an audit of the Company's compliance with applicable rules and regulations;*
2. *Conduct a review and monitoring of the Company's implementation of GCG;*
3. *Ensure that the Company's management adheres to the GCG principles and rules;*
4. *Ensure that GCG is implemented successfully and sustainably.*

Bidang Nominasi dan Remunerasi

1. Memberikan tanggapan atas kebijakan nominasi dan remunerasi;
2. Memberikan rekomendasi dan memantau prosedur pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan untuk memastikan agar sesuai dengan kebijakan nominasi;
3. Memberikan rekomendasi calon Direksi Perusahaan yang akan diusulkan kepada RUPS, apabila diperlukan;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, apabila diperlukan;

Nomination and Remuneration

1. *Provide feedback on nomination and remuneration policies;*
2. *Provide recommendations and monitor the procedures for the appointment of candidates for members of the Board of Commissioners and Directors of subsidiaries/joint ventures to ensure compliance with the nomination policy;*
3. *Provide recommendations for candidates for the Company's Board of Directors to be proposed to the GMS, if necessary;*
4. *Provide recommendations on remuneration policies for the Board of Commissioners and the Board of Directors, if necessary.*

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Memberikan tanggapan atas kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Memberikan tanggapan atas kebijakan manajemen dan prosedur operasi standar (SOP) di bidang pengembangan sumber daya manusia;
3. Melakukan kajian implementasi sistem perencanaan sumber daya manusia;

Rencana Kerja dan Pelaporan Komite GCG & MR

1. Membuat rencana kerja dan KPI Komite tahunan;
2. Menyampaikan laporan kegiatan Komite dan realisasi KPI Komite triwulanan dan tahunan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Human Resources Development

1. Provide input on human resource management and development policies;
2. Provide feedback on human resource development management policies and standard operating procedures (SOPs);
3. Conduct research on the implementation of the human resource planning system.

Work Plan and Report of the GCG & RM Committee

1. Develop yearly work plans and key performance indicators for the Committee;
2. Submit quarterly and yearly reports on the Committee's activities and progress toward meeting the Committee's key performance indicators;
3. Perform additional responsibilities as assigned by the Board of Commissioners in accordance with the requirements of the law.

Rapat Komite GCG dan Manajemen Risiko

Meetings of the GCG and the Risk Management Committee

Sepanjang tahun 2020, Komite GCG dan Manajemen Risiko melaksanakan 39 (tiga puluh sembilan) kali rapat termasuk rapat bersama Dewan Komisaris. Rincian agenda rapat adalah sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan Realisasi Kinerja PT HP Triwulan IV tahun 2019.
2. Rapat pembahasan Realisasi Kinerja PT HP tahun 2019.
3. Rapat pembahasan Laporan Manajemen Risiko (LMR) PT HP tahun 2019.
4. Rapat pembahasan Profil Risiko PT HP tahun 2020.
5. Rapat pembahasan RKAP berbasis Risiko PT HP tahun 2020.
6. Rapat pembahasan Pemantauan realisasi kinerja perusahaan TW 1 tahun 2020.
7. Rapat pembahasan Laporan Manajemen Risiko TW 1 2020.
8. Rapat pembahasan Pemantauan realisasi kinerja perusahaan TW II tahun 2020.
9. Rapat pembahasan Laporan Manajemen Risiko TW II 2020.
10. Rapat pembahasan Pemantauan realisasi kinerja perusahaan TW III tahun 2020.
11. Rapat pembahasan Laporan Manajemen Risiko TW III 2020.
12. Rapat pembahasan Pemantauan realisasi kinerja perusahaan TW IV tahun 2020.

The GCG and Risk Management Committee met 39 times in 2020, including combined sessions with the Board of Commissioners. The meeting agenda is as follows:

1. Meeting to review PT HP's performance in the fourth quarter of 2019.
2. In 2019, a discussion meeting will be held on PT HP Performance Realization.
3. In 2019, the PT HP Risk Management Report (LMR) will be discussed.
4. In 2020, a meeting will be held to review the PT HP Risk Profile.
5. In 2020, PT HP will have a risk-based RKAP debate.
6. Discussion meeting Monitoring the company's performance in the first quarter of 2020.
7. Meeting to review the Risk Management Report for Q1 2020.
8. Discussion meeting Surveillance of the company's performance in TW II 2020.
9. Meeting to review the Risk Management Report for Q2 2020.
10. Meeting of discussion Monitoring the company's performance realisation in the third quarter of 2020.
11. Meeting to review the Risk Management Report for Q3 2020.
12. Consultative meeting Monitoring the company's performance realisation in the fourth quarter of 2020.



13. Rapat pembahasan Laporan Manajemen Risiko TW IV 2020.

14. Rapat pembahasan Profil Risiko PT HP tahun 2020.

13. Meeting to review the Risk Management Report for the fourth quarter of 2020.

14. In 2020, a meeting will be held to review the PT HP Risk Profile.

Kebijakan Suksesi Direksi

Policy on Board of Directors Succession

Salah satu tugas Komite GCG dan MR adalah menjalankan fungsi pengawasan di bidang nominasi dan remunerasi. Komite GCG dan MR memberikan rekomendasi dan memantau prosedur pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan/ perusahaan patungan untuk memastikan agar sesuai dengan kebijakan nominasi. Proses ini dilakukan pada saat pergantian kepemimpinan, Perusahaan akan mengajukan kandidat internal melalui pemilihan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian akan dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama yaitu PT PLN (Persero).

One of the GCG and RM Committee's responsibilities is to exercise supervisory authority over nominations and remuneration. To guarantee conformity with the nomination policy, the GCG and MR Committees provide recommendations and oversee the processes for appointing candidates to the Board of Commissioners and Directors of subsidiaries/ joint ventures. This process is carried out when the Company's leadership changes. The Company will propose internal candidates through elections conducted by the Board of Directors and the Board of Commissioners, which will be followed by a fit and proper test conducted by the Company's primary shareholder, PT PLN (Persero).

Pelaksanaan Tugas Komite GCG dan Manajemen Risiko

Implementation of the GCG and Risk Management Committee's Duties

Pelaksanaan tugas Komite GCG dan Manajemen Risiko dijabarkan dalam bentuk KPI Komite GCG dan Manajemen Risiko dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan serta KPI Komite GCG dan Manajemen Risiko tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris tahunan.
2. Menyerahkan laporan perkembangan Realisasi KPI Komite GCG dan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2020.
3. Menyerahkan laporan Pelaksanaan Tugas dan Realisasi KPI Komite GCG dan Manajemen Risiko Tahun 2020.
4. Melakukan rapat internal sekaligus rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali sekaligus mengarsipkan risalah rapat komite.
5. Melakukan kajian atas usulan yang disampaikan oleh Direksi.
6. Melaksanakan peningkatan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan.
7. Melakukan kunjungan kerja komite serta melaporkan hasil dari kunjungan tersebut kepada Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali.
8. Menyusun rencana kerja dan KPI untuk Komite.

The GCG and Risk Management Committee's responsibilities are carried out in accordance with the GCG and Risk Management Committee KPIs, which include the following details:

1. Developing yearly activity plans and key performance indicators for the GCG and Risk Management Committee based on the Board of Commissioners' annual work plans and key performance indicators.
2. Submitting a report on the GCG and Risk Management Committee's KPI implementation status for the second quarter of 2020.
3. Submitting a report on the GCG and Risk Management Committee's performance and achievement of key performance indicators in 2020.
4. Conducting 39 (thirty-nine) internal meetings as well as joint meetings with the Board of Commissioners, as well as archiving committee meeting minutes.
5. Examining the Board of Directors' recommendations.
6. Increasing competence via participation in different forms of training and education.
7. Conducting committee work trips and reporting to the Board of Commissioners on the outcomes of these visits five (five) times.
8. Developing work plans and key performance indicators for the Committee.

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Commissioners' Board

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh Dewan Komisaris untuk memimpin dan menjalankan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan dan memiliki masa jabatan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners appoints the Secretary to the Board of Commissioners to lead and manage the Board of Commissioners' Secretariat. The Secretary to the Board of Commissioners is appointed by the Board of Commissioners and serves for a period set by the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab

Occupational Duties and Obligations

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris diatur di dalam *Board Manual*, yakni sebagai berikut:

The Board Manual regulates the Secretary to the Board of Commissioners' duties and responsibilities, which include the following:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris;
 2. Menyediakan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan, laporan hasil pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan;
 3. Menyusun dan memfinalisasi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, yaitu RKA, realisasi KPI berkala, laporan pengawasan dan realisasi KPI;
 4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat, pembuatan risalah rapat, serta tugas lain yang terkait;
 5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Komite Dewan Komisaris;
 6. Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris serta mengirimkan hasilhasil keputusan rapat kepada pihak yang berkepentingan;
 7. Menjadi penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
 8. Jika diberikan penugasan oleh Dewan Komisaris melalui surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
1. *Supervise and coordinate secretarial operations within the Board of Commissioners, which shall be controlled further by the Board of Commissioners;*
 2. *Provide information to the Board of Commissioners, such as periodic reports from the Board of Directors (monthly reports, quarterly reports, annual reports, and SPI inspection reports), as well as reports/other information on the Company;*
 3. *Prepare and complete reports and documentation that satisfy the Board of Commissioners' responsibilities, including the RKA, periodic KPI realisation, monitoring reports, and KPI realization;*
 4. *Organise Board of Commissioners meetings, including the preparation and distribution of invitations, the delivery of meeting materials, and the preparation of meeting minutes;*
 5. *Coordinate and assist the operations of the Board of Commissioners' Committee;*
 6. *Maintain and manage meeting minutes and Board of Commissioners materials, as well as communicate meeting outcomes to relevant parties;*
 7. *Act as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties;*
 8. *If assigned by the Board of Commissioners in writing, access records or information about employees, funds, assets, and other Company resources necessary for the performance of their duties and must report the results in writing.*
 9. *Undertake other assignments granted by the Board of Directors.*



Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

Profil Sekretaris Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

The Secretary to the Board of Commissioners' biography is included in the chapter on the Company in this Annual Report.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020

Implementation of the Duties of the Secretary of the Board of Commissioners in 2020

Realisasi kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sejumlah 25 kali rapat.
2. Membuat dan mengelola risalah rapat Dewan Komisaris sejumlah 25 risalah.
3. Menyelenggarakan rapat Komite sejumlah 20 kali rapat.
4. Menyelenggarakan kunjungan kerja Dewan Komisaris 3 kali.
5. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris 3 kali.
6. Membuat Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris 2020 dan 2021.
7. Membuat Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2019 dan 2020.
8. Membuat Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris Triwulan I, II, III Tahun 2020.
9. Mengadministrasikan surat-surat masuk atau ditujukan kepada Dewan Komisaris, dan surat-surat yang diterbitkan oleh Dewan Komisaris baik sebagai jawaban dari surat masuk, maupun dalam jenis surat lainnya sejumlah 90 surat.

The Secretary of the Board of Commissioners' actions during 2020 will be as follows:

1. *Holding 25 Board of Commissioners meetings.*
2. *Preparing and administering the 25-minute minutes of the Board of Commissioners meeting.*
3. *Meetings of the Organizing Committee, for a total of twenty meetings.*
4. *Organizing three times the Board of Commissioners' working visits.*
5. *Organizing three times for the Board of Commissioners' competence development.*
6. *Developing work plans and key performance indicators for the Board of Commissioners in 2020 and 2021.*
7. *Preparation of Supervisory Reports and Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Commissioners in 2019 and 2020*
8. *Preparing Quarter I, II, and III of 2020 Board of Commissioners KPI Realization Reports.*
9. *Managing incoming letters or correspondence addressed to the Board of Commissioners, as well as letters issued by the Board of Commissioners in response to incoming letters or in other kinds of correspondence totalling 90 letters.*

Corporate Secretary

Corporate Secretary

Corporate Secretary berfungsi sebagai *liaison officer*, untuk menjembatani kepentingan Perusahaan dengan pihak eksternal, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

The Corporate Secretary serves as a liaison person, bridging the Company's interests with external parties and ensuring that the Company complies with GCG and relevant laws and regulations while conducting its operational operations.

Profil pejabat Sekretaris Perusahaan

Profile of the Corporate Secretary

Profil Erwin Ardianto sebagai *Corporate Secretary* dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Erwin Ardianto's biography as Corporate Secretary is included in this Annual Report's Company Profile chapter.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan

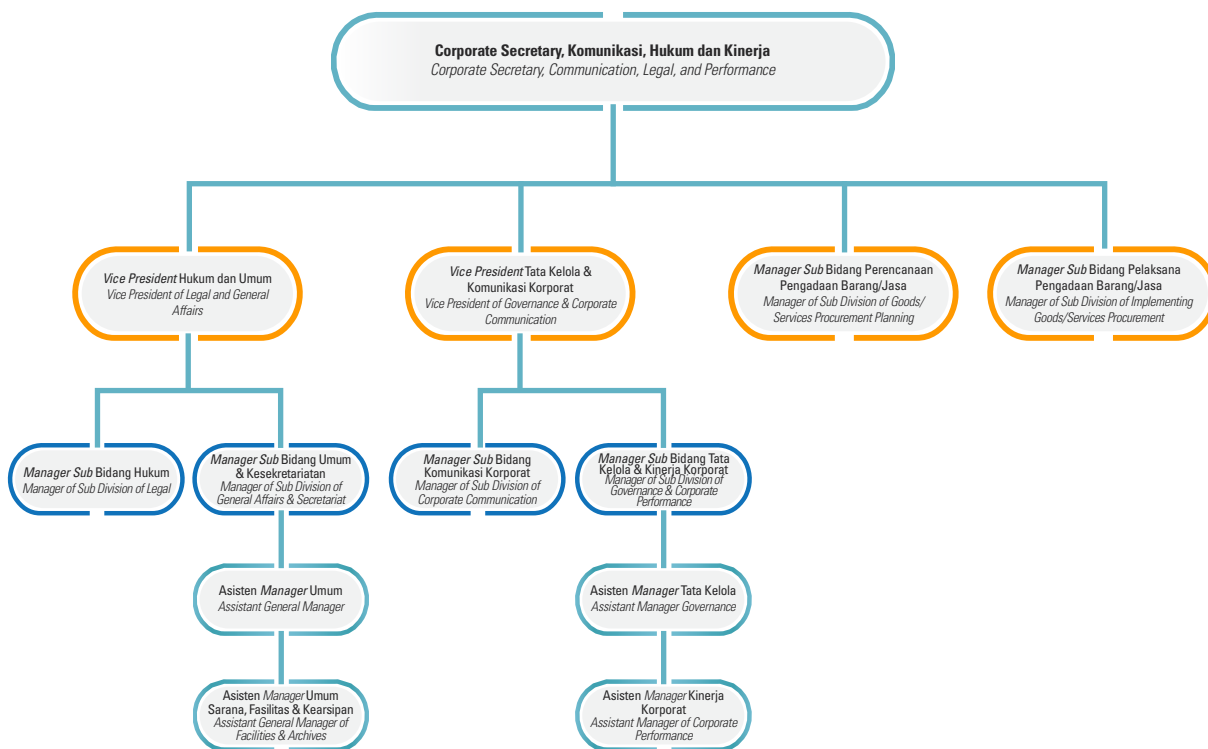
Organizational Structure of the Corporate Secretary

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, *Corporate Secretary* dibantu oleh *Vice President (VP) Hukum & Umum* dan *VP Tata Kelola dan Komunikasi Korporat*.

The Corporate Secretary is appointed and dismissed based on the Board of Directors' decision, which is approved by the Board of Commissioners and communicated to the Shareholders. In carrying out its duties and responsibilities, the Corporate Secretary is assisted by the Vice President (VP) Law & General Affairs and the Vice President (VP) Corporate Governance and Communication.

Mengacu pada Peraturan Direksi No.0012.P/ DIR-HP/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT Haleyora Power Kantor Pusat, Struktur Organisasi *Corporate Secretary*, Komunikasi, Hukum dan Kinerja adalah sebagai berikut:

Referring to Board of Directors Regulation No.0012.P/DIR-HP/2018 dated August 1, 2018 on the Organizational Structure and Position Formation of PT Haleyora Power's Head Office, Corporate Secretary Organizational Structure, Communication, Law, and Performance.



Fungsi dan Tugas

Functions and Duties

Mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0012.P/DIR-HP/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT Haleyora Power Kantor Pusat, Tugas Pokok CRS adalah merumuskan kebijakan dan strategi hal-hal terkait tata kelola perusahaan, pengadaan, Komunikasi, Umum, Hukum, dan Kinerja. Dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan, strategi dan memastikan terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Mengendalikan, *monitoring*, mengevaluasi, dan memastikan terlaksananya pengadaan sesuai kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
4. Menjadi penghubung (*liaison officer*) yang mengorganisasikan dan mengordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan

According to Board of Directors Regulation 0012.P/DIR-HP/2018 on the Organizational Structure and Position Formation at PT Haleyora Power's Head Office, the primary responsibility of the CRS is to develop policies and strategies for corporate governance, procurement, communication, general, legal, and performance. With the following primary responsibilities:

1. Developing policies and overseeing their execution (GCG).
2. Supervising, monitoring, assessing, and ensuring the procurement process is carried out in line with business requirements and relevant laws.
3. Providing information required by the Board of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board on a quarterly basis and/or upon request at anytime.
4. Assuming the role of a liaison officer, organizing and coordinating Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory

Komisaris/Dewan Pengawas, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan *stakeholder*.

5. Mengordinasikan penyusunan Laporan Manajemen triwulanan dan tahunan yang akurat dan dapat diandalkan, serta laporan kinerja, menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
6. Merumuskan kebijakan dan strategi komunikasi, hubungan internal dan eksternal, kelembagaan dan protokoler, serta *Corporate social Responsibility* serta menjamin pelaksanaannya.
7. Mengoordinasikan pelayanan regulasi melalui harmonisasi ketentuan perusahaan, pendapat hukum, dan pendokumentasian ketentuan perusahaan.
8. Mengordinasikan pelayanan regulasi sesuai dengan ketentuan PT PLN (Persero), peraturan perundang-undangan dan GCG, melalui penyediaan dokumen perijinan/lisensi, kerjasama di bidang hukum dengan pihak eksternal, pendokumentasian dan kajian dampak perbitan/perubahan ketentuan.
9. Mengordinasikan pelayanan bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan, pelayanan atas kontrak - kontrak korporat melalui supervisi, pendapat hukum dan pendokumentasian kontrak perusahaan.
10. Mengoordinasikan pelayanan kebijakan korporat melalui penyusunan/revisi Anggaran Dasar perusahaan dan pendokumentasian dokumen korporat dan anak perusahaan.
11. Merumuskan kebijakan dan strategi administrasi dan kesekretariatan, keamanan, pengelolaan rumah tangga perusahaan, sarana dan prasarana serta menjamin pelaksanaannya.
12. Mengelola aset perusahaan dan melaksanakan pengembangannya untuk tujuan produktif secara efisien dan efektif.
13. Mengambil keputusan dan koridor operasional sesuai kebijakan Direksi.
14. Membina dan mengembangkan kompetensi SDM pada bidangnya.
15. Melaksanakan penugasan khusus baik personal maupun teamwork terkait dengan bidangnya sesuai dengan keputusan Direksi.

Board meetings, as well as GMS and other activities with stakeholders.

5. *Coordination of the preparation of accurate and reliable quarterly and annual management reports, as well as performance reports; administration and maintenance of company documents, including but not limited to the Shareholders Register, Special Register, and Board of Directors, Board of Commissioners, and GMS meetings.*
6. *Developing and implementing policies and plans for communication, internal and external interactions, institutions and protocols, and corporate social responsibility.*
7. *Coordination of regulatory services via the harmonisation of corporate rules, legal opinions, and regulatory documents.*
8. *Coordination of regulatory services in compliance with the requirements of PT PLN (Persero), statutory laws, and GCG, including the supply of licensing/licensing papers, legal collaboration with third parties, documentation, and impact assessment of publications/changes in provisions.*
9. *Coordination of legal assistance services both within and outside the courtroom, as well as services related to business contracts, including contract monitoring, legal opinion, and documentation.*
10. *Coordination of corporate policy services via the preparation/revision of the corporation's articles of incorporation and the documentation of corporate and subsidiary papers.*
11. *Developing policies and plans for the administration and secretarial functions, security, and management of the company's homes, facilities, and infrastructure, as well as ensuring their execution.*
12. *Managing the Company's assets and developing them for productive purposes in an efficient and effective manner;*
13. *Making decisions and establishing operational channels in accordance with the Board of Directors' policy.*
14. *Promoting and strengthening human resource skills in their respective areas.*
15. *Undertaking specific tasks in their areas, both personally and collaboratively, in compliance with the Board of Directors' decisions.*



Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Task Implementation 2020

Sepanjang tahun 2020, *Corporate Secretary* melakukan kegiatan antara lain:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RKAP maupun Tahunan.
2. Menyelenggarakan rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan.
3. Menyusun Laporan Manajemen.
4. Menyusun Laporan Tahunan.
5. Melaksanakan kegiatan terkait GCG seperti penilaian penerapan dan sosialisasi.
6. Mendukung kegiatan korporat.
7. Melakukan kegiatan sosial dan lingkungan (CSR).
8. Memantau penerbitan majalah korporat.
9. Melakukan peninjauan untuk kebijakan Perusahaan dan pelayanan hukum.
10. Melakukan pelayanan umum dan kesekretariatan.
11. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan proses pengadaan.

Throughout 2020, the Corporate Secretary engaged in a variety of activities, including the following:

1. Annual and RKAP General Meetings of Shareholders (GMS).
2. Meetings of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and joint meetings.
3. Management Report Preparation.
4. Annual Report Preparation.
5. Conducting GCG-related activities, such as implementation assessment and dissemination.
6. Assistance with company operations.
7. Participating in social and environmental initiatives (CSR).
8. Oversight of corporate magazines.
9. Conducting a review of the company's rules and legal services.
10. Providing administrative and secretarial services.
11. Organizing and carrying out the procurement procedure.



Satuan Pengawas Internal (Audit Internal)

Unit of Internal Supervision (Internal Audit)

Satuan Pengawas Internal (SPI) berfungsi dalam pelaksanaan audit internal dan memegang peranan penting dalam membantu Perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis, teratur dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola.

The Internal Audit Unit (SPI) is responsible for internal auditing and plays a critical role in assisting the Company in achieving its objectives by utilising a systematic, orderly, and structured approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and governance processes.

Profil Kepala SPI

Profile of the SPI Head

Profil Kepala Satuan Pengawasa Internal dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

The Head of the Internal Audit Unit's profile may be found in this Annual Report's Company Profile chapter.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

The Appointing and Dismissing Party for the Head of Internal Audit

SPI bersifat independen dan dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal (KSPI). KSPI diangkat dan diberhentikan langsung oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan KSPI didasarkan kemampuan, kompetensi, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Fungsi Audit Internal baik dari segi kualifikasi, kompetensi, keahlian dan pengalaman kerja.

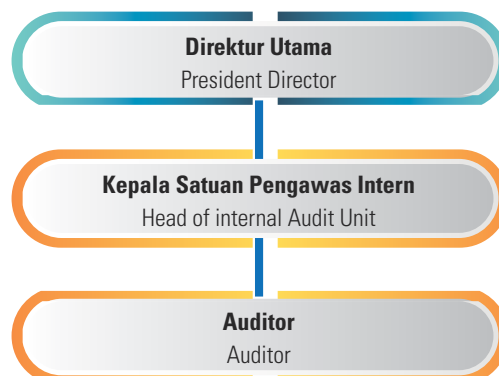
SPI is self-governing and is chaired by the Head of the Internal Supervisory Unit (KSPI). The President Director appoints and dismisses KSPI directly with the consent of the Board of Commissioners. KSPI is appointed based on his or her ability, competence, and expertise, which meet the requirements for carrying out the Internal Audit Function's responsibilities in terms of qualifications, competency, expertise, and work experience.

Struktur organisasi Audit Internal dan jumlah pegawai

Internal Auditing's Organizational Structure and Personnel Count

Struktur organisasi SPI ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No.0013.K/DIR-HP/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi 023.K/DIR-HP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Haleyora Power. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala SPI dibantu oleh 2 orang Auditor.

The organizational structure of SPI is governed by the Board of Directors' Decree No.0013.K/DIR-HP/2016 amending the Board of Directors' Decree 023.K/DIR-HP/2014 on the Organization and Work Procedures of PT Haleyora Power's Head Office. The Head of SPI is supported in carrying out his duties and responsibilities by two Auditors.





Sertifikasi sebagai profesi Audit Internal

Certification as a professional in the field of Internal Audit

Perusahaan memiliki 2 orang personil Satuan Pengawasan Internal yang telah mengikuti pelatihan dan seminar “Dasar-dasar Audit Internal” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Auditor Internal.

The Company has 2 personnel from the Internal Audit Unit who have attended training and seminars on “Basics of Internal Auditing” organized by the Internal Auditor Development Institute.

Piagam SPI

Perusahaan telah menyusun Piagam SPI pada tahun 2014 sebagai acuan dalam tata laksana tugas SPI. Hingga akhir tahun 2020, Piagam SPI masih dianggap sesuai dengan perkembangan organisasi dan proses bisnis Perusahaan sehingga manajemen menganggap belum memerlukan perubahan/penyesuaian.

Charter of the SPI

The Company drafted the SPI Charter in 2014 to serve as a guide for managing SPI responsibilities. Until the end of 2020, the SPI Charter will be evaluated in light of organisational changes and the Company's business operations to ensure that management does not believe it requires modifications/adjustments.

Tugas dan Tanggung Jawab

Occupational Duties and Obligations

Tugas dan tanggung jawab SPI meliputi: .

1. Menyusun rencana, strategi, kebijakan dan prosedur pengawasan;
2. Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan, serta melakukan kajian berkala;
3. Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan telah berjalan efektif, termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan, dan melakukan asesmen terhadap sistem tersebut secara rutin;
4. Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha, antara lain meliputi bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan operasional;
5. Melakukan kegiatan audit untuk mendorong terciptanya kepatuhan seluruh insan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan (*fraud*);
7. Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi objektif kepada auditee mengenai objek yang diaudit;
8. Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja;
9. Mendukung penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;
10. Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya kepada Direktur Utama.

SPI's occupational duties and responsibilities include the following:

1. *Create supervisory plans, strategies, policies, and procedures;*
2. *Monitor and evaluate the supervisory goals and methods, as well as perform periodic evaluations;*
3. *Ensure that the Company's internal control system is operating properly, including by performing preventative actions and conducting system-wide evaluations on a regular basis;*
4. *Oversee all aspects of the company, including accounting, finance, human resources (HR), and operations;*
5. *Conduct audit operations to ensure that all Company employees adhere to applicable rules and regulations;*
6. *Conduct a specific audit (investigation) to identify instances of power abuse, embezzlement, fraud, and fraud;*
7. *Make recommendations for required changes and provide objective information to the auditee about the audited item;*
8. *Consult with all levels of management about initiatives to enhance the efficiency of internal control and other performance-related activities;*
9. *Assist in the implementation of GCG throughout the Company;*
10. *Report to the President Director on the outcomes of its supervisory operations.*

Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Implementation of the Task 2020

Pelaksanaan tugas SPI pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

The following table illustrates the execution of SPI tasks in 2020:

| No. | Auditor | Audit yang Dilaksanakan pada Tahun 2020 Audits Scheduled for 2020 | | | | | | | |
|-----|---------|--|----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | | Pusat Headquarter | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | Region 6 | PT HPI |
| 1 | SPI PLN | 2 kali/times | | | | | | | |
| 2 | SPI HP | - | - | 1 kali/times | 1 kali/times | - | 2 kali/times | - | 1 kali/times |
| 3 | KAP | 1 kali/times | | | | | | | |
| 4 | BPK | 1 kali/times | | | | | | | |

A. SPI-PHP telah melaksanakan Audit sebanyak 5 kali masing-masing pada :

1. Audit Investigasi Kecelakaan Kerja di PT Haleyora Power Region 5 DKI Jakarta dan Banten, pelaksanaan Audit tanggal 20 April 2020 sd 14 Mei 2020 (*Work Desk Survey* Pendahuluan dan Audit Lapangan)
2. Audit Investigasi Keuangan di PT Haleyora Power Region 3 Jawa Timur, pelaksanaan Audit tanggal 14 s.d 27 Juli 2020 (*Work Desk Survey* Pendahuluan dan Audit Lapangan)
3. Audit Operasional pada PT Haleyora Powerindo, pelaksanaan Audit tanggal 31 Agustus sd 11 September 2020 (*Work Desk Survey* Pendahuluan dan Audit Lapangan)
4. Audit Operasional di PT Haleyora Power Region 5 DKI Jakarta dan Banten, pelaksanaan Audit tanggal 05 Oktober 2020 s.d. 16 Oktober 2020 (*Work Desk Survey* Pendahuluan dan Audit Lapangan)
5. Audit Operasional di PT Haleyora Power Region 2 Jawa Tengah, pelaksanaan Audit tanggal 09 Nopember 2020 s.d 20 Nopember 2020 (*Work Desk Survey* Pendahuluan dan Audit Lapangan).

B. SPI-Holding telah melaksanakan Audit Operasional sebanyak 1 kali dan Audit Teknologi Informasi sebanyak 1 kali, masing-masing pada :

1. Audit Teknologi Informasi di PT Haleyora Power Kantor Pusat, pelaksanaan Audit tanggal 13 Pebruari 2020 sd 13 Maret 2020.
2. Audit Operasional di PT Haleyora Power Kantor Pusat, pelaksanaan Audit tanggal 20 Juli 2020 sd 18 Agustus 2020.

A. SPI-PHP has performed five audits on each of the following:

1. *Audit of Work Accident Investigations at PT Haleyora Power Region 5 DKI Jakarta and Banten, from April 20 to May 14, 2020. (Preliminary Work Desk Survey and Field Audit)*
2. *Audit of PT Haleyora Power Region's financial records 3 East Java, July 14-27, 2020, audit implementation (Preliminary Work Desk Survey and Field Audit)*
3. *Operational Audit at PT Haleyora Powerindo, from August 31 to September 11, 2020 (Preliminary Work Desk Survey and Field Audit)*
4. *Operational Audit at PT Haleyora Power Region 5 DKI Jakarta and Banten, Indonesia, from October 5, 2020 to October 16, 2020. (Preliminary Work Desk Survey and Field Audit)*
5. *Operational Audit at PT Haleyora Power Region 2 Central Java, November 09 to November 20, 2020 (Preliminary Work Desk Survey and Field Audit).*

B. SPI-Holdings has performed one operational audit and one information technology audit, respectively, on the following subjects:

1. *Information technology audit at the headquarters of PT Haleyora Power, with the audit taking place between February 13 and March 13, 2020.*
2. *Operational Audit at PT Haleyora Power's headquarters, scheduled to take place between July 20 and August 18, 2020.*



C. Kantor Akuntan Publik (KAP) RSM telah melaksanakan Audit pada PT Haleyora Power dan PT Haleyora Powerindo dengan diterbitkannya Laporan tanggal, mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2019.

C. Public Accounting Firm (KAP) RSM has completed an audit of PT Haleyora Power and PT Haleyora Powerindo, resulting in the issuance of the Report dated, regarding the Consolidated Financial Statements for the Years ended December 31, 2019 and the Compliance Audit Report against applicable laws and regulations, as well as internal control for the Year Ended December 31, 2019.

Temuan dan Tindak Lanjut

Findings and Follow-Up

Keberhasilan SPI didalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan adalah sejauh mana temuan dan rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti oleh Manajemen sehingga dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja perusahaan.

The degree to which SPI is successful in carrying out its supervisory responsibilities toward the management of the Company is determined by the extent to which the findings and suggestions given by SPI can be implemented by the Management to enhance the company's performance.

Hasil audit SPI untuk tahun 2020 terdapat 29 temuan dengan 52 rekomendasi dan seluruh temuan telah diselesaikan pada tahun yang sama sekaligus melakukan rekomendasi yang diberikan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

The SPI audit results for 2020 included 29 findings and 52 suggestions, and all issues were addressed in the same year, as shown in the following table:

| No. | Auditor | Saldo Awal Initial Balance | | Penyelesaian Completion | | Saldo Akhir Final Balance | | Keterangan Description |
|--------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Temuan Findings | Rekomendasi Recommendations | Temuan Findings | Rekomendasi Recommendations | Temuan Findings | Rekomendasi Recommendations | |
| 1. | SPI HP | 15 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | Audit Operasional Operational Audit |
| 2. | SPI Holding | 10 | 23 | 10 | 23 | 0 | 0 | Audit Operasional dan Audit IT Operational Audit & IT Audit |
| 3. | KAP | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Audit Kepatuhan Compliance Audit |
| Total | | 29 | 52 | 29 | 52 | 0 | 0 | |

Akuntan Publik

Public Accounts

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2020 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk.

The external audit examination performed by the public accounting firm serves as the independent supervision role for the Company's financial aspects (KAP). The External Auditor who will review the Company's financial accounts for the 2020 fiscal year is appointed by the Board of Commissioners and the Audit Committee via the Annual GMS. The selection procedure is conducted in line with the relevant goods and services procurement method. An External Auditor is hired to guarantee the audit's independence and quality.

Kebijakan Penunjukan Akuntan Publik

Appointment of Public Accountants

Dewan Komisaris mengusulkan nama Akuntan Publik berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Audit untuk kemudian dipertimbangkan dalam RUPS. Dalam RUPS Perusahaan tanggal 23 Juni 2020 telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC) sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

The Board of Commissioners recommends the Public Accountant's name based on the Audit Committee's assessment and suggestions for consideration in the GMS. In the Company's GMS dated June 23, 2020, a Public Accounting Firm (KAP) has designated Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PWC) as a Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements until December 31, 2020.

Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm's Name and Year of Establishment

| Tahun | KAP Public Accounting Firm | Akuntan Accountant | Opini Opinion |
|-------|--|-----------------------|--|
| 2020 | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner (PWC) | Daniel Kohar | Wajar, dalam semua hal yang material Qualified, in every tangible sense |
| 2019 | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (RSM AAJ) | Dedy Sukrisnady | Wajar, dalam semua hal yang material Qualified, in every tangible sense |
| 2018 | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (RSM AAJ) | Saptoto Agustomo | Wajar, dalam semua hal yang material Qualified, in every tangible sense |
| 2017 | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (RSM AAJ) | Saptoto Agustomo | Wajar, dalam semua hal yang material Qualified, in every tangible sense |
| 2016 | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (RSM AAJ) | Saptoto Agustomo | Wajar, dalam semua hal yang material Qualified, in every tangible sense |

Jasa lain

Tidak ada jasa dan biaya lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan.

Other Services

Apart from yearly financial statement audit services, the Public Accounting Firm and public accountants provide no additional services or fees.



Manajemen Risiko

Risk Management

Manajemen Risiko merupakan salah satu elemen penting dari *Good Corporate Governance* dan memiliki fungsi strategis untuk mengenali berbagai macam risiko yang dihadapi atau akan dihadapi oleh Perseroan. Melalui pelaksanaan Manajemen Risiko, Perseroan juga bertujuan untuk melindungi manajemen agar tidak menghasilkan kebijakan yang merugikan Perseroan di masa mendatang.

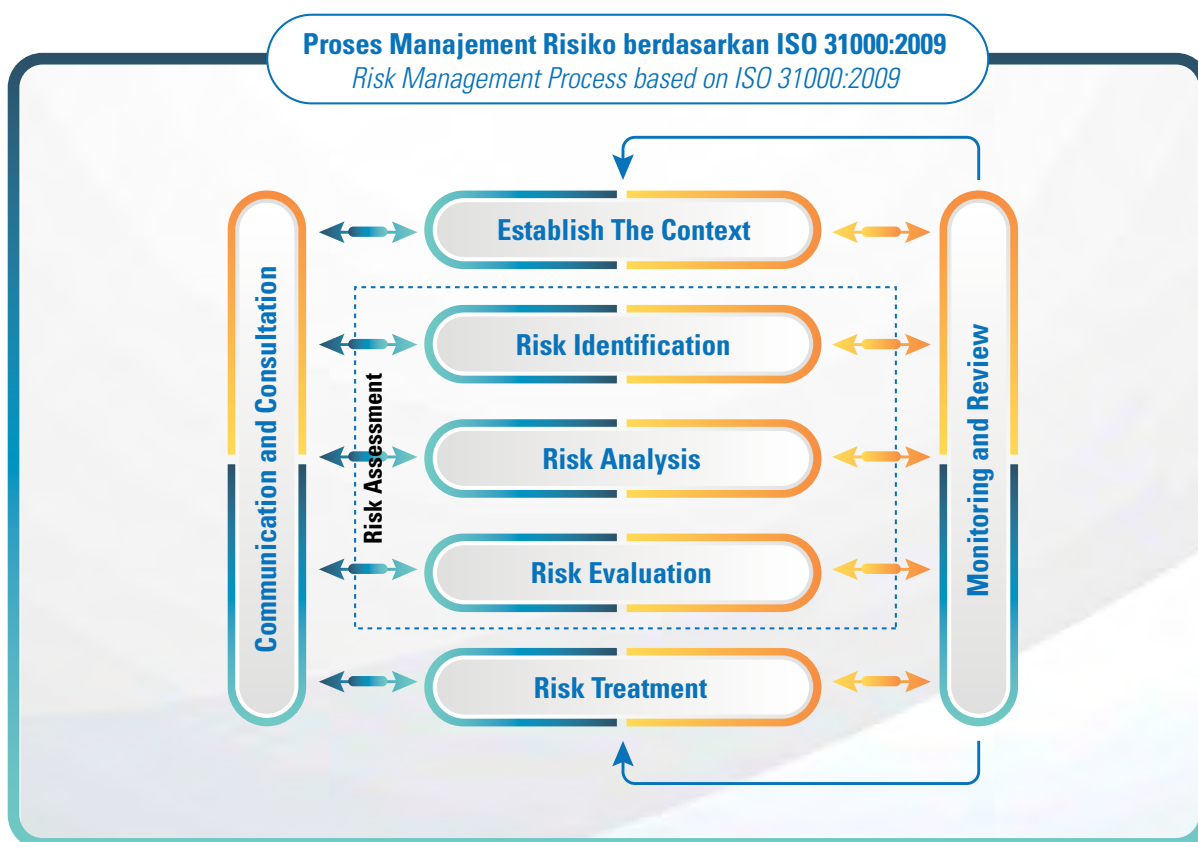
Risk management is a critical component of sound corporate governance since it serves a strategic purpose of identifying the different types of risks that the Company faces or will encounter. The Company also hopes to prevent management from developing policies that are harmful to the Company in the future by implementing Risk Management.

Penjelasan Mengenai Sistem Manajemen Risiko Yang Diterapkan Perusahaan

Explanation of the Risk Management System in Use at the Company

Pengelolaan manajemen risiko di Perusahaan mengacu pada standar ISO 31000:2009 (*International Standard of Risk Management*). Tetapi pada beberapa hal, misalnya aspek kepatuhan, lingkup penerapan dan beberapa istilahnya mengacu pada *COSO-Enterprise Risk Management (ERM) 2014*.

In the Company, risk management is governed by the ISO 31000:2009 (International Standard for Risk Management) standard. However, in some instances, such as the compliance element, the area of application, and certain terminology, COSO-Enterprise Risk Management (ERM) 2014 is referred to.



Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam penyiapan kerangka kerja pengelolaan risiko, penerapan proses manajemen risiko, memantau dan mengkaji kerangka kerja manajemen risiko. Setiap pimpinan unit kerja sebagai pemilik risiko (*risk owner*) bertanggung jawab atas pelaksanaan komitmen manajemen di unit kerjanya masing-masing untuk mewujudkan sistem manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi sehingga visi dan misi Perusahaan dapat tercapai.

Risk management is in charge of developing the risk management framework, executing the risk management process, and monitoring and evaluating the risk management framework. Each work unit leader is accountable for the execution of management commitments within their work units in order to create a complete and integrated risk management system that enables the Company to accomplish its vision and purpose.

Jenis dan Mitigasi Risiko

Types and Mitigations of the Risks

| No. | Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i> | | | Mitigasi Risiko <i>Risk Mitigation</i> |
|-----|--|---|--|--|
| | Jenis Risiko <i>Risk Type</i> | Penyebab Risiko <i>Cause of Risk</i> | Dampak Risiko <i>Risk Impact</i> | Alternatif Penanganan <i>Alternative Handling</i> |
| 1. | <p><i>Disruptive condition;</i> Perubahan kebijakan bisnis PLN</p> <p><i>Disruptive circumstances;</i> PLN's business policy changes</p> | <ol style="list-style-type: none"> Perubahan sistem operasi ketenaga listrik seperti operasi GI tanpa operator (GTO) Perubahan Operator APKT tersebar menjadi <i>Command Centre</i> Perubahan proses bisnis PLN : <ul style="list-style-type: none"> Sistem Operator tanpa GI Implementasi <i>Command Center</i> dan <i>Auto Dispatch</i> Kebijakan <i>Management Billing</i> Penyesuaian <i>margin</i> penugasan Penerapan Kebijakan Alih Daya melalui PerDir 219/2019 <p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Modifications to the electrical operating system, such as GI functioning without the presence of an operator (GTO)</i> <i>Changes in APKT Operators are being sent to the Command Center.</i> <i>Restructuring of PLN's business processes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Operator system devoid of GI</i> <i>Establishment of a Command Center and</i> <i>Automated Distribution</i> <i>Billing Policy for Management</i> <i>Margin adjustment for assignment</i> <i>Enactment of the Outsourcing Policy through the Board of Director's Regulations 219/2019</i> </p> | <ol style="list-style-type: none"> Pengurangan dan rekomposisi jumlah tenaga kerja. Potensi beban uang pengakhiran Tenaga kerja meningkat. Penyesuaian tagihan selama masa COVID-19 Berkurangnya pendapatan Tidak adanya kenaikan upah tenaga kerja sampai dengan kurun waktu tertentu. <p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Reduction and reorganisation of the workforce.</i> <i>Possible termination-related financial costs</i> <i>The labour force is growing.</i> <i>Adjustments to billing throughout the COVID period</i> <i>Income decline</i> <i>There is no growth in employees' salaries for an extended length of time.</i> </p> | <ol style="list-style-type: none"> <i>People :</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga kerja. Optimalisasi dan <i>shifting</i> tenaga kerja ke fungsi-fungsi yang lain. Melakukan sosialisasi dan <i>awareness</i> kepada tenaga kerja. <i>Method :</i> <ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan pola kerja yang berbasis perencanaan dan teknologi. (mis. Menggunakan alat khusus, aplikasi, dsb) <i>Product :</i> <ul style="list-style-type: none"> Perluasan market Non Captive dengan melakukan kolaborasi dengan mitra dan Anak Perusahaan PLN. Pengembangan produk ListriQu dan perluasan market ListriQu <p> <ol style="list-style-type: none"> <i>People: - Increasing the workforce's competency.</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Workforce optimization and reallocation to other functions.</i> <i>Educating and acquainting the staff.</i> <i>Method:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Using planning and technology to implement work patterns. (e.g., via the use of specialised tools, applications, and so forth.)</i> <i>Product:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Expansion of the non-captive market via partnerships through PLN subsidiaries.</i> <i>Product development and market growth for ListriQu</i> </p> |



| No. | Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i> | | | Mitigasi Risiko <i>Risk Mitigation</i> |
|-----|--|--|---|--|
| | Jenis Risiko <i>Risk Type</i> | Penyebab Risiko <i>Cause of Risk</i> | Dampak Risiko <i>Risk Impact</i> | Alternatif Penanganan <i>Alternative Handling</i> |
| 2. | Program Efisiensi yang belum efektif menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) . | <ol style="list-style-type: none"> Biaya Pokok Penyediaan (BPP) terlampaui dikarenakan: <ul style="list-style-type: none"> Kerusakan peralatan kerja (Stick, Tang Ampere dll) dan sarana sebelum masa ekonomis dikarenakan kesalahan penggunaan, cara memeliharanya dan kualitas dibawah standar. Volume gangguan pelanggan meningkat sehingga menyebabkan kebutuhan BBM ikut meningkat. SLA tidak tercapai sehingga terkena denda Adanya biaya - biaya yang tidak terakomodir dalam kontrak pekerjaan. Program Efisiensi biaya belum terukur dan tidak berjalan secara optimal | <ol style="list-style-type: none"> Biaya Operasi meningkat KPI tidak tercapai Biaya BBM meningkat Pendapatan berkurang Beban overhead meningkat Efisiensi tidak tercapai | <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian BPP melalui <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan mutu material melalui <i>track record</i> alat kerja per <i>vendor</i> Sosialisasi SOP penggunaan dan pemeliharaan alker yang benar secara masif Penerapan Perdior tentang hukuman/<i>punishment</i> kepada tenaga kerja yang lalai dalam O&M Alker yang benar Menindaklanjuti hasil pelaporan pemeriksaan alat kerja/peralatan kerja. Optimalisasi penerapan Aplikasi SiAset. Optimalisasi SCM Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> Menambah jumlah DPT untuk proses pengadaan yang lebih kompetitif untuk menghasilkan Alker dengan mutu yang lebih baik Melakukan <i>vendor management</i> termasuk <i>black list</i> untuk <i>vendor</i> tidak memenuhi komitmen sesuai dengan kontrak. Minimalisir denda SLA melalui : <ul style="list-style-type: none"> Menyempurnakan pola rencana dan eksekusi kerja disetiap produk layanan. Meningkatkat komunikasi dan koordinasi dengan PLN. memenuhan alat kerja dan sarana |
| | <i>Efficiency programme that has been unsuccessful in lowering the cost of supply (BPP).</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>The cost of supply (BPP) is surpassed as a result of the following:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Deterioration of work equipment (Stick, Tang Ampere, etc.) and facilities prior to the economic era as a result of overuse, inability to maintain, and poor quality.</i> <i>As the number of customer disruptions rises, so does the need for gasoline.</i> <i>The SLA is not met, resulting in a fine. There are certain expenses that are not covered.</i> <i>Within the terms of the job contract. The cost-effectiveness of the programme has not been quantified, and</i> <i>Does not operate at peak efficiency</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>Increased operating costs</i> <i>KPI was not met</i> <i>Increased fuel prices</i> <i>Income is reduced</i> <i>Increased overhead costs</i> <i>Efficiencies are not realised</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>BPP control through</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Improving material quality control by tracking the work tools used by each vendor</i> <i>Mass socialisation of standard operating procedures for the proper usage and maintenance of alker</i> <i>Enforcing the Perdior on the punishment/punishment of employees who are neglectful in performing the O&M Alker</i> <i>Following up on the findings of the tool/equipment examination.</i> <i>Optimizing the SiAset Application's implementation.</i> <i>Procurement Supply Chain Management Optimization</i> |

| No. | Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i> | | | Mitigasi Risiko <i>Risk Mitigation</i> |
|-----|---|---|--|--|
| | Jenis Risiko <i>Risk Type</i> | Penyebab Risiko <i>Cause of Risk</i> | Dampak Risiko <i>Risk Impact</i> | Alternatif Penanganan <i>Alternative Handling</i> |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Increasing the number of DPT to enable a more competitive procurement process that results in a higher-quality Alker - Vendor management, including the creation of black lists for suppliers that do not adhere to contractual obligations. |
| 3. | Kendala <i>Cash flow</i> Perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja <i>Company cash flow constraints to meet working capital needs</i> | 1. Keterlambatan kesiapan Kontrak dan Amandemen tepat waktu 2. Keterlambatan pengakuan atas penyerahan jasa layanan (BAPP)/ BAST 3. Kebutuhan modal awal: biaya <i>set up</i> dan biaya tenaga kerja 1. <i>Delay in readiness of Contracts and Amendments on time</i> 2. <i>Delay in acknowledgment of service delivery (BAPP)/BAST</i> 3. <i>Initial capital requirements: set up costs and labor costs</i> | 1. Nilai Piutang dan COP yang besar 2. Kendala dalam pemenuhan kewajiban HP untuk pemenuhan modal kerja, gaji TK, pembayaran vendor alker & kendaraan, dan lain- lain 3. Kendala dalam rencana pengembangan usaha 1. <i>Receivable value and large COP</i> 2. <i>Obstacles in fulfilling HP's obligations to fulfill working capital, kindergarten salaries, payment of equipment & vehicle vendors, and others</i> 3. <i>Obstacles in business development plans</i> | 1. Percepatan pemenuhan Kontrak dan Amandemen 2. Kelayakan pemenuhan modal kerja disetiap <i>project</i> harus dapat dilakukan lebih awal 3. Percepatan BAPP dan BAST 4. Percepatan tagihan 5. Melakukan <i>reminder</i> tagihan setiap bulan melalui surat 6. Melakukan komunikasi dengan pelanggan melalui <i>gathering</i> 7. Mencari alternatif lain sebagai sumber dari pemenuhan modal kerja 8. Memenuhi formasi dan meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan <i>project</i> 1. <i>Accelerating the fulfillment of Contracts and Amendments</i> 2. <i>The feasibility of fulfilling working capital in each project must be carried out early</i> 3. <i>Acceleration of BAPP and BAST</i> 4. <i>Billing acceleration</i> 5. <i>Do a bill reminder every month by mail</i> 6. <i>Communicating with customers through gathering</i> 7. <i>Looking for other alternatives as a source of fulfilling working capital</i> 8. <i>Fulfilling formations and improve HR capabilities in project management</i> |



| No. | Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i> | | | Mitigasi Risiko <i>Risk Mitigation</i> |
|-----|---|---|--|--|
| | Jenis Risiko <i>Risk Type</i> | Penyebab Risiko <i>Cause of Risk</i> | Dampak Risiko <i>Risk Impact</i> | Alternatif Penanganan <i>Alternative Handling</i> |
| 4. | <p>Kendala karena adanya UU persaingan usaha (UU No.5 th 1999 ttg larangan monopoli & Persaingan usaha tidak sehat</p> <p><i>Obstacles due to the existence of the business competition law (UU No.5 of 1999 concerning the prohibition of monopoly & unfair business competition</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan dari PLN ke HP sesuai dengan Perdir 734 dan PKS 37 2. Penugasan diluar Perdir 734 dan PKS 37 dimana <i>market share</i> > 50% yang disebabkan: <i>vendor existing</i> wanprestasi, terminasi, dan kondisi gagal lelang <p><i>1. Assignment from PLN to HP in accordance with Director Regulation 734 and PKS 37</i></p> <p><i>2. Assignments outside of Perdir 734 and PKS 37 where the market share is > 50% due to: existing vendor defaults, termination, and failed auction conditions</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan ke KPPU terkait Dugaan pelanggaran UU No.5 th 1999 oleh 2. Pelaku usaha lain 3. Penolakan masuk wilayah kerja dari pelaku usaha lainnya <p><i>1. Reporting to the KPPU regarding the alleged violation of Law No.5 of 1999 by</i></p> <p><i>2. Other business actors</i></p> <p><i>3. Refusal to enter the work area from other business actors</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang UU persaingan usaha No.5 th 1999 2. Melakukan riset pasar terkait pelaku usaha lain dengan bidang usaha sejenis di wilayah kerja HP 3. Membatasi <i>market share</i> di unit PLN sebesar 50% 4. Meningkatkan kemampuan manajemen konflik dan <i>stakeholder management</i> ManReg dan Area 5. HP memperluas pasar <i>non captive</i> <p><i>1. Understanding of the Business Competition Law No.5 of 1999</i></p> <p><i>2. Conducting market research related to other business actors with similar business fields in the HP working area</i></p> <p><i>3. Limiting market share in PLN units by 50%</i></p> <p><i>4. Improving conflict management and stakeholder management capabilities of ManReg and Area</i></p> <p><i>5. HP expands non-captive market</i></p> |
| 5. | <p>Tingginya tingkat komplain dari pelanggan</p> <p><i>High level of complaints from customers</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dan Kemampuan SDM dalam melakukan komunikasi dengan Pemberi 2. Kerja belum baik; 3. Respon atas keluhan Pemberi Kerja lambat; 4. Pemenuhan Kontrak yang tidak tepat waktu (SDM, Alat Kerja); 5. Jadwal evaluasi dengan Pemberi Kerja tidak dilakukan secara tertib dan teratur; 6. Pelanggaran integritas oleh Tenaga kerja; 7. Terjadinya kecelakaan kerja. <p><i>1. Competence and Ability of HR in communicating with Providers</i></p> <p><i>2. Work has not been good;</i></p> <p><i>3. Response to Employer's complaint is slow;</i></p> <p><i>4. Contract fulfillment that is not on time (HR, Work Tools);</i></p> <p><i>5. The evaluation schedule with the Employer is not carried out in an orderly and regular manner;</i></p> <p><i>6. Violation of integrity by the workforce;</i></p> <p><i>7. The occurrence of work accidents.</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Citra Perusahaan dan PLN kurang bagus 2. Komplain dari pelanggan 3. Tidak tercapainya SLA sehingga terkena denda SLA 4. KPI tidak tercapai 5. Munculnya permasalahan hukum terkait pelanggaran integritas <p><i>1. The image of the company and PLN is not good</i></p> <p><i>2. Complaints from customers</i></p> <p><i>3. The SLA is not achieved so that it is subject to an SLA fine</i></p> <p><i>4. KPI not achieved</i></p> <p><i>5. The emergence of legal problems related to integrity violations</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standar proses bisnis terkait pelayanan pelanggan; 2. Memenuhi kekurangan SDM, alat kerja, APD dan sarana prasarana; Membangun komunikasi dengan Pemberi Kerja secara periodik; 3. Implementasi SPS4 4. Pelaksanaan <i>Voice of Customer</i> 5. Melaksanakan program pembinaan competency untuk tenaga kerja 6. <i>Upskilling</i> MAN REG dan MA terkait pelayanan pelanggan. <p><i>1. Creating standard business processes related to customer service;</i></p> <p><i>2. Meeting the shortage of human resources, work tools, PPE and infrastructure; Establish periodic communication with Employers;</i></p> <p><i>3. Implementation of SPS4</i></p> <p><i>4. Implementation of Voice of Customer</i></p> <p><i>5. Implementing competency development programs for workers</i></p> <p><i>6. Upskilling MAN REG and MA related to customer service.</i></p> |

| No. | Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i> | | | Mitigasi Risiko <i>Risk Mitigation</i> |
|-----|---|--|---|---|
| | Jenis Risiko <i>Risk Type</i> | Penyebab Risiko <i>Cause of Risk</i> | Dampak Risiko <i>Risk Impact</i> | Alternatif Penanganan <i>Alternative Handling</i> |
| 6. | <p>SLA dibawah ekspektasi Pemberi Kerja</p> <p><i>SLA below Employer's expectations</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya manajemen WO dan pembagian pekerjaan kepada <i>crew</i>; 2. Kurang fleksibelnya antrian WO dalam aplikasi <i>APKT Mobile</i>; 3. Fungsi pengawasan dan pengendalian belum efektif; 4. Kebijakan Pembatasan penambahan TAD sesuai surat DIRHCM 22284/STH.01.02/BO1070000/2020-R tanggal 24 September 2020 perihal Instruksi Implementasi Pengelolaan Alih Daya; 5. Penetapan target SLA yang tidak mengikuti historical pencapaian; 6. Pemenuhan anggaran peralatan kerja terhambat dan anggaran investasi yang terbatas. <p><i>1. Not optimal WO management and division of work to crew;</i></p> <p><i>2. Lack of flexibility in WO queues in the APKT Mobile application;</i></p> <p><i>3. The function of supervision and control has not been effective;</i></p> <p><i>4. Policy on Restriction of TAD addition according to DIRHCM letter 22284/STH.01.02/BO1070000/2020-R dated September 24, 2020 regarding Instructions for Implementation of Outsourcing Management;</i></p> <p><i>5. Determination of SLA targets that do not follow historical achievements;</i></p> <p><i>6. Fulfillment of the work equipment budget is hampered and the investment budget is limited.</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Citra perusahaan buruk; 2. Kualitas pelayanan yang tidak memenuhi harapan pelanggan; 3. Potensi Denda SLA; 4. Target pendapatan usaha tidak tercapai; 5. Kendala pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang termasuk kategori investasi yang sudah masuk dalam kesepakatan kontrak pekerjaan dengan unit PLN. <p><i>1. Bad company image;</i></p> <p><i>2. Quality of service that does not meet customer expectations;</i></p> <p><i>3. Potential SLA Fines;</i></p> <p><i>4. The target of operating income is not achieved;</i></p> <p><i>5. Obstacles in fulfilling work facilities and infrastructure that are included in the investment category that have been included in the work contract agreement with the PLN unit.</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki sistem manajemen WO; 2. Evaluasi harian/<i>Daily Activity Report</i> melalui aplikasi <i>HOME</i>; 3. Pelatihan <i>flat management</i> (untuk pengaturan WO dan <i>crew</i>); 4. Pelaksanaan pekerjaan melalui kemitraan/subkon melalui penyesuaian kontrak penugasan; 5. Mengadopsi TAD yang pensiun dengan status PKWT; 6. Negosiasi Ulang Penetapan SLA; 7. Penetapan alternatif sumber anggaran untuk pemenuhan alat kerja; 8. Evaluasi Rutin Bulanan Kinerja SLA; 9. Solusi melalui kerjasama sewa-beli dengan pihak ketiga untuk alat kerja yang dengan nilai investasi tinggi seperti alat inspeksi tier 2 dan peralatan Ophar GI 20kV. <p><i>1. Improvement of WO management system;</i></p> <p><i>2. Daily evaluation / Daily Activity Report through the HOME application;</i></p> <p><i>3. Flat management training (for setting up WO and crew);</i></p> <p><i>4. Implementation of work through partnerships/subcontractors through adjustment of the assignment contract;</i></p> <p><i>5. Adopting TAD retired with PKWT status;</i></p> <p><i>6. Negotiation of SLA Determination;</i></p> <p><i>7. Determination of alternative sources of budget for the fulfillment of work tools;</i></p> <p><i>8. Monthly Evaluation of SLA Performance;</i></p> <p><i>9. Solutions through lease-purchase agreements with third parties for high-investment work equipment such as tier 2 inspection tools and 20kV Ophar GI equipment.</i></p> |
| 7 | <p>HP ber Integritas belum menjadi budaya di tingkat <i>Work Force</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran integritas oleh Tenaga kerja; 2. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Tenaga kerja; 3. Belum optimalnya pengawasan secara berjenjang di <i>region/area</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Citra perusahaan & PLN buruk 2. SLA tidak tercapai 3. Kerugian perusahaan 4. Tuntutan hukum terhadap perusahaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sistem pembayaran <i>cashless</i> untuk HP dan PLN 2. Meningkatkan pembinaan dan internalisasi budaya perusahaan kepada seluruh TK 3. Melakukan kerjasama dengan aparat keamanan, BNN, rumah sakit dan dokter yang ditunjuk perusahaan dalam rangka pelaksanaan MCU. |



| No. | Identifikasi Risiko Risk Identification | | | Mitigasi Risiko Risk Mitigation |
|-----|---|---|---|--|
| | Jenis Risiko Risk Type | Penyebab Risiko Cause of Risk | Dampak Risiko Risk Impact | Alternatif Penanganan Alternative Handling |
| | <i>HP with Integrity has not become a culture at the Work Force level</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>Integrity violations by the workforce;</i> <i>Criminal violations committed by workers;</i> <i>There is no optimal step-by-step supervision in the region/area.</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>Bad company & PLN image;</i> <i>SLA not reached;</i> <i>Company loss;</i> <i>Lawsuits against the company.</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>Optimising the cashless payment system for HP and PLN;</i> <i>Improving development and internalization of corporate culture to all kindergartens;</i> <i>Cooperating with security forces, BNN, hospitals and doctors appointed by the company in the context of implementing the MCU.</i> |
| 8. | Implementasi AMC tidak terealisasi tepat waktu <i>AMC implementation was not realised on time</i> | <ol style="list-style-type: none"> Belum ada kesepakatan <i>stakeholder</i> (Divisi Pembina AP dan Divisi Regional) terkait revisi Perdir 734 dan konsep AMC; Sosialisasi AMC belum berjalan secara optimal; | <ol style="list-style-type: none"> Konsep AMC belum sepenuhnya dipahami oleh unit PLN; Dasar hukum pelaksanaan bisnis baru /AMC belum tersedia; Bisnis baru belum dapat dijalankan | <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi bersama Div PFM tentang pemahaman AMC kepada div. op regional. Bersama dengan DIVISI Perencanaan korporat dan DIV PPK menetapkan secara bertahap langkah2 implementasi AMC dengan tahapan tahun 2020 dengan AMC menggunakan Pola II Pelayanan Teknik dan Pola Asset Operator pada 2021. Kontrak-kontrak Pelayanan Teknik baru 2020 menggunakan pola II Pelayanan Teknik |
| | | <ol style="list-style-type: none"> <i>There is no stakeholder agreement (AP Development Division and Regional Division) regarding the revision of Perdir 734 and the AMC concept;</i> <i>AMC socialization has not run optimally;</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>The concept of AMC is not yet fully understood by PLN units;</i> <i>The legal basis for implementing new business /AMC is not yet available;</i> <i>The new business cannot be started</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>Dissemination with the PFM Div about the understanding of AMC to the div. regional op.</i> <i>Together with the Corporate Planning DIVISION and the PPK DIV, step by step implementation of AMC with stages in 2020 with AMC using Pattern II Technical Services and Asset Operator Patterns in 2021.</i> <i>New Technical Service Contracts 2020 use pattern II Technical Services</i> |
| 9. | Implementasi GCG tidak mengalami peningkatan sesuai target <i>GCG implementation does not increase according to target</i> | <ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya tingkat pemahaman Bisnis Proses Owner (BPO) terkait kriteria penilaian GCG; Aspek pengungkapan informasi dan transparansi belum optimal; Belum konsisten dalam pemenuhan eviden pada setiap aktivitas; | <ol style="list-style-type: none"> Skor GCG rendah Citra Perusahaan | <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sosialisasi/<i>workshop</i> di seluruh level; Perbaikan dan pemeliharaan <i>website</i> korporat; Mengikuti <i>award</i> GCG; Mengikuti <i>Annual Report Award</i> (ARA); <i>Review</i> kebijakan pendukung GCG (<i>Board manual</i> Direksi, Pedoman GCG, COC) dan perbaikan proses bisnis; |
| | | <ol style="list-style-type: none"> <i>There is still a lack of understanding of the Business Process Owner (BPO) related to the GCG assessment criteria;</i> <i>Aspects of information disclosure and transparency are not yet optimal;</i> <i>Not yet consistent in fulfilling evidence in each activity;</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>Low GCG score</i> <i>Company Image</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>Implementation of socialization/ workshops at all levels;</i> <i>Repair and maintenance of the corporate website; Participate in GCG awards; Participate in the Annual Report Award (ARA);</i> <i>Review of GCG supporting policies (Board manual of the Board of Directors, GCG Guidelines, COC) and improvement of business processes;</i> |

| No. | Identifikasi Risiko Risk Identification | | | Mitigasi Risiko Risk Mitigation |
|-----|---|--|--|---|
| | Jenis Risiko Risk Type | Penyebab Risiko Cause of Risk | Dampak Risiko Risk Impact | Alternatif Penanganan Alternative Handling |
| 10. | Budaya K3 belum terimplementasi dengan baik dilapangan <i>OHS culture has not been implemented properly in the field</i> | 1. Masih terdapat pelaksana pekerjaan yang tidak kompeten dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi 2. Ketidaksiplinan Tenaga Kerja dalam menjalankan SOP, penggunaan alat kerja dan APD, dokumen <i>Working Permit, Hygiene Factor</i> dan Pedoman <i>Safety, Integrity, dan Quality</i> ; 3. Belum terpenuhinya jumlah peralatan kerja dan sarana sesuai dengan standar K3. 4. Pengawas K3 dan Pengawas Pekerjaan belum tersedia sepenuhnya di setiap lokasi pekerjaan. | 1. <i>Zero accident</i> tidak terpenuhi; 2. Citra Perusahaan memburuk; 3. Dampak Psikologis SDM terganggu akibat kecelakaan kerja, 4. Risiko tenaga kerja mengalami Tingkat keparahan akibat kecelakaan : luka ringan, luka berat, cacat, meninggal dunia sehingga tidak bisa bekerja kembali; 5. Timbul biaya akibat kecelakaan kerja 6. Denda SLA Pengurangan penilaian KPI; | 1. Mitigasi Eksternal (dengan PLN) - Melakukan addendum sesuai dengan regulasi K3 di setiap kontrak; - Melakukan <i>survey Hygiene Factor</i> bersama Div.K3LH & PLN Unit; 2. Mitigasi internal HP : - Men-setup dan mensertifikasi SMK3; - Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan pengawas melalui pelatihan/sertifikasi; - Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> ; - Implementasi SEMATA sebagai rangkaian kegiatan perbaikan <i>maturity level</i> OHS melalui pendekatan kompetensi, Peralatan Kerja, Sarana dan Sistem <i>Monitoring</i> . |
| | | 1. <i>There are still incompetent job executors as evidenced by competency certification</i> 2. <i>Labor indiscipline in carrying out SOPs, use of work tools and PPE, Working Permit documents, Hygiene Factors and Guidelines for Safety, Integrity, and Quality;</i> 3. <i>The number of work equipment and facilities has not been fulfilled in accordance with K3 standards.</i> 4. <i>Occupational Safety and Health Supervisors and Work Supervisors are not fully available at every work location.</i> | 1. <i>Zero accident is not met;</i> 2. <i>The Company's image is deteriorating;</i> 3. <i>Psychological impact of human resources being disrupted due to work accidents,</i> 4. <i>The risk of workers experiencing the severity of the accident: minor injuries, serious injuries, disability, death so that they cannot work again;</i> 5. <i>Costs incurred due to work accidents</i> 6. <i>SLA fines Reduction of KPI assessment;</i> | 1. <i>External Mitigation (with PLN)</i> - <i>Make addendums in accordance with OHS regulations in each contract;</i> - <i>Conducting Hygiene Factor survey with Div.K3LH & PLN Unit;</i> 2. <i>HP internal mitigation:</i> - <i>Setup and certify OHSAS;</i> - <i>Improving the competence of workers and supervisors through training/certification;</i> - <i>Application of rewards and punishments;</i> - <i>Implementation of SEMATA as a series of activities to improve the OHS maturity level through a competency approach, Work Equipment, Facilities and Monitoring System.</i> |
| 11. | Kondisi <i>Force Mejeure</i> Pandemi COVID-19 | 1. Meluasnya dan meningkatnya Wabah Penyakit/Pandemik COVID-19 di wilayah Indonesia 2. Adanya pembatasan kegiatan selama pandemi oleh pemerintah 3. Beberapa pekerjaan tidak memungkinkan menggunakan pola WFH. | 1. Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan terkendala 2. Petugas dilapangan terpapar COVID-19 3. Target SLA tidak tercapai 4. Adanya penambahan biaya akibat COVID-19. 5. Risiko Penularan untuk petugas lapangan menjadi lebih besar | 1. Menetapkan <i>Business Continuity Plan</i> 2. Melakukan koordinasi dan penanganan dengan Dinas Kesehatan setempat dan BPJS 3. Adanya negosiasi ulang terhadap Pemberi Kerja khusus untuk SLA di masa COVID-19 4. Menetapkan perdir pecegahan dan penanganan COVID-19 dengan menyediakan kebutuhan sarana pemenuhan protokol COVID-19 untuk Petugas dan Sarana Perkantoran 5. Melakukan rekomposisi anggaran penanganan COVID-19; |



| No. | Identifikasi Risiko Risk Identification | | | Mitigasi Risiko Risk Mitigation |
|-----|--|--|---|--|
| | Jenis Risiko Risk Type | Penyebab Risiko Cause of Risk | Dampak Risiko Risk Impact | Alternatif Penanganan Alternative Handling |
| | <i>Force Majeure Conditions for the COVID-19 Pandemic</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Widespread and increasing outbreaks of disease/pandemic COVID-19 in the territory of Indonesia 2. There are restrictions on activities during the pandemic by the government 3. Some jobs do not allow using the WFH pattern. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementation of work in the field is constrained 2. Officers in the field are exposed to COVID-19 3. SLA target was not achieved due to COVID-19. 4. There are additional costs 5. The risk of transmission for field workers is greater | <ol style="list-style-type: none"> 1. Establishing a Business Continuity Plan 2. Coordinating and handling with the local Health Office and BPJS 3. There is renegotiation of special Employers for SLAs during the COVID-19 period 4. Establishing regulations for the prevention and handling of COVID-19 by providing the necessary means for fulfilling the COVID-19 protocol for Officers and Office Facilities 5. Recomposing the budget for handling COVID-19; |
| 12. | <p>Produk ListriQu belum dikenal dan belum direspon oleh pelanggan</p> <p><i>ListriQu products are not known and have not been responded to by customers</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan produk baru terbatas, tidak efektif dan terlambat dilaksanakan sehingga kurang dikenal oleh pelanggan; 2. Kecenderungan pasar masih ke sistem eksisting; 3. Penolakan petugas Yantek menggunakan aplikasi ListriQu; 4. Masih terbatasnya ekosistem Mitra yang bergabung dalam ListriQu 5. Masih terpisahnya Sistem <i>Back office</i> _ListriQu dan APKT PLN <p><i>1. The introduction of new products is limited, ineffective and late in implementation so that it is less well known by customers;</i></p> <p><i>2. The market trend is still towards the existing system;</i></p> <p><i>3. Denial of Yantek officers using the ListriQu application;</i></p> <p><i>4. There is still a limited ecosystem of Partners who join ListriQu</i></p> <p><i>5. Still separate _ListriQu Back office system and PLN APKT</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlambatnya ekspansi Lokasi dan Jumlah layanan ListriQu 2. Target pendapatan tidak mencapai target. 3. Pengembangan bisnis baru tidak memenuhi kriteria finansial dan operasional sesuai yang direncanakan <p><i>1. The expansion of the Location and Number of ListriQu services</i></p> <p><i>2. The revenue target did not reach the target.</i></p> <p><i>3. New business development does not meet the financial and operational criteria as planned</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara <i>massive</i> kepada pelanggan terkait produk ListriQu, melalui media sosial, brosur; 2. Pembinaan dan pengawasan <i>crew</i> dalam pelaksanaan ListriQu melalui aplikasi ListriQu; 3. Pengembangan Kemitraan dan pola bisnis yang mempercepat penetrasi mitra dan area layanan 4. Integrasi ListriQU dengan CC123 dan PLN <i>Mobile</i> 5. Melakukan <i>daily activity report</i>; <p><i>1. Massive socialisation to customers regarding ListriQu products, through social media, brochures;</i></p> <p><i>2. Crew guidance and supervision in the implementation of ListriQu through the ListriQu application;</i></p> <p><i>3. Development of partnerships and business patterns that accelerate the penetration of partners and service areas</i></p> <p><i>4. Integration of ListriQU with CC123 and PLN Mobile</i></p> <p><i>5. Conduct daily activity reports;</i></p> |
| 13. | <p>Kebijakan pembatasan penambahan Tenaga Kerja Alih Daya (TAD) & Regulasi ketenagakerjaan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat DIR HCH 22284/STH.01.02/B01070000/2020-R tanggal 24 September 2020 perihal Instruksi Implementasi Pengelolaan Alih Daya 2. Kebijakan tidak adanya penggantian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kewajiban kontrak (SLA) terkendala karena kurangnya TAD karena TAD pensiun dan mengundurkan diri 2. Jumlah TAD tidak sesuai dengan kontrak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pekerjaan melalui kemitraan dan subkon 2. Perubahan kebijakan masa pensiun TAD dari 50th menjadi 56 th 3. Penyesuaian kontraktual penugasan pekerjaan |

| No. | Identifikasi Risiko Risk Identification | | | Mitigasi Risiko Risk Mitigation |
|-----|---|--|---|---|
| | Jenis Risiko Risk Type | Penyebab Risiko Cause of Risk | Dampak Risiko Risk Impact | Alternatif Penanganan Alternative Handling |
| | Policy to limit the addition of Outsourced Workers (TAD) & Employment Regulations | <ol style="list-style-type: none"> Letter of DIR HCH 22284/STH.01.02/B01070000/2020-R dated 24 September 2020 regarding Instructions for Implementation of Outsourcing Management No replacement policy | <ol style="list-style-type: none"> Fulfillment of contract obligations (SLA) is hampered due to lack of TAD because TAD retired and resigned The amount of TAD is not in accordance with the contract | <ol style="list-style-type: none"> Execution of work through partnerships and subcontracts Changes in the TAD retirement policy from 50 to 56 years of age Contractual adjustment of work assignments |
| 14. | Keharusan mengakomodir tenaga kerja impasing yang tidak memiliki kualifikasi kompetensi memadai | <ol style="list-style-type: none"> Permintaan Pemberi Kerja untuk tetap menggunakan pegawai dari mitra sebelumnya; Tidak semua kontrak penugasan antara HP dengan Pemberi Kerja mengakomodir biaya pembinaan; Requirement tenaga kerja diluar standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan; Adanya perbedaan peraturan usia penslun dengan mitra sebelumnya; Belum memiliki sertifikat kompetensi; | <ol style="list-style-type: none"> Kualitas Tenaga Kerja tidak sesuai diharapkan Meningkatnya Biaya pengembangan/ pembinaan SDM. Risiko terjadinya kecelakaan tenaga kerja yang diakibatkan <i>requirement</i> tenaga kerja Posisi jabatan tidak dapat diisi karena kriteria <i>job</i> spesifikasi tidak terpenuhi. Adanya tuntutan dari Pemberi Kerja dan tenaga kerja impasing, tenaga kerja internal terkait usia pensiun SLA tidak tercapai dan terkena denda | <ol style="list-style-type: none"> Mengevaluasi tenaga kerja impasing sebelum menjadi PKWTT; Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja; Pelaksanaan diklat dan pembinaan bagi tenaga kerja; Melakukan sosialisasi dan kesepakatan mengenai usia pensiun sebelum dilakukan proses impasing; Melakukan mediasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dengan ketentuan usia pensiun; Optimalisasi SMK3 di Region dan Area; Melakukan induction ke tenaga kerja Setup sistem untuk monitoring K3 Assesment maturity implementasi K3 dan terkena denda |
| | Must accommodate impassing workers who do not have adequate competency qualifications | <ol style="list-style-type: none"> Employer's request to continue to use employees from previous partners; Not all assignment contracts between HP and the Employer accommodate coaching costs; Manpower requirements beyond the standards set by the company; There is a difference in the age regulation for penslun with previous partners; Not yet have a certificate of competence; | <ol style="list-style-type: none"> The quality of the workforce is not as expected Increasing costs of human resource development/ training. The risk of labor accidents caused by labor requirements The position cannot be filled because the job specification criteria are not met. There are demands from the Employer and unpaid workers, internal workers related to the SLA retirement age are not achieved and are subject to fines | <ol style="list-style-type: none"> Evaluating the impassing workforce before becoming a PKWTT; Fulfillment of Workforce Competency Certification; Implementation of training and coaching for workers; Conducting dissemination and agreement on retirement age before the impasse process is carried out; Conducting mediation with stakeholders related to the provision of retirement age; Optimising OHSAS in Regions and Areas; Conducting induction to the workforce System setup for OHS monitoring Assessment of OHS implementation maturity |



| No. | Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i> | | | Mitigasi Risiko <i>Risk Mitigation</i> |
|-----|--|--|---|--|
| | Jenis Risiko <i>Risk Type</i> | Penyebab Risiko <i>Cause of Risk</i> | Dampak Risiko <i>Risk Impact</i> | Alternatif Penanganan <i>Alternative Handling</i> |
| 15. | <p>Terjadi mogok kerja/ pengunduran diri serentak oleh Tenaga Kerja</p> <p><i>There is a strike/ simultaneous resignation by the workforce</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> Pemahaman yang kurang terkait implementasi UU Cipta Karya Hak normatif pegawai tidak dipenuhi sesuai UU No.13 th 2003 dikarenakan ada yang tidak terakomodir di kontrak pekerjaan (contoh : pengganti cuti, lembur, dll); Solidaritas sesama tenaga kerja karena PHK beberapa tenaga kerja; Provokasi dari pihak tertentu (LSM dll) Penerapan PerDir 219/2019 Banyaknya tenaga kerja yang terafiliasi dengan Serikat Pekerja di luar perusahaan. <p><i>1. Lack of understanding regarding the implementation of the Copyright Act</i></p> <p><i>2. The normative rights of employees are not fulfilled according to Law No. 13 of 2003 because there are some that are not accommodated in the employment contract (example: substitute for leave, overtime, etc.);</i></p> <p><i>3. Solidarity among workers due to layoffs of several workers;</i></p> <p><i>4. Provocation from certain parties (NGOs etc.)</i></p> <p><i>5. Implementation of Board of Directors Regulation 219/2019</i></p> <p><i>6. The number of workers affiliated with labor unions outside the company.</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> Adanya permasalahan Hubungan Industrial. Citra perusahaan menurun SLA tidak tercapai, sehingga berpotensi denda dan kerugian finansial perusahaan; Potensi kerusakan <i>asset</i> karena aksi anarkis oknum TK; Menyebabkan terjadinya potensi mogok kerja dan pelayanan terhadap PLN dan masyarakat terhenti. <p><i>1. There are problems in Industrial Relations.</i></p> <p><i>2. Company image is declining</i></p> <p><i>3. The SLA is not achieved, resulting in potential fines and financial losses for the company;</i></p> <p><i>4. Potential damage to assets due to the anarchic actions of TK personnel;</i></p> <p><i>5. Causing a potential strike and stopping services to PLN and the community.</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada personil <i>Region</i>, tenaga kerja dan serikat pekerja; Melakukan upaya-upaya persuasif ke pemberi kerja untuk mengakomodir hak-hak normatif tenaga kerja dalam perjanjian yang ada. Membuat manajemen <i>stakeholder</i> di level <i>Region</i> dan Area. Menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di <i>Region</i> dan Area. Membuat prosedur tanggap darurat terkait kejadian huru hara, bencana, dll. Memperbaharui <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) dengan memasukkan <i>Emergency Responsiveness</i> apabila ada kejadian darurat. <p><i>1. Conducting socialization and guidance to Regional personnel, workers and trade unions;</i></p> <p><i>2. Making persuasive efforts to the employer to accommodate the normative rights of workers in the existing agreement.</i></p> <p><i>3. Creating stakeholder management at the Regional and Area levels.</i></p> <p><i>4. Implementing a Security Management System (SMP) in Regions and Areas.</i></p> <p><i>5. Making emergency response procedures related to riots, disasters, etc.</i></p> <p><i>6. Updating the Business Continuity Plan (BCP) by including Emergency Responsiveness in the event of an emergency.</i></p> |

| No. | Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i> | | | Mitigasi Risiko <i>Risk Mitigation</i> |
|-----|--|--|---|---|
| | Jenis Risiko <i>Risk Type</i> | Penyebab Risiko <i>Cause of Risk</i> | Dampak Risiko <i>Risk Impact</i> | Alternatif Penanganan <i>Alternative Handling</i> |
| 16. | PLN tidak dapat menerima pasal terkait hak tenaga kerja sesuai regulasi seperti selisih uang pengakhiran, lembur, tunjangan cuti dimasukkan kedalam kontrak | 1. Konsep pekerjaan bersifat pemborongan pekerjaan namun dalam pelaksanaan bersifat PJTK dan adanya hak yang tidak diakomodir di dalam kontrak pekerjaan seperti tunjangan cuti, lembur, uang pengakhiran, dll. | 1. Meningkatnya biaya <i>Overhead</i> untuk menanggung hak-hak yang tidak diakomodir dalam kontrak pekerjaan. 2. Adanya permasalahan Hubungan Industrial. | 1. Melakukan upaya-upaya persuasif ke pemberi kerja untuk mengakomodir hak-hak normatif tenaga kerja dalam perjanjian yang ada. 2. Melakukan upaya-upaya persuasif ke level pengambil kebijakan/ <i>Holding</i> (Div PFM, Div Org, SHK dll) untuk membuat kebijakan yang mengakomodir hak-hak normatif tenaga kerja. |
| | <i>PLN cannot accept articles related to labor rights according to regulations such as the difference in termination fees, overtime, leave allowances included in the contract</i> | 1. <i>The concept of work is in the form of contracting work but in its implementation it is PJTK and there are rights that are not accommodated in the work contract such as leave allowances, overtime, termination fees, etc.</i> | 1. <i>Increasing Overhead costs to bear rights that are not accommodated in the employment contract.</i> 2. <i>There are problems in Industrial Relations.</i> | 1. <i>Making persuasive efforts to the employer to accommodate the normative rights of workers in the existing agreement.</i> 2. <i>Carrying out persuasive efforts to the level of policy makers / Holding (Div PFM, Div Org, SHK etc.) to make policies that accommodate the normative rights of workers.</i> |

Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko

Implementation of the Tasks of the Risk Management Function

| No. | Triwulan <i>Quarter</i> | Pelaksanaan Tugas <i>Execution of the Task</i> |
|-----|----------------------------|--|
| 1. | I | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Profil Risiko PT Haleyora Power tahun 2020 - <i>Parenting</i> dan <i>sistering</i> penerapan implementasi GRC dengan PT PJB tanggal 23 Februari 2020 - <i>Review</i> dan <i>Monitoring</i> Profil Risiko HP TW 1 - Penyampaian Laporan Manajemen Risiko TW1 <ul style="list-style-type: none"> - <i>Development of PT Haleyora Power's 2020 Risk Profile</i> - <i>On 23 February 2020, GRC implementation will be parented and sistered by PT PJB.</i> - <i>Examining and monitoring the risk profile of HP TW 1</i> - <i>TW1 Risk Management Report Submission</i> |
| 2. | II | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan <i>Gap Analysis</i> penerapan GRC oleh PJB (Juni 2020) - Penyampaian Laporan Manajemen Risiko TW2 - Proses penyusunan dan penyelesaian Perdir GRC PT HP <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gap Analysis of PJB's GRC implementation (June 2020)</i> - <i>Q2 Risk Management Report Submission</i> - <i>The method through which the PT HP GRC Director Regulation was drafted and finalised</i> |



| No. | Triwulan Quarter | Pelaksanaan Tugas Execution of the Task |
|-----|---------------------|---|
| 3. | III | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan identifikasi risiko <i>Fraud</i> (FRA) untuk SMAK - Penyampaian Laporan Manajemen Risiko TW3 - <i>SMAK fraud risk assessment (FRA) activities</i> - <i>Q3 Risk Management Report Submission</i> |
| 4. | IV | <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Manajemen risiko dan profil risiko pada 15 November 2020 - Penyampaian Laporan Manajemen Risiko TW4 - <i>On 15 November 2020, risk management and risk profiles will be socialised.</i> - <i>Submission of the Risk Management Report for the fourth quarter</i> |

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2020

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System in 2020

Fungsi manajemen risiko Perusahaan telah melakukan penetapan profil-profil risiko beserta dengan upaya mitigasi dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Hasil evaluasi risiko korporat untuk tahun 2020 berfokus kepada:

1. Meningkatkan Kemampuan Keuangan (*Improving Financial Capability*);
2. Meningkatkan Pelayanan kepada Pelanggan (*Improving Customer Services*);
3. Peningkatan Kinerja Terus-menerus (*Continuous Performance Improvement*);
4. Mengimplementasikan K3LH untuk mencapai Kecelakaan Kerja Nihil (*Implementing Health, Safety, and Environment to achieve Zero Accident*);
5. Pengembangan bisnis baru (*Developing New Bussines*);
6. Meningkatkan Keunggulan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (*Improving Organization and Human Capital*).

The risk management department of the Company has identified risk profiles, mitigation measures, and strategic actions that must be done. The business risk assessment for 2020 focuses on the following:

1. *Strengthening Financial Capacity*;
2. *Enhanced Customer Service (Enhanced Customer Service)*;
3. *Constant Performance Enhancement*;
4. *Adopting K3LH in order to achieve zero accidents (adopting K3LH in order to achieve zero accidents)*;
5. *Establishment of new companies (Establishment of New Businesses)*;
6. *Organizational Excellence and Human Capital Enhancement (Improving Organization and Human Capital)*

Sistem Pengendalian Intern

Internal Control System

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan. Sistem pengendalian internal pelaksanaannya diawali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan Perusahaan telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Perusahaan merancang sistem pengendalian internal dengan mengadopsi *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO).

5 Komponen Sistem Pengendalian Intern

1. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - a) Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - b) Filosofi dan gaya manajemen;
 - c) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - d) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN.
5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Internal control is a continual series of actions and activities carried out by management and workers in order to instil sufficient confidence in the Company's ability to accomplish its goals. Internal control systems are implemented in an ordered, regulated, efficient, and effective way, from planning through execution, monitoring, and accountability, in order to instil confidence in the Company's capacity to carry out its operations efficiently and successfully.

The business established an internal control system using the Internal Control Integrated Framework created by the Treadway Commission's Committee of Sponsoring Organizations (COSO).

Five Internal Control System Components

1. *A disciplined and structured internal control environment within the organization, consisting of the following:*
 - a) *Employee integrity, ethical values, and competence;*
 - b) *Management philosophy and style;*
 - c) *Management's method of carrying out its authorities and responsibilities;*
 - d) *Human resource organization and development; and*
 - e) *Attention and direction from the CEO.*
2. *Business risk management evaluation (risk assessment), which is a method for identifying, analysing, and evaluating relevant risk management.*
3. *Control activities, i.e., actions taken as part of a process of monitoring and controlling the company's activities at all levels and units within the organizational structure of SOEs, including authority, authorization, verification, reconciliation, evaluation of work performance, task division, and asset security.*
4. *Information and communication system, which is the method through which SOEs provide reports on their operational and financial operations, as well as their compliance with applicable rules and regulations.*
5. *Monitoring, defined as the process of evaluating the quality of the internal control system, including the internal audit function, at each level and unit within BUMN's organizational structure in order to ensure optimum performance.*



Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System Evaluation

Perusahaan senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam rangka menyempurnakan sistem pengendalian intern antara lain:

1. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak efektifnya pengendalian risiko Perusahaan harus segera ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris Direksi dan Pegawai terkait;
2. SPI harus melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau tindakan korektif belum ditindaklanjuti;
3. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti maka Direksi harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern dan mengambil langkah perbaikan;
4. Dewan Komisaris dan Direksi harus menerima laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian intern.

The Company continues to implement remedial actions to strengthen its internal control system, including the following:

1. *Any reports of the Company's internal control deficiencies or inadequate risk management must be followed up promptly by the Board of Commissioners, Directors, and relevant personnel;*
2. *SPI shall undertake a review or other appropriate monitoring procedures to identify and promptly disclose to the Board of Commissioners and the President Director any deficiencies that have not been addressed or corrective actions that have not been implemented;*
3. *To guarantee that all vulnerabilities are addressed promptly, the Board of Directors must establish a mechanism for tracking and correcting internal control deficiencies;*
4. *The Board of Commissioners and the Board of Directors shall receive periodic reports summarising the outcomes of the identification of any internal control deficiencies.*



Permasalahan Hukum/Litigasi Perusahaan dan Anak Perusahaan

Legal/Litigation Problems Concerning the Company and Subsidiaries

Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan sepanjang tahun 2020. Oleh karenanya Perusahaan juga tidak mendapatkan sanksi administrasi apapun pada tahun tersebut.

Throughout 2020, the Company had no legal issues. As a result, the Company did not face any administrative penalties during that fiscal year.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Business Data and Information

Masyarakat dapat mengakses seluruh informasi mengenai Perusahaan melalui situs www.haleyorapower.co.id yang berisi berbagai informasi seperti: profil perusahaan; profil Direksi dan Dewan Komisaris; produk dan layanan; berbagai pedoman dan kebijakan perusahaan; produk dan layanan yang dimiliki HP serta berita/informasi terkini mengenai HP.

The public can obtain complete information about the Company at www.haleyorapower.co.id, which includes the following: company profile; profiles of the Board of Directors and Commissioners; products and services; various company guidelines and policies; HP products and services; and the latest news/information about HP.

Penyediaan informasi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dapat lebih lanjut diakses melalui banyak cara, antara lain:

The supply of information to shareholders and stakeholders may be enhanced in a variety of ways, including the following:

| | | |
|---|---|---|
| Alamat Kantor Pusat <i>Head Office Address</i> | : | Kindo Square, Blok A15-16 JL. Duren Tiga Raya No.101 Duren Tiga Jakarta Selatan 12760 |
| Telepon <i>Telephone</i> | : | +62(21)79192517 |
| Faksimili <i>Facsimile</i> | : | +62(21)79192516 |
| Call Center ListriQu | : | +62(21)150-456 |
| Email | : | info@haleyorapower.co.id |
| Website | : | www.haleyorapower.co.id |
| Facebook | : | PT Haleyora Power (fan page) |
| Twitter | : | @pthaleyorapower |
| Instagram | : | @haleyorapower |
| LinkedIn | : | PT Haleyora Power |

Media Haleyora Power

Media Haleyora Power

HP memiliki majalah "Media Haleyora Power" yang terbit triwulanan berisikan tentang berita-berita terkini dari kegiatan operasional maupun non operasional dan informasi penting lainnya seperti kegiatan CSR Perusahaan. Majalah ini dapat diakses melalui situs www.haleyorapower.co.id dalam kanal Komunikasi Berkelanjutan.

HP publishes a quarterly magazine called "Media Haleyora Power" that contains the latest news from operational and non-operational operations, as well as other pertinent information like as the Company's CSR initiatives. This magazine may be viewed through the Sustainable Communications channel on the website www.haleyorapower.co.id.



Kode Etik

Code of Conducts

Etika bisnis adalah bagian integral dari tata kelola perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Kode etik adalah pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi organ perusahaan dan karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan, yang jika diterapkan secara berkelanjutan akan menjadi budaya perusahaan.

Penerapan disiplin Perusahaan telah tertuang di dalam Peraturan Perusahaan yang menjelaskan tentang kewajiban dan hak karyawan, tindakan pelanggaran beserta sanksi yang diberikan, pejabat yang memiliki wewenang dalam memberikan sanksi.

Corporate governance must include business ethics in order to achieve long-term success. A code of CONDUCTS is a set of principles that serves as a guide for the company's organs and workers in applying the company's ideals, which, when consistently implemented, form the company's culture.

The Company's discipline is outlined in its Regulations, which include workers' duties and rights, breaches and resulting penalties, and authorities with the power to impose sanctions.

Pokok-Pokok Kode Etik

Core of Code of Conducts

HP memiliki Pedoman Perilaku yang ini terdiri dari 3 (Tiga) bagian sebagai berikut:

1. Pendahuluan
Menginformasikan latar belakang; maksud dan tujuan; manfaat; serta tata nilai Perusahaan.
2. Pedoman Perilaku
Menjelaskan mengenai benturan kepentingan; pemberian hadiah, makanan, hiburan dan pemberian donasi; kepedulian terhadap keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH); kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi; integrasi laporan keuangan; perlindungan informasi Perusahaan dan *intangible asset*; perlindungan harta perusahaan; kegiatan sosial dan politik; serta etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan.
3. Penegakan Pedoman Perilaku
Memberikan informasi tentang tata cara sosialisasi; pelanggaran; mekanisme pelaporan pelanggaran; sanksi atas pelanggaran; serta penghargaan atas kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.

HP has a Code of Conduct that is divided into three (three) sections:

1. *Orientation*
A brief history; a statement of purpose and goals; a statement of benefit; and a statement of company principles.
2. *Code of Conducts*
Explaining the conflict of interest; the giving of gifts, food, entertainment, and donations; the concern for safety, occupational health, and the environment (K3LH); equal employment and promotion opportunities; the integration of financial reports; the protection of Company information and intangible assets; the protection of company property; social and political activities; and the ethics in dealing with stakeholders.
3. *Compliance with the Code of Conduct*
Providing details on the socialisation processes; the violation reporting system; the penalties for violations; and the incentives for Code of Conduct compliance.

Pengungkapan Kepatuhan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

Compliance Disclosure That the Organization's Code of Conducts Applies to All Levels

Seluruh pegawai di seluruh tingkatan Perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kode etik secara konsisten. Seluruh pegawai Perusahaan wajib membaca, memahami dan menandatangani Pakta Integritas setelah membaca dan memahami isi dari Pedoman Perilaku Perusahaan.

All employees at all levels of the Company are dedicated to and accountable for adhering to the code of ethics consistently. After reading and comprehending the provisions of the Company's Code of Conduct, all Company workers are expected to read, comprehend, and sign the Integrity Pact.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Code of Conduct Dissemination

Perusahaan menyelenggarakan sosialisasi Pedoman Perilaku secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan insan Perusahaan mengenai arti penting Pedoman Perilaku bagi kelangsungan usaha Perusahaan serta membangun kesadaran bahwa Pedoman Perilaku merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja pegawai yang disampaikan kepada seluruh pegawai melalui portal internal maupun di situs web: www.haleyorapower.co.id.

The Company conducts periodic Code of Conduct socialisation sessions to increase employee awareness and understanding of the Code of Conduct's critical role in ensuring the Company's business continuity, as well as to raise awareness that the Code of Conduct is an integral part of business practises and employee performance appraisals that are communicated to all employees via email.

Jenis Sanksi untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran yang Diatur dalam Kode Etik

Sanctions for the Different Types of Violations Regulated by the Code of Conduct

Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku yang terbukti, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

Each breach of the Code of Conduct that is established will be sanctioned in line with the Company's relevant rules and regulations. The Board of Directors determines the sanctions for workers who violate the policy after receiving a report from the employee's immediate supervisor. The Boards of Commissioners and Directors choose whether to offer coaching, disciplinary penalties, and/or other measures, as well as preventive, that must be carried out by their direct superiors in their particular settings.

Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham. Sedangkan jika pelanggaran dilakukan oleh mitra kerja atau pemangku kepentingan lain, maka Perusahaan akan melaksanakan ketentuan sebagaimana telah tertuang dalam kontrak hingga pemutusan hubungan kerja. Jika terdapat unsur tindak pidana maka kasus dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Shareholders decide on sanctions against the Board of Directors and the Board of Commissioners for breaches. Meanwhile, if the breach is committed by a co-worker or another stakeholder, the Company will enforce the contract's terms until the employment connection is terminated. If a case has components of a criminal conduct, it may be referred to the authorities.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Beserta Sanksi Yang Diberikan Pada Tahun Buku Terakhir

The Number of Code of Conduct Violations and Sanctions Imposed in the Previous Fiscal Year

Tidak terdapat pelanggaran terkait kode etik maupun sanksi yang diberikan kepada karyawan sepanjang tahun 2020.

There were no violations related to the code of ethics or sanctions given to employees throughout 2020.



Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Financing of Social and Political Activities

Perusahaan menjamin hak politik seluruh Insan HP untuk dapat melaksanakan dan menyalurkan aspirasi politiknya. Namun demikian perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Perusahaan turut berkontribusi dalam kegiatan sosial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 02/MBU/04/2020 dan Permen BUMN NOMOR PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

The Company guarantees all HP employees' political rights, allowing them to pursue and channel their political ambitions. The business, on the other hand, makes no political donations and is unaffiliated with any political party. Additionally, the company participates in social activities as defined in the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation PER09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises, as amended several times, most recently by Minister of State-Owned Enterprises' Regulation PER 02/MBU/04/2020 and SOE Ministerial Decree NUMBE.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Reports of State Providers on Asset Management (LHKPN)

Penerapan LHKPN Perusahaan dilakukan berdasar beberapa hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan HP antara lain:

1. Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Peraturan Direksi Nomor: 0002.P/DIR-HP/2017 Tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Haleyora Power.

Sebagaimana tercantum dalam Perdir tersebut, Perusahaan mewajibkan pejabat struktural HP untuk melaporkan harta kekayaan dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemenuhan kewajiban pelaporan secara periodik setiap setahun sekali dapat dilakukan secara mandiri melalui link Elektronik LHKPN (E-LHKPN) pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>.

Pejabat Wajib LHKPN

Wajib LHKPN di Perusahaan terdiri dari:

1. Pegawai HP pada jenjang jabatan struktural yang meliputi Manajemen Atas, Manajemen Menengah, dan Manajemen Dasar;
2. Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.

The Company's LHKPN is implemented in accordance with various laws and regulations that serve as the foundation for the viewpoint of implementing LHKPN in the HP environment, including:

1. Law No.28 of 1999 on Clean and Integral State Administrators Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No.30 of 2002 establishing the Commission for the Eradication of Corruption.
3. Regulation No.7 of 2016 of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia on the Procedures for Registering, Notifying, and Examining the Assets of State Administrators.
4. Regulation No.0002.P/DIR-HP/2017 of the Board of Directors relating to the Guidelines for Reporting on State Administration Assets (LHKPN) at PT Haleyora Power.

According to the Board of Directors' Regulation, the Company requires structural officers of HP to disclose assets by completing the State Administrators Assets Report form (LHKPN). Periodic reporting requirements, which are due once a year, may be fulfilled independently through the Electronic LHKPN (E-LHKPN) link at <https://elhkpn.kpk.go.id>.

Mandatory Officer of the LHKPN

The Company's mandatory LHKPN consists of the following:

1. HP workers at all levels of the organisation, including upper management, middle management, and basic management;
2. Procurement Planning and Implementation Officers.

Pelaporan Wajib LHKPN

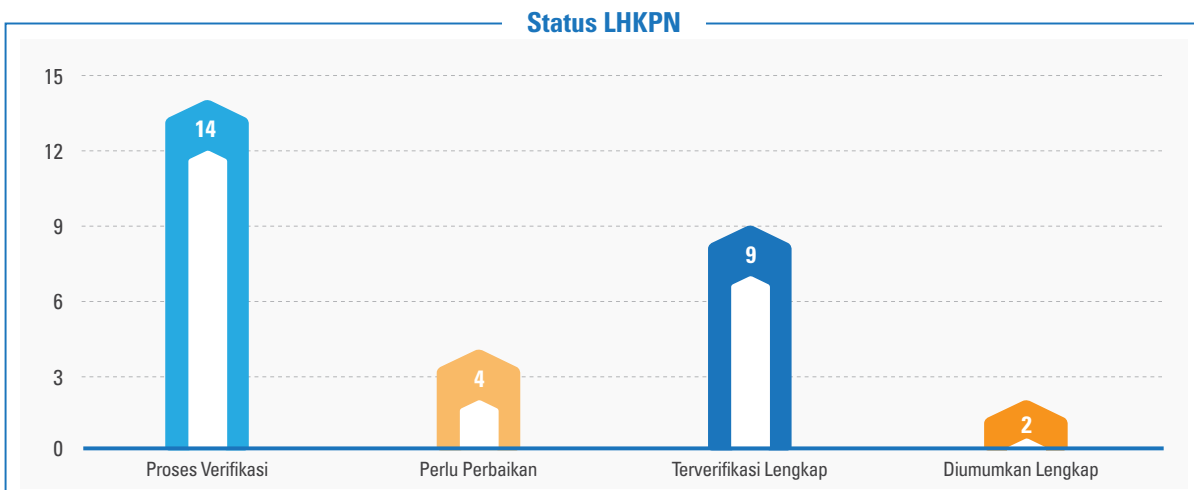
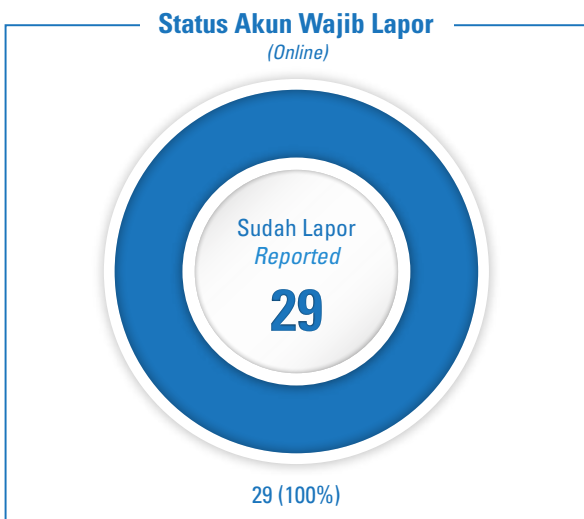
Pertanggal 26 Maret 2020, HP telah menyampaikan kewajiban pelaporan HKPN kepada Komisi Pemberantas Korupsi sejumlah 29 laporan. Sebagai salah satu upaya untuk mendukung program “HP Bersih” yang merupakan implementasi dari program “PLN Bersih” untuk mencegah terjadinya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme dan dapat meningkatkan budaya perusahaan yang sehat di lingkungan Perusahaan.

Dalam hal Wajib LHKPN tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, maka Wajib LHKPN dikenakan sanksi disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai dan Sistem Penilaian Kinerja (Unit/Organisasi) yang berlaku di lingkungan HP.

Mandatory Reporting for LHKPN

As of March 26, 2020, HP has filed 29 reports to the Corruption Eradication Commission regarding HKPN reporting requirements. As part of the Company's efforts to support the “HP Bersih” programme, which includes the execution of the “PLN Bersih” programme aimed at preventing acts of corruption, collusion, and nepotism and fostering a healthy corporate culture,

If the LHKPN Mandatory fails to report the LHKPN or fails to meet its other responsibilities under this Regulation, the LHKPN Mandatory is subject to employee disciplinary sanctions in accordance with the applicable Employee Discipline Regulations and Performance Assessment System (Unit/Organization) in the HP environment.





Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Policy on the Whistleblowing System

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu perusahaan.

The Complaints of Breaches Policy is a mechanism for reporting witnesses and conveying information about alleged violations inside a business.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Guidelines for the Whistleblowing System

Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) untuk mendukung implementasi GCG dan praktik bisnis yang bersih dan bertanggung jawab. WBS merupakan kebijakan untuk mengelola pelaporan/pengungkapan mengenai kejadian yang diduga berhubungan dengan tindakan kecurangan, kriminal, pelanggaran kebijakan Perusahaan dan pelanggaran Pedoman Perilaku.

The firm already has a whistleblower system (WBS) in place to assist with the adoption of GCG and other environmentally friendly and socially responsible business practises. WBS is a policy that governs the reporting and disclosure of events suspected of including fraud, criminality, breaches of Company rules, or violations of the Code of Conduct.

Perusahaan juga telah mengeluarkan Edaran Direksi PT Haleyora Power Nomor:0008.E/DIR-HP/2020 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Audit Investigasi di Lingkungan PT Haleyora Power tanggal 31 Agustus 2020.

Additionally, the business published a Circular of the Board of Directors of PT Haleyora Power No.0008.E/DIR-HP/2020 on August 31, 2020, about the Whistleblowing System and Investigation Audits inside PT Haleyora Power.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Mechanism for Whistleblowing System

Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Insan HP (Komisaris/Direksi/Pegawai) ditujukan kepada Sub Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai fungsi Pengelola WBS dan untuk pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh personil di fungsi pengelola WBS ditujukan kepada Direktur Utama.

Complaints about alleged violations committed by HP personnel (Commissioners/Directors/Employees) are directed to the Sub-Sector of Risk Management and Compliance in its capacity as the WBS Manager function, while complaints about alleged violations committed by WBS management personnel are directed to the President Director.

Seluruh pengaduan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal HP disampaikan secara tertulis/tidak tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

All complaints of breaches, both internal and external to HP, are filed in writing/orally via the following mechanism:

- ~ Telephone : +62 812 70000 219
- ~ SMS/WA : +62 812 70000 219
- ~ Website : www.halevoraopower.co.id
- ~ Email : wbs@halevorapower.co.id
- ~ Surat : Diantar langsung/melalui pos ke Perusahaan
Up: Sub Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan
PT Haleyora Power
Kindo Square, Blok A15-16
Jl. Duren Tiga Raya No. 101
Duren Tiga Jakarta Selatan, 12760

- ~ Telephone : +62 812 70000 219
- ~ SMS/WA : +62 812 70000 219
- ~ Website : www.halevoraopower.co.id
- ~ Email : wbs@halevorapower.co.id
- ~ Letter : Delivered directly/by post to the Company
Up: Sub Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Haleyora Power
Kindo Square, Blok A15-16
Jl. Duren Tiga Raya No. 101
Duren Tiga Jakarta Selatan, 12760

Dan bila Apabila terlapor adalah personil di fungsi pengelola WBS disampaikan melalui surat yang diantar langsung/melalui pos ke Perusahaan langsung ditujukan kepada Direktur Utama PT HP.

Should the reported individual be a member of the WBS management function, it is filed in writing to the Company's President Director directly addressed to the President Director of PT HP.

Jenis Pengaduan Pelanggaran

Types of Violation Complaints

Pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti antara lain:

- ~ Penyimpangan dari peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku;
- ~ Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar perusahaan;
- ~ Pemasaran;
- ~ Korupsi;
- ~ benturan kepentingan;
- ~ Gratifikasi.

Violations that may be pursued include the following:

- ~ *Inconsistencies between business policies and relevant rules and regulations;*
- ~ *Misuse of position for purposes other than those of the business;*
- ~ *Blackmail;*
- ~ *Corruption;*
- ~ *Conflict of Interest;*
- ~ *Gratification.*

Proses Penanganan Pengaduan

Process for Resolving Complaints

1. Tim Pengelola WBS melakukan verifikasi atas laporan yang masuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya. Hasil verifikasi dimuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
 2. Tim Investigasi melakukan proses investigasi atas pengaduan yang diterima dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Bila dipandang perlu, masa kerja ini dapat diperpanjang paling lama untuk 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya. Hasil Investigasi dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dan/atau Manajemen Puncak.
 3. Tim Kepatuhan Anti Penyuapan dan/atau Manajemen Puncak mempelajari laporan dan kesimpulan dari Tim Investigasi dan kemudian memberikan keputusan terkait keberlanjutan Pengaduan (proses dilanjutkan atau ditutup).
 4. Apabila terbukti adanya Pelanggaran oleh Terlapor maka Manajemen PT HP harus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
1. *Within 30 (thirty) working days after receipt, the WBS Management Team evaluates the incoming report, which may be extended for an additional 30 (thirty) working days. The Verification Result Minutes include the verification results.*
 2. *Within 30 (thirty) working days after receiving a complaint, the Investigation Team conducts an investigation. This working time may be extended for a maximum of 30 (thirty) working days if considered essential. The findings of the investigation are documented in the Minutes of the Investigation and communicated to the Anti-Bribery Compliance Function and/or to top management.*
 3. *The Anti-Bribery Compliance Team and/or Top Management review the Investigation Team's findings and conclusions and then make a decision about the Complaint's continuance (process continues or closes).*
 4. *If it is shown that the Reported Party committed a Violation, the Management of PT HP must take appropriate action in accordance with relevant laws and regulations.*



Pihak yang Mengelola Pengaduan

Management of Complaints

Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran (Pengelola WBS) adalah Fungsi Manajemen Risiko & Kepatuhan PT HP yang diberi kewenangan untuk menerima pengaduan/penyungkapan, memantau perkembangan tindak lanjut pelaporan pelanggaran serta melaksanakan pengelolaan administrasi terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di PT HP melalui berbagai media yang disediakan.

The Violation Reporting Administration Manager (WBS Manager) is PT HP's Risk & Compliance Management Function, and is allowed to accept complaints/disclosures, monitor the status of reported violations, and administer the Violation Reporting System at PT HP through different media supplied.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Protection of Whistleblowers

Sebagaimana tertuang dalam Edaran Direksi, Perusahaan berkewajiban untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan pelapor, terlapor, dan pihak-pihak yang terkait lainnya namun tidak terbatas pada perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, dan tindakan pembalasan lainnya. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor akan tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor, selama dalam tahap pemeriksaan dan investigasi dengan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor dan pihak terlibat lainnya.

As stated in the Board of Directors' Circular, the Company is required to protect and maintain the confidentiality of the reporter, the reported party, and other related parties. This obligation includes but is not limited to protection from pressure, deferment of promotion/position, dismissal, and other retaliatory actions. This protection is not limited to the reporter alone, but may be extended to members of the reporter's family throughout the inspection and investigation stages by ensuring the secrecy of the reported party's and other involved parties' identities.

Sosialisasi WBS

Socialization in the WBS

Pada tahun 2020, Perusahaan mengeluarkan Edaran Direksi PT Haleyora Power Nomor : 0008.E/DIR-HP/2020 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Audit Investigasi di Lingkungan PT Haleyora Power tanggal 31 Agustus 2020 sebagai bentuk penyebaran informasi terkait pelaporan pelanggaran di dalam lingkungan Perusahaan.

In 2020, the Company issued Circular of the Board of Directors of PT Haleyora Power Number: 0008.E/DIR-HP/2020 regarding the Whistleblowing System and Investigation Audits within PT Haleyora Power on August 31, 2020 as a means of disseminating information about reporting violations within PT Haleyora Power.

Maksud diberlakukannya Edaran ini adalah agar para pegawai mengerti dan memahami sistem penyelenggaraan WBS dan Audit Investigasi sehingga dapat memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh fungsi terkait sekaligus memberikan keamanan pelapor pelanggaran dan penerima laporan melalui jaminan kerahasiaan pelapor, yaitu penyediaan fasilitas perlindungan pelapor.

The purpose of enacting this Circular is to ensure that employees understand and understand the WBS system and Investigation Audit in order to provide certainty and confidence that submitted reports will be investigated by the appropriate functions, while also providing security for the whistleblower and the recipient of the report through guarantees of the reporter's confidentiality, namely

Apresiasi dan Sanksi terhadap Pelapor/Terlapor

Appreciation and Sanctions for the Whistleblower/Reported

Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelaporan pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/uang organisasi dapat diselamatkan dalam jumlah yang signifikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen.

The business may compensate the whistleblower for disclosing a proven breach in order to preserve large sums of the organization's assets/money in line with management's rules.

Sanksi juga diberikan kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku seperti:

Additionally, sanctions are imposed on the reporting person who is found to have breached the relevant laws and regulations, including the following:

1. Teguran Lisan dan/atau tertulis
2. Pengembalian/pembayaran atas kerugian perusahaan
3. Penundaan kenaikan jabatan
4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan/atau
5. Berdasarkan Peraturan Perusahaan.

1. *Verbal and/or written chastisement*
2. *Refunds/compensation for business losses*
3. *Promotional postponement*
4. *Employment Termination (PHK); and/or*
5. *In accordance with company regulations.*

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses Pada Tahun Buku Terakhir

Complaints Received and Processed in the Previous Fiscal Year

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelaporan yang masuk melalui jalur *whistleblowing system* PT Haleyora Power.

Throughout 2020 there were no reports that came through the PT Haleyora Power whistleblowing system.





Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi

Policy on Anti-Corruption and Gratification

Gratifikasi merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme dan integritas insan HP dalam melaksanakan tugas, sehingga akan berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karenanya Perusahaan telah menyusun pedoman terkait gratifikasi dan korupsi dalam Edaran Direksi PT Haleyora Power Nomor : 0008.E/DIR-HP/2020 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Audit Investigasi di Lingkungan PT Haleyora Power tanggal 31 Agustus 2020, yang telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk dipahami dan diterapkan dalam berkegiatan dalam lingkungan Perusahaan untuk membentuk kerjasama dan hubungan kerja baik antar karyawan maupun dengan mitra bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Gratification is a situation that may influence personal judgments and/or weaken the professionalism and integrity of HP employees in the execution of their responsibilities, which can have a negative impact on the company's long-term performance and reputation. As a result, the Company has compiled guidelines on gratification and corruption in the Circular of the Board of Directors of PT Haleyora Power Number: 0008.E/DIR-HP/2020 regarding the Whistleblowing System and Investigation Audit within PT Haleyora Power, dated August 31, 2020, which has been socialised to all employees to ensure that they are understood and applied in Company activities.

Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency of Improper Government Practices

Perusahaan menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola yang Baik (GCG) yang telah dibangun, karenanya Perusahaan tidak melakukan segala tindakan yang bertentangan dengan aturan serta kebijakan terkait GCG yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

The Company recognises that poor corporate governance practises would jeopardise the Good Governance (GCG) system that has been established, and therefore refrains from violating the GCG principles and regulations set out in the following table:

| No. | Keterangan Description | Praktik Practise |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Terdapat laporan atas kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan <i>There are reports on corporate actions that contribute to environmental pollution.</i> | Nihil <i>Null</i> |
| 2. | Tidak memenuhi kewajiban perpajakan <i>Not adhering to tax requirements</i> | Nihil <i>Null</i> |
| 3. | Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK) <i>Annual reports and financial statements are not presented in accordance with relevant laws and financial accounting standards (SAK)</i> | Nihil <i>Null</i> |
| 4. | Terdapat kasus terkait buruh dan karyawan <i>There are instances involving workers and employees.</i> | Nihil <i>Null</i> |



Melalui penerapan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berkualitas dan berkelanjutan akan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

It will contribute to the community's welfare by implementing a high-quality and sustainable Corporate Social Responsibility programme.



07

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Komitmen dan Kebijakan

Commitments and Policies

HP memiliki aktivitas operasi yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra dan bergerak dalam kegiatan pelayanan operasi dan pemeliharaan (*operation & maintenance/O&M*) jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan berpotensi memberikan dampak pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Respon masyarakat atas dampak dari kegiatan operasional Perusahaan akan dapat menimbulkan risiko terhadap aktivitas operasional Perusahaan dan menjadi salah satu kunci keberhasilan Perusahaan dalam mencapai keberlanjutan usaha jangka panjang. Oleh karenanya Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa membina hubungan yang baik dan saling memberi manfaat kepada para pemangku kepentingan dengan menunjukkan empati dan tanggung jawab terhadap kondisi sosial masyarakat, melalui penerapan program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*(CSR) yang berkualitas dan berkelanjutan dan berupaya berbagi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HP operates in several areas throughout Java and Sumatra and is responsible for the operation and maintenance (O&M) of electricity transmission and distribution networks that have the ability to affect the surrounding population and environment. The public's reaction to the Company's operational operations will pose a danger to those activities and will become critical to the Company's long-term commercial viability. As a result, the Company is dedicated to creating positive connections and mutual benefit for stakeholders by demonstrating empathy and responsibility for the community's socioeconomic circumstances. Through the execution of high-quality, long-term Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, the company aims to share advantages with the community in order to enhance its welfare.

Aktivitas program CSR HP mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

HP's CSR operations are governed by a variety of relevant laws and regulations, including the following:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Undang-Undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang RI No.19 tahun 2003 tentang BUMN
8. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9. Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas
10. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
12. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas
13. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14. Keputusan Menteri ESDM No.1824 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. *Law No.1 of 1970 concerning Occupational Safety*
2. *Law No.23 of 1992 concerning Health*
3. *Law No.5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*
4. *Law of the Republic of Indonesia No.8 of 1999 concerning Consumer Protection*
5. *Law No.39 of 1999 concerning Human Rights*
6. *Law No.20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption*
7. *Law of the Republic of Indonesia No.19 of 2003 concerning BUMN*
8. *Law No.13 of 2003 concerning Manpower*
9. *Law of the Republic of Indonesia No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies*
10. *Law No.32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management*
11. *Law No.13 of 2011 concerning Handling the Poor*
12. *Government Regulation No.47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies*
13. *Government Regulation No.50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management System*
14. *Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No.1824 K/30/MEM/2018 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Community Development and Empowerment*



- | | |
|--|--|
| <p>15. Peraturan Direksi No.0004.P/DPR-HP/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Perdir 0004.P/2017)</p> <p>16. Peraturan Direksi No.0135.P/DIR/2019 tentang <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT PLN (Persero)</p> <p>17. Peraturan Direksi No.0138.P/DIR/2019 tentang Pedoman CSR berbasis ISO 26000</p> | <p>15. <i>Board of Directors Regulation No.0004.P/DPR-HP/2017 dated October 2, 2017 concerning Guidelines for the Implementation of Corporate Social Responsibility (Perdir 0004.P/2017)</i></p> <p>16. <i>Board of Directors Regulation No.0135.P/DIR/2019 regarding the Standard Operational Procedure (SOP) for the Partnership and Community Development Program (PKBL) within PT PLN (Persero)</i></p> <p>17. <i>Board of Directors Regulation No.0138.P/DIR/2019 regarding CSR Guidelines based on ISO 26000</i></p> |
|--|--|

Haleyora Peduli

Haleyora Peduli

Sebagai perwujudan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan HP adalah dengan adanya program Haleyora Peduli yang dibentuk oleh Perusahaan sesuai dengan SK Direksi nomor 0004.P/DPR-HP/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Perdir 0004.P/2017). Haleyora peduli merupakan bentuk nyata dari pengembangan CSR HP yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama pada bantuan pelayanan Kesehatan, bantuan pengembangan UMKM dan Modal Usaha, bantuan pelayanan Pendidikan, bantuan pelestarian Lingkungan, dan bantuan Komunitas.

As an example of the company's commitment to corporate social responsibility, HP established the Haleyora Peduli programme in accordance with the Board of Directors' Decree 004.P/DPRHP/2017 dated October 2, 2017 on Guidelines for the Implementation of Corporate Social Responsibility Board of Director's Rgulations 0004.P/2017). Haleyora caring is a concrete manifestation of HP's CSR growth, with the goal of assisting the community, particularly in the areas of health services, support for establishing MSMEs and business capital, education services, environmental preservation, and community assistance.



HP membantu masyarakat dalam lima bidang tanggung jawab sosial sebagaimana dalam logo diatas, yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan
4. Lingkungan Hidup

HP contributes to the community in five areas of social responsibility, as shown by the emblem above:

1. Education
2. Health
3. Economic, Social, Cultural and Religious Consideration
4. Environment

Tujuan CSR HP

HP's CSR Objectives

Tujuan pelaksanaan program CSR Perusahaan adalah:

1. Meningkatkan Interaksi positif antara Perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak terkait.
2. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang berkelanjutan.
3. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

The Company's CSR programme has the following objectives:

1. *Increasing good contact amongst the Company, the community, local government, and associated parties.*
2. *Empowering the community to sustainably enhance the surrounding community's welfare.*
3. *Preserving equilibrium and environmental sustainability.*

Perusahaan berupaya agar kegiatan operasi Perusahaan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan setempat melalui *standard operation procedure* (SOP) kerja yang mencakup aspek keamanan dan keselamatan tenaga kerja, masyarakat maupun lingkungan. Bahkan Perusahaan berupaya untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan tidak hanya bagi masyarakat dan lingkungan tapi juga untuk para pemangku kepentingan lainnya.

The Company, on the other hand, tries to ensure that its activities do not have a detrimental effect on the local community or environment via standard operating procedures (SOPs) encompassing elements of worker safety and security, as well as community and environmental stewardship. Indeed, the Company seeks to have a good and lasting effect on the community and the environment, as well as on other stakeholders.

HP berusaha mengintegrasikan pengelolaan dampak tersebut ke dalam budaya Perusahaan dan sistem manajemen dengan melibatkan dan membangun kesadaran kepada setiap unsur yang ada di Perusahaan akan pentingnya pengelolaan dampak risiko dari aktivitas Perusahaan.

HP aims to incorporate risk management into the Company's culture and management system by engaging and educating all employees about the critical nature of risk management.

Stakeholder Penting yang Terdampak/Berdampak

Significant Stakeholders Impacted/Affected

Pengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan utama atau yang paling terdampak, Perusahaan menimbang berdasarkan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, aktif dan

After identifying the primary or most impacted stakeholder groups, the Company evaluates their mutual effect, both active and responsive, on the Company; for example, by evaluating the weight



responsif, antara kelompok-kelompok tersebut dengan Perusahaan; antara lain dengan menilai bobot pengaruh dan intensitas pelibatan pemangku kepentingan tersebut dalam setiap proses bisnis Perusahaan. Sesuai dengan bisnis HP sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang *Operation & Maintenance* pada jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan berikut adalah pemangku kepentingan yang terlibat yaitu:

of influence and the intensity of stakeholder engagement in each of the Company's business operations. The following parties are involved in HP's business as an operator and maintainer of energy transmission and distribution networks:

| No. | Pemangku Kepentingan Stakeholders |
|-----|---|
| 1. | PLN sebagai Pemegang Saham dan Konsumen <i>PLN as Shareholder and Consumer</i> |
| 2. | Unit PLN sebagai Pelanggan <i>PLN Unit as Customer</i> |
| 3. | Pelanggan <i>Customer</i> |
| 4. | Masyarakat <i>Community</i> |
| 5. | Pemerintah Daerah <i>Local Government</i> |
| 6. | Pegawai <i>Employee</i> |
| 7. | Pemasok <i>Supplier</i> |
| 8. | Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat <i>Associations and Non-Governmental Organizations</i> |
| 9. | Media |

Perusahaan kemudian menyusun program yang sesuai dengan para pemangku kepentingan. Hal itu sebagai upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan CSR yang lebih tepat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Following that, the business creates programmes that are appropriate for stakeholders. This is an attempt to develop and execute CSR initiatives and activities that are more suitable and beneficial.

Isu-Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Penting Terkait Kegiatan Perusahaan

Significant Social, Economic, and Environmental Issues Affecting the Company's Operations

Perusahaan telah memetakan beberapa isu penting yang terkait dengan aktivitas operasional Perusahaan dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan antara lain:

The Company has identified numerous critical problems relating to its operating operations in the social, economic, and environmental spheres, including the following:

| Aspek Aspects | Isu-Isu Penting Significant Issues |
|------------------------------|--|
| Hak Asasi Manusia | <ul style="list-style-type: none"> ~ Pemenuhan hak asasi terkait ketenagakerjaan ~ Pemenuhan hak adat masyarakat |
| <i>Human Rights</i> | <ul style="list-style-type: none"> ~ <i>Compliance with human rights obligations relating to employment</i> ~ <i>Observance of customary community rights</i> |
| Operasi yang Adil | <ul style="list-style-type: none"> ~ Mengindari konflik kepentingan ~ Persaingan sehat dan anti monopoli ~ Akses informasi dan ketentuan terkait proses pengadaan ~ Transparansi dan kewajaran dalam proses pengadaan |
| <i>Fair Operation</i> | <ul style="list-style-type: none"> ~ <i>Evade conflicts of interest</i> ~ <i>Fair competition and anti monopoly</i> ~ <i>Access to information and provisions related to the procurement process</i> ~ <i>Transparency and fairness in the procurement process</i> |
| Sosial Kemasyarakatan | <ul style="list-style-type: none"> ~ Ketersediaan listrik dan penerangan ~ Ketersediaan lapangan kerja ~ Bantuan pendidikan |
| <i>Social Community</i> | <ul style="list-style-type: none"> ~ <i>Access to power and lights</i> ~ <i>Opportunities for employment</i> ~ <i>Educational aid</i> |
| Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> ~ Pencemaran udara ~ Pencemaran air ~ Polusi suara ~ Pencemaran limbah domestik dan bahan berbahaya dan beracun (B3) |
| <i>Environment</i> | <ul style="list-style-type: none"> ~ <i>Air pollution</i> ~ <i>Water pollution</i> ~ <i>Noise pollution</i> ~ <i>Pollution of domestic waste and hazardous and toxic materials (B3)</i> |
| Ketenagakerjaan, Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> ~ Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ~ Hak-hak pegawai ~ Kesejahteraan pegawai ~ Kesehatan dan keselamatan kerja |
| <i>Employment, Health</i> | <ul style="list-style-type: none"> ~ <i>Compliance with applicable laws and regulations</i> ~ <i>Employee rights</i> ~ <i>Employee welfare</i> ~ <i>Occupational Health and Safety</i> |
| Produk dan Layanan | <ul style="list-style-type: none"> ~ Informasi layanan dan produk ~ Kualitas produk dan layanan ~ Kemudahan dalam memperoleh bantuan dan layanan |
| <i>Products and Services</i> | <ul style="list-style-type: none"> ~ <i>Service and product information</i> ~ <i>Quality of products and services</i> ~ <i>Ease of getting help and services</i> |



Lingkup Tanggung Jawab Sosial

Social Responsibility's Scope

Penerapan program CSR Perusahaan berpedoman kepada standar mutu ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*) yang memuat 7 (tujuh) aspek utama tanggung jawab sosial. ISO 26000 telah memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang pelaksanaan dan pengembangan CSR dalam sebuah organisasi dan telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

ISO 26000 merupakan pendekatan yang digunakan organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dengan membidik tujuh isu keberlanjutan secara holistik dan terintegrasi antara lain:

1. Tata Kelola Organisasi
2. Hak Asasi Manusia
3. Praktik Ketenagakerjaan
4. Lingkungan
5. Prosedur Operasi yang Wajar
6. Isu Konsumen
7. Perlibatan dan Pengembangan Komunitas/Masyarakat

The Company's CSR programme is governed by the ISO 26000 quality standard on Social Responsibility Guidance, which covers seven (seven) major facets of social responsibility. ISO 26000 defines globally relevant patterns and modules for implementing and developing CSR within an organisation. It was approved by the government in 2010 and became a National Standard (SNI) in 2012.

ISO 26000 is a framework for organizations and businesses to address social responsibility by focusing on seven comprehensive and integrated sustainability problems, including the following:

1. *Governance of Organizations*
2. *Rights of Man*
3. *Employment Norms*
4. *Environment*
5. *Procedures that are Reasonable*
6. *Consumer Concerns*
7. *Engagement and Development of the Community/Community*

Struktur Organisasi CSR

Organizational Structure of CSR

Pengelolaan program CSR Perusahaan dilaksanakan oleh *Corporate Secretary*, Komunikasi, Hukum dan Kinerja sesuai dengan Keputusan Direksi No.0012.P/DIR-HP/2018 tanggal 01 Agustus 2018, Peraturan Direksi tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT Haleyora Power Kantor Pusat.

The Corporate Secretary, Communication, Law, and Performance is responsible for managing the Company's CSR programme in accordance with the Board of Directors' Decree No.0012.P/DIR-HP/2018 dated August 1, 2018, Board of Directors Regulation on the Organizational Structure and Position Formation of PT Haleyora Power Head Office.

Target dan Rencana Program CSR 2020

2020 CSR Program Objectives and Plans

Perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan lain-lain melalui *Community Development* yang dirancang dengan seksama. Melalui keterlibatan seluruh

Through carefully planned Community Development, the business seeks to maximise reciprocal connections with the surrounding community and to collaborate with diverse stakeholders such as the government, non-governmental organisations, and mass groups. It is anticipated that through including all stakeholders,

pemangku kepentingan itu, diharapkan agar program yang dilaksanakan tepat guna dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat serta membuat masyarakat sekitar turut terlibat menjadi pelaku program.

Sebagai upaya *stakeholders engagement* untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* dan *shareholder*, HP telah menyusun strategi dan program kerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disetujui oleh *Shareholder*.

the programme would be successful, touch all facets of community life, and engage the surrounding community as programme actors.

As part of its stakeholder engagement efforts to create value for stakeholders and shareholders, HP has established a strategy and work programme that are included in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), which has been approved by shareholders.

Pembiayaan Kegiatan CSR HP

Financing HP's CSR Activities

Sebagai mana diamanatkan dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 74 ayat (1), anggaran untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial diperhitungkan sebagai biaya non operasional perusahaan. Anggaran CSR disusun berdasarkan usulan dari setiap Unit Kerja ke *Corporate Secretary*, Komunikasi, Hukum dan Kinerja, yang kemudian diusulkan ke Bidang Keuangan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

As required by Article 74 paragraph (1) of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies, the budget for social responsibility programmes is assessed as non-operational expenses of the business. The CSR budget is developed based on recommendations from each Work Unit to the Corporate Secretary, Communication, Legal, and Performance, and is then submitted to the Finance Division for inclusion in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for approval by the Annual General Meeting of Shareholders (GMS).

Anggaran khusus untuk pelaksanaan program CSR yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

A dedicated budget for the execution of CSR initiatives, the size of which is determined by the following factors:

1. Inisiatif perusahaan berdasarkan hasil pemetaan sosial masyarakat;
2. Permintaan masyarakat/komunitas;
3. Kesesuaian dengan program Pemerintah;
4. Kondisi tanggap darurat/bencana alam.

1. *Company efforts based on community social mapping findings;*
2. *Community/community demands;*
3. *Government programme compliance; and*
4. *Emergency/natural disaster response circumstances.*

Pada tahun 2020, anggaran untuk pelaksanaan CSR HP adalah sebesar Rp300.000.000 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp76.380.000.

The budget for CSR implementation for HP is Rp300,000,000 in 2020, up from Rp76,380,000.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Social Responsibility in Human Rights

Komitmen dan Kebijakan

Commitments and Policies

Komitmen Perusahaan dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya juga mengatur beberapa hal terkait HAM, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

The Company's commitment to human rights is governed by applicable laws and regulations, including Law No.39 of 1999 concerning Human Rights, Law No.40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, and Law No.13 of 2003 concerning Manpower, which also regulates several human rights-related issues, most notably employment-related issues.

Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial Terkait HAM

The Purpose of Social Responsibility in Relation to Human Rights

Ruang lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan mengemukakan pendapat, pengaturan waktu kerja, praktik kerja paksa, tenaga kerja di bawah umur, kesetaraan *gender* dan kesempatan untuk menjalankan ibadah.

Corporate social responsibility in relation to human rights include the prevention of discrimination, freedom of speech, work schedules, forced labour practises, child labour, gender equality, and the right to exercise religion.

Perusahaan menghormati standar HAM yang diakui secara internasional. Oleh karena itu Perusahaan fokus pada isu-isu penting seperti:

Internationally recognised human rights norms are adhered to by the business. As a result, the Company places a premium on critical concerns, such as:

1. Menghormati HAM di tempat kerja bagi pegawai dan tenaga kerja Perusahaan.
 2. Menangani potensi dampak dari operasi Perusahaan pada masyarakat setempat.
 3. Memastikan bahwa keamanan pegawai/tenaga kerja dan aset Perusahaan dikelola dengan cara yang bertanggung jawab.
1. *Respecting for human rights in the workplace for both workers and contractors.*
 2. *Considering the Company's activities' possible effect on the local community.*
 3. *Ensuring that employee/labour safety and Company assets are handled responsibly.*

Pelaksanaan Kegiatan

Implementation of the Activity

Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Perusahaan memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sesuai dengan Peraturan Direksi No.0001.P/DIR-HP/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit. Forum Bipartit diharapkan dapat memfasilitasi dan menjembatani kesenjangan komunikasi antara Perusahaan/manajemen dan pegawai dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Liberation of Expression

The business has established a Bipartite Cooperation Institution (LKS) in line with Board of Directors Regulation No.0001.P/DIR-HP/2018 of April 17, 2018 on the Establishment of a Bipartite Cooperation Institution. The Bipartite Forum is intended to facilitate and bridge communication gaps between the Company/management and workers when it comes to settling labour disputes.

Pegawai dapat mengemukakan usulan kepada manajemen dan manajemen Perusahaan dapat memberikan umpan balik yang tepat kepada pegawai. Dengan terciptanya hubungan baik antara pegawai dan manajemen diharapkan masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi terbaik untuk kepentingan bersama Perusahaan.

Employees may provide ideas to management, and management can give employees with appropriate feedback. By fostering positive relationships between workers and management, it is anticipated that each party may contribute optimally to the Company's shared interest.

Tenaga Kerja di Bawah Umur

Perusahaan memiliki aturan dalam penerimaan pegawai salah satunya adalah ketentuan mengenai usia pelamar/ calon pegawai yang minimal berusia 18 tahun atau telah menamatkan jenjang pendidikan minimal SMU. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di Perusahaan.

Unauthorised Work

The business has regulations surrounding employee recruitment, one of which is a requirement that applicants/prospective workers be at least 18 years of age or have finished their school level at least high school. Thus, it is possible to guarantee that no underage employees are employed by the Company.

Cuti Haid dan Melahirkan

Didalam Peraturan Perusahaan PT Haleyora Power tanggal 24 Maret 2018 pasal 28 dan 29 dicantumkan hal-hal yang terkait dengan cuti melahirkan dan cuti haid bagi pegawai sebagai berikut:

Pasal 28

1. Istirahat melahirkan anak adalah hari-hari istirahat Pegawai wanita yang diberikan 1 1/2 (satu setengah) bulan sebelum dan 1 1/2 (satu setengah) bulan sesudah bersalin/melahirkan anak.
2. Selama menjalankan istirahat melahirkan, upah Pegawai tetap dibayarkan.
3. Pegawai wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak mendapat istirahat 1 1/2 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang merawatnya.
4. Istirahat sebelum dan/atau sesudah melahirkan anak atau keguguran kandungan dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 29

1. Sesuai pasal 81 ayat 1 dan (2) UU NO.13 Tahun 2003 :
2. Pegawai wanita yang sedang dalam masa haid merasakan sakit atas haidnya dan memberitahukan kepada perusahaan, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan tetap mendapat upah.
3. Apabila dalam masa haidnya tidak menimbulkan rasa sakit, wajib masuk bekerja seperti biasa.

Articles 28 and 29 of the PT Haleyora Power Company Regulation dated March 24, 2018 say the following about maternity leave and menstruation leave for employees:

28th article

1. *Childbearing rest days are days off for female workers provided 1 1/2 (one and a half) months before to and 1 1/2 (one and a half) months after childbirth/childbirth.*
2. *The employee's pay are continued throughout the maternity leave.*
3. *Female workers who miscarry are entitled to one and a half (one and a half) months of leave, or as determined by the obstetrician or midwife who treats them.*
4. *Rest periods before to and/or after childbirth or miscarriage may be prolonged with a doctor's or midwife's certificate.*

29 Article

1. *In accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 81 of Law No.13 of 2003*
2. *If female workers experiencing menstrual discomfort inform the business, they are not required to report to work on the first and second days of menstruation while still getting pay.*
3. *If menstruation is not painful, it is mandatory to report to work as normal.*



Cuti Beribadah

Perusahaan menghormati hak pegawai untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan serta keimanan masing-masing dengan memberi kesempatan untuk melakukan ibadah haji sebagaimana diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 dan PP No.78 Tahun 2015.

Leave of Worship

The business respects workers' rights to worship according to their various faiths and beliefs, as well as their faith, by offering chances for pilgrimage as defined in Law No.13 of 2003 and Presidential Proclamation No.78 of 2015.

Cuti Lainnya

Pegawai dapat diberikan ijin untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat upah untuk keperluan sebagai berikut:

Other Vacancies

Permission may be granted to employees to quit work while still earning pay for the following reasons:

- | | |
|--|---|
| 1. Perkawinan Pegawai yang bersangkutan <i>The employee's marriage</i> | : 3 hari kerja <i>3 working days</i> |
| 2. Perkawinan anak sah Pegawai <i>Legal child marriage of an employee</i> | : 2 hari kerja <i>2 working days</i> |
| 3. Istri sah Pegawai melahirkan/keguguran <i>Birth or miscarriage of the employee's lawful wife</i> | : 2 hari kerja <i>2 working days</i> |
| 4. Khitanan/pembaptisan anak sah Pegawai <i>Legitimate children circumcised/baptised for employees</i> | : 2 hari kerja <i>2 working days</i> |
| 5. Kematian orang tua/mertua, istri/suami, anak/menantu Pegawai <i>The demise of parents/in-laws, spouse/husband, and children/son-in-law for employees</i> | : 2 hari kerja <i>2 working days</i> |
| 6. Kematian saudara kandung orang tua/mertua, saudara kandung istri/Suami <i>Death of siblings/in-laws of the parents, wife's/siblings: husband's</i> | : 1 hari kerja <i>1 working days</i> |
| 7. Rusaknya rumah/tempat tinggal Pegawai karena bencana alam <i>Damage to the employee's home/residence as a result of a natural disaster</i> | : 3 hari kerja <i>3 working days</i> |
| 8. Mengikuti ujian pendidikan yang lamanya paling sedikit 4 hari <i>Take a minimum of four days of educational testing</i> | : 1 hari kerja <i>1 working days</i> |
| 9. Kematian anggota keluarga dalam satu rumah <i>The death of a family member in a single household</i> | : 1 hari kerja <i>1 working days</i> |

Dampak dan Pencapaian

Impact and Accomplishments

Perusahaan berusaha untuk menghindari situasi berisiko pelanggaran HAM di lingkungan kerja. Pemenuhan hak pegawai dan tenaga kerja tercermin dari Rencana Kerja Divisi HCM. Sedangkan untuk memenuhi hak-hak pelanggan, Perusahaan menetapkan target peningkatan aspek kualitas layanan berdasarkan hasil *Service Level Agreement (SLA)*.

The business makes every effort to prevent circumstances that may result in human rights breaches in the workplace. The HCM Division's Work Plan reflects the Division's commitment to ensuring the fulfilment of employees' and workers' rights. Meanwhile, in order to uphold customer rights, the Company establishes a goal for increasing service quality elements based on the Service Level Agreement's outcomes (SLA).

Tanggung Jawab Sosial Bidang Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Corporate Social Responsibility for Ethical Business Activities

Komitmen, Kebijakan dan Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Commitment, Policy, and Scope of Social Responsibility Formulation Regarding Fair Operation

Perusahaan berkomitmen untuk melakukan kegiatan operasional sesuai dengan regulasi maupun praktik bisnis terbaik yang berlaku di industri. Di antaranya, terkait dengan transparansi dan praktik jujur dalam transaksi bisnis. Komitmen Perusahaan mengacu pada sejumlah regulasi yang ada, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih.

The Company is dedicated to doing business in compliance with relevant laws and best business practises. Among other things, it is concerned with openness and ethical corporate operations. The Company's commitment is based on a number of current laws, including Law No.5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No.0060.K/DIR/2014 on Clean PLN Guidelines.

Pelaksanaan dan Capaian Kegiatan

Execution and Completion of Activities

Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil dan mengacu pada tata nilai dan budaya perusahaan, antara Lain:

1. Program Anti Korupsi/Gratifikasi/*Fraud*
2. Proses Pengadaan yang Transparan dan Wajar

The firm fulfils societal obligations associated with ethical business practises and adheres to corporate principles and culture, which include the following:

1. *Program Against Corruption/Gratification/Fraud*
2. *A Procurement Process That Is Transparent and Fair*

Perusahaan memiliki kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan anti korupsi serta sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud* di lingkungan Perusahaan. Pelaksanaan kebijakan terkait hal tersebut diatas dilakukan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait korupsi, gratifikasi dan pelanggaran etika bisnis lainnya.

To combat fraud inside the Company, the Company has a gratification control and anti-corruption policy in place, as well as a reporting mechanism. The following rules are implemented through socializing and distributing information about corruption, gratuities, and other corporate ethical breaches.

Selain itu Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai dalam pemberian remunerasi secara seimbang dan wajar sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Penempatan pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan sesuai dengan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi pegawai.

Additionally, the Company offers equitable chances for workers by paying them a balanced and fair wage commensurate with their duties and responsibilities. Employee placement is decided in line with the Company's needs and in accordance with the position and workforce formation that have been established in accordance with the compatibility of the job's competence criteria and employee competencies.



Sebagai anak perusahaan PLN, HP tetap melakukan persaingan usaha secara sehat dengan menerapkan strategi bersaing yang fokus pada kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan Perusahaan.

HP, as a subsidiary of PLN, continues to engage in healthy business rivalry by focusing on customer satisfaction with the Company's goods and services.

Dalam hal mitra bisnis, Perusahaan juga senantiasa melakukan lelang terbuka dalam pengadaan yang disampaikan secara transparan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil terhadap seluruh mitra.

In terms of business partners, the Company also always conducts transparent open auctions for procurement. This is to provide equal opportunity and treatment for all partners.

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Operasi yang Adil

Procedures and Mechanisms for Complaints Regarding Fair Operation Violations

Terkait adanya pelanggaran terhadap prinsip operasi yang adil yang dilakukan oleh Perusahaan maupun pegawai Perusahaan, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan pelaporan dengan menggunakan saluran *whistleblowing system* yang dikelola Perusahaan. Setiap laporan yang masuk akan terlebih dahulu diverifikasi untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Perusahaan.

Concerning the Company's and its employees' violations of the fair operation principle, all stakeholders may make a complaint via the Company's whistleblowing system channel. Each incoming report will be verified and then followed up according to the Company's authorities.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Social Responsibility in the Environmental Conservation Industry

Komitmen dan Kebijakan

Commitments and Policies

HP berkomitmen bahwa pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dibidang lingkungan hidup merupakan investasi bagi perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

HP is dedicated to implementing a Corporate Social Responsibility programme in the environmental sector as an investment in advancing sustainable development.

Dasar kebijakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial HP terhadap lingkungan mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0004.P/DIR-HP/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkungan PT Haleyora Power pengelolaan CSR di HP.

The policy behind HP's environmental social responsibility programme is Board of Directors Regulation No.0004.P/DIR-HP/2017 dated October 2, 2017 on Guidelines for the Implementation of Corporate Social Responsibility in PT Haleyora Power's Environment for CSR management at HP.

Pelaksanaan dan Capaian Kegiatan

Execution and Completion of Activities

Secara tidak langsung Perusahaan memberi dampak lingkungan dan sosial yang baik. Untuk mengelola dampak tersebut, aspek lingkungan dan kepatuhan dipantau secara berkala sebagai bagian dari pengendalian risiko. HP berupaya untuk mengelola dampak lingkungan yang langsung timbul dari aktivitas kantor pusat yaitu penggunaan energi, air, dan kertas. Tujuan akhir pengelolaan lingkungan operasional adalah untuk mencegah pencemaran dan efisiensi sumber daya alam.

Indirectly, the Company has a positive effect on the environment and society. To mitigate these consequences, environmental and compliance issues are reviewed on a regular basis as part of risk management. HP is committed to minimising the direct environmental effects of its head office operations, namely the use of electricity, water, and paper. Operational environmental management's ultimate aim is to avoid pollution and maximise the efficiency of natural resources.

HP melakukan upaya penghematan energi dalam kegiatan operasional sehari-hari dengan menggunakan peralatan hemat energi berupa lampu jenis LED dan AC Inverter di kantor. Selain itu upaya penghematan penggunaan air baik yang bersumber dari tanah maupun PDAM juga dilakukan dengan himbauan kepada para pegawai untuk mematikan keran ketika selesai penggunaannya, mengganti keran-keran yang rusak dan memperbaiki saluran air bersih yang bocor.

HP makes an attempt to save energy in its everyday operations by using energy-efficient technology such as LED lighting and AC inverters in the workplace. Additionally, efforts to save water are made on land and in PDAM by reminding workers to turn off faucets when done using them, replace broken faucets, and fix leaking clean water lines.

Penggunaan energi listrik dan sumber daya air pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan adanya penerapan peraturan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah terkait pandemi COVID-19. Khusus untuk penggunaan listrik di kantor pusat hingga akhir tahun 2020 adalah sebanyak 5.577 Kwh.

Electricity and water use have dropped in 2020 as a result of the government's imposition of limitations on activities linked to the COVID-19 epidemic. Specifically, the amount of energy used at the corporate headquarters till the end of 2020 is 5,577 Kwh.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Responsibility in Labor, Health, and Safety

Perusahaan berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang taat asas dan taat aturan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja dengan mengacu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

The business is dedicated to adhering to principles and regulations, including those governing employment, occupational health, and safety, in accordance with Manpower Law No.13 of 2003.

Bidang Ketenagakerjaan

Employment Sector

Lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman menjadi perhatian HP terkait tanggung jawab terhadap tenaga kerja. Program tanggung jawab kepada tenaga kerja yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

HP is committed to providing a healthy, safe, and pleasant work environment as part of its social responsibility to its employees. The following are the workforce responsibility initiatives being implemented during 2020:

Pengembangan Kualitas dan Kompetensi SDM

Pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan kompetensi dilakukan untuk seluruh pegawai Perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan. Sebagaimana telah diatur oleh divisi HC, Perusahaan memastikan bahwa setiap pegawai memperoleh hak yang sama untuk mengikuti program pendidikan dan pengembangan kompetensi dalam rangka untuk menunjang pengembangan karirnya.

HR Quality and Competency Development

The Company implements education and competency development programmes for all workers, taking into consideration the Company's requirements. As required by the HC division, the Company guarantees that all employees have equal access to education and competence development programmes that promote career growth.

Pada tahun 2020, HP menyelenggarakan 17 (tujuh belas) program pendidikan dan pengembangan kompetensi, baik diselenggarakan secara in house maupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Program tersebut diikuti oleh 453 peserta dengan anggaran biaya sebesar Rp6.809.654.034.

HP conducted 17 (seventeen) education and competence development programmes in 2020, both internally and via third parties. The programme drew the attendance of 453 with a budget of Rp6.809.654.034.

Kesempatan Kerja yang Sama dan Kesetaraan Gender

HP memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan agama, ras/etnik, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pegawai. Pada tahun 2020, jumlah pegawai HP adalah sebanyak 134 orang, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 96 sedangkan pegawai perempuan sebanyak 38 orang. Meskipun demikian Perusahaan tidak membedakan fasilitas dan benefit yang diberikan bagi seluruh pegawai.

Equal Employment Chances and Gender Equality

HP offers equal employment opportunities to all applicants, men and women alike, regardless of religion, race/ethnic origin, gender, or physical condition. In 2020, HP will employ 134 individuals, with a workforce that is still heavily dominated by male workers by 96; whereas female workers account for approximately 38. However, the Company provides equal access to facilities and perks to all workers.

Hubungan Industrial

Sebagaimana telah dijelaskan di awal pembahasan bahwa Perusahaan memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sesuai dengan Peraturan Direksi No.0001.P/DIR-HP/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit. HP menjunjung tinggi hak pegawai untuk berserikat dalam hubungan industrial antara pegawai dengan Perusahaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara keduanya.

Forum Bipartit diharapkan dapat memfasilitasi dan menjembatani kesenjangan komunikasi antara Perusahaan/manajemen dan pegawai dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Remunerasi Pegawai

Perusahaan senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan memberlakukan sistem remunerasi yang kompetitif dengan mempertimbangkan tingkat pengupahan pada industri sejenis, undang-undang ketenagakerjaan, peraturan upah minimum provinsi (UMP) serta kemampuan keuangan Perusahaan. Kompensasi dan benefit yang diberikan kepada pegawai akan berpengaruh terhadap produktivitas kinerja serta tingkat perputaran pegawai. Dengan senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai, diharapkan dapat menjalin hubungan saling membutuhkan sehingga terjadi keterikatan antara pegawai dan Perusahaan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.

Remunerasi bagi pegawai organik Perusahaan terdiri dari kompensasi (P1, P2 dan P3) dan manfaat pegawai (tunjangan-tunjangan, asuransi, dan lainnya) sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Jabatan
3. Tunjangan Kinerja
4. Bonus/Insentif
5. Tunjangan Hari Raya (THR)
6. Tunjangan Cuti Tahunan
7. Tunjangan Cuti Besar
8. Iuran Pemberi Kerja

Industrial Relations

As stated at the outset of the debate, the Company has a Bipartite Cooperation Institution (LKS) in line with Board of Directors Regulation No.0001.P/DIR-HP/2018 dated April 17, 2018 on the Establishment of a Bipartite Cooperation Institution. HP supports the right of workers to associate in order to foster a healthy relationship between the two.

The Bipartite Forum is intended to facilitate and bridge communication gaps between the Company/management and workers when it comes to settling labour disputes.

Employee Compensation

The Company has always prioritised employee welfare by adopting a competitive remuneration structure that takes into consideration comparable industry salaries, labour laws, provincial minimum wage rules (UMP), and the Company's financial capability. Compensation and perks given to workers have an impact on their productivity and performance, as well as their turnover rate. By constantly putting the welfare of workers first, it is anticipated that the Company would be able to create a connection of mutual benefit, resulting in an attachment between employees and the Company that works in synergy to accomplish the same objective.

Compensation (P1, P2, and P3) and employee benefits (allowances, insurance, and others) for the Company's organic workers are as follows:

1. Salary Minimum
2. Allowance for Position
3. Allowance for Performance
4. Bonuses/Incentives
5. Allowance for Holidays (THR)
6. Allowance for Annual Leave
7. Allowance for Extended Leave
8. Contribution by the employer



9. Penghargaan Kesetiaan Kerja (Winduan)
10. Pemeliharaan Kesehatan
11. Asuransi Pegawai
12. Pakaian Dinas
13. Bantuan Fasilitas Perumahan
14. Perjalanan Dinas Mutasi Jabatan

9. Award for Work Loyalty (8 years)
10. Maintaining Good Health
11. Employee Benefits
12. Official Clothes
13. Assistance with Housing
14. Official Travel Position Transfer

Turn Over Pegawai

Employee Turnover

Tingkat perputaran pegawai juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Pada tahun 2020, *turn over* pegawai HP adalah 0%. Perusahaan menerima 25 pegawai baru dan tidak tercatat adanya pegawai yang keluar. Perputaran pegawai yang terjadi hanya mutasi antar perusahaan PLN Grup dan pegawai tunas karya. Hal ini mencerminkan tingkat kepuasan pegawai terhadap pekerjaan dan Perusahaan sangat baik.

The employee turnover rate is also a reflection of the company's culture and work system, which may serve as a barometer of the company's performance in establishing a suitable work environment.

HP's staff turnover will be 0% in 2020. The business hired 25 new workers and terminated none. Employee churn happens as a result of changes between PLN Group businesses and workers seeking employment opportunities. This indicates an extremely high degree of employee satisfaction with their job and the Company.

Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Safety and Health at Work (OHS)

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pegawai/tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Salah satu bentuk komitmen HP akan pentingnya K3 diwujudkan dengan adanya Program SEMATA (Semangat Selamat Menuju Zero Accident). Program SEMATA ditujukan bagi seluruh insan Haleyora Power agar dapat memahami pentingnya aspek kesehatan dan keselamatan dalam bekerja sehingga terbentuk perilaku disiplin dalam melaksanakan prosedur kerja dan menyadari potensi bahaya yang dihadapinya karena jenis pekerjaan mereka memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

The company is committed to protecting employees/labor from work-related accidents and occupational diseases in accordance with Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1996 on the Occupational Health and Safety Management System, as amended by Government Regulation No. 50 of 2012 on the Occupational Health and Safety Management System (SMK3).

The SEMATA Program is one way in which HP demonstrates their commitment to the critical nature of K3 (Spirit of Congratulations to Zero Accident). The SEMATA program is designed to educate all Haleyora Power employees on the importance of health and safety at work and to foster disciplined behavior in the workplace.

Roadmap K3

Roadmap for OHS

Perusahaan telah menyusun *roadmap* K3 2017-2021 sebagai berikut:

The following is the company's 2017-2021 OHS roadmap:

Dimensi Proses / Process Dimension

- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Perdir SIQ • Penetapan Siaga 1 K3 • Organisasi K3 Region & Area • Standarisasi Probis K3 dengan SWP • Sertifikasi SMK3 • Sertifikasi TK • Direktori Kompetensi TK | <ul style="list-style-type: none"> • <i>SIQ Perdir Determination</i> • <i>Determination of K3 Alert 1</i> • <i>K3 Region & Area Organization</i> • <i>Standardization of Probis of K3 with SWP</i> • <i>SMK3 Certification</i> • <i>TK Certification</i> • <i>TK Competency Directory</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Perdir SIQ • Standarisasi Kebijakan 5S • Pemantapan SIQ dan siaga 1 K3 • Benchmark K3 • Pengukuran Matlev • Akademi Yantek • Paspur Kompetensi • Online Training K3 • Implementasi Aplikasi K3NO1LA • SWP Online • Unit Unggulan K3 • Sertifikasi SMK3 • Sertifikasi TK | <ul style="list-style-type: none"> • <i>SIQ Perdir Implementation</i> • <i>5S Standardization policy</i> • <i>alert 1 of K3 SIQ and 5S Stabilization</i> • <i>Benchmark of K3</i> • <i>Matlev measurement</i> • <i>Yantek Academy</i> • <i>Competency passport</i> • <i>Online Training of K3</i> • <i>K3NO1LA Application Implementation</i> • <i>SWP Online</i> • <i>Featured Unit of K3</i> • <i>SMK3 Certification</i> • <i>TK Certification</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan SIQ dan SS • Siaga 1 K3 • Pengukuran MatLev K3 dan 5S • Akademi Yantek • Paspur Kompetensi • Online Training K3 • Implementasi Aplikasi K3NO1LA • Unit Unggulan K3 • Sertifikasi SMK3 • Sertifikasi TK |
|---|--|--|---|---|

2017

2018

- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zero Accident 15 Area • SMK3 3 Region • Sertifikasi Kompetensi TK 92% | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zero Accident of 15 Area</i> • <i>SMK3 of 3 Region</i> • <i>Competency Certificasin of TK 92%</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SIQ 10 Area • Zero Accident 20 Area • SMK3 3 Region • Matlev K3 Nilai 3 • Implementasi K3NO1LA 5 Area • Paspur Kompetensi 10% pegawai • Serifikasi Kompetensi TK 95% • Peserta Online Training 50% • Akademi Yantek 5 Unit • Best K3 Unit | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Implementation of SIQ 10 Area</i> • <i>Zero Accident of 20 Area</i> • <i>SMK3 3 Region</i> • <i>Matlev K3 with Value 3</i> • <i>K3NO1LA 5 Area Implementaion</i> • <i>Competency passport of 10% employess</i> • <i>TK 95% of Competency Certification</i> • <i>50% Online Training Participation</i> • <i>Yantek Academy of 5 Unit</i> • <i>Best K3 for 1 Unit</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SIQ 20 Area • Zero Accodent 25 Area • SMK3 3 Area Khusus • Matlev K3 Nilai 3,5 : 5S Nilai 3 • Implementasi K3NO1LA15 Area • Paport Kompetensi 25% pegawai • Sertifikasi Kompetensi TK 95% • Peserta Online Tarining 100% • Akademy Yantek 10 Unit • Best K3 3 Unit |
|---|--|---|---|--|

Dimensi Hasil / Result Dimension



- SIQ and 5S Stabilization
- Alert 1 of K3
- MatLev K3 and 5S measurements
- Yantek Academy
- Competency passport
- Online Training K3
- K3NO1LA Application Implementation
- Featured Unit of K3
- SMK3 Certification
- TK Certification

- Budaya SIQ dan 5S
- Siaga 1 K3
- Pengukuran Matlev K3 dan 5S
- Akademi Yantek
- Paspor Kompetensi
- Online Training K3
- Implementasi Aplikasi K3NO1LA
- K3 Award
- Sertifikasi SMK3
- Sertifikasi TK

- SIQ and 5S Culture
- Alert 1 of K3
- Matlev K3 and 5S measurements
- Yantek Academy
- Competency passport
- Online Training of K3
- K3NO1LA Application Implementation
- Award of K3
- SMK3 Certification
- TK Certification

- Budaya SIQ dan 5S
- Siaga 1 K3
- Pengukuran Matlev K3 dan 5S
- Akademi Yantek
- Paspor Kompetensi
- Online Training K3
- Implementasi Aplikasi K3NO1LA
- K3 Award
- Sertifikasi SMK3
- Sertifikasi TK

- SIQ and 5S Culture
- Alert 1 of K3
- Matlev K3 and 5S measurements
- Yantek Academy
- Competency passport
- Online Training of K3
- K3NO1LA Application Implementation
- Award of K3
- SMK3 Certification
- TK Certification

2019

2020

2021

- Implementation of SIQ 20 Area
- Zero Accident of 25 Area
- SMK3 3 of Special Area
- Matlev K3 Value 2.5:5S Value 3
- K3NO1LA Area Implementation
- 25% Competency Passport for employees
- TK 95% Competency Certification
- 100% Online Training Participation
- Yantek Academy of 10 Units
- Best K3 for 3 Units

- Implementasi SIQ 30 Area
- Zero Accident 30 Area
- SMK3 10 Area
- Matlev K3 Nilai 4:5S Nilai 3,5
- Implementasi K3NO1LA 25 Area
- Paspor Kompetensi 50% pegawai
- Sertifikasi Kompetensi TK 95%
- Peserta Online Training 100%

- Implementation of SIQ 30 Area
- Zero Accident of 30 Area
- SMK3 10 Area
- Matlev K3 Value 4:5S Value 3.5
- K3NO1LA 25 Area Implementation
- 50% Competency Passport for employees
- TK 95% Competency Certification
- 100% Online Training Participation
- Yantek Academy of 15 Units
- Best K3 for 5 Units

- Implementasi SIQ Seluruh Unit
- Zero Accident Seluruh Area
- SMK3 20 Area
- Matlev K3 Nilai 4,5:5S Nilai 4
- Implementasi K3NO1LA Seluruh Area
- Paspor Kompetensi 75% pegawai
- Sertifikasi Kompetensi TK 95%
- Peserta Online Training 100%
- Akademi Yantek 20 Unit
- K3 Award 1 Unit

- Implementasi SIQ Seluruh Unit
- Zero Accident Seluruh Area
- SMK3 20 Area
- Matlev K3 Nilai 4,5:5S Nilai 4
- Implementasi K3NO1LA Seluruh Area
- Paspor Kompetensi 75% pegawai
- Sertifikasi Kompetensi TK 95%
- Peserta Online Training 100%
- Akademi Yantek 20 Unit
- K3 Award 1 Unit

- Akademi Yantek 15 Unit
- Best K3 5 Unit
- Program semesta di launching pada tanggal 17 Agustus 2020 program tersebut terdiri dari :
 1. Paspor Kompetensi ,
 2. K3 Defender (inspeksi & penerapan safety Integrity & Quality) &
 3. E-Learning.

- The program was only launched on August 17, 2020, the program consists of:
 1. Competency Passport,
 2. K3 Defender (inspection & implementation of safety Integrity & Quality) &
 3. E-Learning.

Roadmap K3 menjabarkan elemen-elemen terukur yang harus dipenuhi Perusahaan dalam aspek K3 sehingga pada tahun 2021 Perusahaan telah memenuhi kriteria *operational excellence* sebagai *asset operator* mitra strategis PLN dan menjadi *trendsetter* di industri O&M jaringan ketenagalistrikan.

The OHS Roadmap specifies the quantifiable components that the Company must achieve in the OHS area by 2021 in order to satisfy the operational excellence requirements as an asset operator for PLN's strategic partner and to establish itself as a market leader in the electricity grid O&M sector.

Pedoman K3: *Safety, Integrity, Quality*

Mengingat pentingnya K3 dalam lingkungan kerja Perusahaan, Direksi mengeluarkan Peraturan Direksi No.014.P/DIR-HP/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pedoman K3: *Safety, Integrity, Quality* di Lingkungan PT Haleyora Power.

Pedoman K3 merupakan acuan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Perusahaan, yaitu:

- ~ *Safety*
Perusahaan memastikan tercapainya nihil kecelakaan dalam seluruh lingkup pekerjaan.
- ~ *Integrity*
Perusahaan memastikan integritas setiap tenaga kerja dan organ perusahaan dengan melaksanakan kegiatan yang mengedepankan integritas perilaku, integritas penyampaian data dan proses bisnis yang senantiasa berdasarkan tata kelola terbaik.
- ~ *Quality*
Perusahaan memastikan pengelolaan proyek berbasis *work service resource management* dan menjamin tercapainya kualitas pekerjaan berdasarkan proses bisnis yang *excellent* berbasis teknologi informasi sehingga Perusahaan menjadi *trend setter* dan *quality setter*.

Dalam implementasinya, *Safety, Integrity, Quality* dijabarkan dalam 8 program K3, yaitu:

1. *Operation & compliance audit;*
2. *Technical risk management;*
3. *Work procedure management;*
4. *Equipment management;*
5. *Integrity management;*
6. *Communication management;*
7. *Staff management;*
8. *Emergency preparedness.*

OHS Guidelines: Safety, Integrity, Quality

Due to the critical nature of K3 in the Company's work environment, the Board of Directors issued Board of Directors Regulation No. 14.P/DIR-HP/2017 on August 29, 2017 pertaining to the OHS Guidelines: Safety, Integrity, and Quality in the PT Haleyora Power Environment.

The OHS Guidelines serve as a reference for achieving the Business's strategic goals, specifically:

- ~ *Safety*
The company strives to achieve zero incidents throughout its full scope of activity.
- ~ *Integrity*
The Company maintains the integrity of each person and organizational unit by doing activities that emphasise behavioural integrity, data integrity, and business processes that are always governed by best practises.
- ~ *Quality*
The Company guarantees project management based on work service resource management and the accomplishment of high-quality work via the use of outstanding business processes and information technology, enabling the Company to become a trend setter and a quality setter.

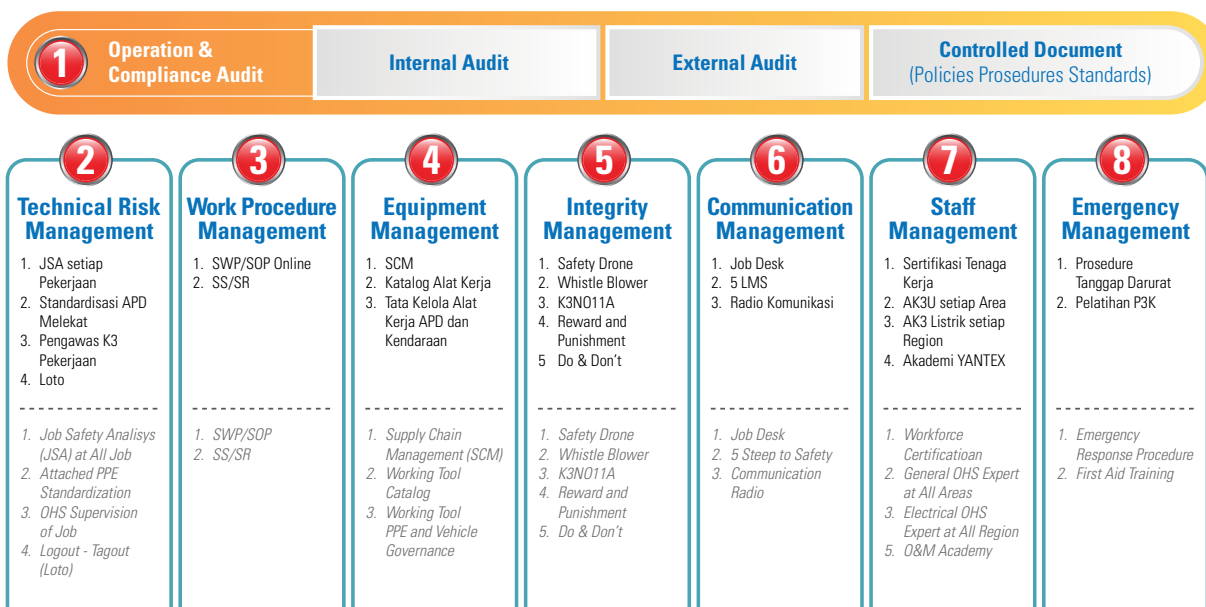
Safety, Integrity, and Quality are defined in eight K3 programmes, namely:

1. *Operation & compliance audit;*
2. *Technical risk management;*
3. *Work procedure management;*
4. *Equipment management;*
5. *Integrity management;*
6. *Communication management;*
7. *Staff management;*
8. *Emergency preparedness.*



8 Program Safety, Integrity, and Quality

Understanding hazards and creating awareness (Instalation, People, Process, Technology, Recovery)



Kegiatan K3 Activities for OHS

HP berupaya agar budaya K3 benar-benar terimplementasi dalam sikap dan tindak-tanduk seluruh personel Haleyora Power Group, dalam rangka meningkatkan budaya K3 serta kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, Perusahaan melakukan beberapa kegiatan K3 antara lain:

HP is committed to ensuring that the OHS culture is genuinely embodied in the attitudes and behaviours of all Haleyora Power Group employees. To enhance its OHS culture and compliance with labour laws, the Company engages in a variety of OSH initiatives, including the following:

Kampanye K3

Setiap pegawai diharapkan untuk menjalankan program "5 Langkah Menuju Selamat" untuk menjaga keselamatan dan kesehatan diri pegawai di lingkungan kerja. LMS adalah prosedur standar yang harus dilaksanakan setiap individu terutama yang bekerja pada instalasi bertegangan (*online service*). Pelanggar prosedur 5LMS akan mendapat sanksi disiplin pegawai dan hak-haknya untuk mendapat perlindungan asuransi atas risiko kecelakaan menjadi gugur.

OHS Campaign

Each employee is required to follow the "5 Steps to Safety" programme to ensure employee safety and health in the workplace. LMS is a standard process that all individuals, particularly those working on live installations, must follow (*online service*). Employees who violate the 5LMS process may face disciplinary action and will lose their rights to insurance protection against the risk of accidents.

5 Langkah Menuju Selamat
Steps to Congratulations

Apakah saya secara fisik sehat untuk melakukan pekerjaan ini?
Am I physically fit to do this job?

Apakah saya mengerti resiko yang akan terjadi saat melakukan pekerjaan ini?
Do I understand the risks involved in doing this job?

Sudahkan saya melakukan tindakan untuk mengurangi bahaya yang mungkin terjadi?
Have I taken action to reduce the possible harm?

Apakah saya memiliki dan mengenakan APD yang benar untuk pekerjaan ini?
Do I have and wear the correct PPE for this job?

Apakah saya memiliki peralatan yang benar untuk melakukan pekerjaan ini?
Do I have the right equipment to do this job?

JIKA JAWABAN ADA YANG "TIDAK" JANGAN MELAKUKAN PEKERJAAN INI!
If The Answer is "No"... Don't do This Work

Selalu Bedo'a Sebelum Beraktifitas

Sosialisasi Budaya K3

Selain itu Perusahaan juga melakukan sosialisasi "5 Tahapan Pekerjaan pada Jaringan Tegangan Menengah" (5TPJ). Dengan tingginya tingkat risiko kecelakaan kerja pada jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kV, pemahaman pegawai akan *Job Safety Analysis* (JSA) menjadi sangat penting terutama dalam mengamankan titik kerja dari bahaya listrik. Oleh karena itu, SOP yang berisi urutan kerja yang benar sangat dibutuhkan agar pelaksana terhindar dari kecelakaan kerja.

K3 Cultural Socialization

Additionally, the Company promoted the "5 Stages of Work on Medium Voltage Networks" (5TPJ). With a significant risk of work accidents on the medium voltage network (JTM) 20 kV, it is essential for employees to understand *Job Safety Analysis* (JSA), particularly when it comes to protecting work sites from electrical dangers. As a result, a standard operating procedure (SOP) providing the proper work sequence is required to ensure that the implementer avoids workplace accidents.



5 TAHAP PEKERJAAN PADA JTM

Stages of Work on Medium Voltage Network



HENTIKAN PEKERJAAN APABILA TIDAK AMAN
Stop Job if It is Potentially Dangerous!

- 1 **Koordinasi dengan PLN, pastikan tegangan sudah padam**
Coordination with PLN to ensure the voltage has been disconnected
- 2 **Cek tegangan dengan VOLTAGE DETECTOR**
Check the voltage using voltage detector
- 3 **Koordinasi dengan PLN, pastikan tegangan sudah padam**
Coordination with PLN to ensure the voltage has been disconnected
- 4 **Pasang GROUND CLUSTER pada jaringan di kedua sisi sebelum dan sesudah lokasi pekerjaan**
Install ground cluster on the both sides of network before and after the work location
- 5 **Lakukan pekerjaan dengan aman**
Do the job safety

Catatan/note :

- a. Pekerjaan nomor 2, 3 dan 4 dilakukan dengan menggunakan APD 20 KV
Work numbers 2, 3 dan 4 are carried out using PPE 20 KV
- b. Lakukan pemeriksaan kondisi tiang sebelum bekerja pada tiang tersebut
Check the condition of the pile before working on the pole



Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Pada tahun 2020, terdapat 11 kecelakaan yang terjadi di Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk semakin meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi yang berperan dalam menurunkan angka kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Work Accidents

Not only can workplace accidents result in fatalities and material losses for employees and employers, but they can also disrupt the entire production process, wreak havoc on the environment, and have a ripple effect on the broader community. In 2020, the Company had 11 accidents. The business is dedicated to expanding the use of an integrated Occupational Health and Safety Management System that contributes to the reduction of work-related accidents and illnesses.

Sistem Manajemen K3 OHS Management System

Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sesuai PP 50/2012 tersebut, HP yang bidang pekerjaannya memiliki potensi bahaya tinggi diwajibkan memenuhi 64 kriteria SMK3. Pemenuhan 64 kriteria tersebut diaudit oleh pihak eksternal, dalam hal ini PLN Jasa Sertifikasi (Pusertif).

Perusahaan telah membentuk tim setup untuk finalisasi proses sertifikasi SMK3 di 6 region yang bertugas untuk melakukan peninjauan awal sampai sejauh mana region bersangkutan telah menerapkan 64 kriteria sebagai tahap awal.

Hasil sertifikasi SMK3 dan kemajuan proses sertifikasi SMK3 hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The business has implemented an OHS Management System (SMK3) in accordance with Government Regulation No.50 of 2012 on the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems (K3). According to PP 50/2012, HP whose line of work involves a high risk of injury are needed to fulfil 64 requirements for SMK3. Compliance with these 64 criteria is verified by an independent third party, in this instance PLN Certification Services (Pusertif).

The Company has established a setup team to complete the SMK3 certification process in six areas, with the goal of performing an initial assessment of how far each region has implemented 64 criteria as a starting point.

The following table summarises the outcomes of the SMK3 certification and the status of the SMK3 certification procedure until the end of 2019:

| No. | Region | Nilai Audit Audit Score | Sertifikasi Certification | Tanggal Audit Date of Audit |
|-----|---|----------------------------|------------------------------|---|
| 1. | Region 1 Jawa Barat Region 1 West Java | 90.62 | Gold | |
| 2. | Region 2 Jawa Tengah Region 2 Central Java | 90.62 | Gold | 17-18 Januari 2018 January 17 - 18, 2018 |
| 3. | Region 3 Jawa Timur Region 3 East Java | 92.19 | Gold | |





Sertifikasi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Certification in Occupational Safety and Health

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan memiliki sertifikasi dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang masa berlakunya hingga akhir tahun 2021 sebagai berikut:

Until the end of 2020, the Company maintains the following certifications in the area of Occupational Health and Safety:



EFFICIENT
T OF TRANSFORMATION

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen dan Mitra Kerja

Social Responsibility of the Corporation in Relation to Responsibility to Consumers and Work Partners

Komitmen dan Kebijakan

Commitments and Policies

HP berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan secara bertanggung jawab bagi seluruh *stakeholders* yang bertujuan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan dan menjadikan pelanggan sebagai orientasi utama sebagaimana misi Perusahaan.

HP is dedicated to delivering goods and services responsibly to all stakeholders, with the primary objective of providing the best service possible to customers and making consumers the Company's primary focus.

Pelaksanaan dan Capaian Kegiatan

Execution and Completion of Activities

Salah satu bentuk tanggung jawab Perusahaan adalah dengan melakukan upaya-upaya untuk menjaga ketepatan produk atau layanan sebagaimana *service level agreement* (SLA) yang telah disepakati, dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan.

One aspect of the Company's duty is to make reasonable efforts to maintain the correctness of the product or service as specified in the service level agreement (SLA), while adhering to all relevant laws and regulations in order to satisfy stakeholder expectations.

Perusahaan turut mendukung perusahaan induk untuk merealisasikan pelayanan sistem distribusi yang andal dan berkualitas sesuai dengan standar layanan tertinggi, serta mendukung PLN dalam menerapkan sistem *revenue assurance* (REVASS) dan efisiensi jaringan distribusi tenaga listrik.

Additionally, the business assists the parent company in delivering dependable and quality distribution system services in compliance with the highest service standards, as well as assisting PLN in establishing a revenue assurance system (REVASS) and increasing the network's efficiency.

Perusahaan juga menginisiasi terbentuknya Komunitas Peduli Kelistrikan yang didukung oleh pemerintah daerah setempat hingga ke struktur RT/RW. Tujuan pembentukan komunitas adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga keselamatan komunitasnya terhadap bahaya listrik.

Furthermore, the business spearheaded the establishment of the Electricity Care Community, which is backed by the local government and adheres to the RT/RW framework. The goal of community formation is to promote community involvement in ensuring their areas are safe from electrical dangers.

ListriQu

Merupakan aplikasi Layanan Instalasi Listrik Pelanggan (ListriQu) yang diluncurkan HP pada tanggal 17 Februari 2019. Layanan ListriQu telah mencakup wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Surabaya. Di tahun 2020, ListriQu akan melayani UID Jawa Tengah dan DIY, UIW S2JB, UIW Sulselrabar, UIW MMU, UIW NTT, dan UID Bali untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh konsumen listrik.

ListriQu

HP released the Customer Electrical Installation Service (ListriQu) application on February 17, 2019. ListriQu's service area included DKI Jakarta, Banten, and Surabaya. By 2020, ListriQu will provide services to UID Central Java and DIY, UIW S2JB, UIW Sulselrabar, UIW MMU, UIW NTT, and UID Bali.

Penggunaan aplikasi ListriQu sangat mudah, dengan aplikasi yang tersedia di *mobile phone* pelanggan dapat meminta bantuan saat terjadi gangguan instalasi listrik di rumah. Petugas ListriQu akan datang untuk menangani gangguan pada instalasi pelanggan. Layanan ListriQu ini bergaransi mulai dari jasa hingga material yang digunakan.

Using the ListriQu application is simple; consumers may request assistance when they have an electrical installation issue at home. The Electricity Officer will respond to the customer's installation disturbance. From the service to the materials utilised, our ListriQu service is assured.



Program ListriQu memiliki kru yang telah tersertifikasi dengan transparansi harga juga memberikan kualitas terbaik, dan garansi pelayanan. Aplikasi ListriQu senantiasa di perbarui dan disempurnakan demi kepuasan pelanggan.

ListriQu's programme utilises a crew that has been approved for pricing transparency and also guarantees the highest level of quality and service. ElectricQu's application is constantly updated and improved to ensure client happiness.

Survei Kepuasan Pelanggan

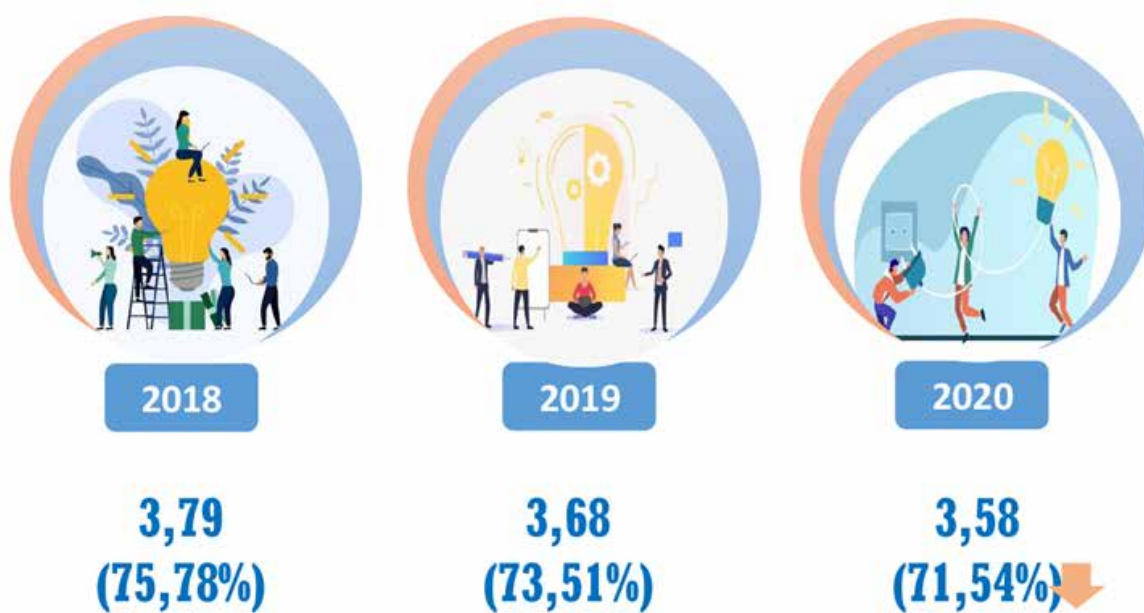
Survey of Customer Satisfaction

Perusahaan secara berkala mengadakan Survei Kepuasan Pelanggan untuk mengukur dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada pelanggan serta memperoleh umpan balik dari pelanggan dengan tujuan untuk perbaikan kualitas layanan dan kinerja.

The business performs a Customer Satisfaction Survey on a quarterly basis to assess and evaluate the services it provides to customers and to get input from them in order to improve service quality and performance.

Pada tahun 2020, Perusahaan bekerjasama dengan PPM Manajemen selaku konsultan untuk melakukan jasa riset dan konsultasi terkait survei kepuasan pelanggan PT Haleyora Power tahun 2020. Terdapat 4 (empat) dimensi layanan yang diukur tingkat kepuasan dan kepentingannya dalam kategori Pelanggan (PT PLN) antara lain: (1) Mutu Layanan & Layanan Secara Umum, (2) Harga, Biaya dan Keuangan, (3) Waktu, (4) Penanganan Keluhan. Berdasarkan hasil survei, persentase rata-rata persepsi Pelanggan terhadap keempat dimensi tersebut mencapai 3,58 (71,54%), turun 0,10 (1,97%).

In 2020, the Company partnered with PPM Management as a consultant to conduct research and advise on the PT Haleyora Power customer satisfaction survey. There are four (four) service dimensions that are quantified by the degree of satisfaction and significance in the Customer category (PT PLN), namely: (1) Service Quality & Service in General, (2) Price, Cost, and Finance, (3) Time, and (4) Complaint Handling. According to the survey findings, the average proportion of customers who see these four characteristics as important reached 3.58 (71.54%), a drop of 0.10 from the previous year (1.97%)



Penilaian kepuasan pelanggan pada dimensi periode 2020 dengan indeks rata-rata total 3,58 (71,54%) dengan indeks kepuasan tertinggi ada pada dimensi Mutu Layanan & Layanan Secara Umum (3,63), Harga Biaya & Keuangan (3,58), Penanganan Keluhan (3,55), dan Waktu (3,51).

Customer satisfaction in the 2020 period is 3.58 (71.54%), with the greatest satisfaction indexes in the aspects of Service Quality & Service in General (3.63), Cost & Finance Prices (3.58), Complaint Handling (3.55), and Time (3.51).

| No. | Aspek Pengukuran Measurement Aspect | Indeks Kepuasan Satisfaction Index | | % |
|-----|---|---------------------------------------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | |
| 1. | Mutu layanan dan Layanan secara Umum <i>Service Quality and Service in General</i> | 3.67 | 3.63 | 0.04 |
| 2. | Harga, Biaya, dan Keuangan <i>Price, Cost and Finance</i> | 3.65 | 3.58 | 0.07 |
| 3. | Waktu <i>Time</i> | 3.78 | 3.55 | 0.23 |
| 4. | Penanganan Keluhan <i>Handling of Complaints</i> | 3.61 | 3.51 | 0.1 |
| | Indeks Rata-Rata Kepuasan Pelanggan <i>Average Customer Satisfaction Index</i> | 3.68 | 3.58 | 0.1 |





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Masyarakat

Corporate Social Responsibility for Social and Community Development

Komitmen dan Kebijakan

Commitments and Policies

Perusahaan senantiasa berkomitmen dalam memperhatikan kondisi sosial/ekonomi masyarakat terutama ketika COVID-19 mewabah di Indonesia sehingga memberikan dampak melemahnya perekonomian bangsa. Perusahaan berupaya untuk ikut berperan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja melalui program-program tanggung jawab sosial di bidang sosial dan masyarakat.

The business is always dedicated to paying attention to the community's social/economic circumstances, much more so now that the COVID-19 epidemic in Indonesia has impacted the country's economy. Through social responsibility initiatives in the social and community sectors, the business seeks to contribute to efforts to raise people's living standards and increase job possibilities.

Pelaksanaan dan Capaian Kegiatan

Implementation and Execution of Initiatives

Pada tahun 2020 Perusahaan telah merencanakan untuk melakukan beberapa kegiatan terkait tanggung jawab Perusahaan dalam bidang sosial masyarakat antara lain:

1. Bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19
2. Memberikan santunan kepada anak yatim
3. Penyelenggaraan HUT Haleyora Power Ke-9 Santunan Anak Yatim
4. Haleyora Peduli Rumah Ibadah

In 2020, the Company intends to engage in a variety of activities linked to corporate social responsibility, including the following:

1. Assistance to COVID-19-affected communities
2. Compensating orphans
3. Organising the 9th Anniversary of Haleyora Power Compensation for Orphans
4. Haleyora Cares for Houses of Worship

Bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19

Di tengah pandemik dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan memperhatikan kondisi sosial/ekonomi masyarakat yang mulai berdampak akibat pembatasan aktivitas diluar rumah (Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB), sebagai salah satu tanggung jawab sosial, PT Haleyora Power turut berperan serta membantu warga kurang mampu yang terkena dampak COVID-19. Program kegiatan ini antara lain memberikan bantuan (berupa sembako atau/alat kesehatan, dll) kepada masyarakat atau/ pedagang di sekitar wilayah kerja PT Haleyora Power yang terdampak COVID-19.

Assistance to communities affected by COVID-19

In the midst of a pandemic, Haleyora provides assistance to communities affected by COVID-19 by preventing the spread of the virus and paying attention to the community's social/economic conditions, which are beginning to deteriorate due to restrictions on activities outside the home (Large-Scale Social Restrictions/PSBB), as one of its social responsibilities. This activity programme entails giving help (in the form of basic needs or/medical equipment, etc.) to the community or/traders in the region impacted by COVID-19 at PT Haleyora Power.

Kegiatan menghabiskan anggaran sebesar Rp53.976.210 dan bertujuan untuk :

1. Membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19
2. Meningkatkan semangat dan rasa saling berbagi kepada sesama
3. Meningkatkan kepekaan terhadap kondisi pandemic COVID-19

The activity is budgeted at Rp53,976,210 and seeks to accomplish the following:

1. Assisting those impacted by COVID-19
2. Increasing excitement and a feeling of communal responsibility
3. Increasing susceptibility to the COVID-19 epidemic



Kegiatan di kantor pusat
Activities at head office



Region 1 Jawa Barat
Region 1 West Java



Region 2 Jawa Tengah
Region 2 Central Java



Region 3 Jawa Timur
Region 3 East Java



*Region 4 Sumatra bagian Barat
Region 4 West Sumatra*



*Region 5 DKI Jakarta & Banten
Region 5 DKI Jakarta & Banten*



*Region 6 WRKR
Region 6 WRKR*



*Region 7 Sumatra bagian Barat
Region 7 West Sumatra*

Memberikan Santunan Kepada Anak Yatim

Kegiatan rutin *Corporate Social Responsibility - Safari Ramadhan* PT Haleyora Power tidak dapat dilakukan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PSBB, maka kegiatan CSR akan dialihkan dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Santunan anak yatim disalurkan melalui panti atau yayasan di seluruh wilayah kerja PT Haleyora Power.

Program kegiatan ini antara lain memberikan bantuan barang dan/atau uang tunai kepada panti/yayasan anak yatim sekitar wilayah kerja PT Haleyora Power dan menghabiskan anggaran sebesar Rp62.520.300 dan bertujuan untuk

1. Membantu anak yatim yang terkena dampak COVID-19
2. Meningkatkan semangat dan rasa saling berbagi kepada sesama
3. Meningkatkan kepekaan terhadap kondisi anak yatim



Kegiatan di kantor pusat
Activities at head office

Compensation for Orphans

Due to the COVID-19 epidemic and the introduction of PSBB, the regular operations of PT Haleyora Power's Corporate Social Responsibility - Ramadhan Safari will be diverted. Donations for orphans are given via orphanages and organisations located within PT Haleyora Power's operating region.

This activity programme, which will spend Rp62,520,300 on products and/or cash support to orphanages/orphanages in the PT Haleyora Power work area, will provide goods and/or cash help to orphanages/orphanages in the work area of PT Haleyora Power.

1. *Assisting orphans impacted by COVID-19*
2. *Increasing excitement and a feeling of communal responsibility*
3. *Increasing empathy to orphans' plight*



Region 1 Jawa Barat
Region 1 West Java



*Region 2 Jawa Tengah
Region 2 Central Java*



*Region 3 Jawa Timur
Region 3 East Java*



*Region 4 Sumatra bagian Barat
Region 4 West Sumatra*



*Region 5 DKI Jakarta & Banten
Region 5 DKI Jakarta & Banten*



Region 6 WRKR
Region 6 WRKR



Region 7 Sumatra bagian Barat
Region 7 West Sumatra

Penyelenggaraan HUT Haleyora Power Ke-9 Santunan Anak Yatim

Ulang Tahun Haleyora Power ke-9 dengan tema *Ma9nificent, Spirit of Transformation* ingin turut berbagi dengan sesama di seluruh wilayah kerja Haleyora Power, maka diadakan pemberian santunan di Haleyora Power Kantor Pusat, *Region 1* (Jawa Barat), *Region 2* (Jawa Tengah & DIY), *Region 3* (Jawa Timur), *Region 4* (Sumatra Barat), *Region 5* (DKI Jakarta & Banten), *Region 6* (WRKR) dan *Region 7* (Sumatra bagian Selatan) sebagai rangkaian HUT Haleyora Power pada bulan Oktober 2020. Santunan diberikan kepada Yayasan atau Panti Anak Yatim untuk turut membantu dan meringankan beban dikala pandemic COVID-19.

Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp90.000.000 dan bertujuan untuk :

1. Membantu anak yatim yang terkena dampak COVID-19
2. Meningkatkan semangat dan rasa saling berbagi kepada sesama
3. Meningkatkan kepekaan terhadap kondisi anak yatim
4. Memeriahkan HUT dengan berbagi kepada sesama

Organizing the 9th Anniversary of Haleyora Power Donations to Orphans

On the occasion of Haleyora Power's 9th birthday, with the theme Ma9nificent, Spirit of Transformation wishes to share with others throughout Haleyora Power's work areas, a donation was held at Haleyora Power's Head Office, Region 1 (West Java), Region 2 (Central Java & DIY), Region 3 (East Java), Region 4 (West Sumatra), and Region 5 (DKI Compensation paid to the Foundation or Orphanage in order to assist and alleviate the burden caused by the COVID-19 epidemic.

This activity, which has a budget of Rp90,000,000, seeks to accomplish the following:

1. *Assisting orphans impacted by COVID-19*
2. *Increasing excitement and a feeling of communal responsibility*
3. *Increasing sensitivity to orphans' plight*
4. *Commemorating the occasion by sharing it with others.*



Kegiatan di kantor pusat
Activities at head office

Mengunjungi Yayasan Rumah Cerdas Indonesia DA
dan Yayasan Dana Sosial Alfalah Jakarta.
*Visiting the Indonesian Smart Home Foundation DA
and Alfalah Jakarta Social Fund Foundation.*



Region 1 Jawa Barat
Region 1 West Java

Mengunjungi Yayasan Seruan Hati Nurani dan
Psaa Al-Amin
*Visiting the Call of Conscience Foundation and
Psaa Al-Amin*



Region 2 Jawa Tengah
Region 2 Central Java

Mengunjungi PSAA Al Yasiroh dan Panti Asuhan
Riyadlus Sholihin.
*Visiting PSAA Al Yasiroh and Riyadlus Sholihin
Orphanage.*



Region 3 Jawa Timur
Region 3 East Java

Mengunjungi Yayasan Cahaya Insani.
Visiting the Human Light Foundation.



*Region 4 Sumatra bagian Barat
Region 4 West Sumatra*

Mengunjungi Yayasan Sayyidah Adawiyah.
Visiting Sayyidah Adawiyah Foundation.



*Region 5 DKI Jakarta & Banten
Region 5 DKI Jakarta & Banten*

Mengunjungi PSAA Wisma Karya Bakti.
Visiting PSAA Wisma Karya Bakti.



*Region 6 WRKR
Region 6 WRKR*

Mengunjungi Panti Asuhan Al Akbar Maharatu dan Yayasan Arrahma Annisa.
Visiting Al Akbar Maharatu Orphanage and Arrahma Annisa Foundation.



*Region 7 Sumatra bagian Barat
Region 7 West Sumatra*



Haleyora Peduli Rumah Ibadah

Sehubungan dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya menasar pada Rumah Ibadah disekitar wilayah kerja PT Haleyora Power di kantor pusat maupun seluruh *Region*, dengan memberikan santunan berupa bantuan renovasi atau perlengkapan yang dibutuhkan oleh Rumah Ibadah agar menjadi lebih layak dan nyaman.

Program kegiatan ini antara lain memberikan bantuan sarana dan/ atau prasarana kepada Rumah Ibadah di sekitar wilayah kerja PT Haleyora Power dan menghabiskan anggaran sebesar Rp90.000.000 dengan tujuan antara lain:

1. Membantu sarana dan prasarana Rumah Ibadah agar lebih nyaman
2. Meningkatkan semangat dan rasa saling berbagi kepada sesama
3. Meningkatkan kepekaan terhadap Rumah Ibadah yang perlu dibantu
4. Meningkatkan rasa toleransi beragama

Haleyora Cares for Houses of Worship

As part of its social duty to the community, Haleyora Cares for Houses of Worship by giving compensation in the form of remodelling help or equipment required by the house of worship to make it more viable and pleasant.

This programme of activities includes giving facilities and/or infrastructural support to places of worship in the vicinity of PT Haleyora Power's operating region, with a budget of Rp90,000,000.

1. *Contributing to the comfort of the House of Worship's amenities and infrastructure*
2. *Increasing excitement and a feeling of communal responsibility*
3. *Enhancing awareness to places of worship in need of assistance*
4. *Increasing tolerance for religious diversity*



Kegiatan di kantor pusat
Activities at head office



*Region 1 Jawa Barat
Region 1 West Java*

*Masjid Al Ikhlas Baleendah Bandung.
Al Ikhlas Baleendah Mosque Bandung.*



*Region 2 Jawa Tengah
Region 2 Central Java*

*Masjid Nurul Amin Yogyakarta & Masjid Al Furqon Klaten.
Nurul Amin Mosque Yogyakarta & Al Furqon Mosque Klaten.*



Region 3 Jawa Timur
Region 3 East Java

Masjid Darussalam & GKI Sulung Bakal Bakal Jamaat Demak.
Darussalam Mosque & Eldest GKI Will Be Demak Jamaat.



Region 4 Sumatra bagian Barat
Region 4 West Sumatra

Masjid Al-Jadid Karang Ganting.
Al- Jadid Mosque Karang Ganting.



*Region 5 DKI Jakarta & Banten
Region 5 DKI Jakarta & Banten*

Masjid Mifta Hussudur.
Mifta Hussudur Mosque.



*Region 6 WRKR
Region 6 WRKR*

Mushola Syafa'at.
Syafa'at Mosque.



*Region 7 Sumatra bagian Barat
Region 7 West Sumatra*

*Mushola Asy-Syakur Palembang.
Asy-Syakur Mosque in Palembang.*





Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

**PT HALEYORA POWER
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2020/
*31 DECEMBER 2020***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

**THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama : Sinung Triwulandari
Alamat : Kindo Square Blok A 15-16
Jl. Duren Tiga Raya No. 101
Pancoran, Jakarta
Telepon : (021) 79192517
Jabatan : PLH Direktur Utama

1. Name : Sinung Triwulandari
Address : Kindo Square Blok A 15-16
Jl. Duren Tiga Raya No. 101
Pancoran, Jakarta
Telephone : (021) 79192517
Position : Acting President Director

2. Nama : Abdul Fatah Nasution
Alamat : Kindo Square Blok A 15-16
Jl. Duren Tiga Raya No. 101
Pancoran, Jakarta
Telepon : (021) 79192517
Jabatan : Direktur Keuangan & SDM

2. Name : Abdul Fatah Nasution
Address : Kindo Square Blok A 15-16
Jl. Duren Tiga Raya No. 101
Pancoran, Jakarta
Telephone : (021) 79192517
Position : Finance & HCM Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Haleyora Power dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Haleyora Power and subsidiary (the "Group");
2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Group's consolidated financial statements;
b. The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and
4. We are responsible for the Group's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi,

For and on behalf of the Board of Directors.



Sinung Triwulandari
PLH Direktur Utama/Acting President Director

Abdul Fatah Nasution
Direktur Keuangan & SDM/Finance & HCM Director

JAKARTA
25 Juni/June 2021



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT HALEYORA POWER

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Haleyora Power dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Haleyora Power and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2020, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Haleyora Power dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Haleyora Power and its subsidiary as at 31 December 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
25 Juni/June 2021

Daniel Kohar, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1130

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

| | <u>Catatan/ Notes</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ASET | | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan setara kas | 4 | 545,637 | 305,598 | Cash and cash equivalents |
| Kas yang dibatasi penggunaannya | 5 | 3,075 | 59,039 | Restricted cash |
| Piutang usaha | 6 | | | Trade receivables |
| - pihak berelasi | | 305,944 | 400,621 | related parties - |
| - pihak ketiga | | 344 | 335 | third parties - |
| Piutang non-usaha | | | | Non-trade receivables |
| - pihak berelasi | | 5,174 | 126 | related parties - |
| - pihak ketiga | | 3,411 | 4,339 | third parties - |
| Pajak dibayar dimuka, bagian lancar | 12a | | | Prepaid taxes, current portion |
| - pajak penghasilan badan | | - | 3,075 | corporate income tax - |
| - pajak lainnya | | 4 | 41,782 | other taxes - |
| Uang muka dan biaya dibayar dimuka | | <u>2,214</u> | <u>16,707</u> | Advances and prepaid expenses |
| Jumlah aset lancar | | <u>865,803</u> | <u>831,622</u> | Total current assets |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Aset tetap | 7 | 60,786 | 42,732 | Fixed assets |
| Aset hak-guna | 8a | 100,253 | - | Right-of-use assets |
| Aset tak berwujud | | 1,842 | 694 | Intangible assets |
| Investasi pada entitas asosiasi | 9 | 49,808 | 48,889 | Investment in associate |
| Pajak dibayar dimuka, bagian tidak lancar | 12a | | | Prepaid taxes, non-current portion |
| - pajak penghasilan badan | | 28,816 | - | corporate income tax - |
| - pajak lainnya | | 63,993 | - | other taxes - |
| Aset pajak tangguhan | 12d | 36,105 | 41,442 | Deferred tax assets |
| Aset tidak lancar lain | | <u>889</u> | <u>1,604</u> | Other non-current assets |
| Jumlah aset tidak lancar | | <u>342,492</u> | <u>135,361</u> | Total non-current assets |
| JUMLAH ASET | | <u>1,208,295</u> | <u>966,983</u> | TOTAL ASSETS |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

| | <u>Catatan/ Notes</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Utang usaha | | | | Trade payables |
| - pihak berelasi | | 654 | 420 | related parties - |
| - pihak ketiga | | 34,215 | 28,126 | third parties - |
| Utang lain-lain | | | | Other payables |
| - pihak berelasi | | 3,094 | 1,604 | related parties - |
| - pihak ketiga | | 15,814 | 1,381 | third parties - |
| Biaya masih harus dibayar | 10 | 72,754 | 55,347 | Accrued expenses |
| Liabilitas sewa, jangka pendek | 8b | 49,005 | - | Lease liabilities, current portion |
| Utang pajak | 12b | | | Taxes payable |
| - pajak penghasilan badan | | - | 7,068 | corporate income tax - |
| - pajak lainnya | | 2,835 | 3,717 | other taxes - |
| Liabilitas imbalan pascakerja, jangka pendek | 11 | <u>26,873</u> | <u>-</u> | Post-employment benefit liabilities, current portion |
| Jumlah liabilitas jangka pendek | | <u>205,244</u> | <u>97,663</u> | Total current liabilities |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Liabilitas sewa, jangka panjang | 8b | 37,632 | - | Lease liabilities, non-current portion |
| Liabilitas imbalan pascakerja, jangka panjang | 11 | <u>130,671</u> | <u>161,925</u> | Post-employment benefit liabilities, non-current portion |
| Jumlah liabilitas jangka panjang | | <u>168,303</u> | <u>161,925</u> | Total non-current liabilities |
| JUMLAH LIABILITAS | | <u>373,547</u> | <u>259,588</u> | TOTAL LIABILITIES |
| EKUITAS | | | | EQUITY |
| Modal saham: | 13 | | | Share capital: |
| Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham | | 100,000 | 100,000 | Authorised, issued and fully paid 100,000 shares at par value Rp1,000,000 (full amount) per share |
| Tambahan modal disetor | | 315 | 315 | Additional paid-in capital |
| Saldo laba | | 644,858 | 539,919 | Retained earnings |
| Penghasilan komprehensif lain | | <u>71,258</u> | <u>50,759</u> | Other comprehensive income |
| | | <u>816,431</u> | <u>690,993</u> | |
| Kepentingan non-pengendali | | <u>18,317</u> | <u>16,402</u> | Non-controlling interests |
| JUMLAH EKUITAS | | <u>834,748</u> | <u>707,395</u> | TOTAL EQUITY |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | | <u>1,208,295</u> | <u>966,983</u> | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah)

| | Catatan/ Notes | 2020 | 2019 | |
|---|-------------------|----------------|----------------|--|
| Pendapatan | 14 | 2,767,679 | 2,513,910 | Revenue |
| Beban pokok pendapatan | 15 | (2,558,205) | (2,225,980) | Cost of revenue |
| LABA BRUTO | | 209,474 | 287,930 | GROSS PROFIT |
| Beban umum dan administrasi | 16 | (66,802) | (58,753) | General and administrative expenses |
| Penghasilan keuangan | | 7,924 | 9,141 | Finance income |
| Bagian laba bersih entitas asosiasi | 9 | 5,956 | 6,717 | Share of profit in associate |
| Beban keuangan | | (8,365) | (76) | Finance expenses |
| Penghasilan/(beban) lain-lain, bersih | | 3,991 | (39) | Other income/(expenses), net |
| LABA SEBELUM PAJAK | | 152,178 | 244,920 | PROFIT BEFORE TAX |
| Beban pajak penghasilan | 12c | (44,983) | (65,598) | Income tax expense |
| LABA TAHUN BERJALAN | | 107,195 | 179,322 | PROFIT FOR THE YEAR |
| Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan: | | | | Other comprehensive income/(loss) for the year: |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | Items that will not be reclassified to profit or loss: |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 11 | 26,281 | (8,103) | Remeasurement of employee benefit liabilities |
| Pajak penghasilan terkait | 12d | (5,782) | 2,026 | Related income tax |
| Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan | | 20,499 | (6,077) | Other comprehensive income/(loss) for the year |
| JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN | | 127,694 | 173,245 | TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | | | | Income for the year attributable to: |
| Pemilik entitas induk | | 104,939 | 177,350 | Owners of the parent entity |
| Kepentingan non-pengendali | | 2,256 | 1,972 | Non-controlling interests |
| | | 107,195 | 179,322 | |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada: | | | | Total comprehensive income for the year attributable to: |
| Pemilik entitas induk | | 125,438 | 171,273 | Owners of the parent entity |
| Kepentingan non-pengendali | | 2,256 | 1,972 | Non-controlling interests |
| | | 127,694 | 173,245 | |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah)

| | Modal saham/ <u>Share capital</u> | Tambahan modal disetor/ <u>Additional paid-in capital</u> | Saldo laba/ <u>Retained earnings</u> | Penghasilan komprehensif lain/ <u>Other comprehensive income</u> | Jumlah/Total | Kepentingan non-pengendali/ <u>Non-controlling interests</u> | Jumlah ekuitas/ <u>Total equity</u> | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|----------------|--|--|---|
| Saldo per 1 Januari 2019 | 100,000 | 315 | 431,908 | 56,836 | 589,059 | 24,251 | 613,310 | Balance as at 1 January 2019 |
| Dividen | - | - | (69,339) | - | (69,339) | - | (69,339) | Dividend |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | - | 177,350 | (6,077) | 171,273 | 1,972 | 173,245 | Total comprehensive income for the year |
| Dividen kepada kepentingan non-pengendali | - | - | - | - | - | (994) | (994) | Dividend to non-controlling interests |
| Penambahan penyertaan modal kepentingan non-pengendali | - | - | - | - | - | (8,827) | (8,827) | Capital addition from non- controlling interests |
| Saldo per 31 Desember 2019 | 100,000 | 315 | 539,919 | 50,759 | 690,993 | 16,402 | 707,395 | Balance as at 31 December 2019 |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | - | 104,939 | 20,499 | 125,438 | 2,256 | 127,694 | Total comprehensive income for the year |
| Dividen kepada kepentingan non-pengendali | - | - | - | - | - | (341) | (341) | Dividend to non-controlling interests |
| Saldo per 31 Desember 2020 | 100,000 | 315 | 644,858 | 71,258 | 816,431 | 18,317 | 834,748 | Balance as at 31 December 2020 |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah)

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|---|------------------------|------------------------|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan dari pelanggan | 2,862,347 | 2,341,358 | <i>Receipts from customers</i> |
| Pembayaran kepada pemasok dan karyawan | (2,505,320) | (2,263,037) | <i>Payments to suppliers and employees</i> |
| Penerimaan penghasilan keuangan | 7,924 | 9,141 | <i>Receipts of finance income</i> |
| Pembayaran beban keuangan | (8,365) | (76) | <i>Payments of finance expenses</i> |
| Penerimaan pengembalian pajak | - | 5,191 | <i>Receipts of tax refunds</i> |
| Pembayaran pajak penghasilan | (81,836) | (68,179) | <i>Payments of income taxes</i> |
| Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | <u>274,750</u> | <u>24,398</u> | Net cash provided by operating activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES |
| Pembelian aset tetap | (38,775) | (24,275) | <i>Acquisitions of fixed assets</i> |
| Pembelian aset tak berwujud | (1,092) | (745) | <i>Acquisitions of intangible assets</i> |
| Penerimaan/(penempatan) kas yang dibatasi penggunaannya | 55,964 | (3,470) | <i>Receipt of/(placement in) restricted cash</i> |
| Penerimaan dividen entitas asosiasi | 1,800 | 5,305 | <i>Dividend receipts from associate</i> |
| Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi | <u>17,897</u> | <u>(23,185)</u> | Net cash provided by/ (used in) investing activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES |
| Pembayaran kembali liabilitas sewa | (52,267) | - | <i>Payments of lease liabilities</i> |
| Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk | - | (69,339) | <i>Dividend paid to the owners of the parent Company</i> |
| Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali | (341) | (994) | <i>Dividend paid to non-controlling interests</i> |
| Perolehan modal dari kepentingan non-pengendali | - | (8,827) | <i>Proceeds from non-controlling interests</i> |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | <u>(52,608)</u> | <u>(79,160)</u> | Net cash used in financing activities |
| KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 240,039 | (77,947) | NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | <u>305,598</u> | <u>383,545</u> | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | <u>545,637</u> | <u>305,598</u> | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR |

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Haleyora Power ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 18 Oktober 2011 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-51226.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 20 November 2012, Tambahan No.72182.

Akta Notaris Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 23 tanggal 11 Desember 2020 dari Muhammad Hanafi S.H., mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-AH.01.03-0418676 tanggal 14 Desember 2020.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan adalah menyelenggarakan dalam bidang industri, perdagangan, pembangunan dan jasa serta melaksanakan penugasan dari pemegang saham mayoritas dalam rangka menunjang/mendukung kegiatan usaha pemegang saham dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kepatutan etika bisnis pada perseroan terbatas.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"). Perusahaan berdomisili di Jakarta dan beralamat di Kindo Square Blok A 15 - 16, Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Pancoran, Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Karyawan proyek | 23,361 | 21,909 |
| Karyawan non-proyek | 190 | 248 |
| Karyawan tugas karya dari entitas anak | 9,556 | 8,576 |
| Karyawan tugas karya dari PLN | <u>38</u> | <u>28</u> |
| | <u><u>33,145</u></u> | <u><u>30,761</u></u> |

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Haleyora Power (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 36 dated 18 October 2011 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-51226.AH.01.01.Year 2011 dated 21 October 2011 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 93 dated 20 November 2012, Supplement No.72182.

The Company's Notarial Deed have been amended several times, recently by Notarial Deed No. 23 dated 11 December 2020 of Muhammad Hanafi, S.H., related to changes of composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors, which has been approved by Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0418676 dated 14 December 2020.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the business activity of the Company is in the industrial sector, trading, development and services and also to perform the duties of the majority shareholders in order to support the shareholder's business activity by applying the principles of Good Corporate Governance and appropriate business ethics in a limited liability company.

The Company's parent entity is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"). The Company is domiciled in Jakarta and located at Kindo Square Blok A 15 – 16 Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Pancoran, Jakarta.

As at 31 December 2020 and 2019, the total number of employees of the Company and subsidiary was as follows (unaudited):

Project employees
Non-project employees
Employees seconded
from subsidiary
Employees seconded from PLN

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Lain-lain

b. Others

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2020 and 2019 was as follows:

| | <u>2020</u> | | <u>2019</u> | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Presiden Komisaris | Bima Putrajaya | | Fahmi El Amruzi D. | <i>President Commissioner</i> |
| Komisaris | Purnama Tioria Sianturi | | - | <i>Commissioner</i> |
| Pelaksana Tugas ("PLT") Komisaris | - | | Karyawan Aji | <i>Acting as Commissioner</i> |
| PLT Komisaris | - | | Purnama Tioria Sianturi | <i>Acting as Commissioner</i> |
| Direktur Utama | Purnomo | | Achmad Taufik Haji | <i>President Director</i> |
| Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia | Abdul Fatah Nasution | | Sutrisno Samad | <i>Director of Finance and Human Resources</i> |
| Direktur Operasi | Sinung Triwulandari | | - | <i>Director of Operation</i> |
| PLT Direktur Operasi | - | | Sinung Triwulandari | <i>Acting as Director of Operation</i> |

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2020 and 2019 was as follows:

| | <u>2020</u> | | <u>2019</u> | |
|---------|--------------------------|--|---------------------|-----------------|
| Ketua | Purnama Tioria Sianturi | | Fahmi El Amruzi D. | <i>Chairman</i> |
| Anggota | I Ketut Gede Agus Sutopo | | Purnama T. Sianturi | <i>Member</i> |
| Anggota | Didik S. Yuwono | | Didik S. Yuwono | <i>Member</i> |

c. Entitas anak

c. Subsidiary

| Entitas anak/ <i>Subsidiary</i> | Lokasi/ <i>Location</i> | Aktivitas bisnis/ <i>Business activities</i> | Mulai beroperasi komersial/ <i>Commencement of commercial operations</i> | Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i> | | Jumlah aset sebelum eliminasi/ <i>Total assets before elimination</i> | |
|--|----------------------------|---|---|---|-------------|--|-------------|
| | | | | <u>2020</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| Kepemilikan langsung/Direct ownership | | | | | | | |
| PT Haleyora Powerindo ("HPI") | Bandung | Layanan teknik dan pemeliharaan/ <i>Technical and maintenance services</i> | 2002 | 95% | 95% | 496,834 | 458,759 |

Berdasarkan Akta Notaris No. 43 tanggal 24 April 2019 dari Muhammad Hanafi, S.H., perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Haleyora Powerindo dan Akta Notaris No. 44 tanggal 24 April 2019 dari Muhammad Hanafi, S.H., perihal Jual Beli Saham PT Haleyora Powerindo, Perusahaan telah melakukan pembelian saham minoritas sebesar 5% dengan nilai Rp8.827.

Based on Notarial Deed No. 43 dated 24 April 2019 of Muhammad Hanafi, S.H., regarding Statement Decision Shareholders PT Haleyora Powerindo and the Notarial Deed No. 44 dated 24 April 2019 of Muhammad Hanafi, S.H., regarding Purchase and Sell Shares of PT Haleyora Powerindo, the Company purchased a 5% minority share with a value of Rp8,827.

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

In these consolidated financial statements, the Company and subsidiary are collectively referred to as the "Group".

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrumen derivatif) diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Untuk memberi pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Selain yang dijelaskan dibawah, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS")

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost concept, as modified by financial assets and financial liabilities (including derivative instruments) at fair value through profit or loss, and using the accruals basis except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Group, due to the significant nature or amount, several items of income or expenses have been shown separately.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and judgements. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. Those areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019, which conform to Indonesian Financial Accounting Standards.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/4 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap Kebijakan akuntansi Grup telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar-standar dan amandemen yang relevan terhadap kegiatan operasional Grup dan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

Penerapan atas PSAK 71

PSAK 71 "Instrumen Keuangan" menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian ("KKE"), yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Grup menerapkan PSAK 71 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Grup menerapkan metode sederhana untuk mengukur KKE yang disyaratkan oleh PSAK 71 yang mengharuskan penggunaan provisi kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang. Penerapan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, tidak ada perubahan jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020 sesuai klasifikasi baru atas penerapan PSAK 71.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to the SFAS and IFAS

On 1 January 2020, the Group adopted new SFAS and IFAS which are effective on that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of the following new standards and amendments which are relevant to the Group's operations and resulted in an effect on the consolidated financial statements are as follows:

Adoption of SFAS 71

SFAS 71 "Financial Instruments" replaces SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new requirements for the classification and measurement of financial instruments based on business model and contractual cash flow assessment, recognition and measurement of allowance for financial instrument impairment losses using the expected credit loss ("ECL") model, which replaced the incurred credit loss model, and also provides a simplified approach to hedge accounting.

The Group has adopted SFAS 71, effective for the financial year beginning 1 January 2020.

The Group applies the simplified approach to provide for ECL prescribed by SFAS 71 which requires the use of a lifetime expected loss provision for all receivables. The adoption did not have a significant impact on the Group's consolidated financial statements.

Based on business model assessments and contractual cash flow, there has been no change in the carrying amount of financial assets and liabilities as at 1 January 2020 due to the adoption of the new classifications under SFAS 71.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/5 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

Penerapan atas PSAK 72

Grup menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penerapan atas PSAK 73

Grup menerapkan PSAK 73 "Sewa" yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi Grup tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian

Pada saat penerapan PSAK 73, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30: Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 7,42% - 7,95%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran dimuka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset tidak lancar Grup meningkat sebesar Rp132.602 dan total kewajiban Grup meningkat sebesar Rp120.501.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to the SFAS and IFAS (continued)

Adoption of SFAS 72

The Group has adopted SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers" effective for the financial year beginning 1 January 2020. The adoption of SFAS 72 did not have a significant impact on the Group's consolidated financial statements.

Adoption of SFAS 73

The Group has adopted SFAS 73 "Leases" effective for the financial year beginning 1 January 2020, but the Group did not restate comparatives for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.

Impact on consolidated financial statements

On the adoption of SFAS 73, the Group recognised right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as 'operating leases' under the principles of SFAS 30: Leases. Lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate as of 1 January 2020. The weighted average of the Group's incremental borrowing rate applied was 7.42% - 7.95%. Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liabilities, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognised in the statement of financial position as at 31 December 2019. By applying this standard, on 1 January 2020 the Group's non-current assets increased by Rp132,602 and total liabilities increased by Rp120,501.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan) 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan) a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan) Changes to the SFAS and IFAS (continued)

Penerapan atas PSAK 73 (lanjutan) Adoption of SFAS 73 (continued)

Dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan) Impact on consolidated financial statements (continued)

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut: The reconciliation between the operating lease commitments under SFAS 30 as at 31 December 2019 and the lease liabilities recognised under SFAS 73 as at 1 January 2020 is as follows:

| | <u>Jumlah/Amount</u> | |
|---|-----------------------------|--|
| Komitmen sewa operasi pada 31 Desember 2019 | 132,561 | Operating lease commitments as at 31 December 2019 |
| Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup | <u>(12,060)</u> | Discounted using the Group's incremental borrowing rate |
| Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020 | <u>120,501</u> | Lease liabilities recognised as at 1 January 2020 |

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar: In applying SFAS 73 for the first time, the Group used the following practical expedients permitted by the standard:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
 - sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
 - pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
 - menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
 - mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.
- the use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
 - operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at 1 January 2020 are treated as short-term leases;
 - the exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application;
 - the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease;
 - relying on the assessment of whether leases are onerous based on SFAS 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets immediately before the date of initial application as an alternative to performing an impairment review.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

PSAK dan ISAK lainnya

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Penyesuaian tahunan 2020 "Kerangka Konseptual 2019"
- PSAK 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- PSAK 102 "Akuntansi Murabahah"
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- ISAK 36 "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16, Aset Tetap dan PSAK No 73, Sewa"
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Amandemen PSAK 73 "Konsesi Sewa terkait COVID-19"
- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55 dan Amandemen PSAK 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga
- Penyesuaian tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ("PPSAK") 13 mengenai pencabutan PSAK 45 "Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba"

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to the SFAS and IFAS (continued)

Other SFAS and IFAS

The adoption of the following new standards, interpretations, amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from 1 January 2020 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- Annual improvement 2020 "Conceptual Framework 2019"
- SFAS 101 "Presentation of Financial Statements of Endowment Entities"
- SFAS 102 "Murabahah Accounting"
- IFAS 35 "Presentation of Non-profit Oriented Entity Financial Statements"
- IFAS 36 "Interpretation of Interaction between Provisions regarding Land Rights in SFAS 16, Fixed Assets, and SFAS 73, Leases"
- IFAS 101 "Recognition of Murabahah Deferred Income without Significant Risk related to Inventory Ownership"
- IFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivables"
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements concerning the Title of Financial Statements"
- Amendment to SFAS 15 "Investments in Associates and Joint Ventures"
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
- Amendment to SFAS 62 "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS 71 "Financial Instruments - Prepayment Features with Negative Compensation"
- Amendment to SFAS 73 "COVID-19 related Rent Concessions"
- Amendment to SFAS 71, Amendment to SFAS 55 and Amendment to SFAS 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform
- Annual improvement to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements"
- Statement of Withdrawal of Financial Accounting Standard 13 regarding the withdrawal of SFAS 45 "Financial Reporting of Non-Profit Entities"

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

PSAK dan ISAK lainnya (lanjutan)

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi"
- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual"
- Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60, Amandemen PSAK 62 dan Amandemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga 2
- Penyesuaian tahunan PSAK 69 "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK 73 "Sewa"
- Penyesuaian tahunan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan PSAK 111 "Akuntansi Wa'd"

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, kecuali Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual", Amandemen PSAK 57, Penyesuaian tahunan PSAK 69, Penyesuaian tahunan PSAK 71 dan Penyesuaian tahunan PSAK 73 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, Amandemen PSAK 1 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Other SFAS and IFAS (continued)

New standards, amendments and annual improvements issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2020 are as follows:

- SFAS 74 "Insurance Contracts"
- SFAS 112 "Accounting for Endowments"
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment to SFAS 22 "Business Combinations - Business Definition"
- Amendment to SFAS 22 "Business Combinations - Reference to Conceptual Framework"
- Amendment to SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling"
- Amendment to SFAS 71, Amendment to SFAS 55, Amendment to SFAS 60, Amendment to SFAS 62 and Amendment to SFAS 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform 2
- Annual improvement to SFAS 69 "Agriculture"
- Annual improvement to SFAS 71 "Financial Instruments"
- Annual improvement to SFAS 73 "Leases"
- Annual improvement to SFAS 110 "Sukuk Accounting"
- Annual improvement to SFAS 111 "Wa'd Accounting"

The above new standards, amendments and annual improvements are effective beginning 1 January 2021, except for Amendment to SFAS 22: "Business Combinations - Reference to Conceptual Framework", Amendment to SFAS 57, Annual improvement to SFAS 69, Annual improvement to SFAS 71 and Annual improvement to SFAS 73 which are effective beginning 1 January 2022, Amendment to SFAS 1 which is effective beginning 1 January 2023 and SFAS 74 which is effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/9 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

PSAK dan ISAK lainnya (lanjutan)

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian.

b. Konsolidasi

(i) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas itu.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Other SFAS and IFAS (continued)

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and annual improvements on the consolidated financial statements.

b. Consolidation

(i) Subsidiary

Subsidiaries include all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiary is fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. It is deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is equivalent to the fair value of the assets transferred, the liabilities recognised to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi untuk setiap akuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi melalui laba rugi. Pihak pengakuisisi mungkin telah mengakui perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

b. Consolidation (continued)

(i) Subsidiary (continued)

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. The non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statements of financial position, separately from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognised changes in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was recognised in other comprehensive income shall be recognised on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value as at the acquisition date. Any subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability is recognised in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/11 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Selisih lebih dari jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan nonpengendali atas jumlah neto aset dan kewajiban teridentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan ini lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas entitas yang diakuisisi, dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui langsung dalam laba rugi.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang dianut oleh Grup.

(ii) Perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset bersih entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

(iii) Pelepasan entitas anak

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian, kepentingan yang masih tersisa di entitas itu diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatatnya diakui dalam laba rugi. Nilai wajarnya adalah nilai tercatat awal yang digunakan untuk pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Consolidation (continued)

(i) Subsidiary (continued)

Goodwill is initially measured as the excess of the aggregate of the consideration transferred, and the fair value of non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. Accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

(ii) Changes in ownership interests in subsidiary without change of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of the net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

(iii) Disposal of subsidiaries

When the Group ceases to have control, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi pihak-pihak berelasi

Grup telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

d. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang dimuat dalam laporan keuangan konsolidasian Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Transactions with related parties

The Group has entered into transactions with certain related parties as defined under SFAS 7 "Related Party Disclosures".

d. Foreign currency translation

(i) Functional and presentation currency

Items included in the Group's consolidated financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency were adjusted to reflect the exchange rates prevailing at this date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia were as follows:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Mata uang | | | Currency |
| Dolar Amerika Serikat ("AS\$") | 14,105 | 13,901 | United States Dollar ("US\$") |

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/13 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020

I. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Mulai 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

II. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets

Accounting policies from 1 January 2020

I. Classification, recognition and measurement

As at 1 January 2020, the Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and
- those to be measured at amortised cost.

The classification depends on the Group's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

II. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)**

III. Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Financial assets (continued)

**Accounting policies from 1 January 2020
(continued)**

III. Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)**

III. Pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI): Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam beban lain-lain, bersih. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam penghasilan/(beban) lain-lain, bersih dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.
- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam beban lain-lain, bersih dalam periode kemunculannya.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Financial assets (continued)

**Accounting policies from 1 January 2020
(continued)**

III. Measurement (continued)

Debt instruments (continued)

- Fair value through other comprehensive income (FVOCI): Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, in cases where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other expenses, net. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), net and impairment expenses in other expenses.
- Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other expenses, net in the period in which it arises.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/16 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

I. Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, tersedia untuk dijual, serta dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi ini tergantung tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, Grup hanya mempunyai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak dikutip pada pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Grup terdiri dari "kas dan setara kas", "kas yang dibatasi penggunaannya", "piutang usaha", dan "piutang non-usaha" pada laporan posisi keuangan.

II. Pengakuan dan pengukuran

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

III. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets (continued)

Accounting policies before 1 January 2020

I. Classification

The Group classifies its financial assets into the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivables, available-for-sale, and held to maturity. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets upon initial recognition. As at the reporting date, the Group only has financial assets classified as loans and receivables.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets, except for those with maturities greater than 12 months after the end of the reporting period. These are classified as noncurrent assets. The Group's loans and receivables comprised "cash and cash equivalents", "restricted cash", "trade receivables" and "non-trade receivables" in the statement of financial position.

II. Recognition and measurement

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus the transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

III. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penurunan nilai aset keuangan

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah KKE. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan (atau peristiwa) berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

f. Impairment of financial assets

Accounting policies from 1 January 2020

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of ECL. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies the "simplified approach" to measuring ECL which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since initial recognition. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception to the receivables which can be assessed at their own rating of expected credit losses.

Accounting policies before 1 January 2020

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flow of the financial asset or a group of financial assets that can be reliably estimated.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini arus kas masa depan diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan memiliki tingkat bunga mengambang, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laba rugi.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan (jika ada).

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya, digunakan sebagai jaminan atau yang tidak dapat digunakan secara bebas digolongkan dalam kas yang dibatasi penggunaannya.

h. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi diluar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi usaha biasa, jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak demikian, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

f. Impairment of financial assets (continued)

**Accounting policies before 1 January 2020
(continued)**

For the loans and receivables category, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flow (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognised in profit or loss. If the loan has a floating interest rate, the discount rate used for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Group may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in profit or loss.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity of three months or less, net of overdrafts (if any).

Cash and cash equivalents which have been restricted for certain purposes, used for collateral or which can not be used freely are classified as restricted cash.

h. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**h. Piutang usaha dan piutang non-usaha
(lanjutan)**

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Ketika piutang usaha atau piutang non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Keberhasilan penagihan kembali di kemudian hari atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan pada laba rugi.

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Untuk tujuan menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

Aset nonkeuangan, selain *goodwill*, yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

h. Trade and non-trade receivables (continued)

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

The amount of the impairment loss is recognised in profit or loss. When a trade or non-trade receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to profit or loss.

i. Impairment of non-financial asset

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but are tested annually for impairment or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying value exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows (cash generating unit).

Non-financial assets, other than goodwill, that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pemulihan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang diukur dengan menggunakan model revaluasi sesuai dengan PSAK yang lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak akan dipulihkan lagi.

Beban dan pemulihan penurunan nilai disajikan secara terpisah dalam laba rugi, setelah penyajian laba usaha.

j. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset tetap

Pada awalnya, aset tetap diakui sebesar harga perolehan dan setelahnya dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi atas penurunan nilai. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak yang bersangkutan.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16 "Aset Tetap".

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Impairment of non-financial asset (continued)

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill, would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Any reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

Impairment charges and reversals are disclosed in a separate line item within profit or loss, below the operating profit line.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

k. Fixed assets

Fixed assets are initially recognised at cost and subsequently, carried at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment under SFAS 73, "Leases". If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 16 "Fixed Assets".

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

k. Aset tetap (lanjutan)

k. Fixed assets (continued)

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama masa manfaatnya sebagai berikut:

Fixed assets, except land, are depreciated to their residual value using the straight-line method to their residual values over their expected useful lives as follows:

| | <u>Tahun/Years</u> | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Bangunan | 20 | <i>Buildings</i> |
| Kendaraan bermotor | 8 | <i>Motor vehicle</i> |
| Perlengkapan umum | 4 | <i>General equipment</i> |

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of fixed assets, are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that is determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when the item is derecognised.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Assets that are temporarily not used in operations are recorded as part of fixed assets. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the fixed assets.

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction of fixed costs. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to a fixed asset account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok diluar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

m. Sewa

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan dan jika telah ditentukan sebelumnya:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired outside of the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

m. Leases

Accounting policies from 1 January 2020

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used and if the use is predetermined:
 1. The Group has the right to operate the asset, or
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Pada tanggal insepasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

m. Leases (continued)

**Accounting policies from 1 January 2020
(continued)**

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability are the fixed payments, including in-substance fixed payments, less any lease incentive receivable.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

Accounting policies from 1 January 2020 (continued)

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities as separate line items in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Short-term leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung unsur sewa dilakukan berdasarkan substansi perjanjian dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset atau beberapa aset tertentu, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari lessor) dibebankan pada laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

m. Leases (continued)

**Accounting policies from 1 January 2020
(continued)**

Lease modification (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- remeasures and allocates the consideration in the modified contract;
- determines the lease term of the modified lease;
- remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

Accounting policies before 1 January 2020

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan masa sewa apabila tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

n. Imbalan karyawan

(i) Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

m. Leases (continued)

**Accounting policies before 1 January 2020
(continued)**

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Fixed assets acquired under finance leases are depreciated over the shorter of the useful life of the assets and the lease term if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership at the end of the lease term.

n. Employee benefits

(i) Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Imbalan karyawan (lanjutan)

(i) Imbalan pascakerja (lanjutan)

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU Ketenagakerjaan") atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

o. Employee benefits (continued)

(i) Post-employment benefits (continued)

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Labour Law No. 13/2003 (the "Labour Law") or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Labour Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment award.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the statement of other comprehensive income in the year in which they arise.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Imbalan karyawan (lanjutan)

(i) Imbalan pascakerja (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

(ii) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

p. Modal saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

o. Employee benefits (continued)

(i) Post-employment benefits (continued)

For defined contribution plans, the Group pays contributions to publicly or privately pension plans. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in the future payments is available.

(ii) Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

p. Share capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Sejak 1 Januari 2020, Grup telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

- i. identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- ii. identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- iv. alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
- v. pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Revenues and expenses recognition

Accounting policy from 1 January 2020

Revenue from contracts with customers

As at 1 January 2020, the Group has applied SFAS 72, which require revenue recognition to fulfil 5 (five) steps of assessment:

- i. identify contract(s) with a customer;
- ii. identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
- iii. determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
- iv. allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and
- v. recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
(lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha biasa diakui ketika jasa telah selesai dilaksanakan kepada pelanggan.

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan dari penyediaan jasa diakui pada saat jasa diberikan.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

r. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di rugi komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam rugi komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara di mana Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**q. Revenues and expenses recognition
(continued)**

**Accounting policy from 1 January 2020
(continued)**

Revenue from contracts with customers
(continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Revenue from services performed in the ordinary course of business are recognised when the services are completed to customers.

Accounting policy before 1 January 2020

Revenue from services are recognised when the services are delivered.

Expenses recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

r. Current and deferred income tax

The tax expense comprised current and deferred taxes. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive loss or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive loss or directly in equity, respectively.

The current income tax is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in the annual tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI PENTING

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Current and deferred income tax (continued)

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting period end and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 2, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/33 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung KKE piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap yang dimiliki Grup ditentukan berdasarkan periode aset tersebut diharapkan masih dapat digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Provision for impairment of trade receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating and other forms).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of a customer's actual default in the future.

Estimated useful lives of fixed assets

The useful life of each item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap
(lanjutan)

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(penghasilan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah, (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasi. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

Estimated useful lives of fixed assets (continued)

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of fixed assets.

Post-employment benefits

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligation.

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds (considering there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group requires judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

Income taxes (continued)

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|--|----------------|----------------|--|
| Kas | 1,476 | 1,096 | Cash on hand |
| Rupiah | | | Rupiah |
| Kas di bank | | | Cash in banks |
| <u>Pihak berelasi</u> | | | <u>Related parties</u> |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") | 425,660 | 130,707 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") | 4,226 | 2,311 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri") | 25,805 | 377 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri") |
| PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. ("BRI Syariah") | 5 | - | PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. ("BRI Syariah") |
| <u>Pihak ketiga</u> | <u>965</u> | <u>1,607</u> | <u>Third parties</u> |
| | <u>456,661</u> | <u>135,002</u> | |
| Rupiah | | | Rupiah |
| Deposito berjangka | | | Time deposits |
| <u>Pihak berelasi</u> | | | <u>Related parties</u> |
| BNI | - | 65,000 | BNI |
| BRI | 27,500 | 42,500 | BRI |
| Mandiri | 10,000 | 10,000 | Mandiri |
| PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk. ("BNI Syariah") | 50,000 | 50,000 | PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk. ("BNI Syariah") |
| <u>Pihak ketiga</u> | <u>-</u> | <u>2,000</u> | <u>Third parties</u> |
| | <u>87,500</u> | <u>169,500</u> | |
| | <u>545,637</u> | <u>305,598</u> | |

Lihat Catatan 17 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 17 for details of related party transactions.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

5. RESTRICTED CASH

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|----------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| Rupiah | | | Rupiah |
| <u>Pihak berelasi</u> | | | <u>Related party</u> |
| BNI | 3,075 | 2,790 | BNI |
| Mandiri | - | 55,457 | Mandiri |
| <u>Pihak ketiga</u> | | | <u>Third party</u> |
| PT Bank Bukopin Tbk. ("Bukopin") | - | 792 | PT Bank Bukopin Tbk. ("Bukopin") |
| | <u>3,075</u> | <u>59,039</u> | |

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada BNI sebesar Rp3.075 (2019: Rp2.790) merupakan jaminan atas pelaksanaan pekerjaan tertentu dengan pelanggan.

As at 31 December 2020, restricted cash and cash equivalents with BNI of Rp3,075 (2019: Rp2,790) represents a guarantee for the implementation of specific work with customers.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada Mandiri dan Bukopin sebesar Rp56.249 merupakan rekening penyimpanan atas dana untuk pembelian saham pada entitas asosiasi.

As at 31 December 2019, restricted cash and cash equivalents with Mandiri and Bukopin of Rp56,249 represents saving accounts for share purchase in associate.

Lihat Catatan 17 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 17 for details of related party transactions.

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|---|----------------|----------------|---|
| Pihak berelasi | | | Related parties |
| PLN | 220,784 | 336,000 | PLN |
| PT Indonesia Comnets Plus ("ICON") | 28,950 | 19,268 | PT Indonesia Comnets Plus ("ICON") |
| PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PLNT") | 20,713 | 14,436 | PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PLNT") |
| PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") | 18,493 | 13,529 | PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") |
| PT Indonesia Power ("IP") | 7,128 | 7,338 | PT Indonesia Power ("IP") |
| PT PLN Batubara ("PLNBB") | 5,797 | 2,185 | PT PLN Batubara ("PLNBB") |
| PT Pembangkit Jawa Bali ("PJB") | 2,196 | 4,647 | PT Pembangkit Jawa Bali ("PJB") |
| PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE") | 731 | 2,630 | PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE") |
| PT Pelayanan Bahtera Adhiguna ("BAG") | 626 | 444 | PT Pelayanan Bahtera Adhiguna ("BAG") |
| PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("PLNGG") | 526 | 144 | PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("PLNGG") |
| | <u>305,944</u> | <u>400,621</u> | |
| Pihak ketiga | <u>344</u> | <u>335</u> | Third parties |
| | <u>306,288</u> | <u>400,956</u> | |

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur piutang usaha yang belum jatuh tempo atau lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lancar | 226,239 | 294,857 |
| Lewat jatuh tempo: | | |
| 1 - 90 hari | 68,359 | 105,734 |
| 91 - 360 hari | 9,209 | 58 |
| Lebih dari 360 hari | <u>2,481</u> | <u>307</u> |
| | <u><u>306,288</u></u> | <u><u>400,956</u></u> |

Berdasarkan penilaian manajemen terhadap penyisihan KKE atas piutang usaha, manajemen berpendapat bahwa penyisihan KKE tidak material, sehingga penyisihan KKE tidak diperlukan.

Lihat Catatan 17 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

Aging analysis of trade receivables that are not yet overdue or overdue but not impaired is as follows:

*Current
Overdue:
1 - 90 days
91 - 360 days
More than 360 days*

Based on management's assessment of the allowance for ECL on trade receivables, management is of the opinion that the allowance for ECL is not material, therefore the allowance for ECL is not necessary.

Refer to Note 17 for details of related party transactions.

7. ASET TETAP

7. FIXED ASSETS

| | <u>2020</u> | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| | <u>Saldo awal/ Beginning balance</u> | <u>Penambahan/ Additions</u> | <u>Pengurangan/ reklasifikasi/ Deduction/ reclassification</u> | |
| <u>Biaya perolehan</u> | | | | <u>Acquisition costs</u> |
| Tanah | 3,116 | - | - | 3,116 |
| Bangunan | 2,340 | - | - | 2,340 |
| Kendaraan bermotor | 1,602 | - | - | 1,602 |
| Perlengkapan umum | 62,922 | 38,775 | - | 101,697 |
| Aset dalam penyelesaian | <u>425</u> | <u>702</u> | <u>(1,127)</u> | <u>-</u> |
| | <u>70,405</u> | <u>39,477</u> | <u>(1,127)</u> | <u>108,755</u> |
| <u>Akumulasi penyusutan</u> | | | | <u>Accumulated depreciation</u> |
| Bangunan | (571) | (117) | - | (688) |
| Kendaraan bermotor | (358) | (200) | - | (558) |
| Perlengkapan umum | <u>(26,744)</u> | <u>(19,979)</u> | <u>-</u> | <u>(46,723)</u> |
| | <u>(27,673)</u> | <u>(20,296)</u> | <u>-</u> | <u>(47,969)</u> |
| Nilai buku bersih | <u><u>42,732</u></u> | | | <u><u>60,786</u></u> |
| | | | | Net book value |

Aset dalam penyelesaian sebesar Rp1.127 merupakan biaya pengembangan piranti lunak yang direklasifikasikan ke aset tak berwujud.

Construction in progress amounted to Rp1,127 represents software development costs which were reclassified to intangible asset.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

7. FIXED ASSETS (continued)

| 2019 | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Additions | Pengurangan/ reklasifikasi/ Deductions/ reclassification | Saldo akhir/ Ending balance | |
| Biaya perolehan | | | | Acquisition costs |
| Tanah | 3,116 | - | 3,116 | Land |
| Bangunan | 2,175 | 165 | 2,340 | Building |
| Kendaraan bermotor | 1,602 | - | 1,602 | Motor vehicle |
| Perlengkapan umum | 39,237 | 23,685 | 62,922 | General equipment |
| Aset dalam penyelesaian | - | 425 | 425 | Constructions in progress |
| | 46,130 | 24,275 | 70,405 | |
| Akumulasi penyusutan | | | | Accumulated depreciation |
| Bangunan | (454) | (117) | (571) | Building |
| Kendaraan bermotor | (158) | (200) | (358) | Motor vehicle |
| Perlengkapan umum | (15,096) | (11,648) | (26,744) | General equipment |
| | (15,708) | (11,965) | (27,673) | |
| Nilai buku bersih | 30,422 | | 42,732 | Net book value |

Beban penyusutan sebesar Rp19.439 (2019: Rp11.196) dibebankan pada beban pokok pendapatan dan sebesar Rp857 (2019: Rp769) dibebankan pada beban umum dan administrasi.

Depreciation expense amounted to Rp19,439 (2019: Rp11,196) was charged to cost of revenue and Rp857 (2019: Rp769) was charged to general and administrative expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan atas nilai aset tetap.

As at 31 December 2020 and 2019, management believes that there was no impairment in the value of fixed assets.

8. SEWA

8. LEASES

a. Aset hak-guna

a. Right-of-use assets

Rincian aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The detail of the right-of-use assets as at 31 December 2020 is as follows:

| 2020 | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Januari/ January 2020 | Penyesuaian saldo awal/ Adjusted beginning balance | Penambahan/ Additions | Saldo akhir/ Ending balance | |
| Biaya perolehan | | | | Acquisition costs |
| Bangunan | - | 15,565 | 9,644 | 25,209 Building |
| Kendaraan bermotor | - | 117,037 | 18,862 | 135,899 Motor vehicle |
| | - | 132,602 | 28,506 | 161,108 |
| Akumulasi penyusutan | | | | Accumulated depreciation |
| Bangunan | - | - | (6,099) | (6,099) Building |
| Kendaraan bermotor | - | - | (54,756) | (54,756) Motor vehicle |
| | - | - | (60,855) | (60,855) |
| Nilai buku bersih | - | | 100,253 | Net book value |

Beban penyusutan sebesar Rp58.757 dibebankan pada beban pokok pendapatan dan sebesar Rp2.098 dibebankan pada beban umum dan administrasi.

Depreciation expense amounted to Rp58,757 was charged to cost of revenue and Rp2,098 was charged to general and administrative expenses.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

8. SEWA (lanjutan)

8. LEASES (continued)

b. Liabilitas sewa

b. Lease liabilities

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| Saldo awal | 120,501 | - | <i>Beginning balance</i> |
| Penambahan | 18,403 | - | <i>Additions</i> |
| Beban bunga | 8,235 | - | <i>Interest expense</i> |
| Pembayaran | <u>(60,502)</u> | <u>-</u> | <i>Payments</i> |
| Saldo akhir | <u>86,637</u> | <u>-</u> | <i>Ending balance</i> |
| Bagian jangka pendek | <u>(49,005)</u> | <u>-</u> | <i>Current portion</i> |
| Bagian jangka panjang | <u>37,632</u> | <u>-</u> | <i>Non-current portion</i> |

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa yaitu berkaitan dengan sewa bangunan dan kendaraan bermotor. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset yang disewakan tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

The Group entered into several lease agreements which are related to rental of buildings and motor vehicles. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants, but leased assets may not be used as security for borrowing purposes.

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

9. INVESTMENT IN ASSOCIATE

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Details of investment in associate is as follows:

| <u>Asosiasi/ Associate</u> | <u>Lokasi/ Location</u> | <u>Aktivitas bisnis/ Business activities</u> | <u>Mulai beroperasi komersial/ Commencement of commercial operations</u> | <u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u> | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|-------------|
| | | | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI") | Jakarta | Penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik wilayah pelabuhan/ <i>Supply and distribution of electric power port region</i> | 2013 | 45% | 45% |

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Changes in investment in associate is as follows:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Saldo awal | 48,889 | 47,477 | <i>Beginning balance</i> |
| Pembayaran dividen | (5,037) | (5,305) | <i>Payment of dividend</i> |
| Bagian laba bersih | <u>5,956</u> | <u>6,717</u> | <i>Share of profit</i> |
| Saldo akhir | <u>49,808</u> | <u>48,889</u> | <i>Ending balance</i> |

Pada tanggal 13 Juli 2020 EPI membagikan dividen kepada Grup sebesar Rp5.037 atas saldo laba tahun 2019. Grup telah menerima pembayaran dividen pada bulan November 2020 sebesar Rp1.800 dan sisanya piutang dividen sebesar Rp3.237 dicatat sebagai piutang non-usaha.

On 13 July 2020, EPI declared dividends to the Group amounted to Rp5,037 related to the 2019 retained earnings. The Group has received payment of dividends in November 2020 amounted to Rp1,800 and the remaining dividends receivable amounted to Rp3,237 is recorded as non-trade receivables.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi
sebagai berikut:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| Jumlah aset | 175,927 | 145,323 |
| Jumlah liabilitas | <u>(65,243)</u> | <u>(36,680)</u> |
| Aset bersih | <u>110,684</u> | <u>108,643</u> |
| Jumlah pendapatan | 192,985 | 176,606 |
| Jumlah laba tahun berjalan | 13,236 | 14,926 |
| Penghasilan komprehensif lain | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | <u>13,236</u> | <u>14,926</u> |

9. INVESTMENT IN ASSOCIATE (continued)

Summarised financial information in associate is as
follows:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Total assets | 175,927 | 145,323 |
| Total liabilities | <u>(65,243)</u> | <u>(36,680)</u> |
| Net assets | <u>110,684</u> | <u>108,643</u> |
| Total revenue | 192,985 | 176,606 |
| Total profit for the year | 13,236 | 14,926 |
| Other comprehensive income | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Total comprehensive income for the year | <u>13,236</u> | <u>14,926</u> |

10. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Bonus dan insentif kerja | 56,581 | 46,871 |
| Gaji dan tunjangan | 14,628 | 4,279 |
| Lain-lain | <u>1,545</u> | <u>4,197</u> |
| | <u>72,754</u> | <u>55,347</u> |

10. ACCRUED EXPENSES

Bonus and incentive
Salaries and allowances
Others

11. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Liabilitas imbalan kerja hanya berasal dari kewajiban
imbalan pasti. Provisi imbalan kerja karyawan pada
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh
kantor konsultan aktuarial terdaftar, Kantor
Konsultan Aktuarial ("KKA") Tubagus Syafrial dan
Amran Nangasan.

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan
konsolidasian adalah sebagai berikut:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------|----------------|
| Nilai kini kewajiban | <u>157,544</u> | <u>161,925</u> |
| Jumlah yang diakui dalam "beban pokok pendapatan" pada laba rugi adalah sebagai berikut: | | |
| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| Biaya jasa kini | 34,860 | 32,235 |
| Biaya bunga | <u>12,120</u> | <u>9,874</u> |
| | <u>46,980</u> | <u>42,109</u> |

11. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

Employee benefits liabilities only represent defined
benefit obligations. The provision for employee
benefits as at 31 December 2020 and 2019 was
prepared by a registered actuarial consulting firm,
Kantor Konsultan Aktuarial ("KKA") Tubagus Syafrial
dan Amran Nangasan.

The amounts recognised in the consolidated
statement of financial position are as follows:

Present value of obligations

The amounts recognised in "cost of revenue" in
profit or loss are as follows:

Current service cost
Interest cost

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

11. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

**11. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES
(continued)**

Jumlah yang diakui dalam “penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan” adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in “other comprehensive income/(loss) for the year” are as follows:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|---|---------------|----------------|--|
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | <u>26,281</u> | <u>(8,103)</u> | <i>Remeasurement of employee benefit liabilities</i> |

Mutasi nilai kini kewajiban selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of the obligation over the year is as follows:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|---|----------------|----------------|--|
| Pada awal tahun | 161,925 | 118,382 | <i>At the beginning of the year</i> |
| Biaya jasa kini | 34,860 | 32,235 | <i>Current service cost</i> |
| Biaya bunga | 12,120 | 9,874 | <i>Interest cost</i> |
| (Keuntungan)/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi aktuari | (26,281) | 8,103 | <i>(Gain)/loss from changes in actuarial assumptions</i> |
| Pembayaran imbalan | (15,090) | (6,027) | <i>Benefit paid</i> |
| Pembayaran iuran | <u>(9,990)</u> | <u>(642)</u> | <i>Contribution paid</i> |
| | <u>157,544</u> | <u>161,925</u> | |

Asumsi utama yang digunakan aktuaris independen yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used by the independent actuaries were as follows:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|---------------------------------|-------------|-------------|---|
| Tabel mortalita | CSO 58 | CSO 58 | <i>Mortality table</i> |
| Umur pensiun | 56 | 56 | <i>Retirement age</i> |
| Tingkat diskonto: | | | <i>Discount rate:</i> |
| Pegawai non-proyek - Perusahaan | 7.74% | 7.82% | <i>Non-project employee - the Company</i> |
| Pegawai non-proyek - HPI | 7.09% | 7.73% | <i>Non-project employee - HPI</i> |
| Pegawai proyek - NKSO | 7.26% | 7.74% | <i>Project employee - NKSO</i> |
| Pegawai KSO | 7.25% | 7.65% | <i>Project employee - KSO</i> |
| Tingkat kenaikan gaji: | | | <i>Salary increase rate:</i> |
| Pegawai non-proyek - Perusahaan | 7.02% | 7.20% | <i>Non-project employee - the Company</i> |
| Pegawai non-proyek - HPI | 7.02% | 7.20% | <i>Non-project employee - HPI</i> |
| Pegawai proyek - NKSO | 8.51% | 9.76% | <i>Project employee - NKSO</i> |
| Pegawai KSO | 8.51% | 9.76% | <i>Project employee - KSO</i> |

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap wilayah. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by each region. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which is applied in calculating the post-employment benefit liabilities recognised within the statement of financial position.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

11. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

Pada tahun 2020, PLN melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan PLN dan entitas anak. Dalam melakukan studi, PLN telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, TMI-2019. Dari studi tersebut, PLN menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan PLN dan entitas anak adalah CSO-58.

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- 1) Perubahan tingkat diskonto: Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- 2) Tingkat kenaikan gaji: Liabilitas imbalan pensiun Grup berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

**11. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES
(continued)**

In 2020, PLN conducted a study to determine which mortality tables best suited most of the PLN and subsidiaries employees' and pensioners' mortality profile. In the study, PLN has considered CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, TMI-2019. Based on the study, PLN found that the mortality table that best suited the mortality profile of the PLN and subsidiaries employees and pensioners is CSO-58.

Through its defined benefit pension plans, the Group is exposed to a number of significant risks which are detailed below:

- 1) Changes in discount rate: A decrease in discount rate will increase plan liabilities.
- 2) Salary growth rate: The Group's pension obligations are linked to salary growth rate, and higher salary growth rate will lead to higher liabilities.

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

| | Perubahan asumsi/ Change in assumption | Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation | | |
|-----------------------|---|---|---|----------------------|
| | | Kenaikan asumsi/ Increase in assumption | Penurunan asumsi/ Decrease in assumption | |
| Tingkat diskonto | 1% | Penurunan sebesar/ Decrease by 10.41% | Kenaikan sebesar/ Increase by 13.66% | Discount rate |
| Tingkat kenaikan gaji | 1% | Kenaikan sebesar/ Increase by 13.41% | Penurunan sebesar/ Decrease by 10.43% | Salary increase rate |

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits is as follows:

| | Kurang dari 1 tahun/ Less than a year | Antara 1 sampai 2 tahun/ Between 1- 2 years | Antara 2 sampai 5 tahun/ Between 2- 5 years | Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years | Jumlah/ Total | |
|-----------------|---|---|---|---|------------------|------------------|
| Imbalan pensiun | 26,873 | 26,771 | 141,108 | 6,090,943 | 6,285,695 | Pension benefits |

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/43 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

12. PERPAJAKAN

12. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Pajak penghasilan badan | | | Corporate income tax |
| Perusahaan | | | The Company |
| 2020 | 21,069 | - | 2020 |
| Entitas anak | | | Subsidiary |
| 2020 | 7,012 | - | 2020 |
| 2019 | 735 | 735 | 2019 |
| 2017 | - | 2,340 | 2017 |
| | <u>28,816</u> | <u>3,075</u> | |
| Pajak lainnya | | | Other taxes |
| Perusahaan | | | The Company |
| Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") | 61,272 | 35,922 | Value Added Tax ("VAT") |
| Entitas anak | | | Subsidiary |
| PPN | 2,721 | 5,806 | VAT |
| Lain-lain | 4 | 54 | Others |
| | <u>63,997</u> | <u>41,782</u> | |
| | <u>92,813</u> | <u>44,857</u> | |
| Bagian lancar | (4) | (44,857) | Current portion |
| Bagian tidak lancar | <u>92,809</u> | <u>-</u> | Non-current portion |

b. Utang pajak

b. Taxes payable

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Pajak penghasilan badan | | | Corporate income tax |
| Perusahaan | - | 7,068 | The Company |
| Entitas anak | - | - | Subsidiary |
| | <u>-</u> | <u>7,068</u> | |
| Pajak lainnya | | | Other taxes |
| Perusahaan | 2,376 | 3,032 | The Company |
| Entitas anak | 459 | 685 | Subsidiary |
| | <u>2,835</u> | <u>3,717</u> | |
| | <u>2,835</u> | <u>10,785</u> | |

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| Beban pajak kini | 45,428 | 74,458 | <i>Current tax expense</i> |
| Manfaat pajak tangguhan | <u>(445)</u> | <u>(8,860)</u> | <i>Deferred tax benefit</i> |
| | <u>44,983</u> | <u>65,598</u> | |

Perhitungan beban pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut:

The calculation of the current corporate income tax expense is as follows:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|--|-----------------|-----------------|--|
| Laba konsolidasian sebelum pajak | 152,178 | 244,920 | <i>Consolidated profit before tax</i> |
| Laba sebelum pajak - entitas anak | <u>(31,082)</u> | <u>(52,252)</u> | <i>Profit before tax – subsidiary</i> |
| Laba sebelum pajak - Perusahaan | <u>121,096</u> | <u>192,668</u> | <i>Profit before tax - the Company</i> |
| Koreksi fiskal: | | | <i>Fiscal corrections:</i> |
| Sewa | 2,670 | - | <i>Leases</i> |
| Penyisihan imbalan kerja karyawan | 138 | 102 | <i>Provision for employee benefits</i> |
| Penyusutan | - | 10 | <i>Depreciation</i> |
| Penghasilan keuangan yang dikenakan pajak final | (4,537) | (5,612) | <i>Finance income subject to final tax</i> |
| Bagian laba bersih entitas asosiasi | (5,956) | (6,717) | <i>Share of profit in associate</i> |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan | <u>64,608</u> | <u>55,000</u> | <i>Non-deductible expenses</i> |
| Laba fiskal - Perusahaan | <u>178,019</u> | <u>235,451</u> | <i>Taxable income - the Company</i> |
| Beban pajak penghasilan badan dengan tarif pajak yang berlaku - Perusahaan | 39,164 | 58,863 | <i>Current corporate income tax expense with applicable tax rate - the Company</i> |
| Beban pajak penghasilan badan kini - entitas anak | <u>6,264</u> | <u>15,595</u> | <i>Current corporate income tax expense - subsidiary</i> |
| Beban pajak penghasilan badan kini - konsolidasian | <u>45,428</u> | <u>74,458</u> | <i>Current corporate income tax expense - consolidation</i> |

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Perhitungan beban pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The calculation of the current corporate income tax expense is as follows: (continued)

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| Beban pajak penghasilan badan dengan tarif pajak yang berlaku - Perusahaan | 39,164 | 58,863 | Current corporate income tax expense with applicable tax rate - the Company |
| Pajak dibayar dimuka - Perusahaan | | | Prepaid taxes - the Company |
| Pasal 23 | (43,065) | (29,713) | Article 23 |
| Pasal 25 | <u>(17,168)</u> | <u>(22,082)</u> | Article 25 |
| (Lebih)/Kurang bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan | <u>(21,069)</u> | <u>7,068</u> | (Over)/Under payment of corporate income tax - the Company |

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan saat SPT tahunan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when annual tax returns are filed with the Directorate General of Tax ("DGT").

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the income tax expense and the theoretical tax amount on consolidated profit before income tax is as follows:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|--|----------------|----------------|--|
| Laba konsolidasian sebelum pajak | <u>152,178</u> | <u>244,920</u> | Consolidated profit before tax |
| Pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku | 33,479 | 61,230 | Income tax at applicable tax rate |
| Penghasilan keuangan yang dikenakan pajak final | (1,743) | (2,286) | Finance income subject to final tax |
| Bagian laba bersih entitas asosiasi | (1,310) | (1,679) | Share of profit in associate |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan | 9,584 | 8,333 | Non-deductible expenses |
| Perubahan tarif pajak | <u>4,973</u> | <u>-</u> | Changes in tax rate |
| Beban pajak penghasilan konsolidasian | <u>44,983</u> | <u>65,598</u> | Consolidated corporate income tax expenses |

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Details of the deferred tax assets are as follows:

| | <u>1 Januari/ January 2020</u> | <u>Dibebankan ke laba rugi^{*)}/ Charged to profit or loss^{*)}</u> | <u>Dikreditkan ke rugi komprehensif lain/ Credited to other comprehensive loss</u> | <u>31 Desember/ December 2020</u> | |
|-----------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 40,482 | (40) | (5,782) | 34,660 | Employee benefits obligation |
| Penyusutan aset tetap | 960 | (115) | - | 845 | Depreciation of fixed assets |
| Sewa | - | 600 | - | 600 | |
| | <u>41,442</u> | <u>445</u> | <u>(5,782)</u> | <u>36,105</u> | |

*) Termasuk penyesuaian akibat perubahan tarif pajak yang mengurangi aset pajak tangguhan sebesar Rp4.973.

*) Including adjustments due to changes in tax rates which reduces the deferred tax assets by Rp4,973.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax assets (continued)

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Details of the deferred tax assets are as follows:
(continued)*

| | 1 Januari/ January 2019 | Dibebankan ke laba rugi/ Charged to profit or loss | Dibebankan ke rugi komprehensif lain/Charged to other comprehensive loss | 31 Desember/ December 2019 | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 29,596 | 8,860 | 2,026 | 40,482 | <i>Employee benefits obligation</i> |
| Penyusutan aset tetap | 960 | - | - | 960 | <i>Depreciation of fixed assets</i> |
| | 30,556 | 8,860 | 2,026 | 41,442 | |

e. Administrasi

e. Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan entitas anak yang berada di dalam Grup menghitung dan menyetorkan besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and the companies within the Group submit tax returns on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

f. Tarif pajak

f. Tax rate

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19") dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020, on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on 16 May 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the CIT rate to 22% which applies in fiscal years 2020-2021 and to 20% which starts to apply in fiscal year 2022.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

13. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

13. SHARE CAPITAL

The Company's shareholders as at 31 December 2020 and 2019 are as follows:

| <u>Pemegang saham/Shareholders</u> | <u>Jumlah saham/ Number of shares</u> | <u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u> | <u>Jumlah/ Amount</u> |
|--|---|--|---------------------------|
| PLN | 99,999 | 99.99% | 99,999 |
| Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN ("YPK PLN") | 1 | 0.01% | 1 |
| | <u>100,000</u> | <u>100.00%</u> | <u>100,000</u> |

14. PENDAPATAN

14. REVENUE

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Operasi dan pemeliharaan | | | <i>Operation and maintenance</i> |
| Pelayanan jasa teknik | 1,588,979 | 1,538,022 | <i>Technical services</i> |
| Pelayanan jasa non-teknik | 629,060 | 500,280 | <i>Non-technical services</i> |
| Lain-lain | 549,640 | 475,608 | <i>Others</i> |
| | <u>2,767,679</u> | <u>2,513,910</u> | |

Pelayanan jasa teknik meliputi penertiban penggunaan tenaga listrik, operator dan teknisi pemeliharaan pembangkit, dan layanan teknik lainnya. Pelayanan jasa non-teknik meliputi tenaga administrasi, pengemudi, satpam, layanan kebersihan dan layanan non-teknik lainnya.

Technical services include monitoring the use of electric power, plant operators and maintenance technicians, and other technical services. Non-technical services include administrative personnel driver, security, janitorial services and other non-technical services.

Lihat Catatan 17 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 17 for details of related party transactions.

15. BEBAN POKOK PENDAPATAN

15. COST OF REVENUE

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| Jasa tenaga kerja langsung | 2,108,495 | 1,815,101 | <i>Direct labour</i> |
| Kendaraan operasional | 103,958 | 153,249 | <i>Operational vehicles</i> |
| Alat kerja dan material | 72,262 | 71,875 | <i>Tools and materials</i> |
| Imbalan kerja (Catatan 11) | 46,980 | 42,109 | <i>Employee benefits (Note 11)</i> |
| Denda operasional | 36,128 | 27,899 | <i>Operational penalty</i> |
| Subkontraktor | 32,954 | 12,079 | <i>Subcontractor</i> |
| Pemeliharaan | 7,697 | 6,933 | <i>Maintenance</i> |
| Lain-lain | 149,731 | 96,735 | <i>Others</i> |
| | <u>2,558,205</u> | <u>2,225,980</u> | |

Lihat Catatan 17 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 17 for details of related party transactions.

16. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

16. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|
| Kepegawaian | 38,965 | 33,063 | <i>Personnel</i> |
| Honorarium | 11,612 | 11,082 | <i>Honorarium</i> |
| Pemeliharaan | 4,452 | 4,143 | <i>Maintenance</i> |
| Lain-lain | 11,773 | 10,465 | <i>Others</i> |
| | <u>66,802</u> | <u>58,753</u> | |

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

17. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

- a. PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN merupakan pemegang saham Perusahaan.
- b. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") lainnya.
- c. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Transaksi pihak berelasi

Berikut adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

17. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Nature of relationships with related parties

- a. PLN and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN are the shareholders of the Company.
- b. The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PLN and other State-Owned Enterprises ("SOE").
- c. Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company.

Transactions with related parties

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

| Pihak-pihak berelasi/ Related parties | Sifat hubungan/ Nature of relationship | Sifat transaksi/ Nature of transaction |
|--|---|--|
| PLN | Entitas induk Perusahaan/ <i>Parent entity of the Company</i> | Piutang usaha, piutang non-usaha, utang usaha, utang lain-lain, pendapatan Jasa dan denda operasional/ <i>Trade receivables, non-trade receivables, trade payables, other payables, service revenue and operational penalty</i> |
| BNI | Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i> | Penempatan kas dan setara kas dan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash and cash equivalents and placement of restricted cash</i> |
| YPK PLN | Pemegang saham/ <i>Shareholder</i> | Utang lain-lain/ <i>Other payables</i> |
| Mandiri | Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i> | Penempatan kas dan setara kas dan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash and cash equivalents and placement of restricted cash</i> |
| BRI | Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i> | Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i> |
| BRI Syariah | Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i> | Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i> |
| BNI Syariah | Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i> | Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i> |
| ICON | Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha, utang lain-lain dan pendapatan jasa/ <i>Trade receivables, other payables and service revenue</i> |
| PLNT | Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha dan pendapatan jasa/ <i>Trade receivables and service revenue</i> |
| PLN Batam | Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha, utang lain-lain dan pendapatan jasa/ <i>Trade receivables, other payables and service revenue</i> |
| IP | Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ <i>Entity under common control</i> | Piutang usaha, utang lain-lain dan pendapatan jasa/ <i>Trade receivables, other payables and service revenue</i> |

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

17. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

17. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Berikut adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan: (lanjutan)

Below is the list of related parties with which the Company has transactions: (continued)

| Pihak-pihak berelasi/ Related parties | Sifat hubungan/ Nature of relationship | Sifat transaksi/ Nature of transaction |
|--|--|--|
| PJB | Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Entity under common control | Piutang usaha dan pendapatan jasa/ Trade receivables and service revenue |
| PLNE | Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Entity under common control | Piutang usaha dan pendapatan jasa/ Trade receivables and service revenue |
| PLNBB | Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Entity under common control | Piutang usaha, utang usaha dan pendapatan jasa/ Trade receivables, trade payables and service revenue |
| BAG | Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Entity under common control | Piutang usaha dan pendapatan jasa/ Trade receivables and service revenue |
| PLNGG | Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Entity under common control | Piutang usaha dan pendapatan jasa/ Trade receivables and service revenue |

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Balances and transactions with related parties

| | 2020 | 2019 | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Pendapatan | | | Revenue |
| PLN | 2,516,424 | 2,274,054 | PLN |
| ICON | 99,418 | 75,851 | ICON |
| PLN Batam | 81,051 | 75,468 | PLN Batam |
| IP | 33,170 | 34,990 | IP |
| PLNBB | 12,416 | 12,042 | PLNBB |
| PJB | 7,972 | 18,704 | PJB |
| PLNT | 6,747 | 14,436 | PLNT |
| PLNE | 6,103 | 5,966 | PLNE |
| PLNGG | 1,489 | 1,894 | PLNGG |
| BAG | 2,027 | 443 | BAG |
| | <u>2,766,817</u> | <u>2,513,848</u> | |
| Denda operasional | | | Operational penalty |
| PLN | <u>36,128</u> | <u>27,899</u> | PLN |

18. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

18. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang non-usaha sebesar Rp863.585 (2019: Rp770.058). Grup hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2019: pinjaman yang diberikan dan piutang).

As at 31 December 2020, the Group's financial assets comprised cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables and non-trade receivables amounted to Rp863,585(2019: Rp770,058). The Group only has financial assets categorised as financial assets held at amortised cost (2019: loans and receivables).

Pada tanggal 31 Desember 2020, liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, dan liabilitas sewa sebesar Rp141.959 (2019: Rp35.728). Grup hanya memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

As at 31 December 2020, the Group's financial liabilities comprised trade payables, other payables, accrued expenses and lease liabilities amounted to Rp141,959 (2019: Rp35,728). The Group only has financial liabilities categorised as financial liabilities held at amortised cost.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/50 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

I. Faktor risiko keuangan

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Dewan Direksi. Dewan Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Secara kas, mayoritas transaksi Grup dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, Grup menilai bahwa risiko nilai tukar mata uang asing adalah minimal.

(ii) Risiko suku bunga

Eksposur terhadap suku bunga dimonitor untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Grup. Pinjaman yang diterima pada tingkat suku bunga variabel mengekspos Grup terhadap arus kas dari risiko tingkat suku bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang adalah kas dan setara kas di bank dan kas yang dibatasi penggunaannya. Risiko pengaruh suku bunga mengambang pada kas dan setara kas di bank dan kas yang dibatasi penggunaannya tidak signifikan.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

I. Financial risk factors

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Group's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and the liquidity risk.

a. Market risk

(i) Foreign exchange risk

On a cash basis, the majority of the Group's transactions are denominated in Rupiah, which reduces the impact of fluctuations in foreign exchange rates. Therefore, the Group assesses the foreign exchange risk as minimal.

(ii) Interest rate risk

Interest rate exposure is monitored to minimise any negative impact to the Group. Borrowings received at variable rates exposes the Group to cash flow interest rate risk.

As at 31 December 2020, the financial assets and financial liabilities of the Group which are impacted by floating interest rates are cash and cash equivalents in banks and restricted cash. Floating interest rate risk on cash and cash equivalents in banks and restricted cash is not significant.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

I. Financial risk factors (continued)

b. Risiko kredit

b. Credit risk

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas di bank, kas yang dibatasi penggunaannya, dan piutang usaha.

Credit risk arises from cash and cash equivalents in banks, restricted cash and trade receivables.

Untuk piutang usaha, Grup menilai bahwa risiko kredit adalah minimal karena piutang usaha mayoritas berasal dari PLN dan entitas anaknya. Untuk kas dan setara kas dan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, Grup meminimalisir risiko kredit dengan melakukan penempatan pada beberapa bank untuk menghindari pemusatan yang signifikan dengan satu institusi.

For trade receivables, the Group assesses that the credit risk is minimal as trade receivables mostly derived from PLN and its subsidiaries. For cash and cash equivalents, the Group minimises credit risk by placing the funds in several banks to avoid significant concentration with one institution

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|----------------|
| Kas dan setara kas di Bank | | |
| Fitch National | | |
| AA+ | 543,196 | 300,895 |
| AAA | 965 | 3,592 |
| Lainnya | - | 15 |
| | <u>544,161</u> | <u>304,502</u> |
| Kas yang dibatasi penggunaannya | | |
| Fitch National | | |
| AA+ | 3,075 | 58,247 |
| AAA | - | 792 |
| | <u>3,075</u> | <u>59,039</u> |

Cash and cash equivalents in Banks

*Fitch National
AA+
AAA
Others*

Restricted cash

*Fitch National
AA+
AAA*

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Grup kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan:

The table below describes the Group's financial liabilities based on their maturities. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

I. Financial risk factors (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

| | Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ <i>Contractual maturities of financial liabilities</i> | | | | Jumlah/ <i>Total</i> | |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------|
| | Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i> | Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ <i>Over one year but not longer than three years</i> | Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ <i>Over three years but not longer than five years</i> | Lebih dari lima tahun/ <i>More than five years</i> | | |
| 2020 | | | | | | 2020 |
| Utang usaha | 34,869 | - | - | - | 34,869 | Trade payables |
| Utang lain-lain | 18,908 | - | - | - | 18,908 | Other payables |
| Biaya yang masih harus dibayar | 1,545 | - | - | - | 1,545 | Accrued expenses |
| Liabilitas sewa | 53,667 | 39,261 | - | - | 92,928 | Lease liabilities |
| | <u>108,989</u> | <u>39,261</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>148,250</u> | |
| 2019 | | | | | | 2019 |
| Utang usaha | 28,546 | - | - | - | 28,546 | Trade payables |
| Utang lain-lain | 2,985 | - | - | - | 2,985 | Other payables |
| Biaya yang masih harus dibayar | 4,197 | - | - | - | 4,197 | Accrued expenses |
| | <u>35,728</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>35,728</u> | |

II. Manajemen risiko permodalan

II. Capital risk management

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman ekuitas pemegang saham. Dewan Direksi secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern. The Group's capital structure consists of shareholders' equity. The Board of Directors regularly reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

III. Estimasi nilai wajar

III. Fair value estimation

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at 31 December 2020 and 2019.

20. WABAH COVID-19

20. COVID-19 OUTBREAK

Sejak awal 2020, terdapat penurunan kondisi ekonomi sebagai akibat wabah COVID-19, yang sangat mempengaruhi diantaranya permintaan global atas barang dan jasa serta rantai pasokan. Manajemen telah menilai dampak dari kejadian ini terhadap kegiatan operasional Grup dan meyakini bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan yang perlu diperhitungkan walaupun dampak jangka panjang sulit untuk diprediksi saat ini. Manajemen akan terus memonitor hal ini dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa depan.

Since early 2020, there has been a continuing economic downturn as a result of the COVID-19 outbreak, severely affecting among others global demand for products and services and supply chains. Management has assessed the effect of the event on the Group's operations and believes that no significant adverse impact should be considered although long-term impacts are difficult to predict at this moment. Management will continue to monitor this and take the necessary actions to address related risks and uncertainties going forward.

PT HALEYORA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/53 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
except otherwise stated)

21. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi pada tanggal 25 Juni 2021.

21. MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements were prepared and authorised for issuance by the Board of Directors on 25 June 2021.

22. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada bulan November 2020, Undang-Undang No. 11/2020 ("UU Cipta Kerja") tentang Cipta Kerja mulai berlaku. Selanjutnya di bulan Februari 2021, Pemerintah secara resmi mengesahkan 51 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Salah satu dari peraturan pelaksana ini adalah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan pelaksana ini mengatur, antara lain, jangka waktu kontrak untuk karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah lima tahun maksimum dan karyawan ini berhak atas uang kompensasi yang dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja, termasuk pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Grup masih melakukan penilaian atas potensi dampak dari peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

22. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

In November 2020, Law No. 11/2020 ("Job Creation Law") about Job Creation became effective. Subsequently in February 2021, the Government has officially authorised 51 implementing regulations. One of these implementing regulations is Government Regulation No. 35 of 2021 concerning the Limited Time Employment Agreement, Outsourcing, Working Time and Break Time, and Termination of Employment. This implementing regulation regulates, among other things, that the contract period for employees with a limited time employment agreement is five years maximum and these employees are entitled to compensation benefit which is calculated proportionally based on the length of service, including severance pay and service pay. The Group is still evaluating the potential impact of the implementation of the Job Creation Law to the Group's consolidated financial statements.

23. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan PT Haleyora power (entitas induk saja) yang terdapat dalam lampiran 6/1 sampai dengan lampiran 6/5 menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak dan entitas asosiasi berdasarkan metode biaya.

23. SUPPLEMENTARY INFORMATION

The following financial information of PT Haleyora Power (parent entity only) on schedule 6/1 to schedule 6/5 presents the Company's investment in a subsidiary and an associate under the cost method.

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT HALEYORA POWER
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT ENTITY ONLY**

Lampiran 6/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| ASET | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan setara kas | 380,449 | 166,982 | <i>Cash and cash equivalents</i> |
| Kas yang dibatasi penggunaannya | - | 56,249 | <i>Restricted cash</i> |
| Piutang usaha | | | <i>Trade receivables</i> |
| - pihak berelasi | 156,904 | 235,087 | <i>related parties -</i> |
| - pihak ketiga | 344 | 335 | <i>third parties -</i> |
| Piutang non-usaha | | | <i>Non-trade receivables</i> |
| - pihak berelasi | 5,472 | 7,385 | <i>related parties -</i> |
| - pihak ketiga | 617 | 291 | <i>third parties -</i> |
| Pajak dibayar dimuka, bagian lancar | | | <i>Prepaid taxes, current portion</i> |
| - pajak lainnya | - | 35,922 | <i>other taxes -</i> |
| Uang muka dan biaya dibayar dimuka | <u>931</u> | <u>14,610</u> | <i>Advances and prepaid expenses</i> |
| Jumlah aset lancar | <u>544,717</u> | <u>516,861</u> | Total current assets |
| ASET TIDAK LANCAR | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Aset tetap | 51,995 | 33,604 | <i>Fixed assets</i> |
| Aset hak-guna | 89,743 | - | <i>Right-of-use assets</i> |
| Aset tak berwujud | 1,842 | 694 | <i>Intangible assets</i> |
| Investasi pada entitas asosiasi | 36,951 | 36,951 | <i>Investment in associate</i> |
| Pajak dibayar dimuka, bagian tidak lancar | | | <i>Prepaid taxes, non-current portion</i> |
| - pajak penghasilan badan | 21,069 | - | <i>corporate income tax -</i> |
| - pajak lainnya | 61,272 | - | <i>other taxes -</i> |
| Aset pajak tangguhan | 671 | 73 | <i>Deferred tax assets</i> |
| Aset tidak lancar lain | <u>889</u> | <u>-</u> | <i>Other non-current assets</i> |
| Jumlah aset tidak lancar | <u>264,432</u> | <u>71,322</u> | Total non-current assets |
| JUMLAH ASET | <u><u>809,149</u></u> | <u><u>588,183</u></u> | TOTAL ASSETS |

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT HALEYORA POWER
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT ENTITY ONLY**

Lampiran 6/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | CURRENT LIABILITIES |
| Utang usaha | | | Trade payables |
| - pihak berelasi | 137 | 426 | related parties - |
| - pihak ketiga | 31,413 | 22,911 | third parties - |
| Utang lain-lain | | | Other payables |
| - pihak berelasi | 110,484 | 79,249 | related parties - |
| - pihak ketiga | 13,901 | 1,117 | third parties - |
| Biaya masih harus dibayar | 49,098 | 41,019 | Accrued expenses |
| Liabilitas sewa, jangka pendek | 47,289 | - | Lease liabilities, current portion |
| Utang pajak | | | Taxes payable |
| - pajak penghasilan badan | - | 7,068 | corporate income tax - |
| - pajak lainnya | 2,376 | 3,032 | other taxes - |
| Jumlah liabilitas jangka pendek | <u>254,698</u> | <u>154,822</u> | Total current liabilities |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Liabilitas sewa, jangka panjang | 32,857 | - | Lease liabilities, |
| Liabilitas imbalan kerja | 382 | 290 | non-current portion |
| Jumlah liabilitas jangka panjang | <u>33,239</u> | <u>290</u> | Employee benefit liabilities |
| JUMLAH LIABILITAS | <u>287,937</u> | <u>155,112</u> | Total non-current liabilities |
| EKUITAS | | | TOTAL LIABILITIES |
| Modal saham: | | | EQUITY |
| Modal dasar, ditempatkan dan | | | Share capital: |
| disetor penuh 100.000 lembar saham | | | Authorised, issued and |
| dengan nilai nominal Rp1.000.000 | | | fully paid 100,000 shares |
| (nilai penuh) per lembar saham | 100,000 | 100,000 | at par value Rp1,000,000 |
| Tambahan modal disetor | 3,989 | 3,989 | (full amount) per share |
| Saldo laba | 417,044 | 328,939 | Additional paid-in capital |
| Penghasilan komprehensif lain | 179 | 143 | Retained earnings |
| JUMLAH EKUITAS | <u>521,212</u> | <u>433,071</u> | Other comprehensive income |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | <u>809,149</u> | <u>588,183</u> | TOTAL EQUITY |
| | | | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT HALEYORA POWER
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT ENTITY ONLY**

Lampiran 6/3 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

| | 2020 | 2019 | |
|---|----------------|----------------|---|
| Pendapatan | 2,086,494 | 1,645,974 | <i>Revenue</i> |
| Beban pokok pendapatan | (1,904,570) | (1,408,270) | <i>Cost of revenue</i> |
| LABA BRUTO | 181,924 | 237,704 | GROSS PROFIT |
| Beban umum dan administrasi | (64,633) | (57,167) | <i>General and administrative expenses</i> |
| Penghasilan keuangan | 4,537 | 5,612 | <i>Finance income</i> |
| Beban keuangan | (7,739) | (52) | <i>Finance expenses</i> |
| Penghasilan dividen | 11,521 | 24,184 | <i>Dividend income</i> |
| Penghasilan/(beban) lain-lain, bersih | 1,050 | (153) | <i>Other income/(expenses), net</i> |
| LABA SEBELUM PAJAK | 126,660 | 210,128 | PROFIT BEFORE TAX |
| Beban pajak penghasilan | (38,555) | (58,837) | <i>Income tax expense</i> |
| LABA TAHUN BERJALAN | 88,105 | 151,291 | PROFIT FOR THE YEAR |
| Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan: | | | Other comprehensive income/ (loss) for the year: |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | <i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i> |
| Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 46 | (25) | <i>Remeasurement of employee benefit liabilities</i> |
| Pajak penghasilan terkait | (10) | 6 | <i>Related income tax</i> |
| Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan | 36 | (19) | Other comprehensive income/ (loss) for the year |
| JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 88,141 | 151,272 | TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR |

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT HALEYORA POWER
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT ENTITY ONLY

Lampiran 6/4 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah)

| | Modal Saham/ <i>Share capital</i> | Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i> | Saldo laba/ <i>Retained earnings</i> | Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive Income</i> | Jumlah/Total | |
|--|--------------------------------------|--|---|---|----------------|---|
| Saldo per 1 Januari 2019 | 100,000 | - | 246,987 | 162 | 347,149 | Balance as at 1 January 2019 |
| Dividen | - | - | (69,339) | - | (69,339) | Dividend |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | - | 151,291 | (19) | 151,272 | Total comprehensive income for the year |
| Penambahan modal dan kenaikan nilai wajar pada investasi pada entitas anak | - | 3,989 | - | - | 3,989 | Capital addition and fair value increment from subsidiaries |
| Saldo per 31 Desember 2019 | 100,000 | 3,989 | 328,939 | 143 | 433,071 | Balance as at 31 December 2019 |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | - | 88,105 | 36 | 88,141 | Total comprehensive income for the year |
| Saldo per 31 Desember 2020 | 100,000 | 3,989 | 417,044 | 179 | 521,212 | Balance as at 31 December 2020 |

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

**PT HALEYORA POWER
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT ENTITY ONLY**

Lampiran 6/5 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah)

| | 2020 | 2019 | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan dari pelanggan | 2,164,668 | 1,481,540 | <i>Receipts from customers</i> |
| Pembayaran kepada pemasok dan karyawan | (1,861,123) | (1,417,424) | <i>Payment to suppliers and employees</i> |
| Penerimaan penghasilan keuangan | 4,537 | 5,612 | <i>Receipts of finance income</i> |
| Pembayaran beban keuangan | (7,739) | (52) | <i>Payments of finance expenses</i> |
| Penerimaan pengembalian pajak | - | 5,191 | <i>Receipts of tax refunds</i> |
| Pembayaran pajak penghasilan | (68,538) | (55,228) | <i>Payments of income taxes</i> |
| Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 231,805 | 19,639 | Net cash provided by operating activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES |
| Pembelian aset tetap | (35,723) | (21,035) | <i>Acquisitions of fixed assets</i> |
| Pembelian aset tak berwujud | (1,092) | (745) | <i>Acquisitions of intangible assets</i> |
| Penerimaan/(penempatan) kas yang dibatasi penggunaannya | 56,249 | (3,493) | <i>Receipt of/(placement in) restricted cash</i> |
| Penyertaan saham entitas anak | - | (8,827) | <i>Acquisition of subsidiary for stock subscription</i> |
| Penerimaan dividen entitas asosiasi | 13,004 | 19,463 | <i>Dividend receipts from associate</i> |
| Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi | 32,438 | (14,637) | Net cash provided by/ (used in) investing activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES |
| Pembayaran kembali liabilitas sewa | (50,776) | - | <i>Payments of lease liabilities</i> |
| Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk | - | (69,339) | <i>Dividend paid to the owners of the parent Company</i> |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | (50,776) | (69,339) | Net cash used in financing activities |
| KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 213,467 | (64,337) | NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 166,982 | 231,319 | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 380,449 | 166,982 | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR |

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Kindo Square, Blok A15-16
JL. Duren Tiga Raya No.101 Duren Tiga
Jakarta Selatan 12760

Email : info@haleyorapower.co.id
Telp. : (021) 79192517
Fax. : (021) 79192516

